GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten/Kota adalah dokumen rencana pembangunan daerah di kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan, dan pagu pendanaan.

(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. dasar dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b. dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah;
   c. pedoman dalam menyusun RPJM Daerah kabupaten/kota tahun 2025-2029;
   d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; dan
   e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(4) RPJM Daerah wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 3

(1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
   c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V Penutup.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RPJM DAERAH

Pasal 4

(1) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah wajib berkonsultasi, berkoordinasi, dan mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

(4) Dalam penyusunan dan/atau perubahan RPJM Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 5

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan prinsip kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko pembangunan daerah.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.

(5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur.

Pasal 6

(1) Target kinerja, kerangka pendanaan dan pagu pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.

(2) Perubahan target kinerja dan pagu pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur untuk mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 196905121989032009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (1-117/2025).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penetapan dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Kalimantan Sukses Menuju Generasi Emas.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kerangka keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dengan pagu pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan selama periode 2026–2030. Selain itu, RPJMD Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah serta perencanaan pembangunan nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat terjaga secara konsisten.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 berperan penting sebagai awal pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi landasan transformasi pembangunan daerah dalam dua dekade mendatang. Selain itu, RPJMD ini juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian visi dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sehingga harmonisasi antara agenda pembangunan daerah dan nasional

dapat diwujudkan secara sinergis. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 akan sangat menentukan tidak hanya arah dan kualitas pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah dalam jangka panjang, sejalan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerangka pendanaan" adalah kerangka pendapatan daerah, kerangka belanja daerah, dan kerangka pembiayaan daerah.

Yang dimaksud "pagu pendanaan" adalah pagu indikatif di setiap program Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah bahwa pelaksanaan pengendalian dilakukan secara rutin dan terjadwal dalam jangka waktu tertentu, baik periode tahunan ataupun periode lima tahunan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "paruh waktu" adalah setengah dari total jangka waktu periode pelaksanaan RPJM Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "bersifat indikatif" adalah bahwa angka-angka target kinerja dan pagu pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah belum bersifat final atau mengikat secara mutlak, melainkan merupakan perkiraan awal yang disusun berdasarkan asumsi, proyeksi, dan kondisi yang tersedia pada saat

perencanaan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan "goncangan politik" adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan "krisis ekonomi" adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan "konflik sosial budaya" adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan "gangguan keamanan" adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan "pemekaran daerah" adalah pemecahan provinsi dan/atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan "perubahan kebijakan nasional" adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 4
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 9
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 59
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 100
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 141
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal 163
2.1.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur 177
2.1.5 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 177
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 179
2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 179
2.2.2 Neraca Daerah 189
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 206
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 206
2.3.2 Isu Strategis Daerah 211
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 227
3.1 RPJMD Tahun 2025-2029 Sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 227

3.2 RPJMD Tahun 2025-2029 Sebagai Bagian Integral Pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 231
3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 234
3.3.1 Visi Pembangunan Daerah 234
3.3.2 Misi Pembangunan Daerah 236
3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 242
3.3.4 Penyelerasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) 249
3.3.5 Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2029 .. 252
3.3.6 Penyelarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 254
3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 255
3.4.1 Strategi Prioritas Pembangunan 255
3.4.2 Strategi Penahapan Pembangunan 257
3.4.3 Arah Kebijakan 261
3.4.4 Strategi 265
3.4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 295
3.4.6 Program Unggulan 306
3.4.7 Kegiatan Ugggulan 318
3.4.8 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025-2029 325
3.4.9 Strategi Pengembangan Wilayah 337
3.4.10 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 338

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 364

4.1 Program Perangkat Daerah 364

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 475

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 475

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 478

BAB V PENUTUP 505

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur..... 10
Tabel 2.2 Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan 12
Tabel 2.3 Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 14
Tabel 2.4 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 17
Tabel 2.5 Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ... 18
Tabel 2.6 Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 19
Tabel 2.7 Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 21
Tabel 2.8 Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 21
Tabel 2.9 Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton) Tahun 2024* 22
Tabel 2.10 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (ekor)..... 24
Tabel 2.11 Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 24
Tabel 2.12 Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 25
Tabel 2.13 Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 26
Tabel 2.14 Produksi Kayu Bulat Tahun 2020-2024 (M^3) 27
Tabel 2.15 Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) 27
Tabel 2.16 Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 - 2024 . 28
Tabel 2.17 Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri di Kalimantan Timur..... 29

Tabel 2.18 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024 33
Tabel 2.19 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023 34
Tabel 2.20 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 35
Tabel 2.21 Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 36
Tabel 2.22 Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 37
Tabel 2.23 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen) 40
Tabel 2.24 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 41
Tabel 2.25 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen) 42
Tabel 2.26 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah..... 43
Tabel 2.27 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 45
Tabel 2.28 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024 46
Tabel 2.29 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024..... 48
Tabel 2.30 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 49
Tabel 2.31 Persebaran Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 50
Tabel 2.32 Proyeksi Jumlah Penduduk 56
Tabel 2.33 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 56
Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur..... 57

Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)..... 61
Tabel 2.36 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 62
Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)..... 62
Tabel 2.38 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)..... 63
Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 65
Tabel 2.40 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)..... 66
Tabel 2.41 Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)..... 68
Tabel 2.42 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)..... 74
Tabel 2.43 Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)..... 76
Tabel 2.44 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 77
Tabel 2.45 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur..... 77
Tabel 2.46 Angka Belum Pernah Berskolah (BPB) di Kalimantan Timur.... 78
Tabel 2.47 Angka *Drop Out* (DO) Kalimantan Timur..... 79
Tabel 2.48 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur..... 79
Tabel 2.49 Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024..... 80
Tabel 2.50 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024..... 82

Tabel 2.51 Data Akreditasi Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 83
Tabel 2.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 84
Tabel 2.53 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024..... 89
Tabel 2.54 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 95
Tabel 2.55 Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024 96
Tabel 2.56 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024 97
Tabel 2.57 Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 98
Tabel 2.58 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020 – 2024 (orang) 102
Tabel 2.59 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020 – 2024 (orang)..... 103
Tabel 2.60 *Return on Asset* (ROA) BUMD (persen)..... 111
Tabel 2.61 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024..... 116
Tabel 2.62 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 120
Tabel 2.63 Data Backlog Perumahan..... 124
Tabel 2.64 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan 124
Tabel 2.65 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi..... 126
Tabel 2.66 Hierarki Pelabuhan Nasional di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037 129
Tabel 2.67 Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022 130

Tabel 2.68 Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024 131
Tabel 2.69 Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024..... 139
Tabel 2.70 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur..... 143
Tabel 2.71 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 144
Tabel 2.72 Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024..... 147
Tabel 2.73 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 149
Tabel 2.74 Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 151
Tabel 2.75 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 155
Tabel 2.76 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024.. 164
Tabel 2.77 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024... 166
Tabel 2.78 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024..... 168
Tabel 2.79 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 172
Tabel 2.80 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 174
Tabel 2.81 Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2024..... 175
Tabel 2.82 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah) 180
Tabel 2.83 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 181
Tabel 2.84 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 186
Tabel 2.85 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 187

Tabel 2.86 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 188
Tabel 2.87 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (Miliar Rupiah) 189
Tabel 2.88 Asumsi Ekonomi Makro Nasional..... 191
Tabel 2.89 Proyeksi Ekonomi Makro Kalimantan Timur 191
Tabel 2.90 Penetapan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah) 196
Tabel 2.91 Penetapan Belanja Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah) 196
Tabel 2.92 Penetapan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah) 202
Tabel 2.93 Penetapan Kapasitas Riil tahun 2025 dan Proyeksi Kapasitas Riil Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah) 204
Tabel 2.94 Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS, dan Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur..... 213
Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 228
Tabel 3.2 Strategi Besar Pencapaian Visi Kaltim Sejahtera 2045 229
Tabel 3.3 Fokus Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I..... 230
Tabel 3.4 Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029..... 231
Tabel 3.5 Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029 232
Tabel 3.6 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 233
Tabel 3.7 Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD 236
Tabel 3.8 Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD..... 241

Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 244
Tabel 3.10 Penyelarasan Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro RPJM Nasional Tahun 2025-2029 250
Tabel 3.11 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) 251
Tabel 3.12 Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 253
Tabel 3.13 Keselarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 254
Tabel 3.14 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 266
Tabel 3.15 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ... 295
Tabel 3.16 Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 319
Tabel 3.17 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Unggulan RPJMD Tahun 2025-2029 325
Tabel 3.18 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional 331
Tabel 3.19 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Paser 338
Tabel 3.20 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Barat 341
Tabel 3.21 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Kartanegara 344
Tabel 3.22 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Timur 347
Tabel 3.23 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Berau 350
Tabel 3.24 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Penajam Paser Utara 352

Tabel 3.25 Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Mahakam Ulu 355
Tabel 3.26 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Balikpapan 357
Tabel 3.27 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Samarinda 360
Tabel 3.28 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Bontang 362
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 365
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 476
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 479

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur 9
Gambar 2.2 Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional 11
Gambar 2.3 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 13
Gambar 2.4 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 14
Gambar 2.5 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 16
Gambar 2.6 Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 19
Gambar 2.7 Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur 23
Gambar 2.8 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Kalimantan Timur 31
Gambar 2.9 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur 32
Gambar 2.10 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024 36
Gambar 2.11 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen) 39
Gambar 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 41
Gambar 2.13 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 46
Gambar 2.14 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2024 47

Gambar 2.15 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen) 50
Gambar 2.16 Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029..... 57
Gambar 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 58
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (%) 59
Gambar 2.19 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen) 61
Gambar 2.20 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 63
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 64
Gambar 2.22 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024... 66
Gambar 2.23 Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 67
Gambar 2.24 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023..... 69
Gambar 2.25 Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)..... 70
Gambar 2.26 Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 70
Gambar 2.27 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024..... 71
Gambar 2.28 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024..... 72
Gambar 2.29 Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 73

Gambar 2.30 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 74
Gambar 2.31 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 75
Gambar 2.32 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022 85
Gambar 2.33 Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa) 87
Gambar 2.34 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 88
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2019–2023 91
Gambar 2.36 Dimensi Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023 91
Gambar 2.37 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 92
Gambar 2.38 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 93
Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 94
Gambar 2.40 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 95
Gambar 2.41 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 97
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 99
Gambar 2.43 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 100
Gambar 2.44 Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 101

Gambar 2.45 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 101
Gambar 2.46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 105
Gambar 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 106
Gambar 2.48 Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 107
Gambar 2.49 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen) 108
Gambar 2.50 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen) 109
Gambar 2.51 Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen) 109
Gambar 2.52 Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 110
Gambar 2.53 Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024..... 111
Gambar 2.54 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 113
Gambar 2.55 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 114
Gambar 2.56 Analisa Kuadran IBEI 2025 115
Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 117
Gambar 2.58 Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 117
Gambar 2.59 Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 118

Gambar 2.60 Disparitas Harga Antar Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 119
Gambar 2.61 Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024 121
Gambar 2.62 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang..... 122
Gambar 2.63 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 123
Gambar 2.64 Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)... 127
Gambar 2.65 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024..... 128
Gambar 2.66 Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024..... 131
Gambar 2.67 Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 132
Gambar 2.68 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 133
Gambar 2.69 Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 134
Gambar 2.70 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 135
Gambar 2.71 Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 136
Gambar 2.72 Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 137
Gambar 2.73 Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022 138
Gambar 2.74 Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)..... 140
Gambar 2.75 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur 141
Gambar 2.76 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024..... 145

Gambar 2.77 Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 146
Gambar 2.78 Nilai Sistem Merit Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 148
Gambar 2.79 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 148
Gambar 2.80 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020 153
Gambar 2.81 Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 154
Gambar 2.82 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 182
Gambar 2.83 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 183
Gambar 2.84 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) 184
Gambar 2.85 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)..... 187
Gambar 3.1 Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .. 234
Gambar 3.2 Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 243
Gambar 3.3 Trisula Pembangunan Daerah Sebagai Strategi Prioritas Pembangunan 255
Gambar 3.4 Penahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 257
Gambar 3.5 Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Nasional..... 306
Gambar 3.6 Peta Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 337

Gambar 3.7 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 339
Gambar 3.8 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 342
Gambar 3.9 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 344
Gambar 3.10 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 347
Gambar 3.11 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 350
Gambar 3.12 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 353
Gambar 3.13 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 355
Gambar 3.14 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 358
Gambar 3.15 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kota Samarinda Tahun 2025–2029 360
Gambar 3.16 Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kota Bontang Tahun 2025–2029 362

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah dengan kontribusi PDRB terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian sebagai pilar utama perekonomian. Namun, tantangan pembangunan seperti ketergantungan sektor ekstraktif pertambangan dan penggalian, pemenuhan infrastruktur dasar, kesenjangan pembangunan antarwilayah, pemerataan kualitas SDM, permasalahan sosial dan isu lingkungan masih perlu untuk diselesaikan. Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menambah dinamika pembangunan yang menuntut kesiapan Provinsi Kalimantan Timur menghadapi urbanisasi, tantangan ketimpangan pembangunan dan pemanfaatan ruang, serta peningkatan kebutuhan layanan publik akibat penambahan jumlah penduduk.

Menghadapi fenomena tersebut, ketersediaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memiliki urgensi tersendiri untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta mengantisipasi isu pembangunan yang mengarah pada upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, perluasan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik dan keunggulan yang dimiliki.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5

(lima) tahunan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kerangka keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Selain menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, RPJMD juga disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat *(QuickWins)* Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dalam penyusunannya, Peraturan Daerah tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), RPJMD terhitung berlaku sejak ditetapkannya melalui Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Periodisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 ditetapkan sesuai dengan periodisasi RPJMN Tahun 2025-2029, namun secara substansi tetap mengikuti masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2024. Pelantikan Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. sebagai Gubernur dan Ir. H. Seno Aji, M.Si sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti yang dimulai dari tahun 2025 dan akan berakhir pada tahun 2030.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi dasar rencana pelaksanaan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung selama masa kampanye. Tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah pada 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga menjadi periode pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 serta menjadi bagian integral pembangunan dalam pencapaian visi RPJMN Tahun

2025–2029. Melalui keselarasan tersebut, diharapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan visi Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan jangka panjang daerah dan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1. **Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMN;**

   RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mempedomani visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan prioritas Nasional dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

2. **Hubungan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur;**

   RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan dari visi, misi, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 periode pertama. Oleh karena itu, penyusunannya secara substantif mempedomani RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045.

3. **Hubungan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;**

   RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi dasar dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RENSTRA PD. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam RPJMD diwujudkan melalui pelaksanaan RENSTRA masing-masing Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. RENSTRA PD

disusun dengan memperhatikan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga implementasi RPJMD dapat berjalan secara terarah, terukur, dan terintegrasi dalam mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

4. **Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Kabupaten/Kota;**

   RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan dan/atau perubahan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota, terutama pada keselarasan perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan. Keselarasan ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan.

5. **Hubungan RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur;**

   Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mengacu pada pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi, serta indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2042. Keselarasan antara RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembangunan sektoral yang sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan sehingga mencegah konflik pemanfaatan ruang, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. **Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;**

   Pengarusutamaan isu strategis dan poin-poin rekomendasi dari KLHS menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

7. **Hubungan RPJMD dengan Evaluasi Capaian Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur;**

   Hasil evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, termasuk kesimpulan dan rekomendasinya

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam perumusan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, terutama dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Hasil evaluasi yang dimaksud disini adalah hasil evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

8. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;

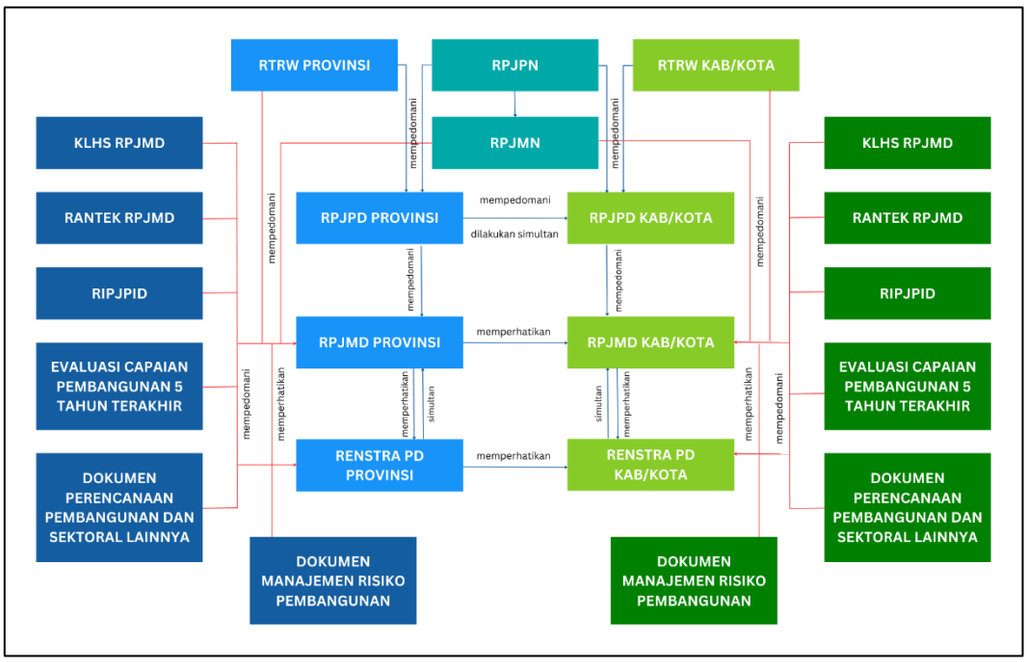

Gambar 1.1. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga perlu mengacu pada beberapa dokumen perencanaan lainnya, diantaranya Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang berisi rekomendasi kinerja dan rekomendasi kerja, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang telah ditetapkan. Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga perlu didukung dengan manajemen risiko pembangunan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan sehingga memastikan implementasi RPJMD berjalan efektif dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan, mengoperasionalisasikan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kinerja pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka menengah sesuai dengan kondisi serta karakteristik daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan pedoman dalam penyusunan RKPD mulai dari RKPD Tahun 2026 hingga RKPD Tahun 2030. Selain itu, penyusunan RPJMD bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah, menjaga sinergi pembangunan jangka menengah antara pemerintah daerah dan pusat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui kebijakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berfokus pada prioritas pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 juga akan menjadi instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum. Selain itu, juga menjelaskan mengenai

gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah, permasalahan pembangunan daerah, serta isu strategis pembangunan daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan penjelasan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, juga memuat penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan daerah, serta program-program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat daftar seluruh program Perangkat Daerah tahun 2025–2029, termasuk indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah. Selain itu, Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan RPJMD, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2^0 37’ 12.99” Lintang Utara (LU) dan -2^0 28’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 113^0 50’ 3.61-119^0 14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi kedalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkurang sebesar 322.429 Ha.

Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional mencapai 4,12 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,09 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana

Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

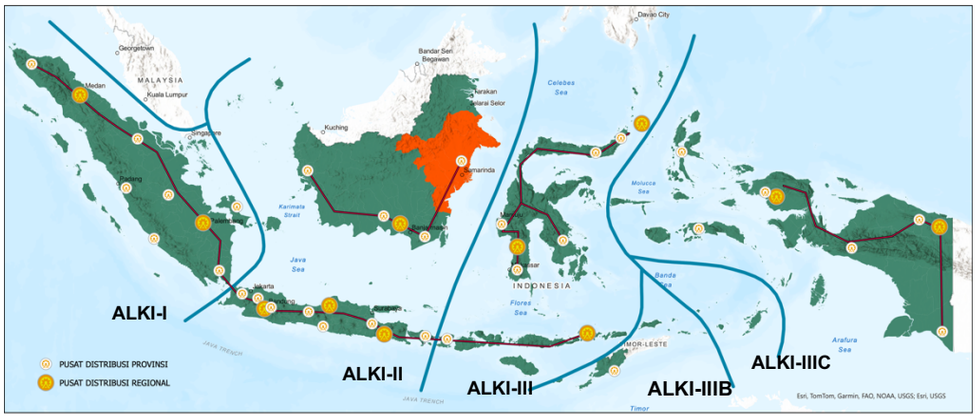

Gambar 2.2. Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)

Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimana hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk belum diolah. Komoditi yang hingga saat ini menjadi unggulan di Kalimantan Timur adalah batu bara, migas, dan kelapa sawit. Sementara untuk komoditi lainnya masih berpotensi besar untuk terus dikembangkan. Pengembangan potensi komoditi unggulan di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan

Peruntukan Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Produksi	5.953.731
Kawasan Pariwisata	9.857
Kawasan Perikanan	2.085.091
Kawasan Pertanian	3.469.408
Kawasan Peruntukan Industri	54.424

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur perlu diprioritaskan agar potensi sumber daya alamnya dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan menciptakan perluasan lapangan kerja. Beberapa sektor yang menjadi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1) Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan analisa kuadran terhadap potensi komoditi perikanan bernilai ekonomi tinggi Provinsi Kaltim tahun 2023, Kalimantan Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan terus mengalami tren peningkatan produksi. Hal ini didukung dengan garis pantai yang panjang, sumber daya ikan yang melimpah, serta potensi budidaya laut yang beragam. Kondisi ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perikanan utama di Indonesia, melalui upaya peningkatan produksi perikanan terutama pada usaha budidaya perikanan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Adanya dukungan pemerintah daerah melalui pemberian bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pembudidaya serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan produksi tersebut.

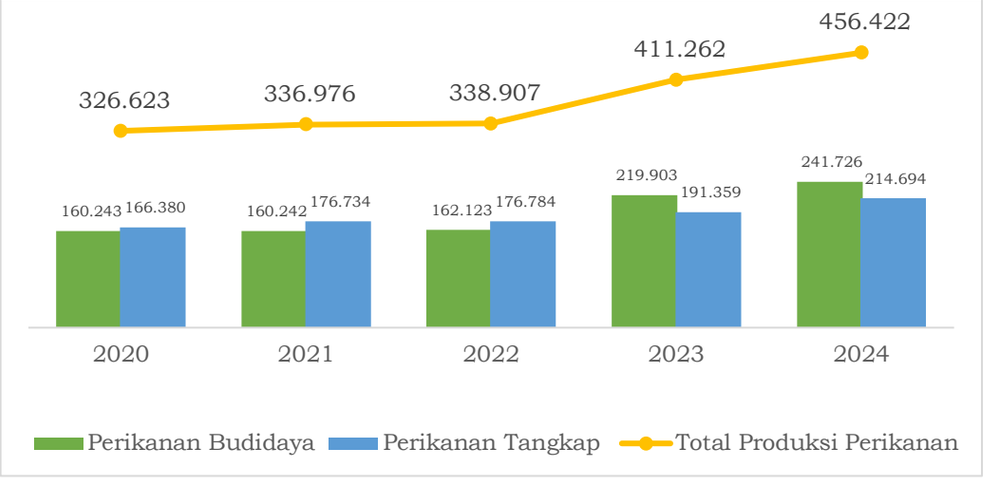

Gambar 2.3. Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024 (diolah))

Namun, dalam upaya pencapaian produksi perikanan tersebut masih dihadapkan pada permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Tingginya harga pakan, keterbatasan benih unggul, serta kurang intensifnya penanganan terhadap serangan hama pada usaha budidaya perikanan mengakibatkan beberapa pelaku usaha berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya pelayanan pangkalan pendaratan ikan juga dapat mempengaruhi produksi perikanan tangkap.

2) Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil pertanian (It) dan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi (Ib). NTP menggambarkan kemampuan petani dalam menukar hasil produksinya dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara umum, NTP digunakan sebagai gambaran tingkat kesejahteraan petani.

Rata-rata NTP dihitung dari gabungan lima subsektor pertanian setiap bulan. NTP lebih dari 100 menunjukkan bahwa petani mendapatkan keuntungan dalam hal perdagangan karena harga jual hasil pertanian naik lebih cepat dibanding biaya yang dikeluarkan. Sebaiknya, jika NTP di bawah

100, maka petani mengalami kerugian. Sementara itu, NTP sebesar 100 menunjukkan kondisi seimbang, di mana perubahan harga jual sama dengan perubahan biaya yang dibayar.

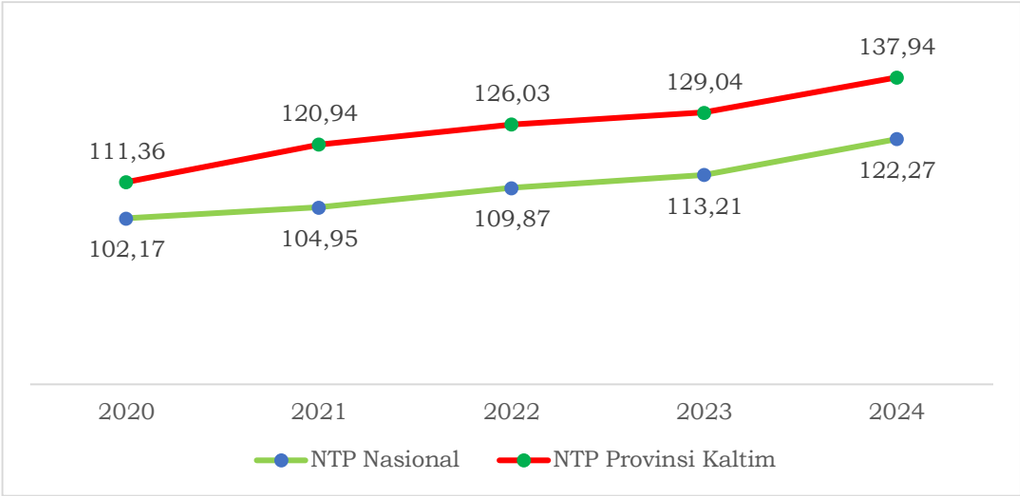

Gambar 2.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (*Sumber: BPS Prov Kaltim, 2025*)

Rata-rata NTP Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Selain itu, NTP Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir juga jauh berada di atas rata-rata NTP Nasional dengan angka mulai dari 111,36 pada tahun 2020 dan mencapai 137,94 pada tahun 2024, peningkatan mencapai 24%. Peningkatan yang signifikan dan lebih cepat di Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa petani di Kalimantan Timur mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama lima tahun terakhir. Dalam perhitungannya, sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Tanaman Hortikultura (NTPH), Perkebunan Rakyat (NTPR), Peternakan (NTPT), dan Perikanan (NTPN).

Tabel 2.3. Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Uraian	**Nilai Tukar Petani**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tanaman Pangan	101,6	95,28	92,34	97,77	102,94
Hortikultura	105,2	106,07	112,32	111,86	113,63
Perkebunan	124,57	151,1	162,54	166,92	186,93
Peternakan	101,65	104,28	108,77	108,62	105,17
Perikanan	102,79	101,77	99,42	99,86	99,81

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Data NTP di Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar subsektor pertanian. Subsektor Tanaman Pangan menunjukkan fluktuasi cukup besar, dengan nilai terendah 92,34 pada tahun 2022 dan kembali naik ke 102,94 di tahun 2024. Subsektor Hortikultura mengalami tren yang relatif stabil dan positif, meningkat dari 105,2 pada tahun 2020 menjadi 113,63 pada tahun 2024. Subsektor Perkebunan mencatat kenaikan yang sangat signifikan, dari 124,57 di tahun 2020 menjadi 186,93 pada tahun 2024, menjadikannya subsektor dengan peningkatan tertinggi. Sementara itu, subsektor Peternakan berada dalam kisaran stabil dengan nilai sedikit di atas 100, menunjukkan situasi yang relatif seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Berbeda dengan itu, subsektor Perikanan mengalami penurunan nilai NTP secara bertahap, dari 102,79 pada tahun 2020 menjadi 99,81 pada tahun 2024, mengindikasikan penurunan kesejahteraan petani subsektor perikanan.

Berdasarkan data di atas, subsektor Perkebunan dan Hortikultura merupakan sektor yang paling menunjukkan perkembangan positif dan menguntungkan bagi petani di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang dapat mendukung kondisi tersebut di antaranya peningkatan harga komoditas atau efisiensi produksi yang lebih baik. Sebaliknya, subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang kurang stabil yang ditunjukkan melalui NTP di bawah 100. Lebih lanjut, meskipun stabil, subsektor Peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan intervensi kebijakan, khususnya untuk subsektor dengan NTP di bawah atau mendekati 100, agar kesejahteraan petani dari seluruh subsektor dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

NTP mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi sektor pertanian. Ketika NTP meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran, yang mendorong produktivitas dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaliknya, penurunan NTP dapat menekan pendapatan petani, mengurangi minat berusaha tani, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pergerakan NTP memiliki hubungan erat dengan dinamika kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2024 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,66 persen.

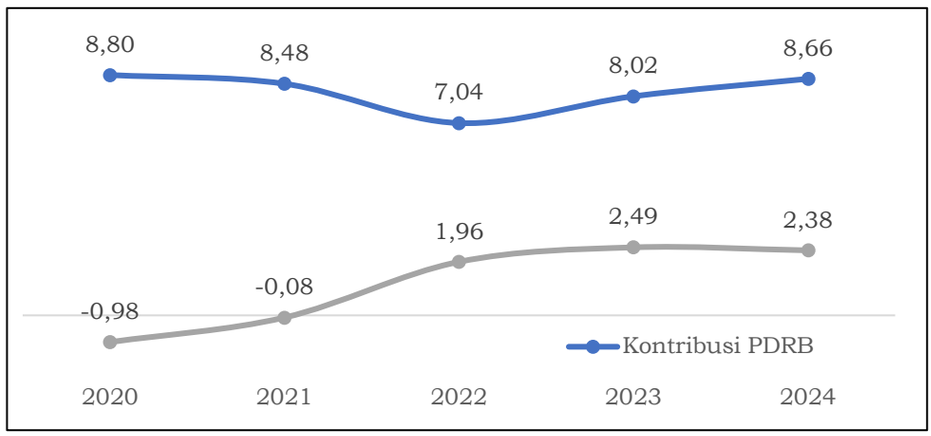

Gambar 2.5. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka –0,98 persen dan -0,08 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48 persen. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mencapai 2,38 persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

Berikut data dan dan informasi sub sektor pertanian dalam arti luas:

a. Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro- ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi

sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan

Tren Produksi Padi Provinsi Kalimantan Timur periode 2020-2024 adalah terjadi penurunan produksi padi secara bertahap dari 262.435 ton (2020) hingga titik terendah 226.972 ton (2023) dan pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan signifikan dengan produksi mencapai 249.643 ton (meningkat 10% dari 2023). Tren ini sejalan dengan penurunan luas panen dari 73.568 Ha (2020) menjadi 57.082 Ha (2023), meski produktivitas meningkat.

Tabel 2.4. Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	52.365,75	51.972,06	48.202,66	28.608,94	52.886,67
KUBAR	1.199,22	2.021,46	1.284,77	1.319,37	1.348,29
KUKAR	110.940,44	104.441,83	105.025,70	115.103,82	106.553,73
KUTIM	17.078,56	13.119,61	12.076,25	10.167,79	13.938,46
Berau	23.352,73	22.364,87	21.135,98	20.498,89	16.693,40
PPU	47.018,03	42.130,14	45.160,69	45.100,57	48.133,90
MAHULU	1.081,75	932,09	489,42	680,75	681,92
Balikpapan	419,57	354,13	302,10	153,81	125,69
Samarinda	8.651,61	6.988,91	5.492,34	5.184,28	9.280,84
Bontang	326,86	352,88	255,43	153,85	0,29
Kalimantan Timur	262.434,52	244.677,98	239.425,34	226.972,07	249.643,19

Sumber: BPS RI, 2025

Jika dilihat dari perkembangan produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur secara agregat masih ditopang oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupate Paser, dan Kabupaten PPU sebagai penyumbang utama. Beberapa daerah seperti Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan menunjukkan tren penurunan konsisten, sedangkan Kabupaten Paser dan Kota Samarinda memperlihatkan pemulihan tajam di tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan perlunya strategi penguatan produksi secara berkelanjutan, terutama di daerah yang mengalami tren penurunan signifikan.

Penurunan produksi padi 2020-2023 sejalan dengan pertumbuhan negatif sub-sektor tanaman pangan selama periode tersebut dengan

pemulihan produksi tahun 2024 sejalan dengan pertumbuhan positif sub-sektor tanaman pangan (2,49 persen pada 2024)

Meskipun ada perbaikan produktivitas dari 3,57 ton/ha (tahun 2023) menjadi 3,96 ton/ha (tahun 2024), namun tantangan utama produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur adalah terjadinya potensi penurunan luas panen yang signifikan. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dan mengurangi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Sedangkan produksi beras berdasarkan rata-rata rendemen 58,2%, mengalami penurunan dari 152.649, 84 ton (tahun 2020) menjadi 132.022,44 ton (tahun 2023) dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 145.209,53 ton.

Tabel 2.5. Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	30.459,51	30.230,50	28.037,95	16.640,91	30.762,49
KUBAR	697,54	1.175,83	747,33	767,42	784,27
KUKAR	64.530,52	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93
KUTIM	9.934,06	7.631,26	7.024,36	5.914,28	8.107,56
Berau	13.583,55	13.008,91	12.294,14	11.923,56	9.710,01
PPU	27.348,90	24.505,74	26.268,52	26.233,57	27.997,96
MAHULU	629,22	542,17	284,68	395,97	396,66
Balikpapan	244,05	205,99	175,72	89,47	73,11
Samarinda	5.032,37	4.065,23	3.194,72	3.015,53	5.398,37
Bontang	190,12	205,26	148,57	89,49	0,17
Kalimantan Timur	152.649,84	142.321,38	139.266,10	132.022,44	145.209,53

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Jika ditinjau Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota maka pola distribusi serupa dengan produksi padi, dengan Kutai Kartanegara dan Paser sebagai produsen utama. Berbeda dengan produksi padi, produksi beras di PPU relatif stabil. Kabupaten Berau menunjukkan kontribusi yang lebih signifikan dalam produksi beras (±9.000-13.000 ton/tahun).

Dengan populasi penduduk Kalimantan Timur tahun 2024 sekitar 4.045.860 jiwa, produksi beras 145.209,53 ton, setara dengan ketersediaan 35,89 kg/kapita/tahun. Angka ini jauh di bawah konsumsi beras rata-rata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 (82,36 kg/kapita/tahun), menunjukkan Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada pasokan dari luar provinsi.

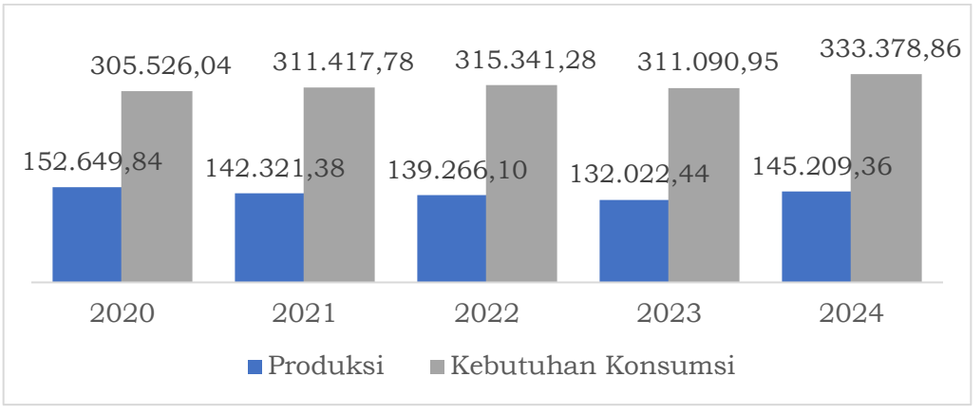

Gambar 2.6. Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber Data : DPTPH Prov. Kaltim, 2025)

Pola konsumsi beras di Kalimantan Timur cenderung tinggi, mengingat beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, permintaan beras pun terus meningkat. Hal ini memperburuk kesenjangan antara produksi dan kebutuhan lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kalimantan Timur banyak mengandalkan pasokan beras dari daerah luar, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Upaya untuk mengatasi masalah ini tentu saja perlu melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian beras melalui teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertanian beras di Kaltim.

Selain beras, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas pangan nomor dua setelah padi. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam membudidayakan tanaman jagung khususnya jagung hibrida. Kebutuhan akan produk jagung akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain untuk konsumsi, jagung juga banyak digunakan untuk pakan ternak dan bahan input industri pangan. Peningkatan kebutuhan akan permintaan jagung juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah produksi jagung tiap tahunnya.

Tabel 2.6. Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	**Produksi (Ton)**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***
Paser	6.569,23	5.615,62	5.358,83	1.538,60	1.071,56
KUBAR	2.376,57	2.832,38	1.981,75	2.917,20	879,48
KUKAR	9.296,99	5.717,84	6.982,08	7.674,00	4.639,98

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
KUTIM	5.762,85	6.774,56	7.283,61	2.122,40	916,71
Berau	48.881,75	63.023,55	51.072,78	19.335,90	138,18
PPU	1.898,14	2.535,01	503,28	171,60	533,11
MAHULU	2,17	7,94	12,74	3,20	-
Balikpapan	679,79	206,88	356,14	75,10	57,29
Samarinda	410,74	267,21	343,86	118,40	116,69
Bontang	42,18	38,00	40,62	87,90	94,77
Kalimantan Timur	75,920,42	87,018,99	73,935,68	34,044,30	8,447,77

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Produksi jagung di Kalimantan Timur menurun drastis dari 73.935,68 ton pada 2022 menjadi 34.044,30 ton pada 2023 (penurunan sekitar 54%). Kabupaten Berau sebagai produsen terbesar pada 2020-2022, namun mengalami penurunan signifikan pada 2023. Kutai Kartanegara dan Kutai Barat justru menunjukkan peningkatan produksi pada 2023 sementara kabupaten/kota lain mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kontribusi dimana dominasi Berau mulai menurun dan digantikan oleh kabupaten lain seperti Kutai Kartanegara. Pola produksi yang sangat fluktuatif pada beberapa kabupaten menunjukkan kemungkinan adanya faktor eksternal yang memengaruhi produksi (cuaca, kebijakan, konversi lahan, dll).

Penurunan drastis di beberapa kabupaten utama seperti Kutai Timur yang turun dari 7.283,61 ton (2022) menjadi 2.122,40 ton (2023). Sementara produksi di wilayah perkotaan (Balikpapan, Samarinda) relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya.

b. Hortikultura

Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam di lahan yang terbatas, seperti kebun rumah atau lahan pertanian kecil, dengan cara budidaya yang tepat dan inovatif, tanaman hortikultura dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 bahwa di Kalimantan Timur ditetapkan 3 komoditas prioritas sub sektor buah-buahan adalah Pisang, Pepaya dan jeruk. Sedangkan komoditas sayuran adalah bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Tabel 2.7. Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Komoditas	Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pisang	95.528	130.656	127.562	156.132	159.120
Pepaya	15.121	24.068	13.674	29.442	12.882
Jeruk	12.517	11.457	7.755	8.396	7.349
Bawang Merah	267	72	114	252	345
Cabai Rawit	9.081	8.367	7.778	7.470	6.468
Cabai Besar	4.290	5.916	2.083	1.183	1.007

Sumber Data : *BPS Provinsi Kalimantan Timur*, 2025

Produksi pisang pada tahun 2024 merupakan produksi komoditas buah-buahan terbesar diantara komoditas tanaman lainnya, dan meningkat sebanyak 1,91 persen (2.988 ton) dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.8. Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kab/Kota	Produksi (ton)					
	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Bawang Merah	Cabai Rawit	Cabai Besar
Paser	70.423,50	295,64	3.224,20	48,65	685,11	53,80
KUBAR	976,99	357,51	121,21	-	307,55	25,40
KUKAR	11.391,36	1.810,82	1.629,18	200,16	1.971,15	488,05
KUTIM	87.735,45	847,92	1.706,36	38,64	951,81	132,24
Berau	161,50	162,33	-	15,40	298,95	57,19
PPU	2.350,56	373,05	582,38	29,11	973,76	3,89
MAHULU	4,74	0,93	-	-	2,74	-
Balikpapan	16.239,00	18.440,40	21,92	2,10	667,66	21,61
Samarinda	5.262,23	11.132,51	277,51	-	129,90	35,47
Bontang	106,18	72,29	3,82	-	69,70	43,90
Kalimantan Timur	194.651,52	33.493,38	7.566,58	334,06	6.058,33	861,55

Sumber Data : *BPS Provinsi Kalimantan Timur*, 2025

Kabupaten/kota dengan produksi pisang terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur dan berkontribusi sebesar 45,07 persen terhadap total produksi buah-buahan di Kalimantan Timur.

Sementara itu untuk komoditas bawang merah, cabai rawit dan cabai besar cukup fluktuatif, kecuali untuk cabai besar yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan produksi cabai besar di Kalimantan Timur berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk

mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kalimantan Timur.

c. Perkebunan

Subsektor perkebunan memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, subsektor Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjadi subsektor dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDRB) terbesar pada sektor pertanian dalam arti luas, dengan persentase terakhir tahun 2024 mencapai 5%. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan kakao.

Tabel 2.9. Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton) Tahun 2024*

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Lada
Paser	6	9.705	622	2.762.937	18
KUBAR	21	35.107	218	1.233.000	6
KUKAR	41	20.729	2.619	3.446.893	2.961
KUTIM	1.456	1.557	679	7.759.931	156
Berau	725	100	1.794	2.785.000	556
PPU	1	2.157	1.022	585.377	1.240
MAHULU	289	-	4	78.485	-
Balikpapan	1	3.626	562	250	127
Samarinda	3	599	306	15.371	16
Bontang	-	-	17	734	-
KALTIM	2.543	73.580	7.843	18.667.978	5.080

*Ket: *) Angka Sementara Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025*

Komoditas perkebunan yang sangat mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit. Tahun 2024, produksi tertinggi Kelapa Sawit berada pada Kabupaten Timur sebanyak 7.759.931 ton. Selain Kelapa Sawit, tingginya produksi komoditi karet sebesar 73.580 ton mencerminkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur.

Di sisi lain, luasan areal dan produksi komoditi subsektor Perkebunan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Meski begitu, luas areal dan produksi komoditas perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2024.

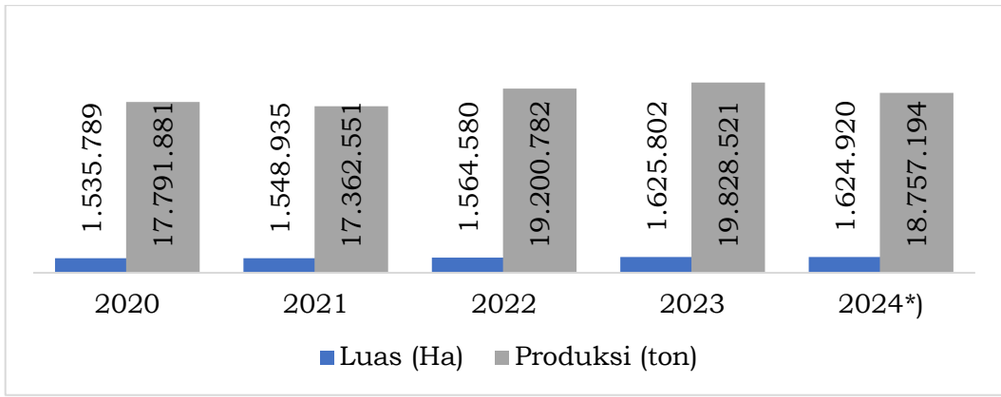

Gambar 2.7. Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur
*(Ket: *) Angka Sementara; Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)*

Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir, dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Komoditi Karet Rakyat di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kukar, dan Kabupaten Kutim memiliki potensi peningkatan produksi yang meningkat. Hal ini ditandai dengan besarnya calon tanaman produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Disisi lain pada Komoditi Karet di Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar, dan Kabupaten Paser memiliki luasan Tanaman Tua/Rusak yang cukup tinggi dengan potensi

produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya peremajaan ataupun rehabilitasi pada komoditi tanaman tersebut.

d. Peternakan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

Tabel 2.10. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sapi	119.974	121.290	108.613	57.757	71.949
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69
3	Kerbau	6.552	6.539	6.490	1.325	4.254
4	Kambing	69.929	68.997	58.552	26.978	40.783
5	Domba	635	694	642	611	935
6	Babi	83.652	76.292	45.839	18.957	28.832
7	Kuda	95	143	95	24	94
8	Ayam Buras	4.435.205	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524
9	Ayam Petelur	1.218.994	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328
10	Ayam Pedaging	59.402.832	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677
11	Itik	254.749	261.263	269.564	47.290	155.377
12	Kelinci	10.830	9.462	7.931	857	1.006
13	Puyuh	79.222	94.339	88.143	19.518	16.161
14	Itik Manila	52.823	64.178	67.608	45.791	21.090

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024*

Populasi Ternak berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi) ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci dan puyuh), Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 Kabupaten/Kota. Terjadi penurunan jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

Tabel 2.11. Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	509,30	469,17	1.020,96	341,03	335,20
KUBAR	296,51	240,43	298,88	254,57	241,70
KUKAR	909,12	762,52	870,10	643,86	878,46
KUTIM	840,56	883,84	766,15	893,85	1.197,50
Berau	636,78	506,93	705,49	537,08	522,66

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
PPU	473,59	545,63	599,50	564,74	901,88
MAHULU	14,53	13,11	17,38	14,47	26,85
Balikpapan	1.692,49	1.335,79	1.149,55	1.447,10	1.179,19
Samarinda	2.096,74	1.918,07	1.700,55	2.075,32	2.096,68
Bontang	880,21	641,04	707,86	706,66	567,60
Kalimantan Timur	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024*

Peningkatan produksi daging sapi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sejalan dengan peningkatan populasi sapi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Namun produksi daging belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas, bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku, keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

Tabel 2.12. Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	2.601,86	2.627,88	2.653,23	1.650,79	1.667,29
KUBAR	2.409,17	2.409,64	2.434,67	2.358,27	2.318,85
KUKAR	13.262,74	13.989,87	14.126,97	5.188,18	5.240,06
KUTIM	2.740,38	3.561,20	3.597,75	3.637,39	3.673,76
Berau	1.684,25	1.689,92	1.707,75	10.937,63	11.047,01
PPU	1.840,90	1.704,67	1.721,72	1.179,13	1.190,92
MAHULU	69,87	70,73	71,43	-	-
Balikpapan	11.888,42	12.228,08	12.351,30	15.279,67	15.432,47
Samarinda	14.619,26	14.799,23	14.946,29	20.285,32	20.488,18
Bontang	4.163,42	3.503,11	3.539,08	4.009,05	4.049,14
Kalimantan Timur	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024*

Sementara itu, produksi daging ayam pedaging menunjukkan tren yang lebih positif. Produksi meningkat signifikan pada tahun 2023, terutama karena lonjakan produksi di Kabupaten Berau. Ayam pedaging menjadi komoditas unggulan dalam penyediaan protein hewani masyarakat karena

lebih mudah dibudidayakan dan memiliki tingkat produksi yang relatif tinggi.

Tabel 2.13. Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	1.455,62	1.556,80	1.483,73	196,51	239,99
KUBAR	384,23	418,57	424,55	292,93	334,42
KUKAR	3.607,93	3.669,03	3.726,94	3.377,63	3.687,30
KUTIM	1.308,24	1.310,25	1.799,30	533,58	871,56
Berau	2.130,79	2.371,80	2.262,04	1.878,66	1.900,42
PPU	896,93	770,45	777,92	487,03	755,60
MAHULU	44,94	49,01	48,15	7,99	13,71
Balikpapan	938,81	937,43	945,85	879,94	905,78
Samarinda	3.094,14	3.195,57	4.027,44	3.172,79	3.818,11
Bontang	146,95	123,67	98,43	31,88	91,20
Kalimantan Timur	14.008,58	14.402,57	15.594,35	10.858,94	12.618,09

*Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024*

Produksi telur belum dapat mencukupi konsumsi telur di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi telur antara lain UMP Kalimantan timur yang tinggi serta topographi lahan yang sulit menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga kurangnya minat pengusaha untuk membuka usaha peternakan di Kalimantan Timur, kurangnya lahan pakan dan bahan baku pakan untuk unggas, dan peningkatan penyakit Avian Influenza (AI / Flu Burung) pada tahun 2024.

Adanya sarana dan prasarana peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan produksi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi Pengembangan Desa Korprorasi Ternak (PDKT), Pembangunan *Hatchery* ayam lokal unggul, serta optimalisasi sistem integrasi ternak dengan sektor lain seperti integrasi sapi perkebunan sawit, integrasi sapi lahan pasca tambang, dan integrasi sapi perhutanan sosial.

e. Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber

daya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

Tabel 2.14. Produksi Kayu Bulat Tahun 2020-2024 (M^3)

No	Nama Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan Alam	1.122.077,09	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	887.293,41
2	Hutan Tanaman	3.484.923,24	3.314.494,10	3.206.086,00	4.613.355,95	5.146.333,56
3	Non-Kehutanan	227.281,22	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.805,98
TOTAL		4.834.281,55	4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.293.432,95

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

Tabel 2.15. Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2020	38.737,80
2.	2021	39.900,80
3.	2022	38.866,17
4.	2023	38.861,16
5.	2024	38.165,00
TOTAL		194.530,93

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 274.477 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun).

Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2020–2024 yaitu seluas 194.530,93 Ha. Sedangkan pada tahun 2024,

terjadi kerusakan hutan seluas 12.766,01 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 1.049,64 Ha, kebakaran hutan seluas 6.869,65 Ha, dan perambahan seluas 4.846,71 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2024 sebesar 330.184,61 Ha yang dikelola oleh 179 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

Kalimantan Timur memiliki tutupan hutan yang luas, termasuk hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan lahan gambut. Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Timur memiliki distribusi luas hutan yang cocok untuk pengembangan perhutanan sosial berbasis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kondisi geografis seperti aksesibilitas terbatas dan topografi berbukit menjadi tantangan dalam pemanfaatan HHBK dan pemasaran hasil hutan, namun juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata berbasis hutan.

Terdapat komunitas masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang selama ini telah mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Sebagian besar tenaga kerja lokal di daerah pedalaman masih tergantung pada sektor kehutanan, sehingga pengembangan HHBK dan HHK memiliki dampak ekonomi langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.16. Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Jasling dan HHBK	Kabuaten/ Kota	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE)					JUMLAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ekowisata	Balikpapan Berau, Kukar, Kutim			400.000.000	649.550.001	631.348.342	1.680.898.343
2	Kerajinan	Kukar					220.935.500	220.935.500
3	HHBK Lainnya	Paser, Kukar, Balikpapan, Kubar	5.000.000	3.485.000	184.298.500	346.160.000	150.310.000	689.253.500
4	Udang	Kukar			292.770.000	593.425.000	124.557.000	1.010.752.000
5	Perikanan	Kukar dan Berau			7.300.000	50.225.500	97.986.000	155.511.500

No	Jenis Jasling dan HHBK	Kabuaten/ Kota	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE)					JUMLAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Madu	Paser, Berau, Kukar dan Balikpapan		3.150.000	14.100.000	33.415.000	84.790.000	135.455.000
7	Padi	Kukar					63.000.000	63.000.000
8	Biji Kopi	Kutim				22.750.000	53.377.000	76.127.000
9	Kepiting	Kukar			158.605.000	474.045.000	43.635.000	676.285.000
10	Rotan Sega	Berau					5.000.000	5.000.000
11	Nira Aren	Berau					3.251.000	3.251.000
12	Jeruk	Kutim					3.200.000	3.200.000
13	Biji Kemiri	Kutim					1.800.000	1.800.000
14	Buah Naga	Balikpapan			5.600.000	256.000.000	770.000	262.370.000
15	Talas	Paser					100.000	100.000
16	Karet	Balikpapan	1.500.000	475.392.912	111.277.100			610.545.012
17	Durian	Balikpapan		7.000.000	18.000.000	24.000.000		49.000.000
18	Lada	Balikpapan			14.895.000	225.000.000		239.895.000
19	Nangka	Balikpapan			3.000.000			3.000.000
20	Silvofishery	Kutai Kartanegara			1.720.000			1.720.000
21	Bambu Lainnya	Kutai Kartanegara			1.600.000			1.600.000
22	HHK Lainnya	Balikpapan			730.000			730.000
23	Sarang Burung Walet	Kutai Kartanegara			700.000			700.000
24	Buah-Buahan/Umbi-Umbian Talas Lainnya	Balikpapan				131.100.000		131.100.000
25	Kunyit/Kunir	Kutai Timur				130.000		130.000
26	Ki Sereh	Balikpapan				120.000		120.000
	JUMLAH		**6.500.000**	**489.027.912**	**1.214.595.600**	**2.805.920.501**	**1.484.059.842**	**6.022.478.855**

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2025

Tabel 2.17. Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri di Kalimantan Timur

No	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Hutan Alam**					
	• Produksi (M3)	1.122.077,09	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	1.168.483,44
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	544.750,12	546.063,52	447.158,11	226.508,86	161.889,89
	• Persentase (%)	48,55	43,30	44,31	30,12	13,85
2	**Hutan Tanaman**					
	• Produksi (M3)	3.484.923,24	3.314.494,10	3.206.086,34	4.613.355,95	5.118.843,31
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	11.169	738.607,28	780.691,08	1.144.755	1.135.024,08
	• Persentase (%)	0,32	22,28	24,35	24,81	22,17
3	**Non Kehutanan**					
	• Produksi (M3)	227.281,22	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.812,64
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	158.464,48	546.063,52	82.219,54	78.327,00	56.913,06
	• Persentase (%)	69,72	209,44	37,58	40,22	21,91
Jumlah						
• Produksi (M3)		4.834.281,55	4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.547.139,39
• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)		714.383,20	1.830.734,32	1.310.068,73	1.449.590,89	1.353.827,03
• Persentase (%)		14,78	37,85	29,55	26,07	20,68

Sumber : Dinas Kehutanan, 2025

Berdasarkan data Matriks GOKUPS NTE 2020–2024, nilai transaksi ekonomi dari KUPS dan KTH menunjukkan tren peningkatan, meskipun fluktuatif per tahun tergantung pada komoditas dan dukungan pasar. Komoditas HHBK seperti madu hutan, bambu, rotan, getah damar, kemiri, aren, dan gaharu menjadi penyumbang NTE terbesar di banyak kabupaten. Beberapa KUPS telah berhasil naik kelas (*pemula → tumbuh → maju*), yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha dan daya saing komunitas.

NTE merupakan indikator outcome prioritas dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan PermenLHK. NTE mencerminkan kontribusi ekonomi langsung dari hutan kepada masyarakat, berbeda dengan indikator luas atau jumlah kelompok semata. NTE juga mencerminkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan non-ekstraktif (berbasis HHBK/HHK), sejalan dengan transformasi ekonomi hijau dan rendah karbon Kalimantan Timur.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung air dan daya dukung pangan.

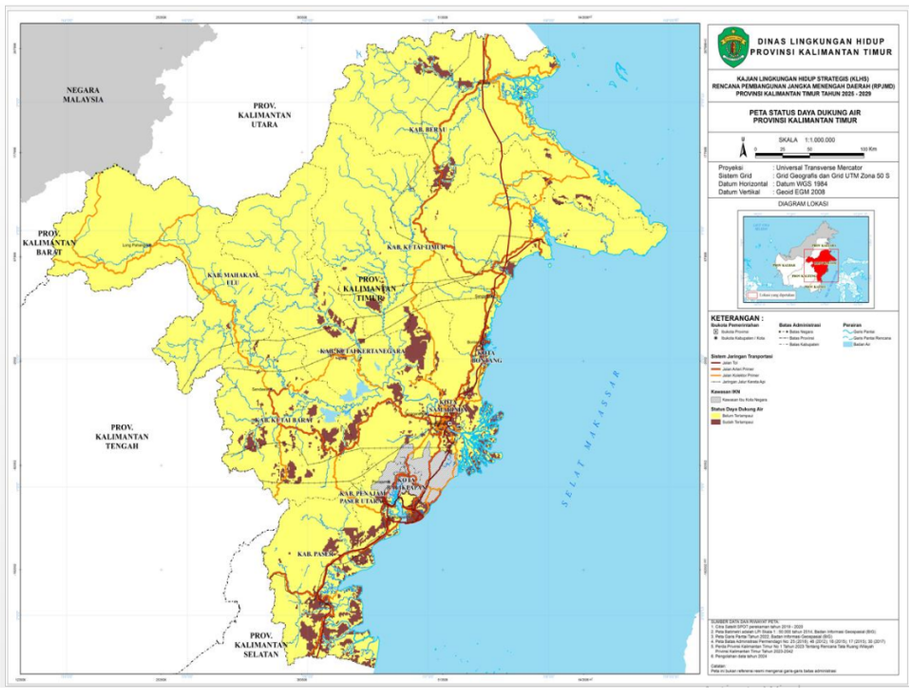

Gambar 2.8. Peta Status Daya Dukung Air
Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui dengan luas 11.646.333,50 Ha (93,60 persen) dan sudah terlampaui dengan luas 796.483,87 Ha (6,40 persen). Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.

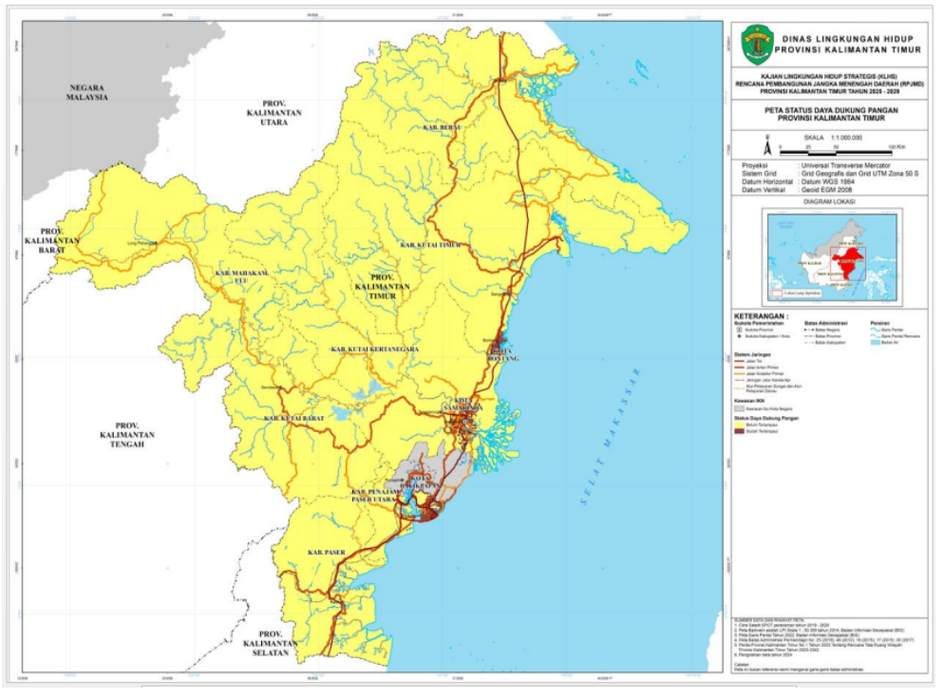

Gambar 2.9.Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung penyediaan pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten yang sudah terlampaui yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan. Upaya ini penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan,

dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaaatan pangan.

Tabel 2.18. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	82,26	80,48	81,76	83,70	80,04
2.	KUBAR	54,98	57,76	66,94	58,39	60,87
3.	KUKAR	84,28	84,73	84,44	85,53	87,17
4.	KUTIM	73,13	66,19	60,09	65,76	61,64
5.	Berau	85,34	86,77	86,16	85,33	81,91
6.	PPU	86,20	86,24	85,51	87,40	88,11
7.	MAHULU	63,17	52,75	53,29	57,68	56,53
8.	Balikpapan	87,66	88,68	89,47	91,40	91,23
9.	Samarinda	80,75	83,72	84,66	88,97	89,68
10.	Bontang	84,59	87,24	84,21	88,76	88,89
Kalimantan Timur		78,24	77,46	77,65	79,29	78,61

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka 79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu

indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel 2.19. Capaian Aspek Ketahanan Pangan
Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
1.	Paser	81,31	87,38	82,73
2.	KUBAR	0,00	87,03	80,70
3.	KUKAR	78,27	91,28	86,67
4.	KUTIM	19,13	87,09	84,74
5.	Berau	76,02	94,43	85,50
6.	PPU	87,62	91,46	84,18
7.	MAHULU	0,00	84,63	80,73
8.	Balikpapan	-	98,62	85,49
9.	Samarinda	-	93,82	85,00
10.	Bontang	-	92,12	86,02
Kalimantan Timur		48,91	90,79	84,18

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourisment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tabel 2.20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	11,64	15,37	20,54	11,99	8,44
KUBAR	11,17	14,20	16,39	12,63	7,23
KUKAR	11,14	14,41	18,52	10,59	8,06
KUTIM	9,24	10,90	16,35	8,70	6,60
Berau	5,14	12,30	14,16	7,86	6,66
PPU	11,58	16,60	23,09	16,34	8,20
MAHULU	8,20	10,76	18,22	13,82	8,18
Balikpapan	5,90	8,30	13,68	6,98	5,90
Samarinda	6,29	13,51	14,50	7,87	7,31
Bontang	5,21	9,84	11,72	6,95	7,73
Kalimantan Timur	8,24	12,56	16,19	9,20	7,40
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

Sumber: BPS RI, 2024

Kondisi PoU Kalimantan Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kinerja. Namun, mulai tahun 2023 PoU Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan nilai PoU di tahun 2024 sebesar 7,40 persen. Perbaikan kinerja PoU terjadi karena adanya program pemerintah terhadap akses pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai. Angka PoU Kalimantan Timur di tahun 2024 yang sebesar 7,40 persen merepresentasikan bahwa masih terdapat 7 orang dari 100 orang di Kalimantan Timur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.

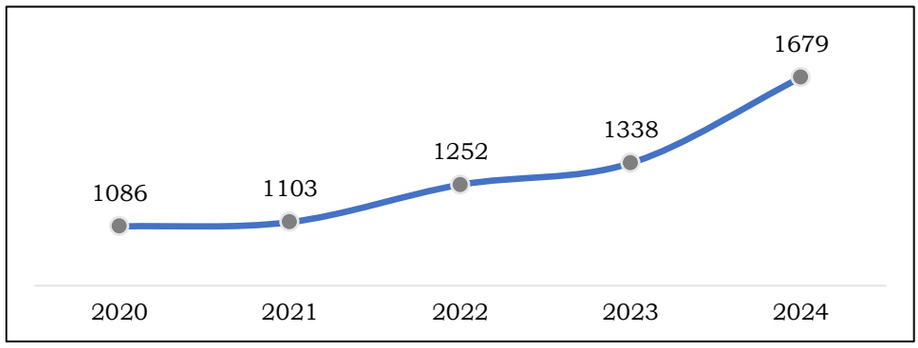

Gambar 2.10. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.086 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 1.679 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 341 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan listrik selama periode tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

d. Rasio Elektrifikasi

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi pondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.21. Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Elektrifikasi/ Rasio KK Berlistrik (%)
		PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah	
1	Balikpapan	34	0	34	0	255,213	471	255,684	99,62%
2	Berau	91	19	110	0	79,736	10,353	90,089	89,58%
3	Kutai Kartanegara	227	10	237	0	223,658	9,641	233,299	89,32%
4	Samarinda	59	0	59	0	312,525	0	312,525	100%
5	Kutai Timur	115	26	115	0	107,268	26,308	133,576	89,17%
6	Bontang	15	0	15	0	57,319	1,123	58,442	94,43%
7	PPU	54	0	54	0	59,631	1,085	60,716	92,83%
8	Paser	138	6	138	0	88,203	4,129	92,332	92,31%
9	Kutai Barat	164	30	164	0	53,810	4,402	58,212	94,82%
10	Mahulu	32	18	32	0	6,682	5,047	11,729	87,41%
Total	**Kaltim**	**929**	**109**	**1.038**	**0**	**1,244,045**	**62,559**	**1,306,604**	**96,17%**

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Dari total 1.358.621 jumlah KK dan 4.048.079 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 89,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 10,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 109 Desa Berlistrik Non PLN dan 62.559 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 95,18 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,17 persen pada tahun 2024.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 109 desa yang belum berlistrik PLN atau belum berlistrik selama 24jam, yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

e. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer di Provinsi Kalimantan Timur merefleksikan efisiensi penggunaan energi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, yang diukur melalui rasio konsumsi energi primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai wilayah kaya sumber daya energi, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan peran sebagai lumbung energi nasional dengan upaya transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.22. Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator	Based Data	Unit	Annual Value					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		Konsumsi	BOE	56,798,586	57,652,857	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91

No	Indikator	Based Data	Unit	Annual Value					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Intensitas Energi Final	Energi Final							
		PDRB	Milyar Rupiah	486,523	472,393	484,440	506,159	537,630	570,820
		Intensitas Energi Final	BOE/Milyar Rupiah Konstan 2020	116.74	122.04	121.98	101.68	135.09	100.94
2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari Sumber Energi Primer	Total EBT	BOE	2,820,571	3,025,714	3,864,511	3,715,859	8,308,572	6,994,663,830
		Total Energi	BOE	56,798,586	57,652,857	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91
		Bauran EBT	%	4.40	4.80	6.53	7.27	11.44	12.14

Sumber Data : Dinas ESDM Prov. Kaltim, Tahun 2025

Intensitas energi final di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2019 - 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi mencapai 100,94 BOE/miliar Rupiah konstan 2010 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan konsumsi energi per unit output ekonomi yang mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur masih sangat tergantung pada sektor-sektor padat energi. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan tajam pada tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi energi di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN.

Peningkatan intensitas energi ini juga sejalan dengan naiknya konsumsi energi final dari 486.523 Milyar Rupiah pada tahun 2019 menjadi 537.630 Milyar Rupiah pada tahun 2023, sebelum kemudian menurun drastis menjadi 570.820 Milyar Rupiah pada tahun 2024. Fenomena ini bisa mencerminkan adanya perubahan struktural dalam sektor-sektor pengguna energi atau penyesuaian metodologi pencatatan statistik energi dan ekonomi. Namun demikian, secara umum, tingginya intensitas energi menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur belum sepenuhnya didorong oleh sektor-sektor yang efisien energi seperti jasa, teknologi, atau industri kreatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perencanaan pembangunan yang ingin menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya intensitas energi menuntut intervensi kebijakan yang terfokus pada transformasi struktural ekonomi dan adopsi teknologi energi yang efisien. Pemerintah daerah perlu

mendorong integrasi kebijakan energi dengan rencana pembangunan sektoral, termasuk pengembangan kawasan industri hijau, elektrifikasi sektor transportasi, serta insentif bagi pelaku industri yang menerapkan sistem manajemen energi. Selain itu, percepatan bauran energi terbarukan yang porsinya telah meningkat dari 4,40% pada 2019 menjadi 12,14% pada 2024 menunjukkan potensi yang patut dimaksimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

f. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, pada akhir periode RPJMN 2020-2024 Kalimantan Timur hanya mampu menembus angka 83,71 persen. Sementara itu, capaian Nasional pada tahun 2024 adalah 92,64 persen.

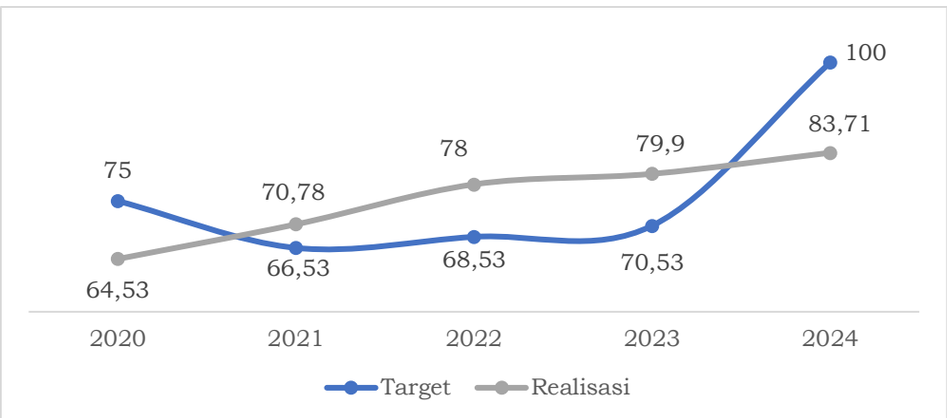

Gambar 2.11.Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Selanjutnya,

tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Tabel 2.23. Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	48,56	66,80	70,14	84,25	84,25
2.	KUBAR	31,04	72,19	86,02	86,02	85,92
3.	KUKAR	51,54	56,50	72,85	78,22	87,74
4.	KUTIM	40,11	44,20	51,73	55,03	60,01
5.	Berau	56,87	70,21	82,16	81,55	82,00
6.	PPU	32,14	49,90	30,90	23,35	89,07
7.	MAHULU	24,51	13,89	66,06	14,40	85,10
8.	Balikpapan	79,79	97,84	99,25	98,99	99,51
9.	Samarinda	87,28	79,39	87,27	87,27	85,86
10.	Bontang	99,96	81,18	83,55	83,55	83,55

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan data diatas, diketahui capaian akses air minum layak di seluruh kabupaten/kota pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Pada tahun 2024, capaian tertinggi diperoleh oleh Kota Balikpapan dengan 99,51 persen. Sementara itu, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki capaian sebesar 60,01 persen dimana capaian ini masih berada di bawah target, sehingga memerlukan perhatian khusus. Adapun permasalahan air minum di Kabupaten Kutai Timur adalah penurunan kualitas air baku, penurunan debit air baku, tekanan dan kontinuitas pengaliran pipa masih kecil dan sering terganggu serta pencemaran lingkungan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.

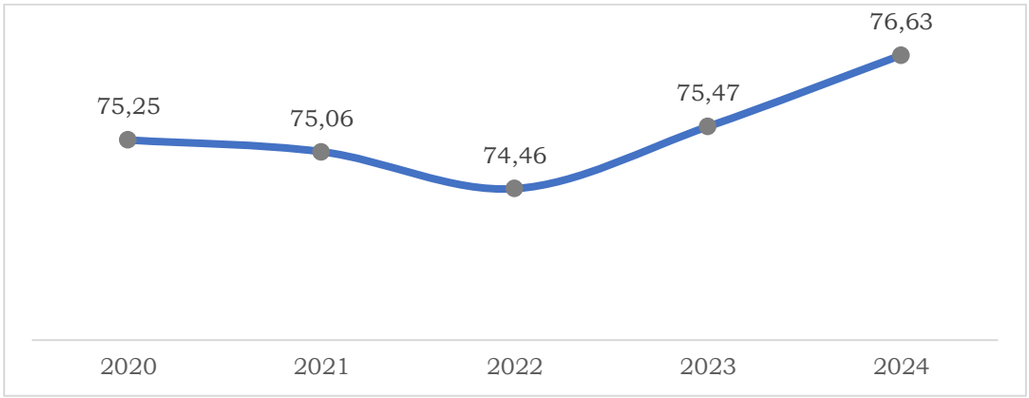

Gambar 2.12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.24. Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	53,7	51,92	53,02	52,64	52,64
IKU	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43
IKL	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03
IKAL	83,51	85,4	81,45	81,36	85,16

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada periode 2020–2024, terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sejak tahun 2020, IKLH menunjukkan tren penurunan. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan metodologi penghitungan dengan penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kehadiran komponen ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Timur yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem laut.

Selain itu, penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) turut berkontribusi terhadap melemahnya capaian IKLH pada periode awal. IKA berada pada

angka 53,7 di tahun 2020, turun menjadi 51,92 pada 2021, dan hanya mengalami sedikit fluktuasi hingga 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap kualitas air sungai, baik akibat aktivitas domestik, industri, maupun aktivitas pertambangan yang cukup dominan di Kalimantan Timur.

Meskipun demikian, capaian IKLH tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan. Peningkatan ini terutama ditopang oleh kenaikan signifikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) yang mencapai 91,43 pada tahun 2024, serta penguatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKU yang konsisten berada pada level tinggi sepanjang periode 2020–2024 mengindikasikan keberhasilan dalam pengendalian pencemaran udara, meskipun tekanan dari sektor transportasi dan industri tetap ada. Sementara itu, IKL yang meningkat dari 79,76 (2020) menjadi 84,03 (2024) mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola lahan, termasuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.25. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20
7.	MAHULU	2,92	2,91	2,91	0,50
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28
KALTIM		2,68	4,71	4,71	4,88

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air

limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitupun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.26. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Timbulan sampah (ton)	601.375,66	718.865,78	791.828,97	809.331,64	851.605,52
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)	85.054	97.216	133.061	135.670	142.822
Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	14,14	13,52	16,80	16,76	16,77

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa sampah terkumpul, dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada sampah terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas

pengelolaan sampah, sementara proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2022 sebesar 78,75 persen. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan BPS setiap 3 Tahunan dan Data Inti (KOR BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahunan (masih dalam tahap pengusulan).

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2024 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 2.259 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari

keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

Tabel 2.27. Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	10,21	27,73	25,22	26,24	26,92

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.924.455,43 ton CO2eq atau sebesar 49,19 persen pada tahun 2024 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2024 sebanyak 54.739.320,59 ton CO2 Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca provinsi Kalimantan timur tahun 2024 dari dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan timur adalah 31,05 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

Besaran emisi gas rumah kaca tahun aktifitas 2023 yang diasumsikan sebagai emisi GRK tahun 2024 sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq, baseline intensitas emisi GRK tahun 2010 adalah 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah, serta PDRB Kaltim Harga konstan tahun 2024 adalah sebesar Rp570,82 triliun.

Dari data diatas diketahui intensitas emisi tahun 2024 adalah sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq/Rp570.820 Milyar atau sebesar 48,73 ton CO2 Eq/milyar rupiah dan besaran presentase penurunan intensitas emisi GRK adalah (199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah - 48.73 ton CO2 Eq/milyar rupiah) / 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah atau sebesar 75,55 persen.

c. Indeks Risiko Bencana

Provinsi Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, serta abrasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat. Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin kuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

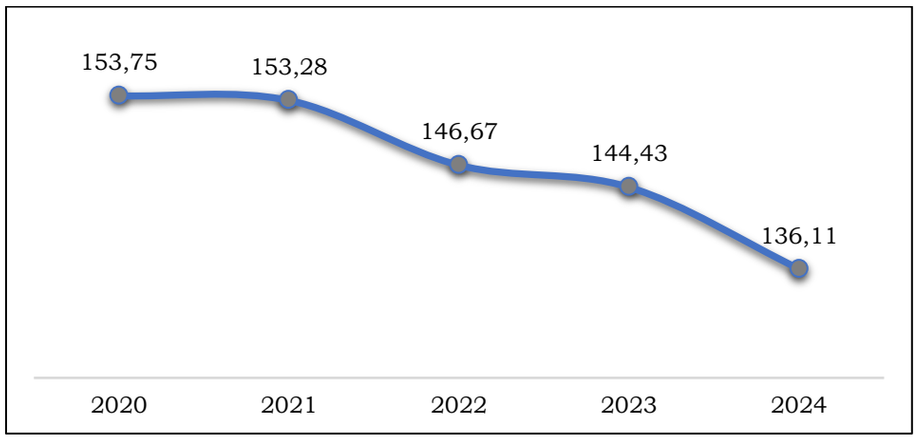

Gambar 2.13. Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut.

Tabel 2.28. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Paser	196.40	196.40	196.40	191.78	187.98	Tinggi
2	KUBAR	156.40	156.40	153.65	149.15	151.32	Sedang
3	KUKAR	119.16	119.16	120.96	114.30	118.80	Tinggi
4	KUTIM	190.00	190.00	181.57	185.17	173.36	Tinggi
5	Berau	202.40	202.40	188.37	173.74	148.64	Tinggi
6	PPU	158.32	151.67	143.00	129.44	131.81	Sedang
7	MAHULU	-	156.40	156.40	156.40	146.03	Tinggi
8	Balikpapan	108.14	123.46	110.79	118.21	101.43	Sedang
9	Samarinda	102.94	101.05	92.77	98.29	85.20	Sedang
10	Bontang	150.00	135.89	122.77	127.85	116.57	Sedang
	Rata-Rata	**153.75**	**153.28**	**146.67**	**144.43**	**136.11**	**Sedang**

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih berada dalam kategori risiko bencana "tinggi" pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Paser dengan nilai 187,98, Kutai Timur dengan nilai 173,36 , Kutai Barat dengan nilai 151,32 , Berau dengan nilai 148,64, dan Mahakam Ulu dengan nilai 146,03.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Resiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.

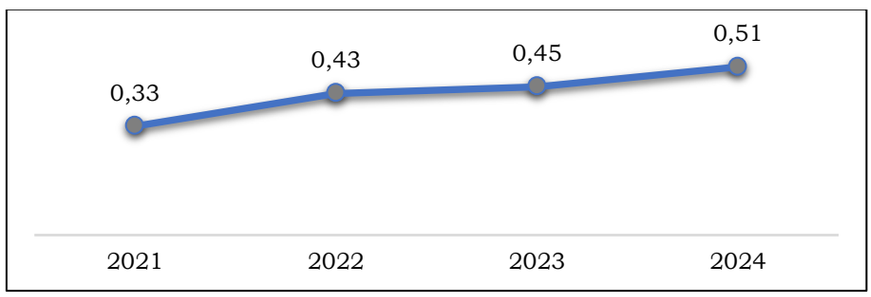

Gambar 2.14. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2024
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0.51 di tahun 2024. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya capaian kinerja pada beberapa indikator, antara lain lemahnya kebijakan daerah dan kelembangaan tentang penanggulangan bencana, belum optimalnya pemaduan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana, belum optimalnya integrasi sistem informasi kebencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya (manusia, logistik, dan peralatan), belum terpadunya penanganan tematik kawasan rawan bencana, rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, lemahnya kesiapsiagaan dan

penanganan bencana, serta lemahnya pengembangan sistem pemulihan bencana.

7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757.220 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045.860 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288.640 jiwa.

Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024) (%)
1	Paser	274.890	278.040	281.140	284.110	286.990	1,10
2	KUBAR	171.940	173.750	175.470	177.130	178.740	0,99
3	KUKAR	727.610	735.970	746.370	756.790	789.770	2,14
4	KUTIM	432.550	440.290	447.940	455.500	462.990	1,71
5	Berau	247.210	250.950	254.660	258.290	261.830	1,45
6	PPU	178.060	180.590	188.900	197.630	267.690	11,38
7	MAHULU	32.420	32.870	33.320	33.770	34.250	1,39
8	Balikpapan	687.060	694.940	702.600	710.040	717.230	1,10
9	Samarinda	827.070	835.150	843.010	850.630	858.080	0,96
10	Bontang	178.410	180.920	183.370	185.850	188.290	1,37
Kalimantan Timur		3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	4.045.860	1,93

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,93 persen selama lima tahun sejak tahun 2020–2024. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 11,38 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio,* jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.30. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	148.880	138.110	286.990	107,80	27,00
2	KUBAR	93.950	84.800	178.740	110,79	13,00
3	KUKAR	409.890	379.880	789.770	107,90	29,00
4	KUTIM	248.020	214.980	462.990	115,37	15,00
5	Berau	139.350	122.480	261.830	113,77	12,00
6	PPU	137.570	130.120	267.690	105,72	84,00
7	MAHULU	17.760	16.490	34.250	107,66	2,00
8	Balikpapan	366.050	351.190	717.230	104,23	1.407,00
9	Samarinda	435.900	422.180	858.080	103,25	1.197,00
10	Bontang	96.560	91.730	188.290	105,26	1.171,00
Kalimantan Timur		2.093.900	1.951.960	4.045.860	107,27	32,00

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2 per km². Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,21 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,85 persen).

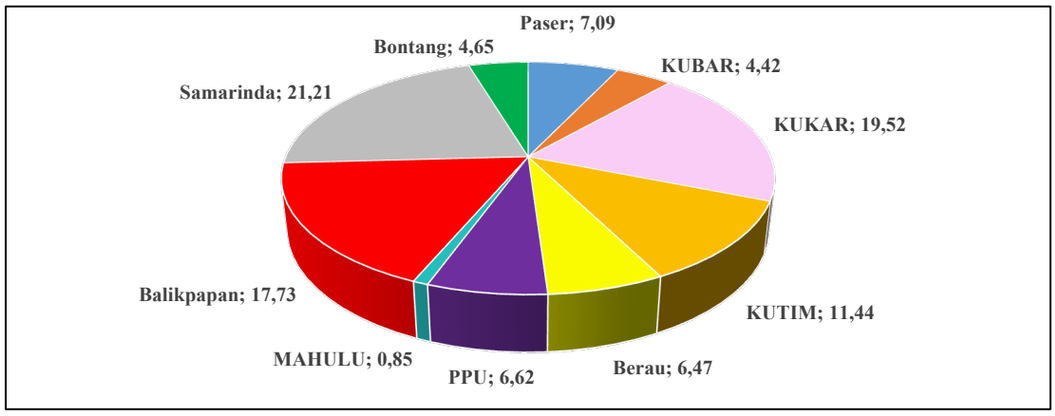

Gambar 2.15. Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen)
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

Tabel 2.31. Persebaran Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
1	2	3		4		5		6
1	Berau	1	Biduk - Biduk	1	Teluk Sumbang	1	Teluk Sumbang	Dayak Basap
		2	Gunung Tabur	1	Birang	1	Hulu Sei Birang/sei Maning	Dayak Basap
				2	Samburakat	2	Samburakat	Berau Banua, Dayak, Kutai
		3	Kelay	1	Long Keluh	1	Long Keluh	Dayak Kenyah
				2	Long Pelay	2	Long Gie	Dayak Punan
				3	Merabu	3	Merabu	Dayak Lebo
				4	Merasa	4	Merasa	Dayak Kenyah
				5	Long Keluh	5	Long Keluh	Dayak Punan
				6	Long Pelay	6	Long Gie	Dayak Punan,Dayak Ga'ai
				7	Lesan Dayak	7	Lesan Dayak	Dayak Ga'ai,Dayak Punan

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
				8	Long Beliu	8	Long Beliu	Dayak Kenyah,Dayak Punan
				9	Long Duhung	9	Long Duhung	Dayak Punan Kelay
				10	Long sulai	10	Long sulai	Dayak Punan,Dayak Ga'ai
				11	Long Lamcin	11	Long Lamcin	Dayak Punan
				12	Mapulu	12	Mapulu	Punan Lebo
				13	Merapun	13	Merapun	Punan Lebo
				14	Sido Bangen	14	Sido Bangen	Dayak Kenyah
				15	Muara Lesan	15	Muara Lesan	Berau/Melayu/Dayak Ga'ai
		4	Teluk Bayur	1	Labanan Makarti	1	Sei Lais	Dayak Kenyah
				2	Tumbit Melayu	2	Tumbit Melayu	Dayak Gaai
		5	Segah	1	Batu Rajang	1	Batu Rajang	Dayak Kenyah
				2	Punan Malinau	2	Punan Malinau	Dayak Punan, Dayak Gaai, Dayak Kenyah
				3	Long Ayan	3	Long Ayan	Dayak Gaai, Dayak Kenyah
				4	Tepian Buah	4	Tepian Buah	Dayak Kenyak Lepo, Lepo Tau, Lepo Kulit, Lepo Jaalan
				5	Siduung Indah	5	Siduung Indah	Dayak Kenyah
				6	Gunung Sari	6	Gunung Sari	Berau Banua
				7	Punan Segah	7	Punan Segah	Dayak Punan
				8	Long Ayap	8	Long Ayap	Dayak Punan, Dayak Gaai
				9	Punan Mahakam	9	Punan Mahakam	Dayak Punan Segah
				10	Long Laai	10	Long Laai	Dayak Punan, Dayak Gaai
				11	Bukit Makmur	11	Bukit Makmur	Dayak Kenyah
				12	Pandan Sari	12	Siduung Muara	Dayak Kenyah
		6	Sambaliung	1	Tumbit Dayak	1	Tumbit Dayak	Dayak Gaai
				2	Bena Baru	2	Bena Baru	Dayak Kenyah Badeng
				3	Inaran	3	Kampung Inaran	Dayak Lebbo
				4	Long Lanuk	4	Kampung Long Lanuk	Dayak Ga'ay
				5	Suaran	5	Kampung Suaran	Dayak Basap
		7	Tabalar	1	Tabalar Ulu	1	Tabalar Ulu	Dayak Basap
		8	Talisayan	1	Campur sari	1	Campur sari	Dayak
				2	Bumi Jaya	2	Bumi Jaya	Dayak
				3	Tunggal Bumi	3	Tunggal Bumi	Dayak
				4	Sumber Mulya	4	Sumber Mulya	Dayak, Berau Banua, Kutai
				5	Capuak	5	Capuak	Dayak
		9	Biatan	1	Biatan Bapinang	1	Bapinang	Dayak Basap
2	Kutai Barat	1	Bongan	1	Tanjung Soke	1	Tanjung Soke	Paser Luangan
				2	Gerunggung	2	Gerunggung	Paser Luangan
				3	Deraya	3	Deraya	Paser Luangan
				4	Lemper	4	Lemper	Paser Luangan
				5	Pering Taliq	5	Pering Taliq	Basap Paser
		2	Long Iram	1	Linggang Muara Leban	1	Apoy Jure	Tunjung Benuaq
				2	Ujoh Halang	2	Ujoh Halang	Benuaq

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
								Bahau Uma Luhad
		3	Bentian Besar	1	Jelmuk Sibak	1	Sembulan	Benuaq
				2	Penarung	2	Penarung	Benuaq Menalik
								Benuaq Madjaun
				3	Randah Empas	3	Randah Empas	Bentian
		4	Tering	1	Linggang Muyub Ilir	1	Linggang Muyub Ilir	Tunjung
				2	Tering Lama Ulu	2	Tering Lama Ulu	Bahau
		5	Linggang Bigung	1	Linggang Melapeh	1	Linggang Melapeh	Tunjung Rentenungk Linggang Melapeh
		6	Nyuatan	1	Sembuan	1	Sembuan	Benuaq
								Jumetn Tuwoyatn Sembuan
								Murai Madeng Sembuan
		7	Mook Manaar Bulatn	1	Muara Batuq	1	Muara Batuq	Tunjung Rentenuknng
		8	Sekolaq Darat	1	Sekolaq Joleq	1	Sekolaq Joleq	Tunjung Joleq Papan Puti
				2	Abit	2	Abit	Tunjung Abit
		9	Muara Lawa	1	Dingin	1	Dingin	Benuaq
		10	Jempang	1	Tanjung Isuy	1	Tanjung Isuy	Benuaq Kenohan
				2	Muara Tae	2	Muara Tae	Benuaq Ohoknng Sangoknng
		11	Barong Tongkok	1	Ongko Asa	1	Ongko Asa	Tunjung
				2	Juaq Asa	2	Juaq Asa	Tonyooi
3	Kutai Timur	1	Sandaran	1	Tanjung Mangkalihat	1	Tengar	Dayak Basap
						2	Tonda	Dayak Basap
						3	Labuhan Bilik	Dayak Basap
						4	Labuhan Pinang	Dayak Basap
		2	Busang	1	Long Bentuk	1	Long Bentuk	Dayak Modang Long Way
				2	Mekar Baru	2	Mekar Baru	Kenyah Bakung
				3	Long Lees	3	Long Lees	Kenyah Leppo Bem
				4	Long Nyelong	4	Long Nyelong	Kenyah Leppo Bem
				5	Long Pejeng	5	Long Pejeng	Kenyah Leppo Bem
		3	Muara Ancalong	1	Muara Dun	1	Muara Dun	Dayak Modang Long Way
				2	Senyiur	2	Senyiur	Kutai Senyiur
				3	Long Nah	3	Long Nah	Modang Long Way Lung
				4	Long Tesak	4	Long Tesak	Modang Long Way Lung
		4	Bengalon	1	Tebangan Lembak	1	Tebangan Lembak	Dayak Basap
		5	Muara Wahau	1	Long Wehea	1	Long Wehea	Dayak Wehea
				2	Dabeq	2	Dabeq	Dayak Wehea
				3	Bea Nehas	3	Bea Nehas	Dayak Wehea
				4	Diaq Lay	4	Diaq Lay	Dayak Wehea
				5	Nehes Liah Bing	5	Nehes Liah Bing	Dayak Wehea
				6	Diaq Leway	6	Diaq Leway	Dayak Wehea
		6	Karangan	1	Karangan Dalam	1	Karangan Dalam	Dayak Basap
				2	Karangan Seberang	2	Karangan Seberang	Lebo Tintang
		7	Sangkulirang	1	Tepian Terap	1	Tepian Taraf	Dayak Basap

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
		8	Kombeng	1	Miau Baru	1	Miau Baru	Dayak Kayan Umaq Lekan dan Punan Kelay (RT 10)
				2	Miau Baru Utara	2	Miau Baru Utara	Dayak Kayan Umaq Lekan
		9	Long Mesangat	1	Melan	1	Melan	Modang Long Way Lung
		10	Telen	1	Lung Melah	1	Lung Melah	Kayan Uma Lekan
4	Kutai Kartanegara	1	Kota Bangun	1	Kedang Ipil	1	Kedang Ipil	Kutai Adat Lawas
		2	Loa Kulu	1	Lung Anai	1	Lung Anai	Kenyah Umaq Jalan
				2	Jonggon	2	Jonggon	Basap
		3	Sebulu	1	Lekaq Kidau	1	Lekaq Kidau	Kenyah Lepo Bem
		4	Tabang	1	Ritan Baru	1	Ritan Baru	Dayak Kenyah
				2	Muara Tuboq	2	Muara Tuboq	Punan Bekatan
				3	Long Lalang	3	Long Lalang	Kenyah Umaq Lasan
				4	Muara Tiq	4	Muara Tiq	Punan Lisum
				5	Muara Belinau	5	Muara Belinau	Punan Lisum
				6	Muara Salung	6	Muara Salung	Punan Lisum
				7	Muara Kebaq	7	Muara Kebaq	Punan Lisum
				8	Kampung Baru	8	Kampung Baru	Kenyah Leppo Timey
				9	Uma Bekuai	9	Uma Bekuai	Kenyah Leppo Timey
				10	Uma Dian	10	Uma Dian	Kenyah Leppo Timey
				11	Tabang Lama	11	Tabang Lama	Kenyah Leppo Timey
				12	Muara Pedohon	12	Muara Pedohon	Kenyah Leppo Timey
				13	Bila Talang	13	Bila Talang	Kenyah Leppo Timey dan Leppo Tukung
				14	Uma Tukung	14	Uma Tukung	Kenyah Leppo Tukung
		5	Muara Badak	1	Sungai Bawang	1	Sungai Bawang	Kenyah Umaq Jalan
		6	Muara Wis	1	Engelam	1	Engelam	Tunjung Berambai Engelam
		7	Tenggarong	1	Loa Ipuh Darat	1	Dusun Bensamar	Kutai Bensamar
						2	Dusun Pondok Labu	Benuaq
		8	Kembang Jangut	1	Kelekat	1	Kelekat	Benuaq
				2	Long Beleh Modang	2	Long Beleh Modang	Modang Long Way Lung
		9	Loa Janan	1	Loa Duri Ilir	1	Dusun Putaq	Tonyooi Benuaq
5	Mahakam Ulu	1	Long Apari	1	Long Apari	1	Noha Tibab	Dayak Bahau
						2	Aruan	Dayak Bahau
						3	Pacan Usu	Dayak Bahau
						4	Long Apari	Dayak Penhing
				2	Naha Silat	5	Naha Silat	Dayak Penhing
				3	Naha Buan	6	Naha Buan	Dayak Penhing
				4	Tiong Ohang	7	Tiong Ohang	Dayak Penhing
				5	Tiong Bu'u	8	Tiong Bu'u	Dayak Penhing
				6	Krioq	9	Krioq	Dayak Penhing
				7	Penaneh 1	10	Penaneh 1	Dayak Seputan
				8	Penaneh 2	11	Penaneh 2	Dayak Seputan
				9	Penaneh 3	12	Penaneh 3	Dayak Seputan
		2	Long Pahangai	1	Long Isun	1	Long Isun	Umaaq Suling
				2	Long Pakaq	2	Long Pakaq	Dayak Kayan
				3	Long Tuyoq	3	Long Tuyoq	Dayak Lung Kelat

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
				4	UU Mulang	4	UU Mulang	Dayak Umaaq Lakwe
				5	Datah Naha	5	Datah Naha	Dayak Umaq Tuan
				6	Long Lunuk	6	Long Lunuk	Dayak Umaq Urut
				7	Long Lunuk Baru	7	Long Lunuk Baru	Dayak Umaq Tuan
				8	Long Pahangai 1	8	Long Pahangai 1	Bahau Busang
				9	Long Pahangai 2	9	Long Pahangai 2	Bahau Busang
				10	Urung Ubing	10	Urung Ubing	Bahau Busang
				11	Naha Aruq	11	Naha Aruq	Bahau Busang
				12	Long Pakaq Baru	12	Long Pakq Baru	Dayak Kayan
				13	Delang Kerhong	13	Delang Kerhong	Dayak kayan
		3	Long Bagun	1	Batoq Keloq	1	Bato Keloq	Dayak Kayan & Dayak Bakumpai
				2	Mamahak Ulu	2	Mamahak Ulu	Dayak Kayan & Dayak Bakumpai
				3	Long Merah	3	Long Merah	Dayak Punaan
				4	Rukung Damai	4	Rukun Damai	Dayak Kenyah
				5	Batu Majang	5	Batu Majang	Dayak Kenyah
				6	Long Bagun Ulu	6	Long Bagun Ulu	Dayak Bahau
				7	Long Hurai	7	Long Hurai	Dayak Bahau
				8	Mamahak Besar	8	Mamahak Besar	Dayak Bahau
				9	Ujoh Bilang	9	Ujoh Bilang	Dayak Bahau
		4	Laham	1	Nyaribungan	1	Nyaribungan	Dayak Kayan & Bakumpai
				2	Danum Paroy	2	Danum Paroy	Dayak Kayan & Bakumpai
				3	Muara Ratah	3	Muara Ratah	Dayak Kayan & Bakumpai
				4	Long Gelawang	4	Long Gelawang	Dayak Bahau
				5	Laham	5	Laham	Dayak Bahau
		5	Long Hubung	1	Long Hubung	1	Long Hubung	Dayak Bahau Saq
				2	Matalibaq	2	Matalibaq	Dayak Bahau Saq
				3	Mamahak Teboq	3	Mamahak Teboq	Dayak Bahau Saq
				4	Datah Bilang Ilir	4	Datah Bilang Ilir	Dayak Lepoq Jalan
				5	Datah Bilang Ulu	5	Datah Bilang Ulu	Dayak Lepoq Bakung
6	Paser	1	Batu Sopang	1	Rantau Layung	1	Prayon	Paser
		2	Muara Komam	1	Swan Slutung	1	Mului	Paser
				2	Busuy	2	Busuy	Paser
				3	Binangon	3	Binangon	Paser
				4	Lusan	4	Lusan	Luangan Atang Lusan
				5	Sekuan Makmur	5	Sekuan Makmur	Paser
				6	Prayon	6	Prayon	Paser
		3	Long Ikis	1	Semuntai	1	Semuntai	Paser
				2	Tiwei	2	Tiwei	Paser Adang Tiwei
				3	Long Gelawang	3	Long Gelawang	Paser Adang
		4	Long Kali	1	Kepala Telake	1	Kepala Telake	Paser
				2	Pinang Jatus	2	Liombe	Paser Pias Dayo
				3	Muara Toyu	3	Muara Toyu	Paser Telake

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LOKASI		SUKU/MASYARAKAT ADAT
		5	Batu Engau	1	Kerang Dayo	1	Pasero	Paser
		6	Muara Samu	1	Muara Andeh	1	Muara Andeh	Paring Sumpit
				2	Muara Bintungan	2	Muara Bintungan	Paser
		7	Kuaro	1	Rangan	1	Rangan	Paser Migi
7	Penajam Paser Utara	1	Penajam	1	Sepan	1	Kampung Sepan	Paser Adan
				2	Baluminung	2	Muan	Paser Semunte
				3	Nenang	3	Nenang	Telake
				4	Sotek	4	Sotek	Paser Semunte
				5	Petung	5	Petung	Tunan/Das Tunan
				6	Pantai Lango	6	Pantai Lango	Paser Balik, Paser Pematang
				7	Nipah - Nipah	7	Nipah - Nipah	Paser Pematang
				8	Penajam	8	Penajam	Paser Pematang
				9	Riko	9	Riko	Paser Balik, Paser Telake, Paser Adang
		2	Waru	1	Waru	1	Waru	Paser Telake (Tikas & Nyawo), Paser Adang
				2	Sesulu	2	Uka	Paser Adang
		3	Babulu	1	Babulu Darat	1	Babulu	Paser Telake (Tikas & Nyawo)
		4	Sepaku	1	Sepaku	1	Sepaku	Balik, Paser Telake, Paser Semunte, Paser Mayang
				2	Semoi II	2	Semoi	Balik
				3	Mentawir	3	Kampong Mentawir	Balik
				4	Maridan	4	Maridan	Balik
				5	Pemaluan	5	Pemaluan	Balik
8	Samarinda	1	Samarinda Utara	1	Budaya Pampang	1	Budaya Pampang	Dayak Kenyah Lepok Bakung
9	Bontang	1	Bontang Utara	1	Bontang Kuala	1	Bontang Kuala	Kutai Bontang Kuala
				2	Guntung	2	Guntung	Kutai Guntung

Sumber : DPMPD Provinsi KALTIM, 2025

Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka berperan aktif sebagai garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

d. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dengan pemindahan IKN diperkirakan akan mengubah besaran migrasi penduduk di Kalimantan Timur.

Tabel 2.32. Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk Tahun 2024 (Ribu Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribu Orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
4.045,86	4.267,60	4.478,36	4.677,52	4.864,47	5.038,56

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 5.038,56 ribu orang pada tahun 2029. Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Timur yang cukup besar ini dipengaruhi adanya proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara.

Tabel 2.33. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Ribu Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribu Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	2.093,90	2.204,41	2.309,19	2.407,92	2.500,29	2.585,97
Perempuan	1.951,96	2.063,19	2.169,17	2.269,60	2.364,18	2.452,59
Rasio	107,27	106,84	106,46	106,09	105,76	105,44

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

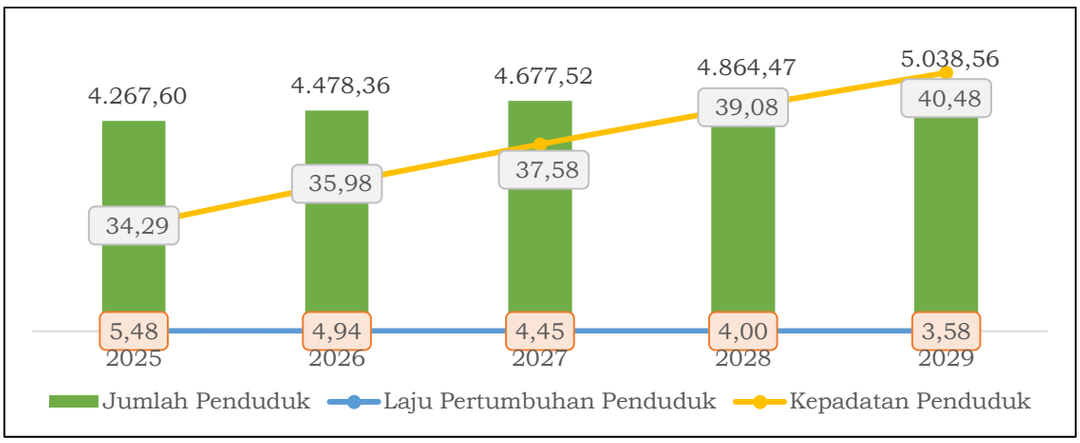

Gambar 2.16. Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pada tahun 2025-2029 merupakan periode pemindahan penduduk tahap 2, sehingga jumlah penduduk diproyeksikan meningkat signifikan seiring pemindahan ASN selesai pada tahap ini sehingga kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga semakin tinggi diproyeksikan mencapai 40,48 per km2 di tahun 2029 dengan laju pertumbuhan penduduk 3,58 persen.

Tabel 2.34. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	**Proyeksi Penduduk (Ribu Orang)**				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	991,85	1.020,93	1.051,98	1.084,36	1.117,28
15-64 Tahun	3.044,56	3.208,60	3.358,32	3.493,90	3.615,67
> 65 Tahun	231,19	248,83	267,22	286,21	305,61
Angka Ketergantungan	40,17	39,57	39,28	39,23	39,35

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 991,86 ribu orang pada tahun 2025 menjadi 1.117,28 ribu orang pada tahun 2029. Pertambahan jumlah penduduk usia muda turut dipengaruhi oleh dinamika penduduk akibat pemindahan IKN yang berasal dari pola fertilitas perempuan pendatang dan jumlah penduduk dependen atau penduduk ikutan usia muda. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 23,24 persen dari total populasi pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 26,18 persen pada 2029. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) diproyeksikan bertambah sampai dengan tahun 2029 mencapai 3.615,67 ribu orang.

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas pada tahun 2029 sekitar 305,61 ribu orang atau sekitar 7,61 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2029, meningkat dari tahun 2025 yang sebesar 5,42 persen. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk lansia dan usia muda masih lebih kecil dibanding pertambahan penduduk usia produktif. Hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur jika dikelola dengan baik.

Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami bonus demografi yang terlihat dari angka ketergantungan yang diproyeksikan sebesar 40,17 persen pada tahun 2025 dan menurun menjadi 39,35 persen pada tahun 2029 dengan capaian di bawah 50 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang tidak dan belum produktif.

Bonus demografi juga dapat diartikan bahwa setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ke depan kemiskinan yang menjadi simbol ketidakberdayaan dalam ekonomi akan semakin menghilang tergantikan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

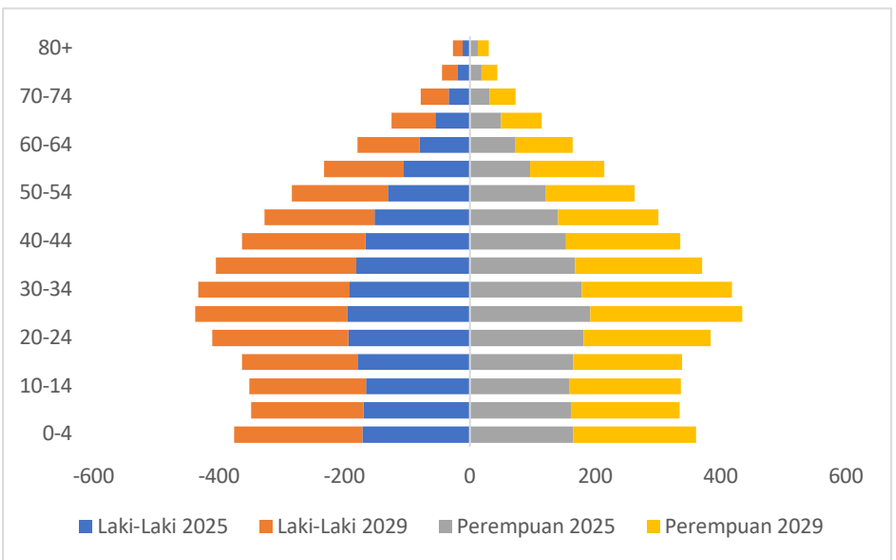

Gambar 2.17. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penambahan penduduk paling banyak pada usia produktif (15-64 tahun) dalam periode 2025-2029. Peningkatan ini merupakan dampak pemindahan penduduk ke IKN, sehingga piramida penduduk Kalimantan Timur cenderung tidak berubah bentuk, dengan proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (60 tahun ke atas).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.

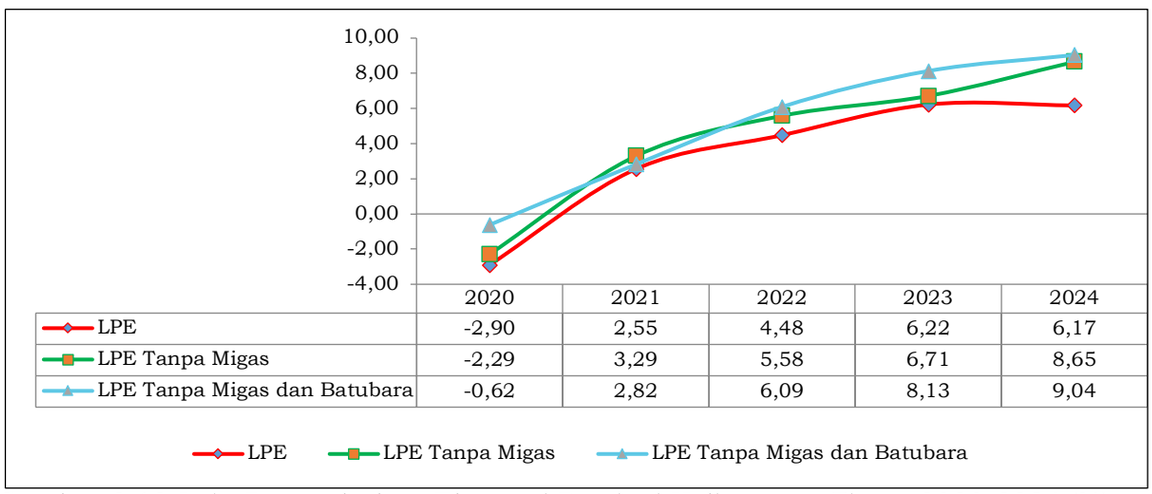

	2020	2021	2022	2023	2024
LPE	-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17
LPE Tanpa Migas	-2,29	3,29	5,58	6,71	8,65
LPE Tanpa Migas dan Batubara	-0,62	2,82	6,09	8,13	9,04

Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur

mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan.

Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 2.35. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,39	1,10	1,38	3,77
2	KUBAR	-2,87	4,19	4,78	5,82	7,57
3	KUKAR	-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
4	KUTIM	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	29,85	30,68
7	MAHULU	-0,22	1,27	0,91	2,80	3,60
8	Balikpapan	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
9	Samarinda	-0,99	2,78	6,60	8,62	8,66
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan.

b. Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

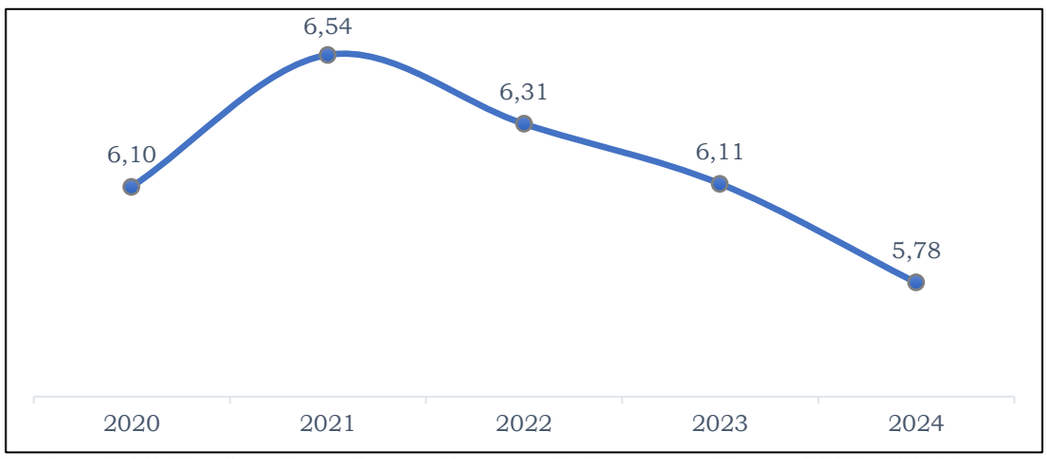

Gambar 2.19.Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi salah satunya melalui Program Intervensi Kemiskinan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kepada tenaga kerja rentan miskin, serta jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.

Tabel 2.36. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
KUBAR	9,29	10,24	10,2	9,72	9,56
KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
PPU	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
MAHULU	11,44	11,9	11,55	11,38	10,75
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,3
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
KALTIM	6,1	6,54	6,31	6,11	5,78

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukan penurunan di Tahun 2024. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,75%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Tabel 2.37. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	26,77	27,56	27,02	26,39	25,28
KUBAR	13,78	15,38	15,38	14,69	14,49
KUKAR	58,42	62,36	62,87	60,86	59
KUTIM	36,98	37,78	36,84	37,04	37,11
Berau	12,3	13,62	13,31	13,26	12,35
PPU	11,93	12,13	11,59	11,19	10,78
MAHULU	3,26	3,18	3,1	3,06	2,9
Balikpapan	17,02	18,53	15,83	14,99	14,53
Samarinda	41,92	42,84	41,95	41,89	37,8
Bontang	7,91	8,41	8,39	7,71	7,11
KALTIM	230,27	241,77	236,25	231,07	221,34

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat dari jumlah obsolutnya penduduk miskin tertinggi ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 59 ribu jiwa, dan Kutai Timur

37,11 ribu jiwa hal ini dikarenakan kondisi wilayah kedua Kabupaten ini yang cukup luas.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.

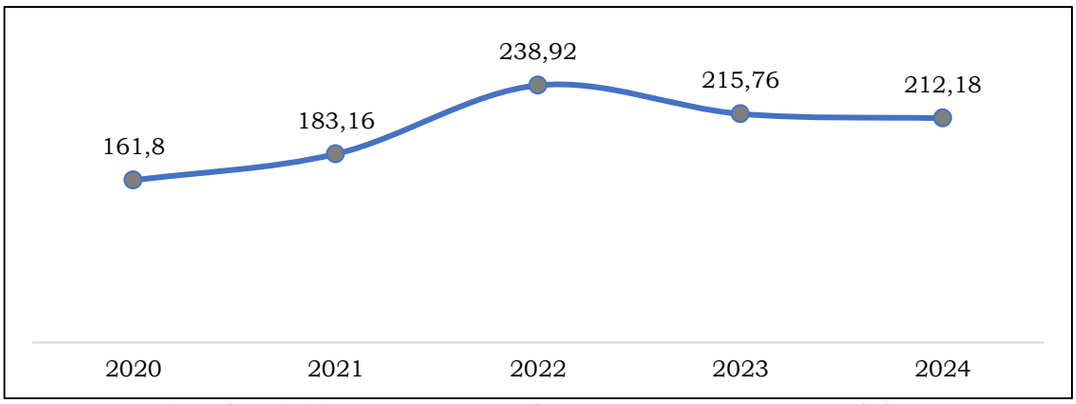

Gambar 2.20.PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Sama halnya dengan Provinsi, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten/Kota rata-rata juga mengalami penurunan kecuali Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.38. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	157,18	193,82	271,26	208,43	193,14
2	KUBAR	158,03	184,71	247,40	222,08	222,07
3	KUKAR	204,50	241,07	322,08	270,72	259,19
4	KUTIM	268,80	310,29	471,27	369,42	344,49
5	Berau	143,67	171,49	236,23	198,53	194,08
6	PPU	50,78	55,87	69,50	87,26	87,14
7	MAHULU	85,38	90,43	95,12	100,94	110,20
8	Balikpapan	151,31	160,30	181,29	201,64	214,11
9	Samarinda	80,36	85,22	98,88	104,97	114,69
10	Bontang	311,88	320,30	344,15	366,46	363,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis keuangan global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.

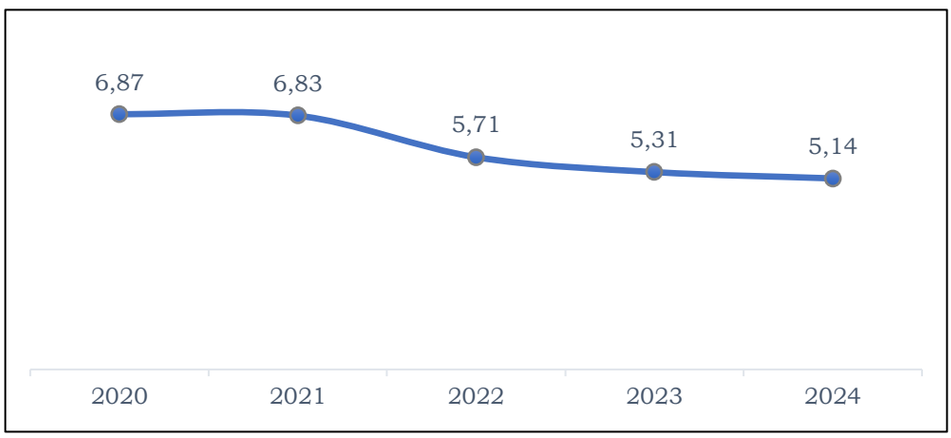

Gambar 2.21.Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 6,87 persen menjadi 5,14 persen di tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan

pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

Tabel 2.39. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	4,52	5,77	4,88	4,72	4,53
KUBAR	4,97	5,14	4,62	6,16	5,58
KUKAR	5,7	5,66	4,14	4,05	4,11
KUTIM	5,45	5,35	6,48	5,93	5,76
Berau	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15
PPU	6,22	2,95	2,12	2,07	2,05
MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,09	2,51
Balikpapan	9	8,94	6,9	6,09	6,22
Samarinda	8,26	8,16	6,78	5,92	5,75
Bontang	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06
KALTIM	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan TPT di tahun 2024. Meningkatnya TPT di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang mencari pekerjaan, hampir selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan yang mengurangi volume pekerjaan, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan pendidikan dan masih mencari pekerjaan. Pada sektor pertanian terjadi pergeseran dari status pekerja bebas di pertanian menjadi buruh dan berusaha sendiri.

e. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

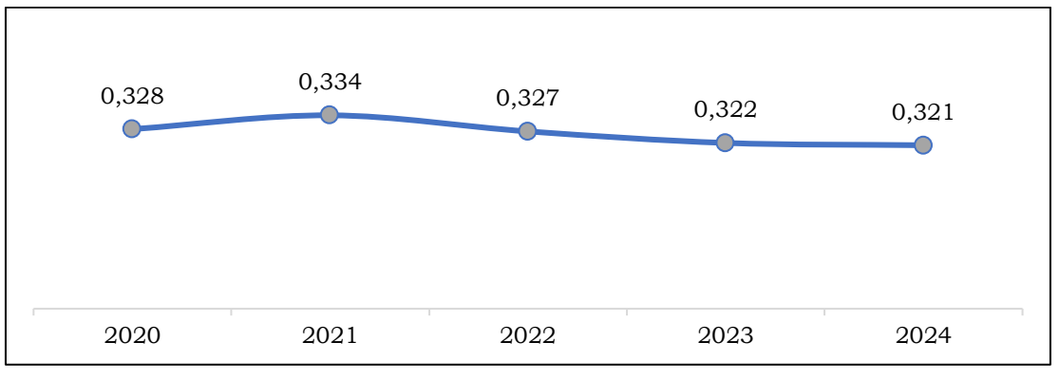

Gambar 2.22. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,328 di tahun 2020 menjadi 0,321 di tahun 2024. Salah satu kondisi meningkatnya indeks gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 hingga 2024 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.40. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	0,288	0,282	0,292	0,271
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,277	0,266
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,284	0,307
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,336	0,283
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,327	0,317
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,299	0,258
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,330	0,285
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
9	Samarinda	0,324	0,322	0,346	0,323	0,330
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,299	0,330

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

f. Indeks Modal Manusia

Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Penggunaan IMM tidak hanya menunjukkan kuantitas namun juga kualitas *outcome* pembangunan manusia.

Indikator IMM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu *survival*, pendidikan dan kesehatan. Skor IMM berkisar dari 0 hingga 1, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya yang akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. IMM Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 0,56, capaian ini berada diatas nasional sebesar 0,54 dan berada pada peringkat ke tujuh tertinggi dibandingkan provinsi yang lain.

2. Kesehatan untuk Semua

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 tahun hingga menjadi 74,94 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun.

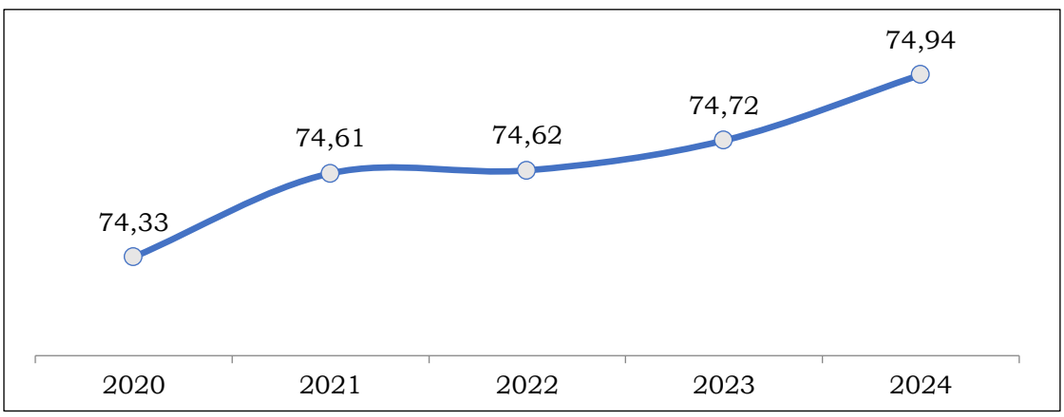

Gambar 2.23. Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya promotif, preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders.

Upaya promotif fokus pada edukasi, gaya hidup sehat, dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Tujuannya adalah membuat orang yang sehat tetap sehat dan mencegah penyakit sejak dini, melalui kegiatan seperti penyuluhan, pendidikan kesehatan di sekolah, program olahraga, dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Adapun upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Kemudian jika melihat data capaian menurut kabupaten/kota pada tahun 2024, Kota Balikpapan menjadi daerah dengan capaian tertinggi Umur Harapan Hidup 75,87 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan capaian terendah Umur Harapan Hidup 73,64 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga umur 73-75 tahun.

Tabel 2.41. Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	73,48	73,77	73,78	73,89	74,10
2	KUBAR	73,37	73,63	73,63	73,73	73,93
3	KUKAR	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
4	KUTIM	73,86	74,21	74,22	74,33	74,55
5	Berau	73,06	73,35	73,35	73,45	73,66
6	PPU	73,57	73,87	73,90	74,03	74,27
7	MAHULU	73,06	73,30	73,32	73,44	73,64
8	Balikpapan	75,20	75,50	75,52	75,64	75,87
9	Samarinda	74,83	75,12	75,15	75,27	75,51
10	Bontang	74,37	74,67	74,69	74,81	75,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah

dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.

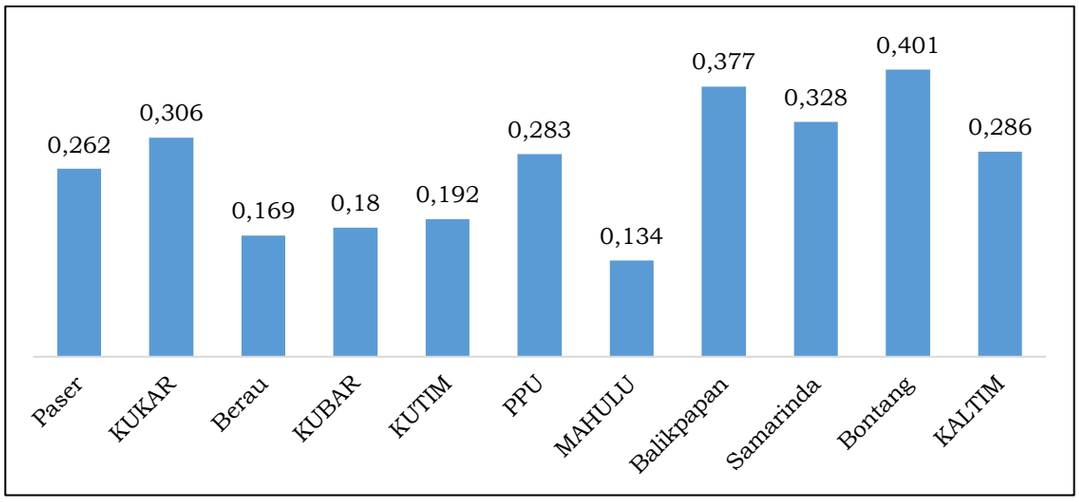

Gambar 2.24. Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan oleh rendahnya capaian pada indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat secara teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai capaian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 rata-rata nilai indeks < 0,5 dan masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

c. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu masih menjadi tantangan utama pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil *long form* sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2023 berfluktuasi, namun mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 83 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024, sebanyak 74 jiwa ibu yang meninggal yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan

dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Berikut data kematian ibu yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.

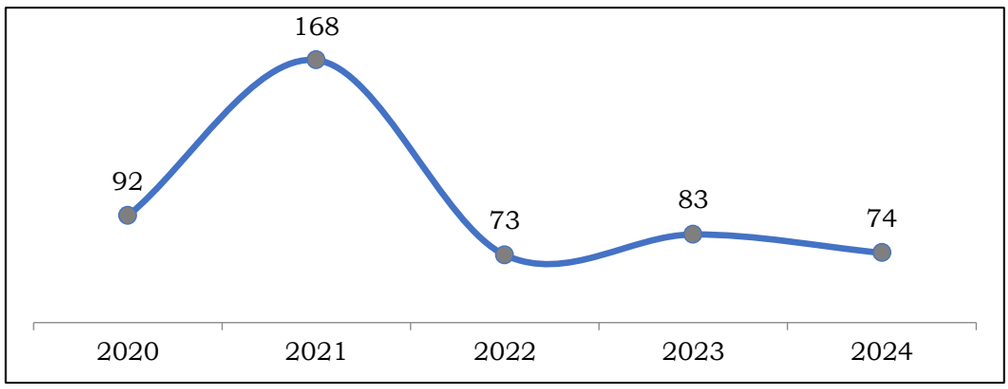

Gambar 2.25. Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)
(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024)

Penyebab utama Angka Kematian Ibu di Indonesia meliputi beberapa hal seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (*preeklamsia*), dan infeksi (*sepsis*). Selain faktor medis, Angka Kematian Ibu juga dipengaruhi oleh faktor non-medis seperti keterlambatan diagnosis dan penanganan, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, minimnya pemeriksaan kehamilan dan kehamilan di bawah umur.

d. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.

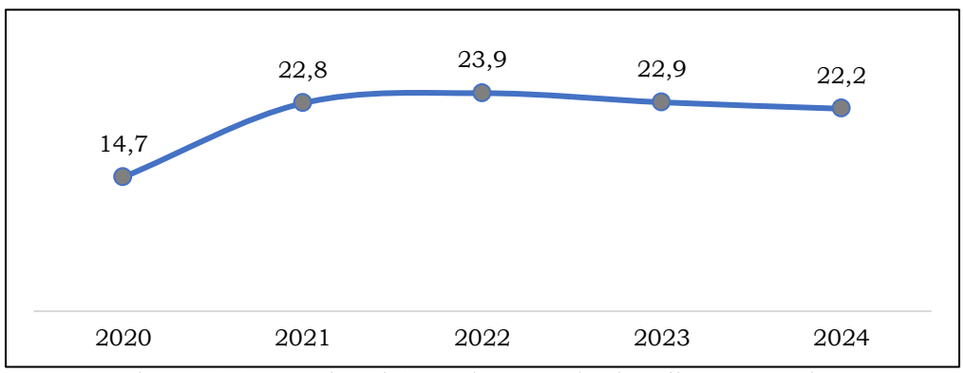

Gambar 2.26. Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025)

Angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur mengalami fluktuatif dan cenderung menurun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. Menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalansi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada urutan ke-22 dan pada tahun 2024 meningkat berada pada peringkat ke-19.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalansi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

e. Insidensi Tuberkulosis

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

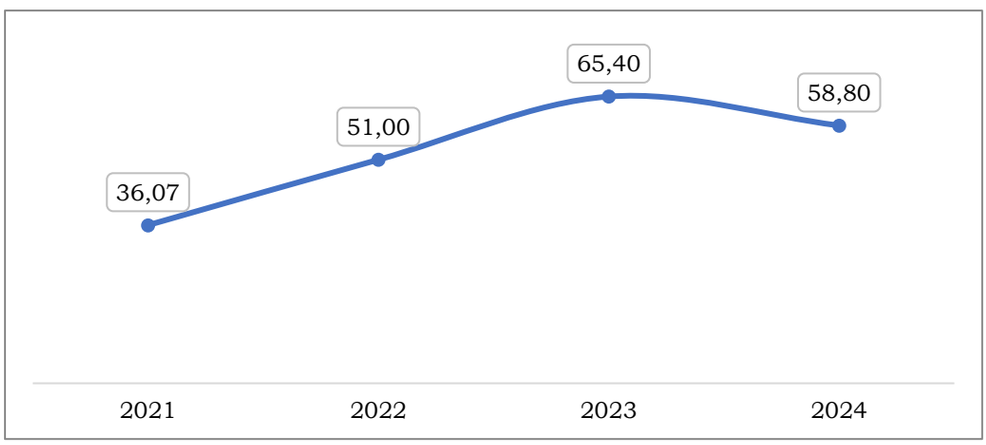

Gambar 2.27. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati *(Case Detection Rate)* di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen dan terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 58,80 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga presentase cakupan menjadi menurun.

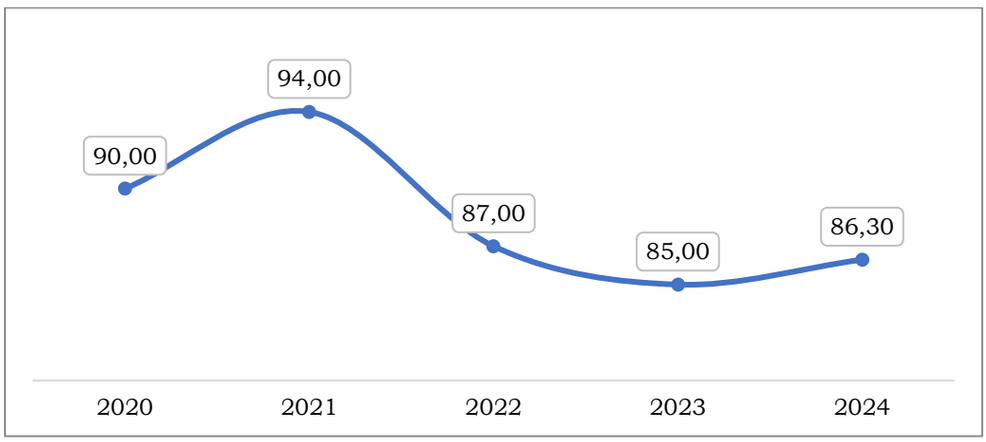

Gambar 2.28.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) di Provinsi KalimantanTimur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberculosis yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberculosis dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberculosis untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberculosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penumuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara

tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberculosis di masyarakat.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2020 berjumlah 3.460.756 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4.123.303 peserta.

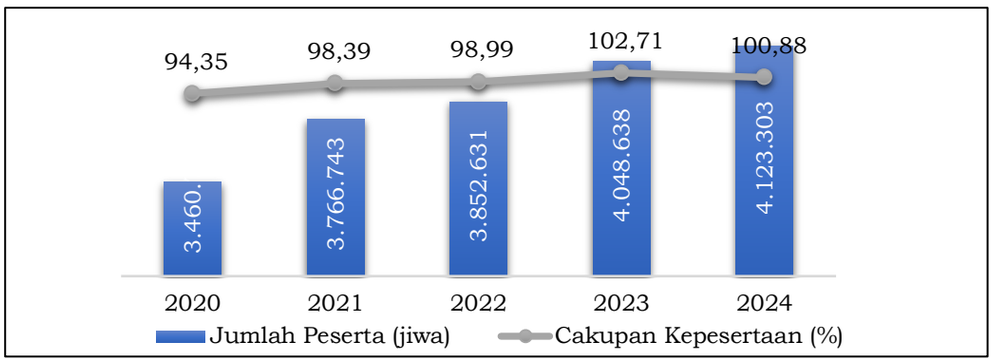

Gambar 2.29.Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2025)

Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, dan berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di Provinsi Kalimantan Timur, capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

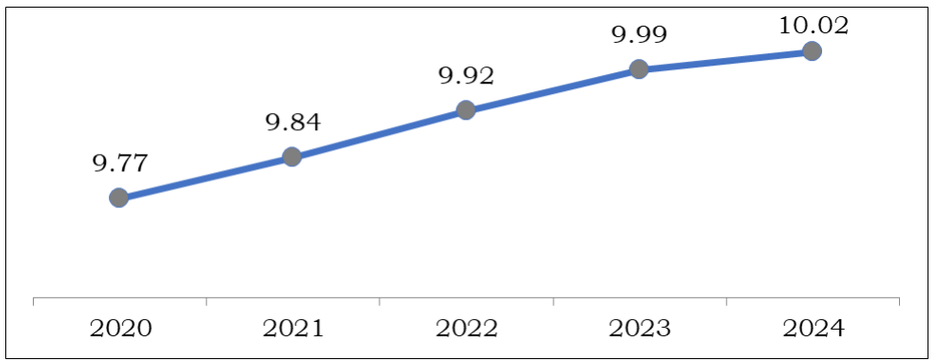

Gambar 2.30. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani adalah hingga jenjang SMA kelas X. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar 12 tahun belum tercapai di Kalimantan Timur, tentunya ini disebabkan masih adanya masyarakat Kalimantan Timur berusia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan wajib belajarnya hingga lulus dari jenjang SMA.

Tentunya kondisi ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan unit sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam kondisi baik untuk menampung anak usia sekolah, hingga kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi anak untuk menamatkan pendidikannya.

Tabel 2.42. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	8,55	8,79	8,80	8,91	8,92
2	KUBAR	8,47	8,70	8,78	8,85	8,89
3	KUKAR	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
4	KUTIM	9,19	9,43	9,44	9,45	9,47
5	Berau	9,52	9,53	9,54	9,56	9,57
6	PPU	8,28	8,36	8,51	8,53	8,57
7	MAHULU	7,97	8,18	8,36	8,49	8,50
8	Balikpapan	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
9	Samarinda	10,48	10,49	10,71	10,93	10,95
10	Bontang	10,79	10,80	10,81	10,92	10,97

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Sama halnya dengan pencapaian IPM, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berkorelasi dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota. Jika dilihat dari pertumbuhan capaian RLS pada Kabupaten/kota tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada pada angka 0,027 tahun, dimana ada 4 Kabupaten yang pertumbuhannya hanya 0,01 tahun yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Mahakam Ulu.

Jika melihat kondisi capaian 4 Kabupaten tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kabupaten Paser dan Berau merupakan daerah paling ujung perbatasan antara Kaltim-Kalsel dan Kaltim-Kaltara yang memiliki permasalahan dalam hal akses pendidikan. Begitu halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan wilayah paling luas di Kalimantan Timur. Namun kondisi Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sedikit perbedaan, dimana Mahakam Ulu memiliki karakteristik wilayah yang lebih sulit serta akses infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga berpengaruh pada sulit dan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Indikator HLS sangat penting dalam menilai kualitas pendidikan dan potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah.

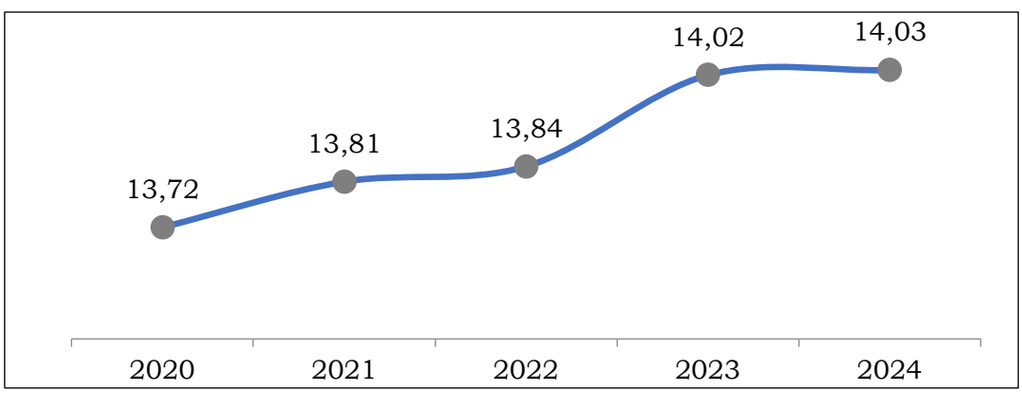

Gambar 2.31. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meski pada tahun 2024 peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian HLS pada Kabupaten/kota juga mengalamai perlambatan. Kondisi ini sama halnya dengan rata-rata lama sekolah yang juga bergantung pada capaian ditingkat Kabupaten/kota.

Tabel 2.43. Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	13,10	13,25	13,27	13,37	13,38
2	KUBAR	12,90	13,02	13,09	13,25	13,36
3	KUKAR	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
4	KUTIM	12,89	12,90	13,00	13,01	13,02
5	Berau	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
6	PPU	12,56	12,57	12,70	12,86	12,87
7	MAHULU	12,51	12,61	12,62	12,63	12,78
8	Balikpapan	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
9	Samarinda	14,89	15,09	15,10	15,39	15,40
10	Bontang	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Meski capaian HLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Terbukti dari 10 Kabupaten/kota hanya ada 2 Kabupaten yang pertumbuhannya mencapai 0,1 tahun yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Bahkan Kota Balikpapan dan Samarinda hanya bertumbuh 0,01 tahun dari tahun 2023. Perlambatan capaian HLS dapat disebabkan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia sekolah, kecukupan guru yang berpengaruh pada pembukaan kelas belajar dengan kualitasnya, kemudahan akses penduduk dari tempat tinggal terhadap fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga hingga budaya masyarakat.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai akses pendidikan di suatu daerah. Terdapat beberapa komponen dalam angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi

kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Masing-masing indikator ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Tabel 2.44. Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah					
17 - 12	99,73	99,6	99,57	99,64	99,69
13-15	99,07	98,9	98,75	98,71	98,73
16-18	81,88	82,1	81,43	81,5	81,84
Angka Partisipasi Kasar					
SD Sederajat	105,75	105,26	105,21	106,46	104,69
SLTP Sederajat	92,17	92,03	91,47	92,28	104
SLTA Sederajat	95,23	95,52	95,09	95,16	99,1
Angka Partisipasi Murni					
SD Sederajat	98,44	98,36	98,45	98,53	96,56
SLTP Sederajat	81,28	81,3	82,65	83,36	83,86
SLTA Sederajat	69	69,29	69,1	69,89	72,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Kalimantan Timur telah terdaftar di sekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan ketepatan umur peserta didiknya. Sedangkan APM yang lebih rendah dibandingkan APK menunjukkan masalah pada ketepatan umur siswa terhadap jenjang pendidikan yang seharusnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, anak yang terlambat dalam mengenyam pendidikan dan anak yang putus sekolah. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hal ini sejalan dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur.

Tabel 2.45. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Paser	1.769	1.376	1.582	4.727

Kabupaten/Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
KUBAR	1.181	859	729	2.769
KUKAR	5.523	2.945	3.627	12.095
KUTIM	9.945	1.996	1.470	13.411
Berau	2.110	1.225	1.163	4.498
PPU	814	749	621	2.184
MAHULU	517	158	114	789
Balikpapan	3.300	1.674	1.149	6.123
Samarinda	4.221	2.076	2.079	8.376
Bontang	841	525	275	1.641
Total	30.221	13.583	12.809	56.613

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, tingginya jumlah siswa yang belum pernah bersekolah, *drop out* dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel 2.46. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Usia				Total
		<7	7-12	13-15	>15	
1	Paser	0	432	471	866	1.769
2	KUBAR	0	342	293	546	1.181
3	KUKAR	0	1.304	1.297	2.922	5.523
4	KUTIM	0	1.452	2.200	6.293	9.945
5	Berau	0	534	561	1.015	2.110
6	PPU	0	225	208	381	814
7	MAHULU	0	140	131	246	517
8	Balikpapan	0	1.218	752	1.330	3.300
9	Samarinda	0	1.506	989	1.726	4.221
10	Bontang	0	189	162	490	841
Total		0	7.342	7.064	15.815	30.221

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah anak yang belum pernah sekolah paling tinggi di antara Kabupaten/kota lain. dengan memiliki wilayah paling luas di Kalimantan Timur, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga memilliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga masyarakat tinggal tersebar dekat pada daerah pertambangan dan perkebunan, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di

daerah tersebut yang penduduknya tidak terkumpul dalam satu wilayah. Selain itu, intervensi untuk anak yang belum pernah bersekolah ini tentunya bergantung pada Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelesaiannya. Dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan intervensi langsung kepada jenjang dasar dan ujian paket.

Tabel 2.47. Angka *Drop Out* (DO) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	ATAS (SMA/SMK)	
1	Paser	0	383	476	517	1.376
2	KUBAR	0	257	269	333	859
3	KUKAR	0	878	973	1.094	2.945
4	KUTIM	0	671	670	655	1.996
5	Berau	0	362	430	433	1.225
6	PPU	0	204	296	249	749
7	MAHULU	0	17	79	62	158
8	Balikpapan	0	382	476	816	1.674
9	Samarinda	0	480	585	1.011	2.076
10	Bontang	0	128	144	253	525
Total		0	3.762	4.398	5.423	13.583

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Berbagai faktor penyebab terjadinya drop out atau putus sekolah anak, seperti kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak lebih memilih untuk bekerja, akses jarak antara rumah dengan sekolah yang begitu jauh, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan hingga budaya masyarakat.

Tabel 2.48. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		Total
		Dasar (SD)	Menengah (SMP)	
1	Paser	690	892	1.582
2	KUBAR	291	438	729
3	KUKAR	1.497	2.130	3.627
4	KUTIM	603	867	1.470
5	Berau	488	675	1.163
6	PPU	275	346	621
7	MAHULU	47	67	114
8	Balikpapan	452	697	1.149
9	Samarinda	889	1.190	2.079
10	Bontang	97	178	275
Total		5.329	7.480	12.809

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Anak lulus yang tidak melanjutkan juga disebabkan oleh faktor yang kurang lebih sama dengan anak yang drop out. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga intervensinya juga bergantung pada keaktifan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C.

Intervensi pemerintah daerah terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

d. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan individu membaca dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan kemampuan numerasi merupakan kemampuan individu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dari sisi kualitas hasil pembelajaran peserta didik, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tabel 2.49. Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	6,72	12,65	32,36	43,53
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum	29,48	40,38	53,89	57,83

Indikator	2021	2022	2023	2024
pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca				
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	0,00	0,00	10,00	0,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	10,00	20,00	40,00	67,51

Sumber: Kemendikdasmen, 2024

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khhusus dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat. Termasuk diantaranya adalah pemenuhan fasiliatas penunjang pembelajaran baik dari buku teks dan non teks, pendukung media pembelajaran siswa, hingga intervensi terhadap peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran distribusi capaian pendidikan di masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Persentase penduduk di Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan SMA/sederajat lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 39,07 persen, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah menjadi jenjang pendidikan yang paling umum di Kalimantan Timur, yang juga dapat diartikan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan menengah sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Tabel 2.50. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Persentase (%)				
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
Paser	8,41	28,51	23,91	32,02	7,14
KUBAR	10,25	27,39	22,77	29,23	10,36
KUKAR	8,68	25,59	23,48	32,73	9,52
KUTIM	9,58	22,76	22,37	36,09	9,20
Berau	7,77	25,79	23,24	30,99	12,21
PPU	13,05	26,13	21,48	31,09	8,25
MAHULU	11,15	29,28	22,86	30,59	6,12
Balikpapan	4,39	13,46	19,96	46,06	16,13
Samarinda	3,08	12,04	19,07	47,73	18,07
Bontang	4,94	13,95	20,85	45,52	14,74
Kalimantan Timur	6,75	19,87	21,51	39,07	12,80

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Proporsi penduduk berumur 15 tahus ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi yakni lulusan perguruan tinggi sebesar 12,80 persen. Rendahnya penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi disebabkan banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan hambatan yang signifikan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi, faktor-faktor seperti biaya pendidikan, kurangnya informasi dan keterbatasan institusi perguruan tinggi di daerah juga menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Samarinda memiliki persentase penduduk tertinggi yang menamatkan perguruan tinggi (18,07 persen), diikuti oleh Balikpapan (16,13 persen) dan Bontang (14,74 persen). Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat persentase terendah, yakni 6,12 persen. hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan institusi pendidikan tinggi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik di perkotaan.

f. Akreditasi sekolah

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana satuan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki fungsi

untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Tabel 2.51. Data Akreditasi Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

PROVINSI				KABUPATEN/KOTA			
JENJANG	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**	**JENJANG**	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**
SLB	11	24	35	SD	1658	273	1931
A	1		1	A	488	120	608
B	7	6	13	B	908	99	1007
BT	1	2	3	BT	4	20	24
C	2	15	17	C	252	33	285
TT		1	1	TT	6	1	7
SMA	144	97	241	SMP	458	247	705
A	88	34	122	A	166	90	256
B	40	33	73	B	206	100	306
BT	3	9	12	BT	6	10	16
C	12	21	33	C	80	47	127
TT	1		1				
SMK	88	131	219				
A	30	18	48				
B	51	67	118				
BT	1	3	4				
C	6	42	48				
TT		1	1				
Total	243	252	495	Total	2116	520	2636

Sumber: BAN-PDM Prov. Kaltim, 2024

Pada jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi, satuan pendidikan di dominasi akreditasi “B” dengan total 41,21%, akreditasi “A” 34,55%, akreditasi C 19,80% dan belum/tidak terakreditasi sebesar 4,44%. Mutu pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Sekolah dengan akreditasi tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari orang tua dan masyarakat, sedangkan sekolah dengan akreditasi rendah atau belum terakreditasi menghadapi tantangan dalam menarik kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pemerataan pendidikan berkualitas juga dapat dicerminkan dari meratanya satuan pendidikan yang memiliki akreditasi tinggi. Dimana komponen yang menjadi penilaian akreditasi adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, iklim lingkungan belajar serta kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik. Upaya

peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur.

g. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga kerja, Tingkat kunjungan masyarakat, Jumlah perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi, serta Ke anggota perpustakaan. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2.52. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,78	17,74	36,06	68,77	78,34

Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2020 IPLM Kalimantan Timur adalah 20,78 dan pada tahun 2024 sebesar 78,34 dan termasuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 IPLM Kalimantan Timur pada kategori posisi rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan ruang gerak seperti mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan formal, perpustakaan, dan bahan bacaan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi/buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide

serta minat dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan budaya membaca.

h. Indeks Literasi Digital

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics* dan *Digital Safety*.

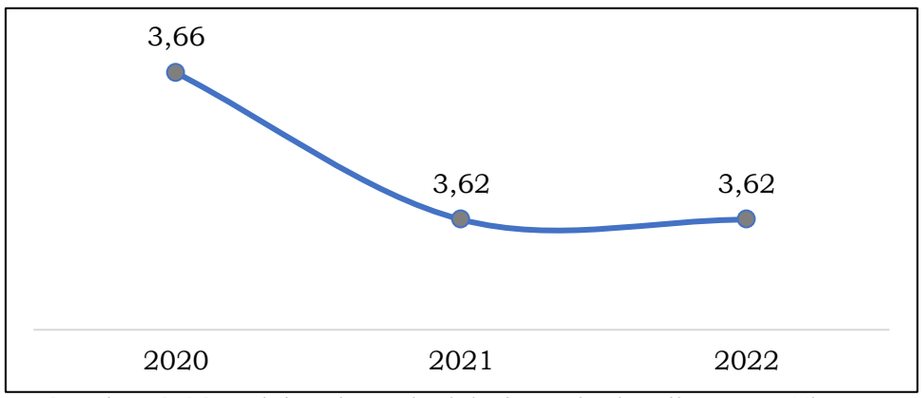

Gambar 2.32. Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus

spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan pelindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 66,54 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

b. Penyandang Disabilitas yang Bekerja

Keberadaan 6 (enam) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja secara setara. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 94 penyandang disabilitas telah mendapatkan fasilitasi melalui ULD ini, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan penempatan kerja, hingga advokasi hak-hak ketenagakerjaan. Kehadiran ULD tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Dengan adanya jaringan ULD di berbagai wilayah, Kalimantan Timur terus memperkuat langkah menuju ketenagakerjaan yang berkeadilan, setara, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Semakin tingginya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, diharapkan semakin banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik dan layak.

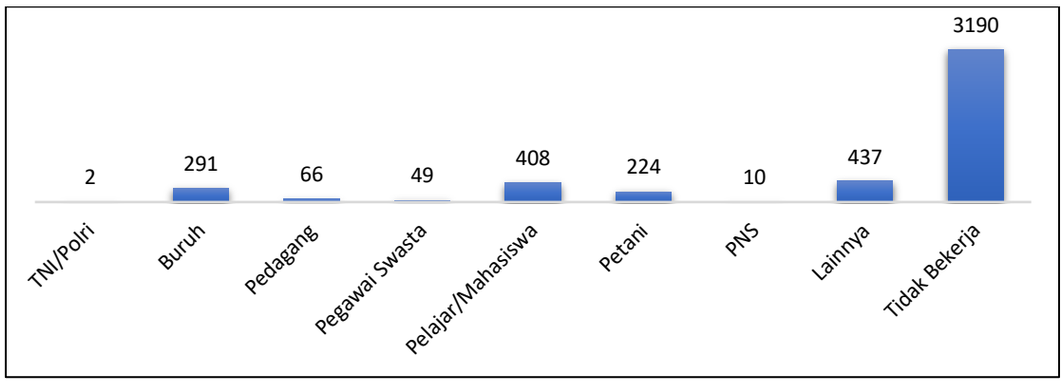

Gambar 2.33. Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa)
(Sumber: Dinsos Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2024, dari total 4.677 penduduk penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, hanya 352 orang (7,30 persen) yang bekerja di sektor formal. Sektor formal tersebut mencakup profesi seperti anggota TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, dan PNS. Sebaliknya, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan pekerjaan lainnya, mencapai 952 orang (20,35 persen). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Kalimantan Timur, sehingga perlu upaya lebih untuk mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam dunia kerja formal.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

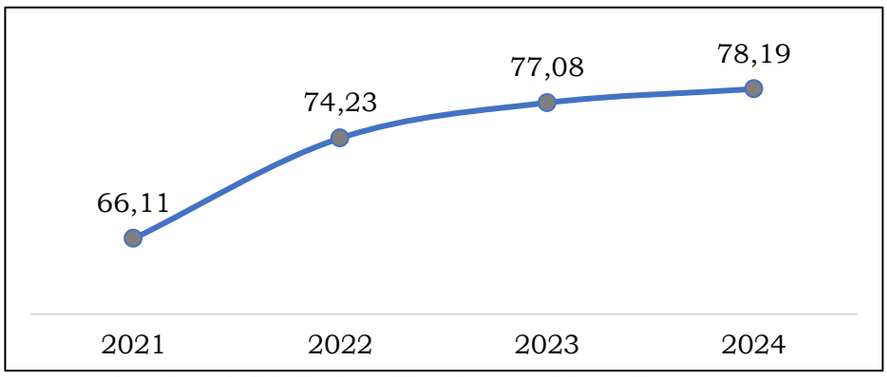

Gambar 2.34. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kementerian Agama RI, 2025)

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,64 di tahun 2024 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (78,64), kesetaraan (78,22) maupun kerja sama (77,72). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

b. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim, dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel 2.53. Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
1	KUBAR	Nasional	Belian Bawo	Ulap Doyo
		Nasional	Hudoq	Sarut
		Nasional	Upacara Adat Kwangkay	
		Nasional	Genikng	
		Nasional	Kelentangan Kutai Barat	
		Nasional	Tari Perang Dayak Bahau Saq	
		Nasional	Ngerangkau	
		Nasional	Sapeq Kalimantan Timur	
		Nasional	Parapm Api Bayaq	
		Nasional	Banaq Sawaq Pelulukng Peruku	
		Nasional	Jomit Burei	
		Nasional	Tari Gantar Kutai Barat	
		Nasional	Pakaatn Nyahuq	
		Nasional	Beliat Sentiu Kutai Barat	
2	KUKAR	Nasional	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panju Selaten)	
		Nasional	Erau Kartanegara	
		Nasional	Ganjur	
		Nasional	Tari Gong	
		Nasional	Suliikng Dewa	
		Nasional	Tari Dewa Memanah	
		Nasional	Datun Ngentau	
		Nasional	Tari Topeng Kemindu	
		Nasional	Belian Namang	
		Nasional	Kanjet Lasan	
		Nasional	Punan Leto	
		Nasional	Gasing Kutai	
		Nasional	Naek Ayun	
		Nasional	Nutuk Beham	
		Nasional	Tarsul Kutai	
		Nasional	Muang Kutai Adat Lawas	
		Nasional	Jatung Utang Kalimantan Timur	
		Nasional	Kuda Gepang Kutai Kartanegara	
		Nasional	Mecaq Undat	

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
		Nasional	Sangkoh Kutai Kartanegara	
		Nasional	Gambus Kutai Kartanegara	
		Nasional	Tingkilan Kutai Kartanegara	
3	KUTIM	Nasional	Lom Plai	
		Nasional	Blontang Kalimantan Timur	
		Nasional	Bekenjong	
4	Paser	Nasional	Ronggeng Passer	Petis Udang Paser
		Nasional	Ngarang	
		Nasional	Pentengan Gambus Paser	
		Nasional	Besoyong	
		Nasional	besembur Paser	
		Nasional	Gendang Agong Paser	
5	PPU	Nasional	Betore	
		Nasional	Tambak Pulut Paser	
6	Samarinda	Nasional		Sarung Tenun Samarinda
7	Kalimantan Timur	Nasional		Mandau Kalimantan Timur
		Nasional		Rumah Panjang Dayak
		Nasional		Pakaian Kulit Kayu

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Pendokumentasian dan pemajuan OPK ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal, memperkaya khasanah kebudayaan nasional, serta menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 55,47 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023. Capaian IPK Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.

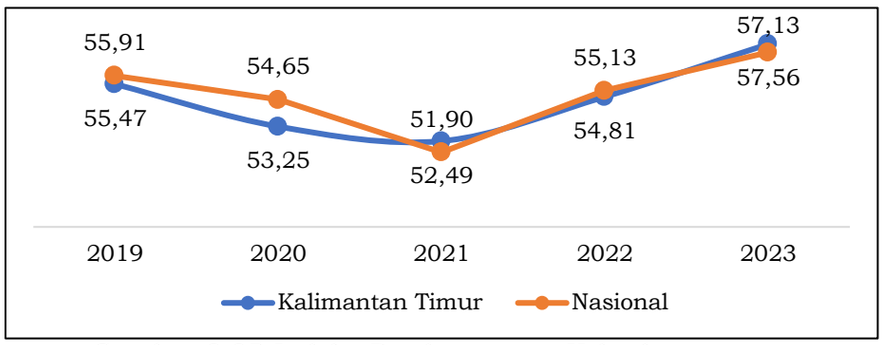

Gambar 2.35. Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2019–2023
(Sumber: KEMENBUD, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.

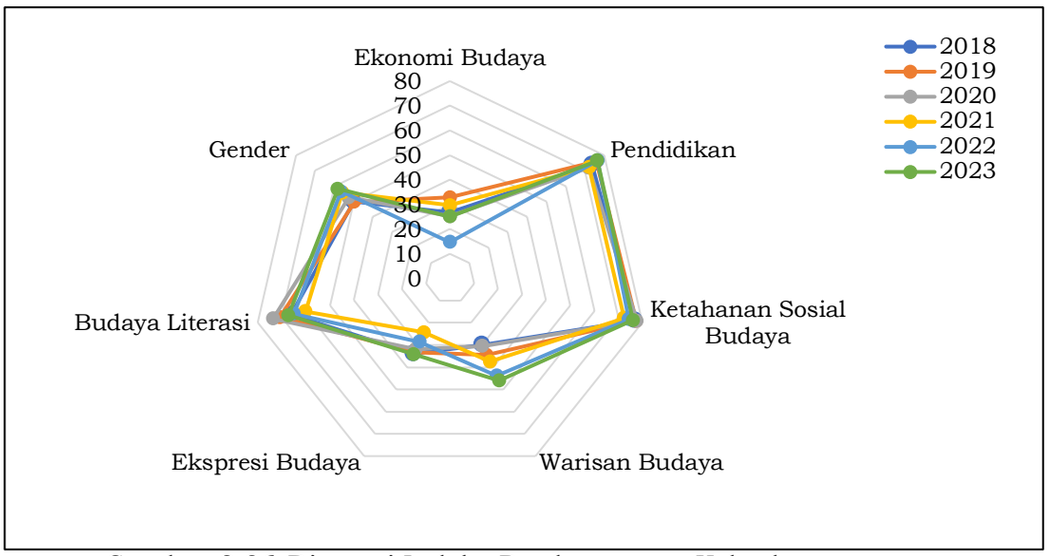

Gambar 2.36. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023
(Sumber: KEMENBUD, 2024)

Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak (IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.

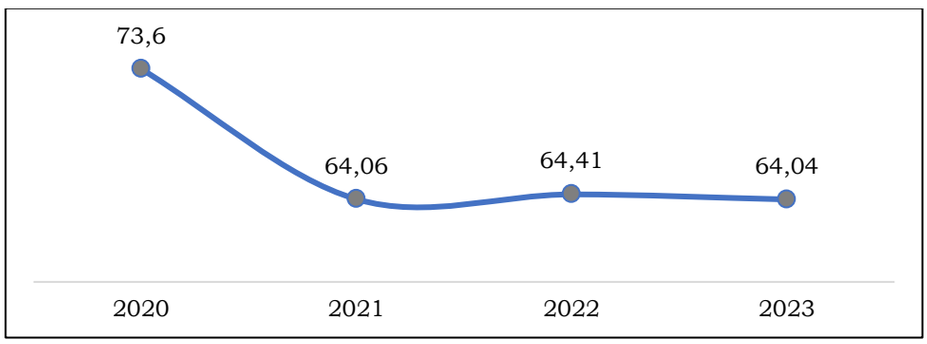

Gambar 2.37. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023
(Sumber: Kemenpppa RI, 2025)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Turunnya IPA di tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya capaian pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Kondisi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai strategi implementatif dan

komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian IPA Kalimantan Timur.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).

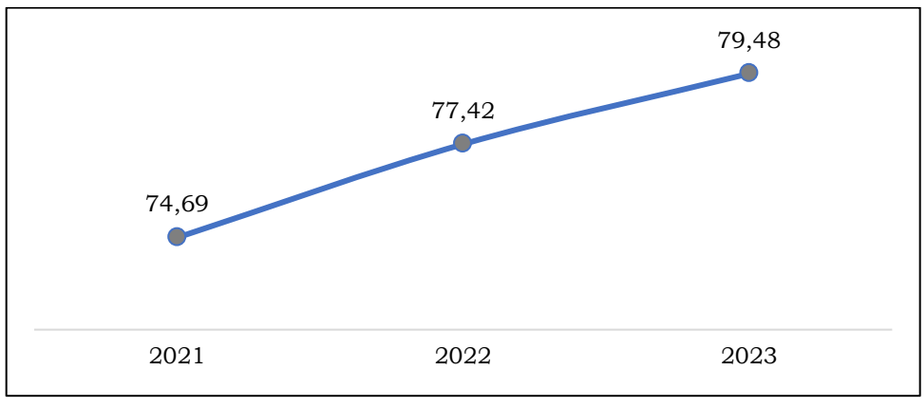

Gambar 2.38. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
(Sumber: Kemenppa, 2025)

IKK Kalimantan Timur termasuk kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK dengan capaian 79,48 pada tahun 2023. Meskipun nilai IKK di tahun 2023 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya *Prevalence of Undernourishment* (PoU) semua umur yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi, persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak-anak dan lain-lain.

Kedepannya IKK akan menjadi turunan dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK adalah alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, IPKK memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan keluarga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan. IPKK disusun demi memenuhi hak

pengasuhan anak dan mewujudkan keluarga berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. IPKK akan menjadi ukuran atau indikator dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

c. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

3 (tiga) dimensi pembentuk untuk perhitungan iBangga yaitu Dimensi Ketentraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan Kesehatan, jaminan keuangan dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan keluarga, dan akses informasi. Dimensi kebahagian dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.

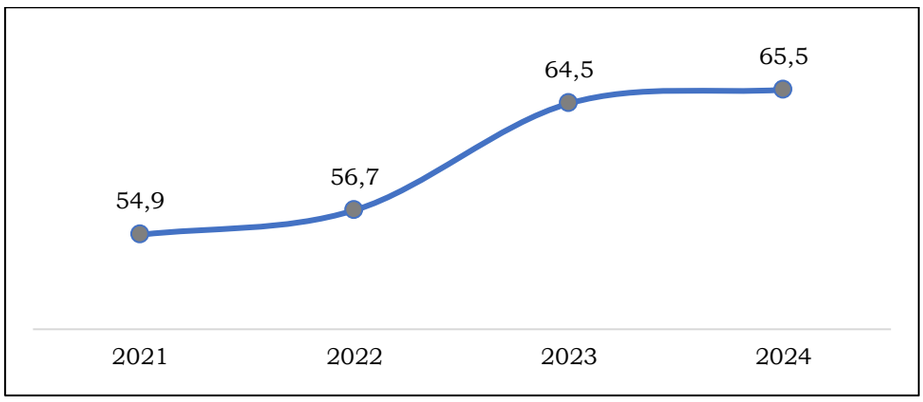

Gambar 2.39. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: BKKBN, 2025)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 65,5 di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan perbaikan dalam standar hidup, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi,

Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbaikan kesetaraan gender. Dengan kata lain, tingkat pencapaian kesetaraan gender di Kalimantan Timur relatif semakin baik.

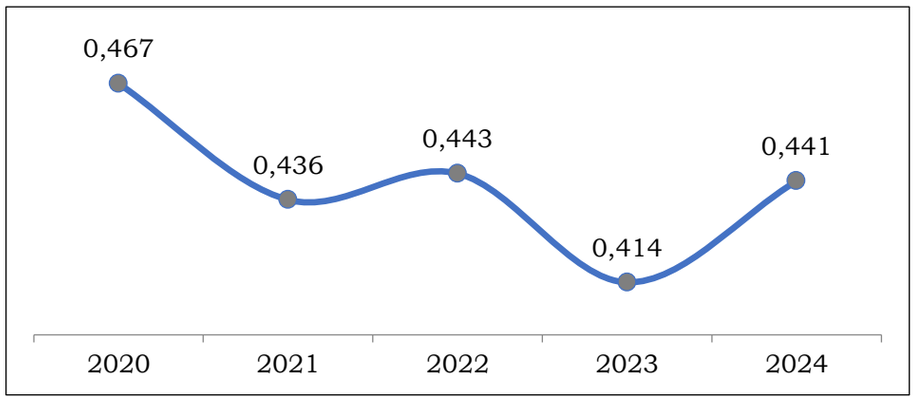

Gambar 2.40. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dibandingkan dengan nilai IKG tahun 2020, penurunan nilai IKG Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perbaikan di hampir seluruh indikator pada ketiga dimensi pembentuk. Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan nilai IKG yang terutama disebabkan oleh menurunnya persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, sedangkan indikator lainnya menunjukkan perbaikan, terutama pada dimensi tenaga kerja yang meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.54. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,549	0,511	0,528	0,489	0,527
2	KUBAR	0,484	0,501	0,490	0,491	0,477
3	KUKAR	0,556	0,511	0,540	0,490	0,439
4	KUTIM	0,530	0,518	0,552	0,532	0,517
5	Berau	0,493	0,467	0,380	0,502	0,421
6	PPU	0,438	0,572	0,527	0,544	0,474
7	MAHULU	0,406	0,449	0,421	0,362	0,339
8	Balikpapan	0,297	0,246	0,344	0,178	0,313
9	Samarinda	0,311	0,222	0,197	0,237	0,243
10	Bontang	0,235	0,348	0,253	0,314	0,313
Kalimantan Timur		0,467	0,436	0,443	0,414	0,441

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2024, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 0,517, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Samarinda dengan nilai 0,243. Rendahnya ketimpangan di Samarinda dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.55. Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024

Dimensi/ Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,111	0,085	0,089	0,069	0,066
MHPK20	Perempuan	0,269	0,267	0,265	0,255	0,258
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	81,82	79,63	80,00	78,18	87,27
	Perempuan	18,18	20,37	20,00	21,82	12,73
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	56,35	56,59	50,12	50,68	50,23
	Perempuan	43,36	46,36	50,12	50,68	50,23
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	81,52	81,35	82,74	82,82	83,75
	Perempuan	47,96	48,20	45,17	46,86	49,07

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, serta dimensi pasar tenaga kerja. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, indikator yang digunakan hanya berfokus pada penduduk perempuan, sedangkan dua dimensi lainnya menggunakan perbandingan indikator antara penduduk laki-laki dan perempuan.

e. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

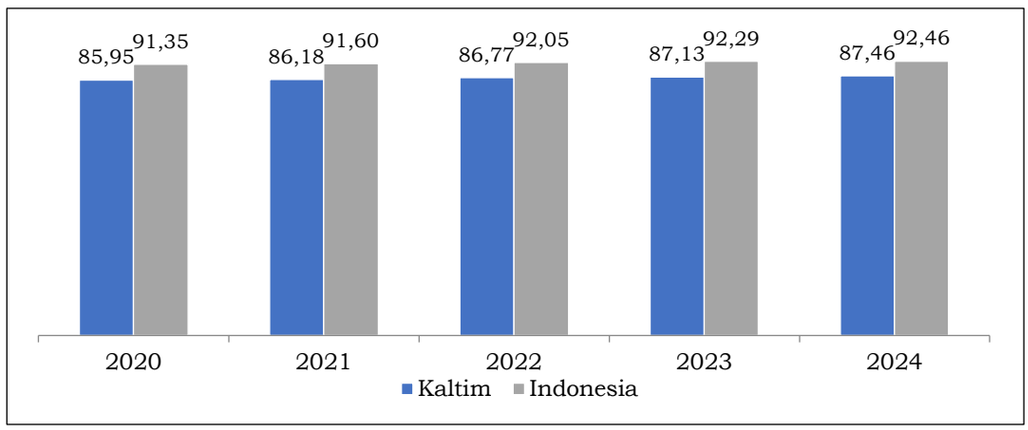

Gambar 2.41. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020 nilai IPG Kalimantan Timur sebesar 85,95 dan meningkat menjadi 87,46 di tahun 2024. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

Tabel 2.56. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	76,62	76,90
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,19	14,21
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,29	9,82
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	20,76	8,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan

komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel 2.57. Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	71,35	71,49	72,27	73,15	74,03
2	KUBAR	84,09	84,67	85,02	85,73	86,23
3	KUKAR	79,20	79,61	80,30	81,08	81,71
4	KUTIM	76,63	76,95	77,67	78,46	79,10
5	Berau	87,71	88,08	88,08	88,43	88,88
6	PPU	86,68	86,97	87,23	87,41	87,80
7	MAHULU	81,07	81,92	82,60	83,28	83,89
8	Balikpapan	90,24	90,48	90,59	90,80	91,04
9	Samarinda	89,82	89,90	90,40	90,68	91,01
10	Bontang	87,29	87,66	88,05	88,34	88,84
Kalimantan Timur		85,95	86,18	86,77	87,13	87,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 91,04 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 74,03 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Rendahnya IPG di Kabupaten Paser disebabkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan yang hanya sebesar 3,39 juta rupiah pada tahun 2024.

Komitmen nyata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara gender ditegaskan melalui penetapan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai wadah koordinatif yg berperan strategis dalam memastikan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sebagai implementasi nyata dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengintegrasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam system perencanaan dan penganggaran daerah. Penerapan ARG memastikan bahwa setiap

alokasi anggaran, baik dalam APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, telah melalui analisis gender untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Langkah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan porsi anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja agar memberikan manfaat yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan ditandai dengan diraihnya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya pada tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana penghargaan ini diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagai sebuah pengakuan atas upaya strategis dan terstruktur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

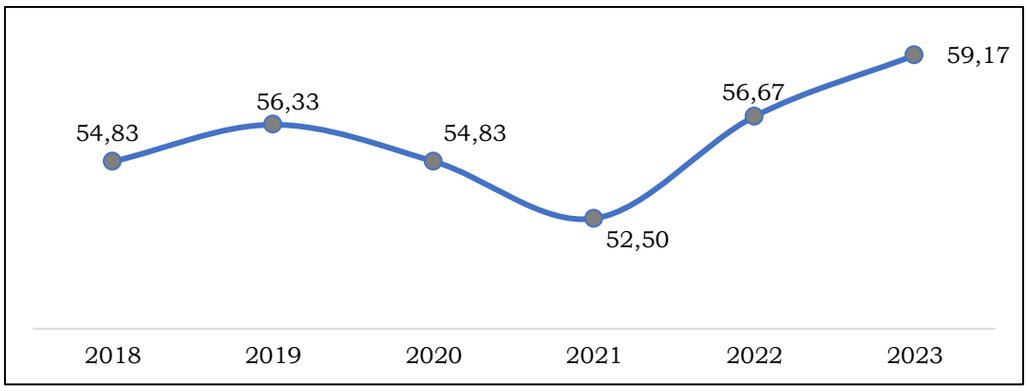

Gambar 2.42. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023
(*Sumber: BAPPENAS, 2024*)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami

peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

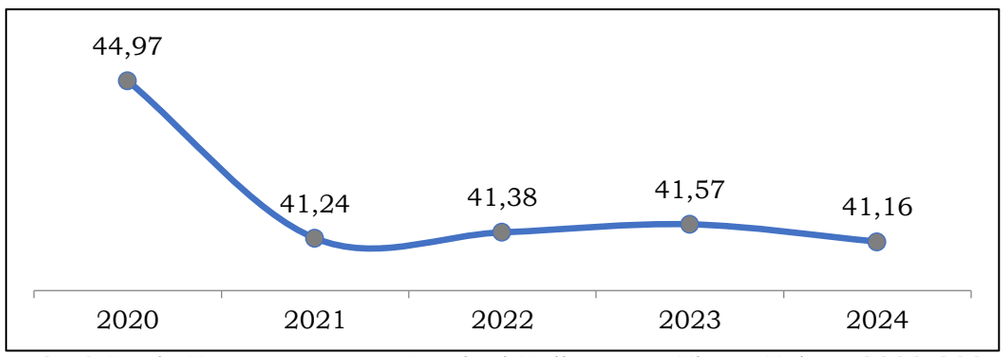

Gambar 2.43. Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 41,16 pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

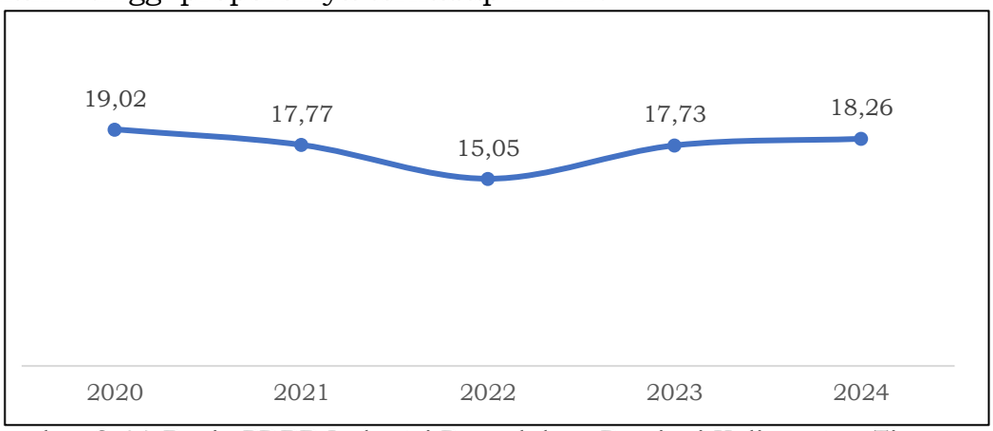

Gambar 2.44. Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio PDRB industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 18,26 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur, seperti smelter nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pabrik Semen di Kabupaten Kutai Timur dan Amonium Nitrat di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

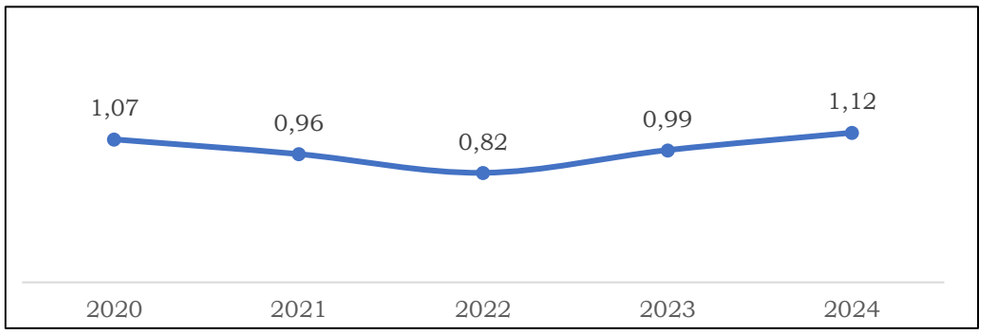

Gambar 2.45. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 1,12 persen di Tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2024 disebabkan adanya pelaksanaan acara-acara besar di Kalimantan Timur pada Tahun 2024 seperti perayaan HUT RI di IKN, MTQ Nasional ke XXX, *East Borneo Internasional Folklore Festival* (EBIFF), dan peningkatan MICE yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini secara beriringan saling memperkuat dan menciptakan sinergi positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berperan sebagai pendorong utama yang menggerakan sektor ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif pun turut menambah nilai tambah bagi sektor pariwisata.

Tabel 2.58. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020 – 2024 (orang)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	32.965	89.931	118.045	105.838	131.346
2	KUBAR	25.929	20.218	103.435	145.795	147.634
3	KUKAR	692.689	515.471	1.041.254	1.530.444	1.215.549
4	KUTIM	40.129	103.770	107.006	212.959	381.133
5	Berau	127.176	125.520	397.054	420.926	552.920
6	PPU	20.263	114.869	164.532	859.041	497.438
7	MAHULU	2.596	5.590	7.789	8.757	16.317
8	Balikpapan	1.072.569	1.306.225	1.748.085	2.534.015	2.633.919
9	Samarinda	654.984	742.844	2.338.341	3.119.216	2.538.018

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
10	Bontang	215.029	156.212	270.167	305.924	1.268.702
Kalimantan Timur		2.884.329	3.180.650	6.295.708	9.242.915	9.382.976

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025

Pada tahun 2019, pariwisata Kalimantan Timur berada dalam kondisi yang stabil dengan jumlah wisatawan yang tinggi, baik dari mancanegara maupun domestik. Namun, pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan pembatasan perjalanan internasional dan domestik membuat sektor pariwisata mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan. Kemudian menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan dari 2020 hingga 2024 seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Jumlah wisatawan Nusantara meningkat drastis dari 2,88 juta (2020) menjadi 9,38 juta (2024), dengan Balikpapan dan Samarinda sebagai destinasi utama. Peningkatan terbesar terjadi setelah 2021, seiring pemulihan pasca-pandemi.

Tabel 2.59. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020 – 2024 (orang)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-	1	1	28	-
2	KUBAR	28	5	243	158	168
3	KUKAR	557	43	632	1.530	3.803
4	KUTIM	365	108	152	805	406
5	Berau	220	30	283	1.666	4.294
6	PPU	26	-	2	40	38
7	MAHULU	5	-	622	708	81
8	Balikpapan	16.510	17.200	11.704	24.511	36.450
9	Samarinda	2.075	441	1.418	6.818	8.281
10	Bontang	-	-	1.450	1.564	1.484
Kalimantan Timur		19.786	17.828	16.507	37.828	55.005

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025

Wisatawan mancanegara juga mengalami pertumbuhan, meski dengan fluktuasi. Setelah penurunan akibat pandemi, kunjungan naik dari 16,51 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 55 ribu orang pada tahun 2024, dengan Balikpapan sebagai tujuan utama. Namun, beberapa daerah seperti Mahakam Ulu dan Paser masih memiliki jumlah wisatawan yang rendah.

Wisatawan domestik mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan wisatawan mancanegara, menunjukkan bahwa pariwisata dalam negeri menjadi motor utama pemulihan sektor ini. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan

Nasional (IPKN) Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat keempat se-Indonesia dengan nilai 4,54. (2022: 14, 2023: 10, 2024: 4).

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kalimantan Timur pada Tahun 2024 sebesar 5,67 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,61 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat fokus pada pengembangan subsektor yang sudah dominan seperti kuliner dan fesyen untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Subsektor kriya dan fesyen menunjukkan bahwa produk-produk kreatif berbasis budaya lokal memiliki pasar yang cukup besar, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor produk kreatif. Di sisi lain, subsektor yang masih kecil seperti aplikasi, *game developer*, dan film, animasi, video perlu mendapatkan perhatian lebih melalui insentif, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Subsektor seperti arsitektur, desain komunikasi visual, dan periklanan mungkin memerlukan program khusus untuk meningkatkan kontribusinya.

4) Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 2,04 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 3,61 persen.

Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

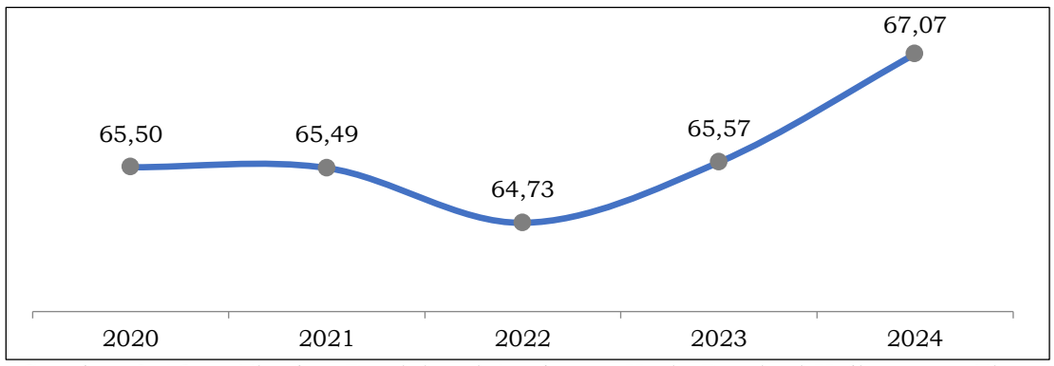

Gambar 2.46. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesetaraan gender dapat digambarkan melalui keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah TPAK perempuan.

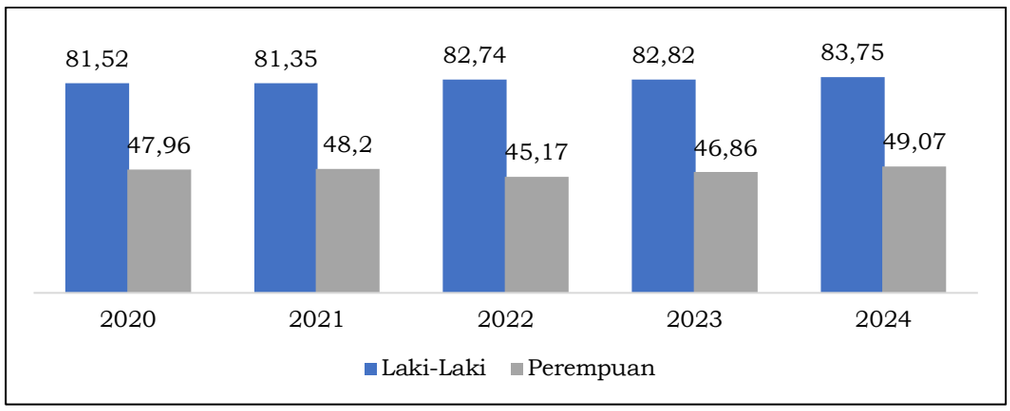

Gambar 2.47.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020–2024 angka TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan TPAK perempuan. Angka TPAK perempuan mengalami tren peningkatan di sepanjang tahun 2020–2024. Namun, pada tahun 2022 angka TPAK mengalami penurunan menjadi 45,17 persen. Hal ini disebabkan oleh pergeseran struktur angkatan kerja perempuan akibat dampak negatif pandemi Covid-19, dimana banyak yang memutuskan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, angka TPAK perempuan kembali meningkat di tahun 2024. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kalimantan Timur terus meningkat, kesenjangan dengan TPAK laki-laki masih signifikan. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk sepenuhnya masuk ke pasar kerja, di mana ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perempuan masih belum memadai.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 25.155 orang, dimana 2.912 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 6.232 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan

sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi serta untuk meningkatkan profesionalisme pekerja konstruksi, menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap tahap pembangunan.

6) Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Status pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara pekerja dan tempat kerjanya yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

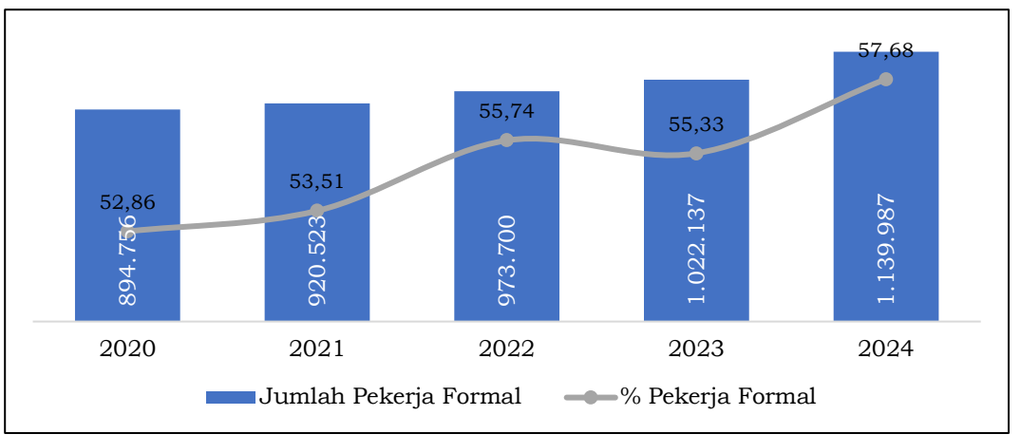

Gambar 2.48.Jumlah dan Rasio Pekerja Formal
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah pekerja formal Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pekerja formal di Kalimantan Timur tahun 2024 didorong oleh pembangunan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan RDMP Balikpapan, serta tumbuhnya sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan yang menyerap banyak tenaga kerja bergaji tetap. Selain itu, program pelatihan vokasi dan pemagangan yang dilakukan pemerintah turut meningkatkan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja ke sektor formal.

7) Proprosi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kontribusi sektor UKM terhadap perekonomian daerah. Pergerakan indikator ini dapat mencerminkan dinamika iklim usaha, keberhasilan program pemberdayaan, serta efektivitas kebijakan fasilitasi UKM yang diterapkan selama periode waktu tertentu.

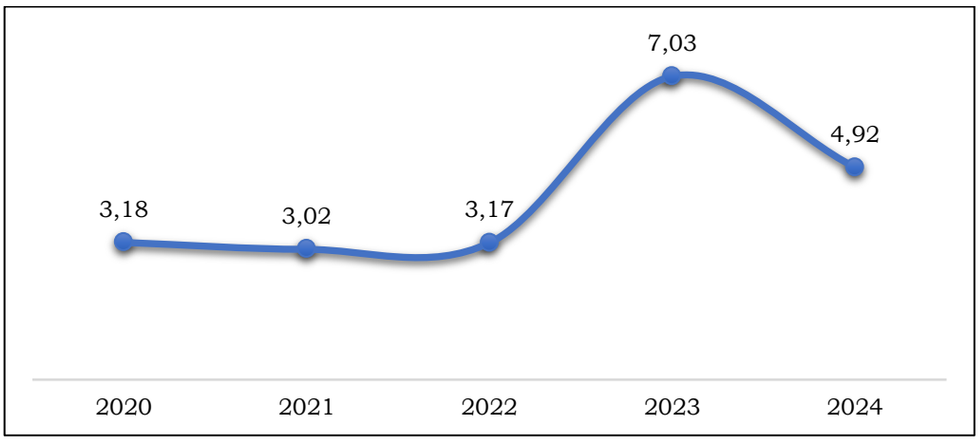

Gambar 2.49. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,03 persen pada tahun 2023 yang merupakan hasil dari program pemulihan ekonomi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, dan peningkatan literasi digital pelaku UKM. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 4,92 persen. Perbedaan angka ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja sektor UKM, melainkan karena adanya perbedaan sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator pada tahun tersebut dan memengaruhi hasil akhir capaian. Selama 5 tahun terakhir, proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Peningkatan proporsi jumlah UKM sebesar 4,69 persen di tahun 2024 ini menandakan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di sektor non pertanian.

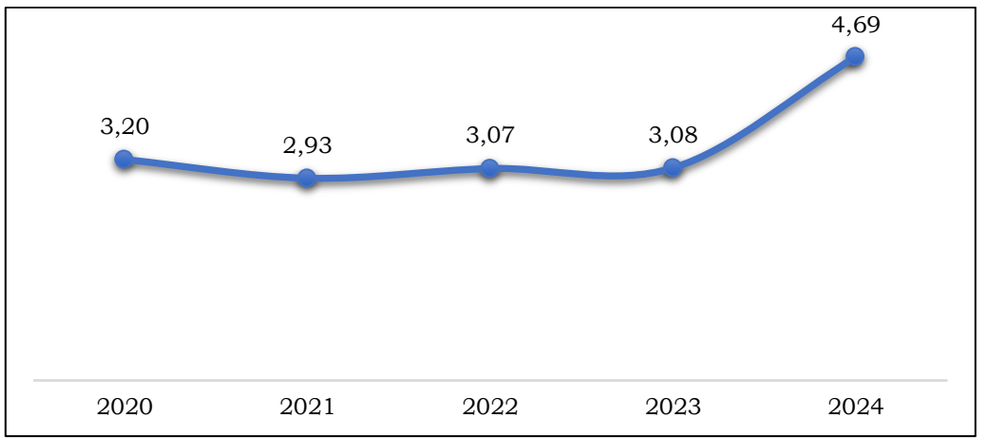

Gambar 2.50. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Fenomena ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja dan dukungan kebijakan yang lebih efektif terhadap sektor usaha kecil dan menengah di Kalimantan Timur melalui program pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Upaya penguatan kapasitas dan daya saing usaha kecil dan menengah perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kontribusi dalam perekonomian daerah.

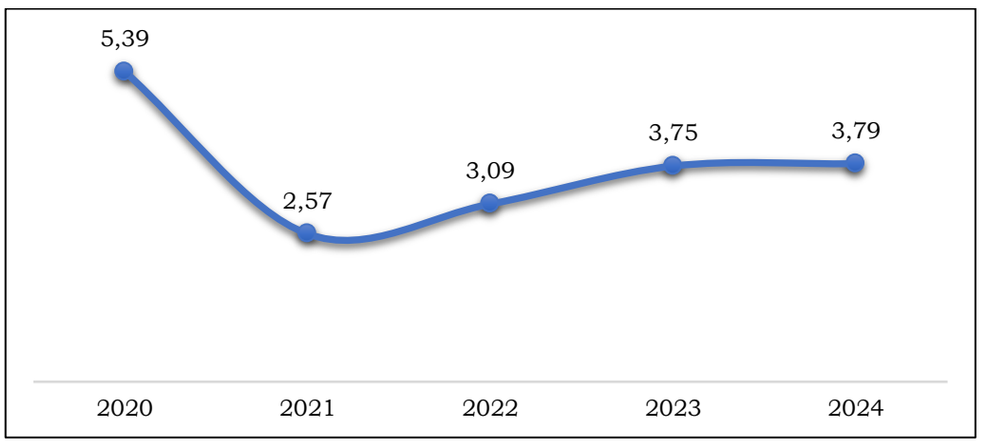

Gambar 2.51. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2020 proporsi jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,39 persen, kemudian mengalami penurunan cukup tajam menjadi 2,57 persen pada tahun 2021 akibat dampak pandemi dan melemahnya aktivitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, perbaikan tren mulai terlihat sejak tahun 2022, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 3,79 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah IKM

sedang berada pada fase pemulihan yang masih berlangsung, di mana kapasitas produksi dan kemandirian usaha mulai menguat terhadap kondisi ekonomi baru, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha. Untuk mempercepat pemulihan diperlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan daya saing, inovasi produk, dan kolaborasi dengan sektor industri besar, agar dapat meningkatkan kontribusi sektor IKM dalam perekonomian daerah.

8) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.

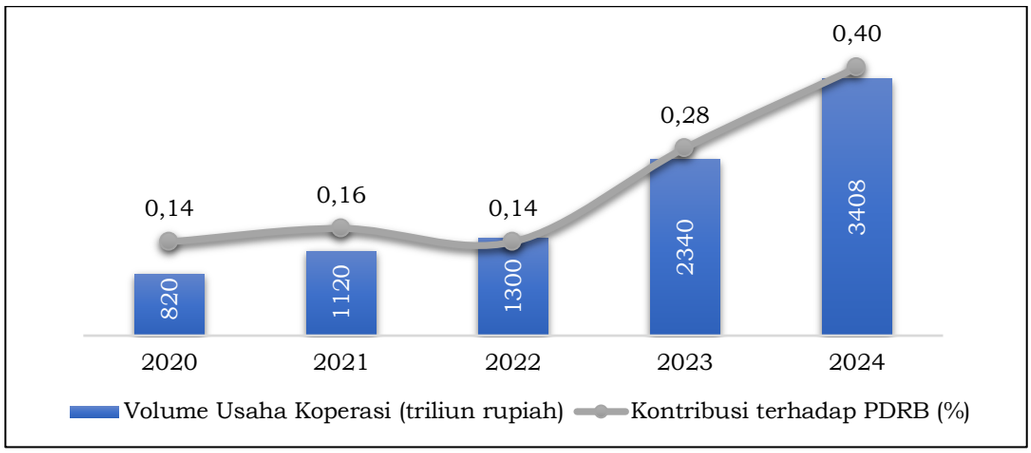

Gambar 2.52. Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3,41 triliun rupiah. Seiring dengan hal tersebut, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,40 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

9) *Return on Asset* (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) menjadi indikator penting untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menunjukkan seberapa baik manajemen BUMD menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi

menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah bisa menjadi tanda adanya inefisiensi atau aset yang tidak produktif.

Tabel 2.60. *Return on Asset* (ROA) BUMD (persen)

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (persen)
2020	346.626.978.618	32.093.363.045.420	1,08
2021	548.298.971.125	35.291.428.257.166	1,55
2022	644.044.558.425	44.050.119.950.096	1,46
2023	709.620.264.375	51.597.214.487.495	1,38
2024	736.806.278.813	53.415.438.356.665	1,38

Sumber: Biro Ekonomi Setda Provinsi KALTIM, 2025

Secara keseluruhan, total ROA gabungan dari semua perusahaan BUMD menunjukkan penurunan dari 1,55 persen pada tahun 2021 menjadi 1,38 persen pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan laba bersih, pertumbuhan total aset yang cepat tidak diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan aset di beberapa perusahaan.

10) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.

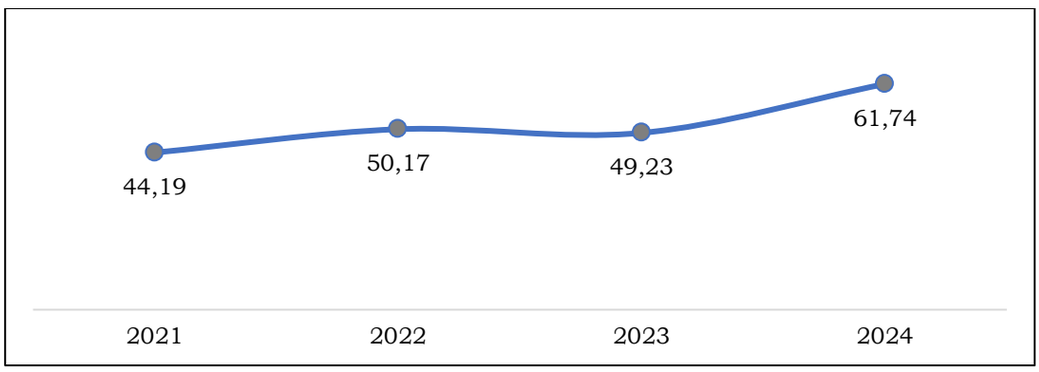

Gambar 2.53. Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kemendagri RI, 2025)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 61,74 termasuk kategori Sangat Inovatif dan berada pada peringkat ke 10 (sepuluh) dari 38 Provinsi. Peningkatan skor IID ini disebabkan mulai meningkatnya inisiasi pelaksanaan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem inovasi di tingkat lokal juga diperlukan agar inovasi daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Timur.

11) Produk Tersertifikat Halal

Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal merupakan salah satu indikator penting dalam penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Timur. Dalam lima tahun terakhir, Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 produk, kemudian mengalami penurunan menjadi 291 produk pada 2021. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, Kalimantan Timur berhasil melakukan akselerasi besar dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah produk tersertifikasi menjadi 6.287 produk pada tahun 2022, kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 17.167 produk di tahun 2023. Kenaikan tajam ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang diluncurkan, seperti pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM, optimalisasi peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Halal Center di perguruan tinggi seperti Universitas Mulawarman dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kampanye edukasi dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional.

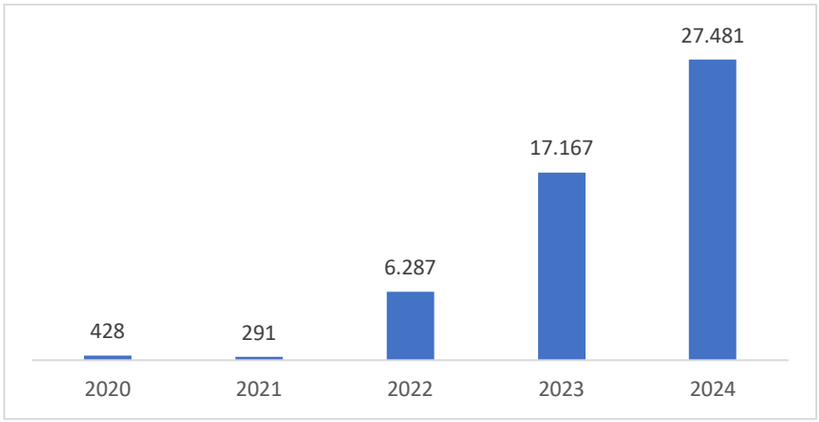

Gambar 2.54.Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(*Sumber : BPJPH, 2025*)

Capaian tertinggi hingga saat ini terjadi pada tahun 2024, di mana produk bersertifikat halal mencapai 27.481 produk. Lonjakan ini menandai puncak kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, pelaku UMKM, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif. Ini juga mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam menjadikan sektor halal sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

Meskipun pada tahun 2024 terlihat adanya sedikit perlambatan dari sisi target ke depan, namun capaian ini telah memberikan pijakan kuat bagi Kalimantan Timur untuk memasuki periode RPJMD 2025–2029 dengan optimisme tinggi. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kuantitas produk bersertifikat halal, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan sertifikasi, serta perluasan pasar produk halal lokal baik di tingkat nasional maupun ekspor.

2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1) Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.

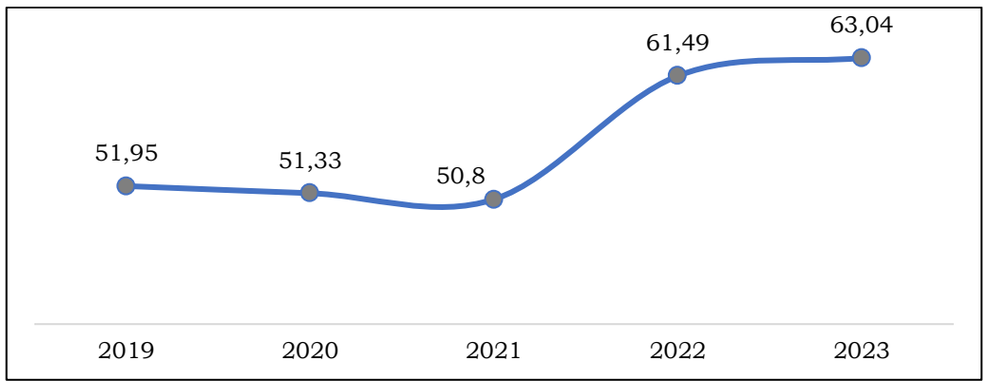

Gambar 2.55. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023
(Sumber: Bappenas, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO2, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

2) Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia/*Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) merupakan instrument strategis untuk memantau kemajuan pembangunan ekonomi biru secara menyeluruh, yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Untuk mengukur atau melihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi (IBEI).

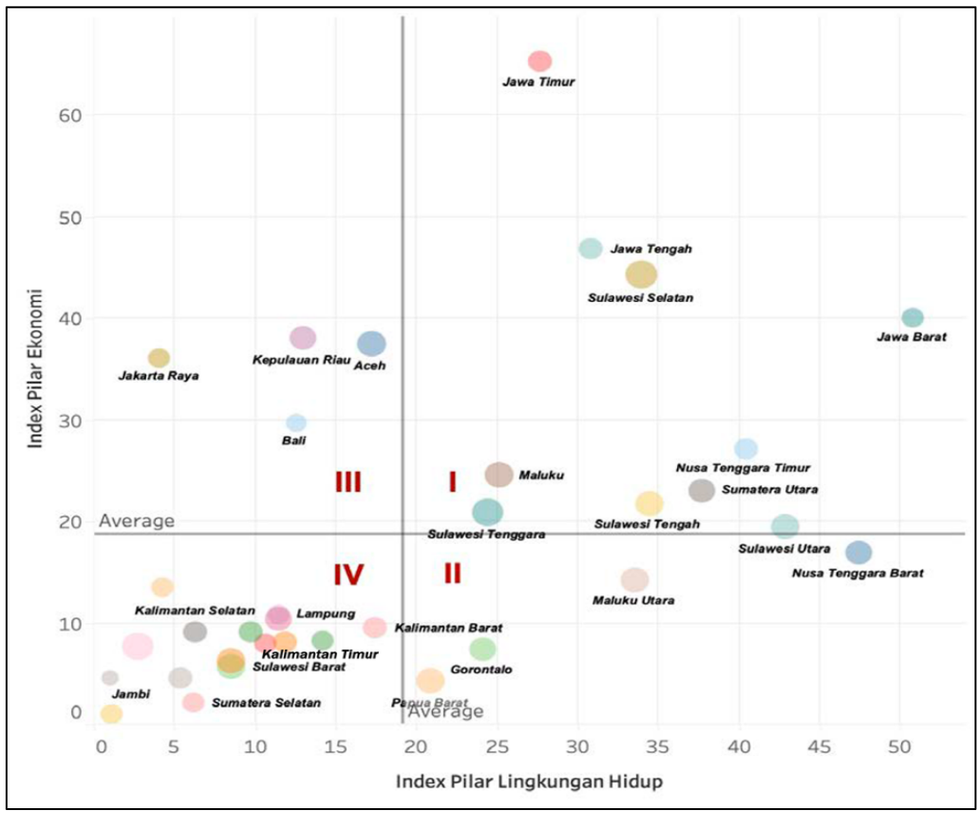

Gambar 2.56.Analisa Kuadran IBEI 2025
(*Sumber : BAPPENAS, 2025*)

Dari gambar diatas, IBEI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 31,30 (dibawah rata-rata Nasional yaitu 35,59). Dengan angka ini Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kelompok Kuadran IV, dimana provinsi yang masuk pada kuadran ini menghadapi tantangan ganda dengan kinerja di bawah rata-rata nasional untuk pilar ekonomi dan pilar lingkungan, sehingga berdampak pada pencapaian pilar sosial yang terbatas. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Timur memerlukan intervensi paling fundamental dalam rangka Pencapaian IBEI.

3) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW,

Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*trilliun cubic feet*).

Tabel 2.61. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6,994,663.83	979,252.94	0.98	12.14%
2	Minyak Bumi	21,149,991.51	2,960,998.8	2.96	36.71%
3	Gas Bumi	21,437,322.89	3,001,225.20	3.00	37.21%
4	Batubara	8,036,082.68	1,125,051.58	1.13	13.95%
Total		57,618,060.91	8,066,528.53	8.07	100%

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

3. Transformasi Digital

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

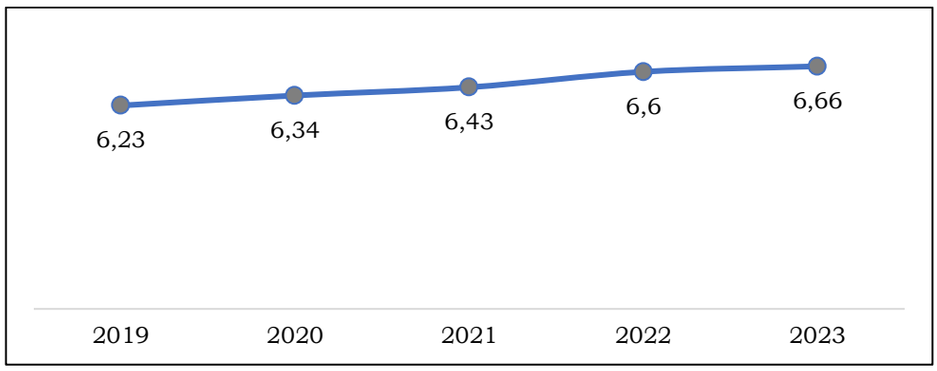

Gambar 2.57. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023
(Sumber: BPS RI, 2024)

Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Rasio PDRB PMTB merupakan *share* PMTB terhadap PDRB Provinsi.

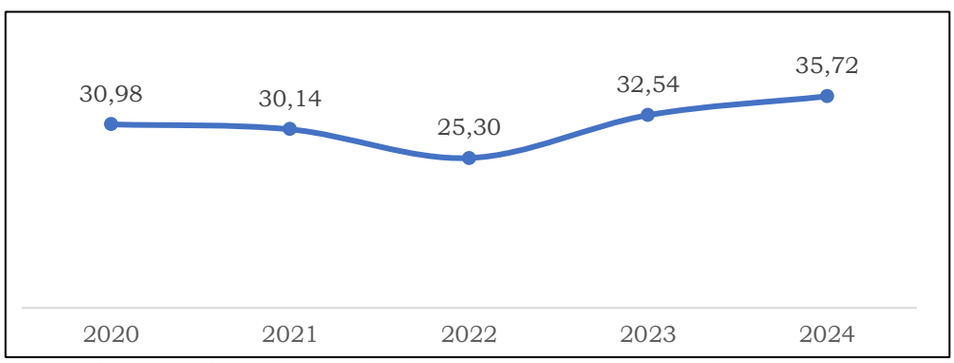

Gambar 2.58. Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 35,72 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto disebabkan meningkatnya investasi di sektor konstruksi dengan adanya pembangunan IKN dan berbagai proyek pembangunan serta revitalisasi infrastruktur di kabupaten dan kota.

2) Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

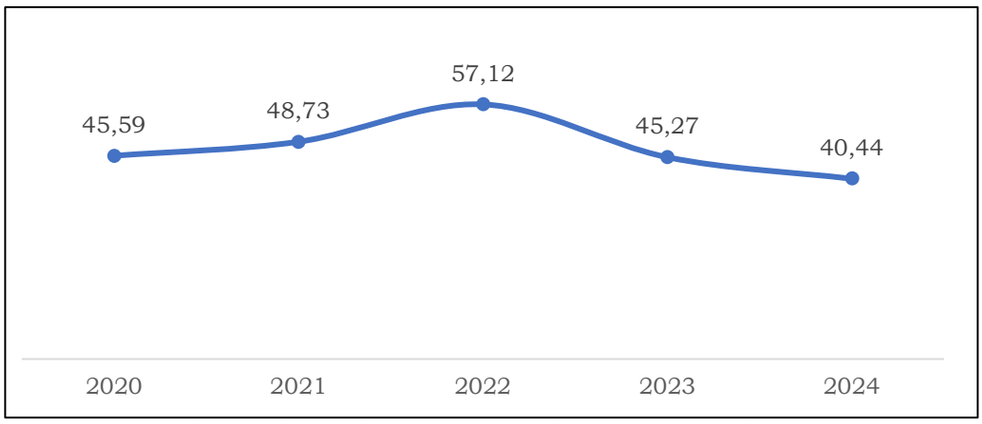

Gambar 2.59. Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan mencapai 40,44 persen di tahun 2024, namun masih mendominasi pada komponen pengeluaran PDRB. Turunnya Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa dikarenakan

mulai meningkatnya nilai PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

3) Disparitas Harga

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Dukungan sektor terkait dirasa masih kurang dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kalimantan Timur juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di Kalimantan Timur belum dapat dikendalikan. Disparitas harga antar wilayah di Kalimantan Timur tahun 2020-2024 relatif membaik. Semakin kecil capaian disparitas harga antar wilayah, maka semakin baik kondisi ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok.

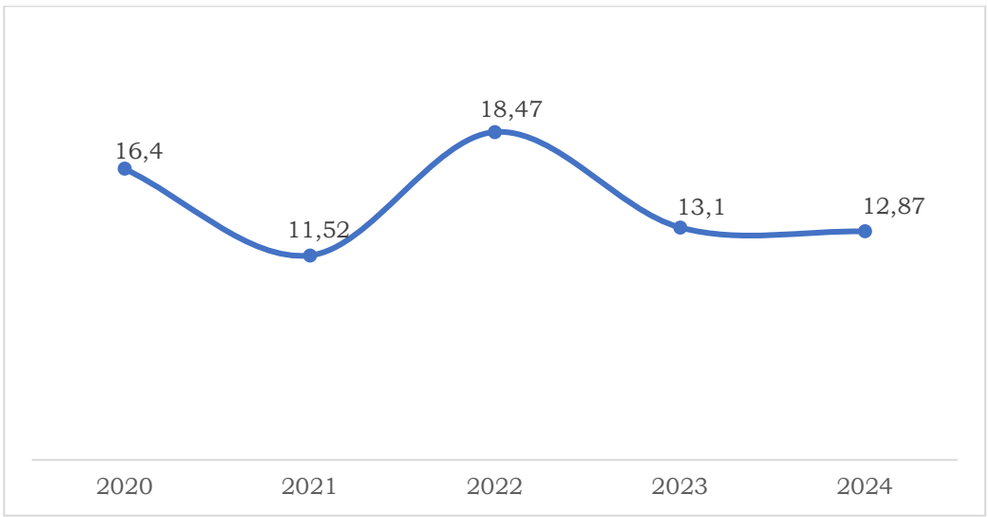

Gambar 2.60. Disparitas Harga Antar Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim, 2025)

Disparitas harga antar wilayah di Kalimantan Timur mengalami lonjakan di tahun 2022 hingga mencapai 18,47% yang disebabkan oleh pemulihan pasca pandemi dan kenaikan harga bahan pokok akibat pasokan barang kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Kalimantan Timur. Kemudian terjadi perbaikan kondisi disparitas harga antar wilayah dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 12,87%. Disparitas harga masih menjadi tantangan serius, terutama di

daerah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian 5,92 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai angka 7,39. Penurunan tersebut disebabkan adanya metode perhitungan baru yakni menambahkan semua program pada perangkat daerah terkait, sebagai komponen perhitungan IKLI. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

Beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas antara lain pada sektor transportasi, perumahan dan permukiman.

1) Infrastruktur Jalan

Berdasarkan data Tahun 2024, masih terdapat jalan dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) pada ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat. Kondisi jalan rusak ringan sepanjang 55,55 kilometer dan rusak berat 111,46 kilometer membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan. Sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel 2.62. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Status Jalan	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Total Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58	1.806,76
Jalan Provinsi	321,38	450,46	55,55	111,46	938,85

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77 persen, sementara pada Tahun 2024 telah mencapai 82,21 persen. Faktor pendorong meningkatnya

capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim – Talisayan, ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb, dan ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Batas Berau yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp. 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta meningkatkan aksesibilitas Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan Akses Jembatan Sei. Nibung (Kutim), pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu), pemeliharaan jalan Long Bagun Seberang – Long Boh (Batas Kaltara), serta pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda, pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan dan pembangunan jaringan jalan dari Kabupaten Penajam Paser Utara – Kutai Barat.

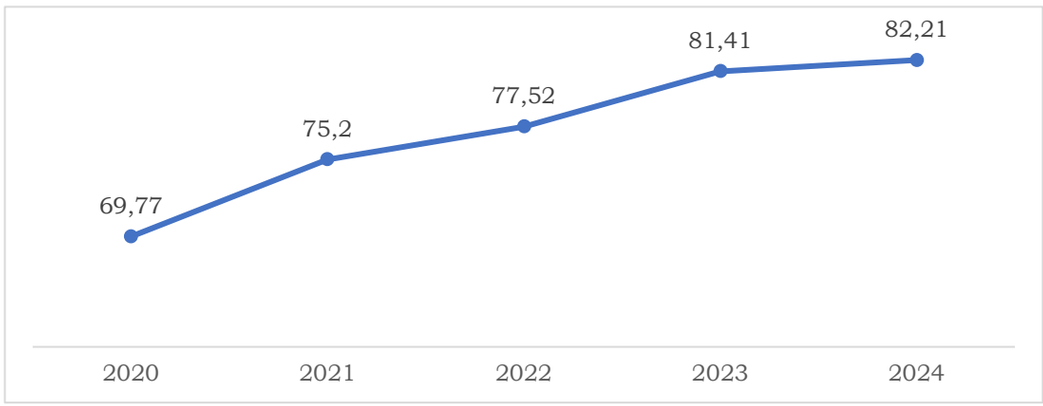

Gambar 2.61.Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1.000 km^2 dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1.000 km^2. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;

3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

2) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.

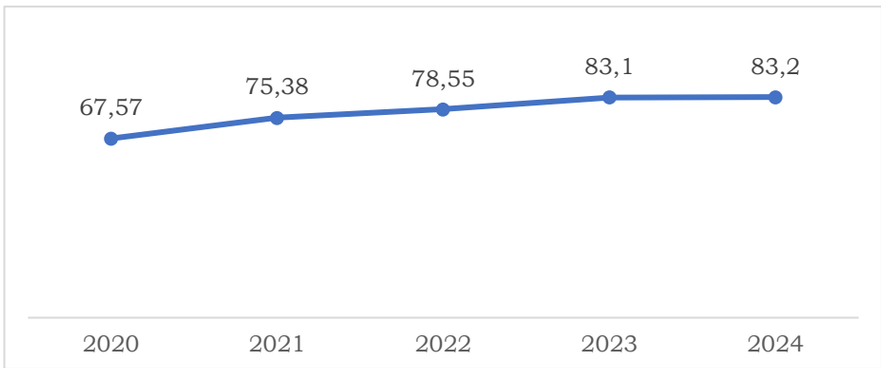

Gambar 2.62. Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Data menunjukan bahwa, capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan

Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang.

3) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

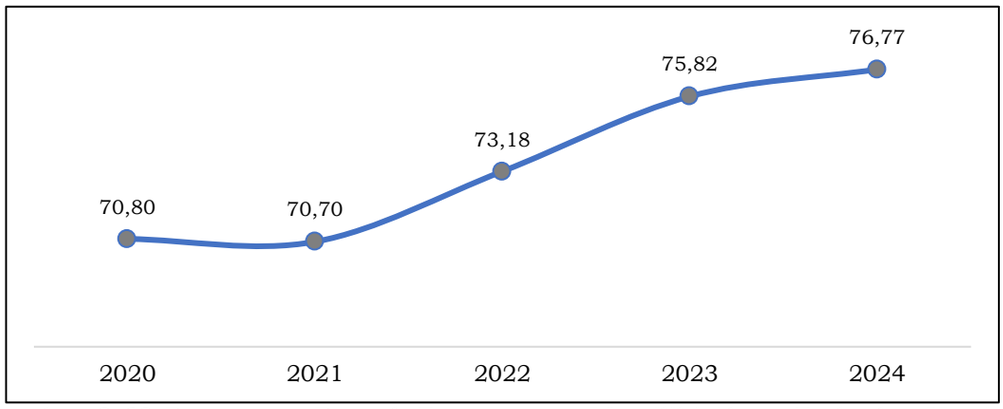

Gambar 2.63. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS RI, 2025)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 26.732 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.63. Data Backlog Perumahan

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan (unit)	Penghunian (unit)
1	Paser	9.492	15.674
2	KUBAR	6.340	8.405
3	KUKAR	28.111	22.595
4	KUTIM	15.449	12.237
5	Berau	7.837	7.443
6	PPU	7.837	7.293
7	MAHULU	698	2.580
8	Balikpapan	30.424	8.372
9	Samarinda	45.831	9.358
10	Bontang	10.550	3.045
	Total	162.569	97.002

Sumber Data: Balai P2P kalimantan II (2023)

Total backlog kepemilikan tercatat sebesar 162.569 unit, sedangkan backlog penghunian mencapai 97.002 unit, yang menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan keterhunian. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perumahan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap kepemilikan.

Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dalam backlog kepemilikan dengan 45.831 unit, mencerminkan tekanan kebutuhan perumahan yang tinggi di ibukota provinsi. Sementara itu, Kota Kutai Kartanegara mencatat backlog tertinggi dari sisi penghunian, yakni sebanyak 22.595 unit, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan rumah dan pemanfaatannya.

Tabel 2.64. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verfifikasi	SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota		
1	Paser	180,74	35,06	8,72	28,74	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	933,37	73,56	38,69		No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	92,61	25,49	15,5	25,49	No. 105/SK-BUP/HK/2023
4	KUTIM	74,77	310,14	172,03	270,62	No. 600/K.652/2023
5	Berau	0	25,79	2,47		No. 30 Tahun 2020
6	PPU	0	39,4	0		No.593.33/212/2023
7	MAHULU	49,2	22,52	49,98		No. 600/650/K.126/2023
8	Balikpapan	52,99	21,78	29,92	21,78	No. 188.45-203/2023
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	19,13	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	18,3	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1437,91	611,34	349,55		

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 (lima) dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2024 sebesar 11,01 m^3/detik, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17 m^3/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m^3/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum terkoneksinya pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.65. Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)			
		Permen PU No.14/PRT/M/2015	Potensial	Fungsional	Baku
1	DI Biatan	1.779	383,56	263,53	2145
2	DI Labanan	1.100	196,52	196,52	754
3	DI Merancang	1.200	1084,2	191,4	1275
4	DI Semurut	1.089	737,65	309,43	1047
5	DI Marangkayu	1.507	938,19	515,68	1453
6	DI Sungai Buluh	1.089	701,53	84,27	785
7	DI Kaliorang	1.300	1295,8	137,35	1433
8	DI Selangkau	2.987	891,65	123,87	1015,5
Total		12.060	6.229	1.822	9.908

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data menunjukan Daerah Irigasi Permukaan (DI) kewenangan provinsi yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting lapangan, luasan

fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.

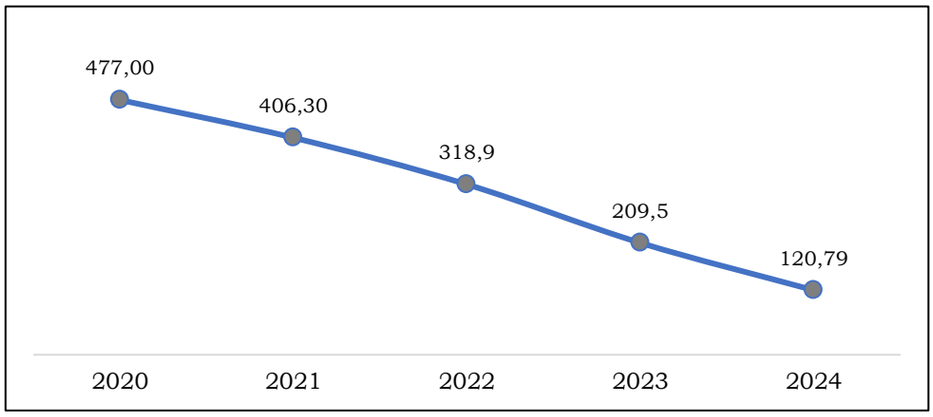

Gambar 2.64. Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penangannya adalah pengurangan luas genangan banjir. Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan lokasi banjir di Wilayah Sungai Karangan yang merupakan kewenangan provinsi. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders,* baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi kalimatan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

5) Infrastruktur Perhubungan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan 510 kejadian, namun pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan, masing-masing dengan 162 dan 144 kejadian. Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur, salah

satunya disebabkan meningkatnya pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas–ruas jalan provinsi.

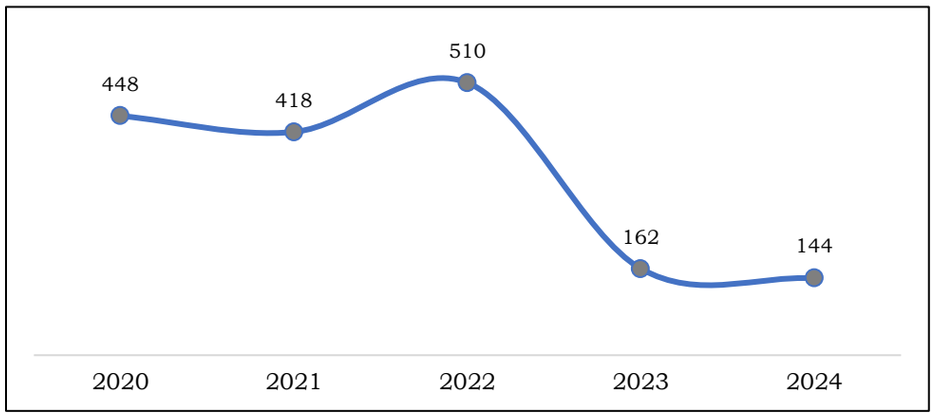

Gambar 2.65. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat. Bandara SAMS Sepinggan, Bandara Kalimarau dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi

ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552/K.784/2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) telah ditetapkan 2 (dua) pelabuhan pengumpan regional, 3 (tiga) rencana pelabuhan penumpang regional, 2 (dua) pelabuhan penyeberangan kelas I, dan 5 (lima) pelabuhan sungai dan danau.

Tabel 2.66. Hierarki Pelabuhan Nasional di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mantaritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Tabel 2.67. Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hierarki	
1	Berau	Mantaritip	Pengumpan Regional	
2	Kutai Timur	Sangkulirang	Pengumpan Regional	
RENCANA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
1	Balikpapan	Kampung Baru Tengah	Pengumpan Regional	
2	Balikpapan	Somber	Pengumpan Regional	
3	Penajam Paser Utara	Penajam Speedboat	Pengumpan Regional	
PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS I				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Status	Keterangan

			Pencapaian	
1	Balikpapan	Kariangau	Operasi	Kelas I
2	Penajam Paser Utara	Penajam	Operasi	Kelas I
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU				
1	Kutai Barat	Tering	Operasi	Pengumpan
2	Kutai Barat	Melak	Operasi	Pengumpan
3	Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	Operasi	Pengumpan
4	Mahakam Ulu	Long Bagun	Operasi	Pengumpan
5	Samarinda	Sungai Kunjang	Operasi	Pengumpan

Sumber: RIPP Provinsi KALTIM, 2022

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

2) Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Klasifikasi status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

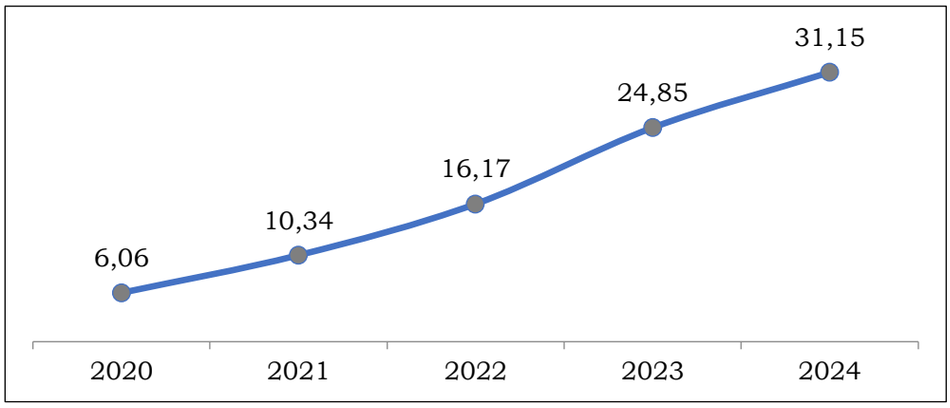

Gambar 2.66. Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

Persentase desa mandiri di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami peningkatan dengan capaian 31,15 persen di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

3) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB wilayah kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peran penting masing-masing kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga kota utama yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB provinsi. Balikpapan menyumbang sekitar 17,90 persen, menjadikannya kota dengan kontribusi tertinggi karena perannya sebagai pusat industri migas dan perdagangan. Disusul oleh Samarinda, ibu kota provinsi, dengan kontribusi sekitar 11,48 persen yang dominan di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Sementara itu, Bontang berkontribusi sebesar 7,98 persen, didorong oleh aktivitas industri petrokimia dan pupuk.

Tabel 2.68. Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024

No	Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Balikpapan	17,08	15,99	13,82	16,96	17,90
2	Samarinda	10,94	10,22	9,05	10,58	11,48
3	Bontang	9,15	8,32	6,85	8,07	7,98
Kontribusi Wilayah Kota		37,17	34,53	29,72	35,61	37,36

Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Kontribusi yang signifikan dari kota-kota ini mencerminkan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada sektor-sektor industri ekstraktif dan jasa. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah provinsi ini, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi yang mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah kabupaten lainnya. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengoptimalkan potensi kota-kota besar sambil memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah lain, sehingga kontribusi PDRB dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

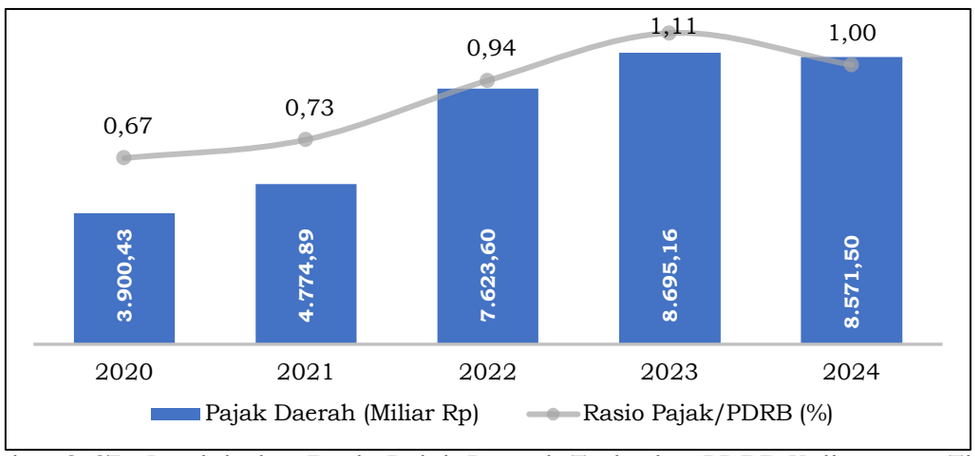

Gambar 2.67. Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren fluktuasi hal ini disebabkan oleh tidak berkolerasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak Provinsi dan Kab/Kota. Apabila

pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah provinsi yang dilakukan dengan peningkatan nilai pajak bahan bakar yang berkontribusi dominan, optimalisasi pendataan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

b. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

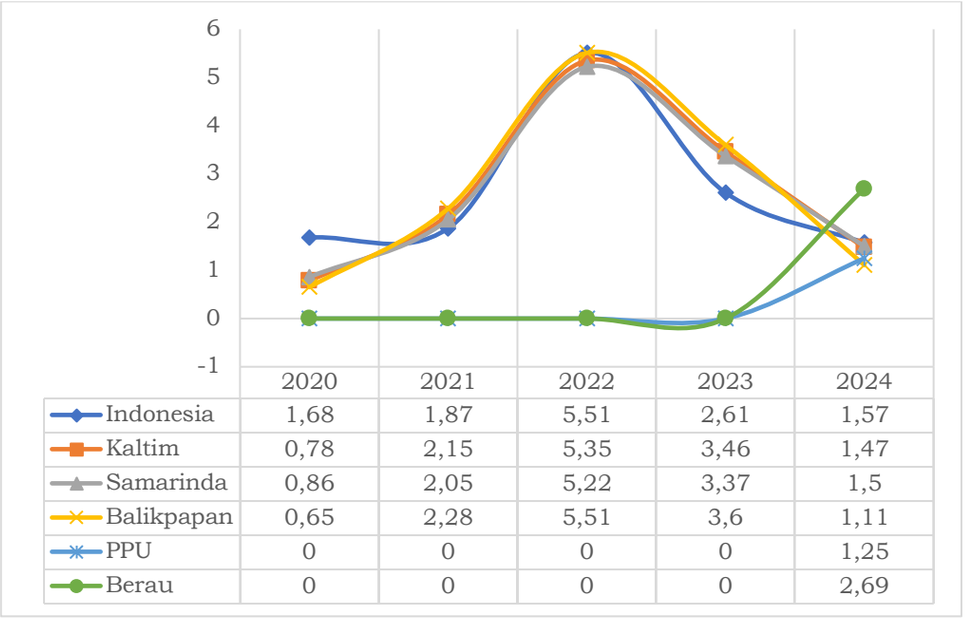

	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Kaltim	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47
Samarinda	0,86	2,05	5,22	3,37	1,5
Balikpapan	0,65	2,28	5,51	3,6	1,11
PPU	0	0	0	0	1,25
Berau	0	0	0	0	2,69

Gambar 2.68. Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun

2024 laju inflasi sebesar 1,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran kesehatan dan perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pada tahun 2024, terdapat wilayah penambahan perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,11 persen, dan tertinggi yaitu di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

c. Aset Dana Pensiun

Aset dana pensiun berasal dari iuran peserta dan/atau pemberi kerja, hasil pengembangan investasi serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Besarnya aset dana pensiun mencerminkan kemampuan lembaga dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa pensiun, sehingga pengelolaan aset yang aman, produktif dan menguntungkan menjadi sangat penting.

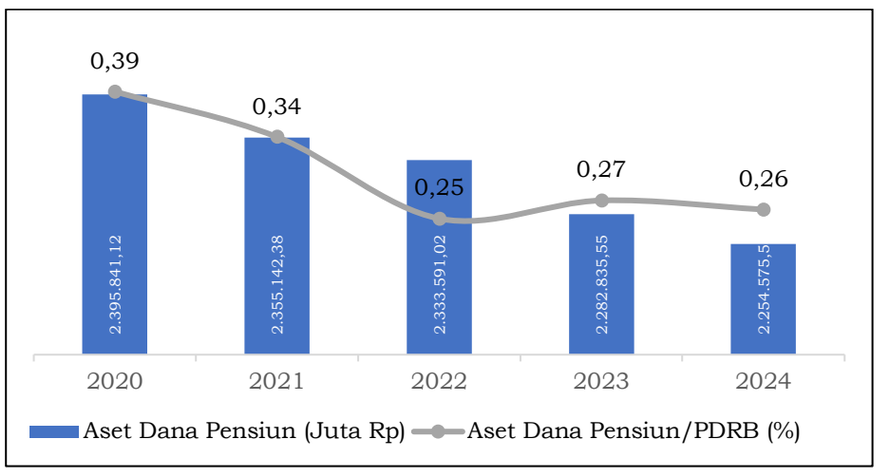

Gambar 2.69.Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset dana pensiun mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan persentase aset dana pensiun terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian daerah juga mengalami penurunan.

Penurunan nilai aset ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan kinerja investasi, pencairan dana pensiun yang lebih besar daripada iuran yang masuk, atau perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi perkembangan aset dana pensiun.

Untuk menjaga keberlanjutan dan kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian Kalimantan Timur, diperlukan strategi pengelolaan aset yang lebih optimal, termasuk diversifikasi portofolio investasi dan peningkatan kepesertaan.

d. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal

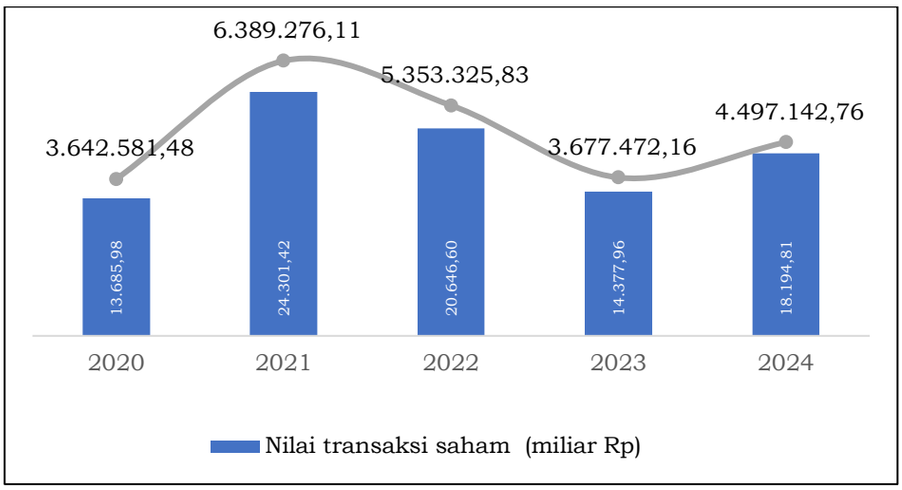

Gambar 2.70. Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi saham per kapita mengalami fluktuasi. Pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika ekonomi nasional dan global, harga komoditas utama (misalnya batu bara dan minyak), tingkat kepercayaan investor, serta likuiditas di pasar modal. Kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya optimisme atau pemulihan minat investasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, memantau indikator ini penting untuk memahami perkembangan iklim investasi dan potensi pergerakan ekonomi Kalimantan Timur ke depan.

e. Total Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh perbankan dari nasabah di Provinsi Kalimantan Timur. DPK Provinsi Kalimantan Timur mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem perbankan daerah semakin tinggi. Meningkatnya pertumbuhan DPK di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini juga terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat arus investasi dan memicu peningkatan simpanan dari masyarakat maupun perusahaan.

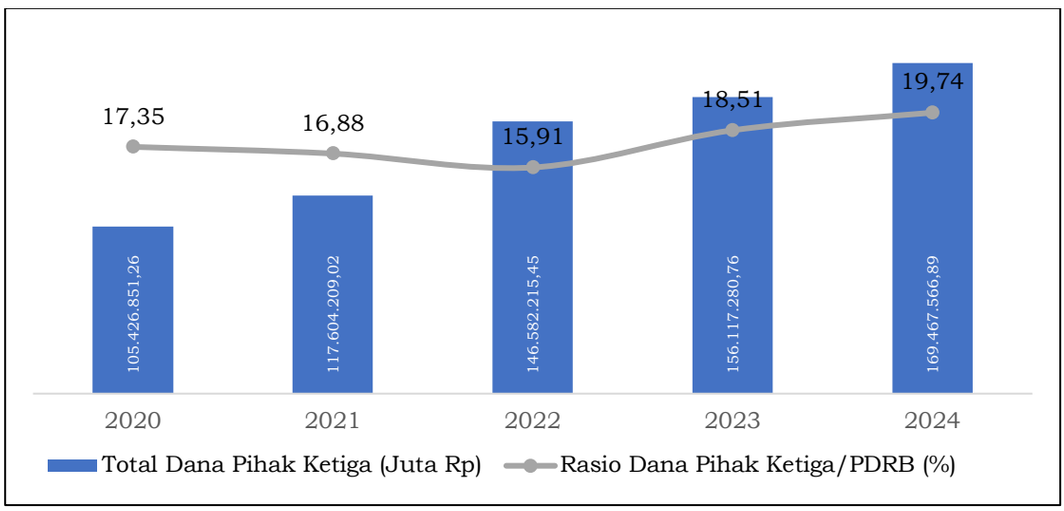

Gambar 2.71.Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio DPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur menggambarkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total output ekonomi daerah tersebut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan, memberikan potensi likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

f. Total Kredit

Total kredit di Kalimantan Timur mencerminkan aktivitas penyaluran pinjaman oleh perbankan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek IKN dan pertumbuhan sektor pertambangan serta energi, penyaluran kredit mengalami peningkatan signifikan dengan nilai terakhir 97,03 triliun rupiah pada tahun 2024. Kredit tersebut sebagian besar

disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertambangan, konstruksi dan perdagangan, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, permintaan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan, yang disebabkan tumbuhnya daya beli masyarakat. Total kredit yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur di tengah dinamika pembangunan yang pesat semakin besar.

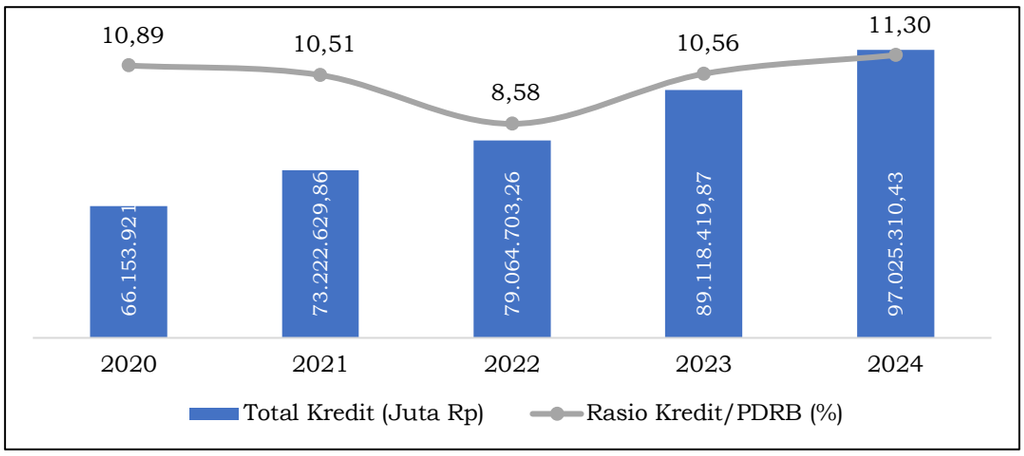

Gambar 2.72.Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio total kredit terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan seberapa besar fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penyaluran pendanaan pada kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

g. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

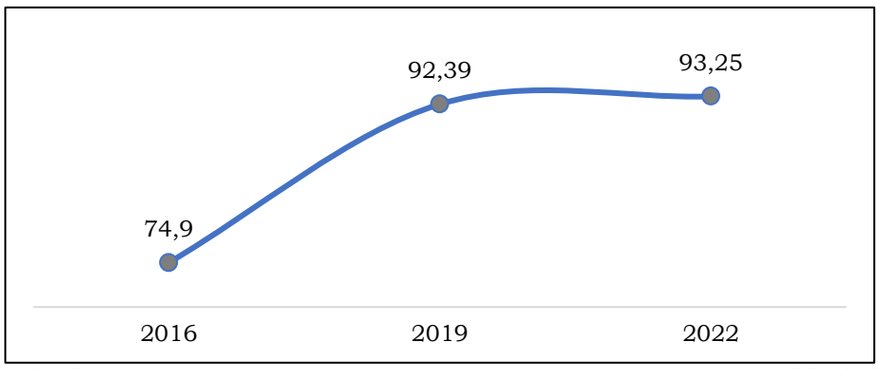

Gambar 2.73.Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2023)

Perkembangan inklusi keuangan di Kalimantan Timur dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan berada di 74,9 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 92,39 persen pada tahun 2019. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana inklusi keuangan mencapai 93,25 persen. Perkembangan ini mencerminkan adanya percepatan dalam akses layanan keuangan oleh masyarakat melalui perluasan akses ke layanan keuangan melalui teknologi digital dan upaya literasi keuangan.

h. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur efektivitas tata kelola zakat di daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi indikator strategis dalam mendorong penguatan peran zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di daerah.

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “Stabil” dengan skor indeks sebesar 0,53. Skor ini menempatkan Kalimantan Timur dalam klasterisasi potensi “Menengah” berdasarkan pengelompokan nasional, dengan estimasi pertumbuhan indeks tahunan sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat di Kalimantan Timur telah berada pada jalur yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi (baik atau sangat baik).

Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan operasional, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur baik oleh BAZNAS Provinsi maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah relatif mapan dalam aspek tata kelola dan pelayanan. Namun demikian, tantangan yang

dihadapi antara lain adalah optimalisasi penghimpunan zakat, penguatan sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap zakat produktif.

Selain itu, pertumbuhan indeks yang relatif kecil (0,03) menandakan perlunya inovasi yang lebih progresif dalam pengelolaan zakat, seperti pemanfaatan teknologi digital, sinergi lintas sektor (khususnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha), serta penguatan kapasitas amil zakat. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 2.69. Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN	Interpretasi
Paser	0,8	0,34	0,48	Stabil
KUKAR	0,71	0,25	0,39	*Developing*/Berkembang
Berau	0,71	0,74	0,73	*Growth*/Bertumbuh
KUBAR	0	0	0	
KUTIM	0,77	0,61	0,66	*Growth*/Bertumbuh
PPU	0,63	0,26	0,37	*Developing*/Berkembang
MAHULU	0	0	0	
Balikpapan	0,59	0,65	0,63	*Growth*/Bertumbuh
Samarinda	0,52	0,36	0,41	Stabil
Bontang	0	0	0	
Kalimantan Timur	0,8	0,41	0,52	Stabil

Sumber : BAZNAS, 2025

Adapun IZN tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Berau, sedangkan IZN terendah di ialah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan potensi Kalimantan Timur yang cukup besar dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi, serta posisi strategis sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan tata kelola zakat menjadi prioritas strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

g. Rasio Aset Perbankan Syariah

Rasio aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor keuangan syariah dalam struktur ekonomi daerah. Rasio ini juga menggambarkan sejauh mana perkembangan perbankan syariah mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dalam periode tahun 2020–2024, Kalimantan Timur mencatatkan tren pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio aset

perbankan syariah terhadap PDRB tercatat sebesar 1,44 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,21 persen. Kenaikan ini terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang justru menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi.

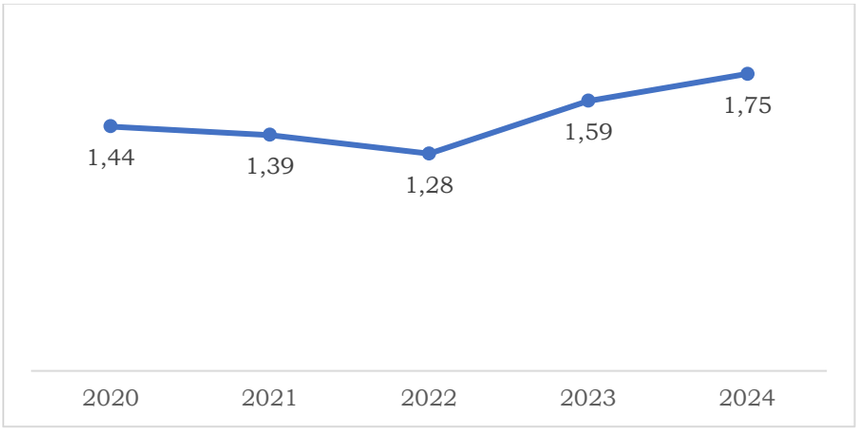

Gambar 2.74. Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber : OJK, 2025)

Namun pada 2021 dan 2022, terjadi sedikit penurunan berturut-turut menjadi 1,39 persen dan 1,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum optimalnya ekspansi pembiayaan syariah, konsolidasi internal lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Selain itu, peningkatan PDRB daerah yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah juga turut mempengaruhi penurunan rasio tersebut.

Pada 2023, rasio ini kembali meningkat menjadi 1,59 persen, dan dilanjutkan dengan capaian 1,75 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa kebijakan penguatan industri keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Beberapa faktor pendukungnya antara lain bertambahnya unit layanan syariah dan kantor cabang pembantu perbankan syariah di daerah, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya pada sektor UMKM serta dukungan regulasi dari otoritas jasa keuangan dan pemerintah daerah yang mendorong ekosistem ekonomi syariah. Secara umum, capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi landasan penting bagi arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dalam memperkuat peran

keuangan syariah sebagai salah satu pilar inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.

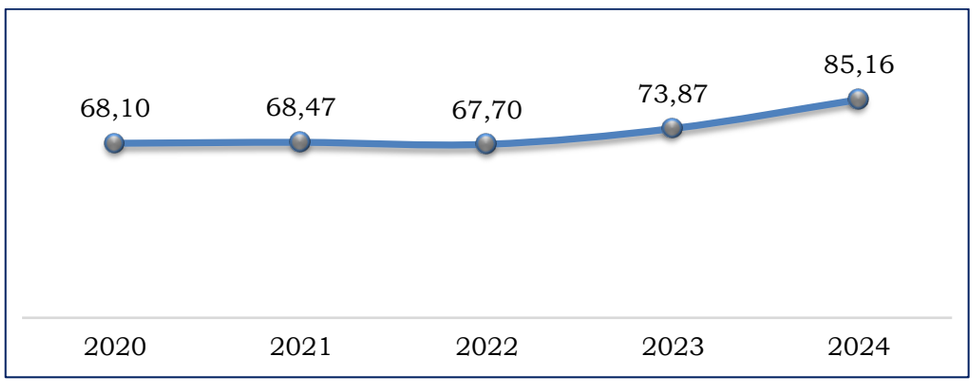

Gambar 2.75. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang berbeda. Evaluasi Reformasi Birokrasi sebelum tahun Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan peraturan turunannya, terdapat perubahan mekanisme, instrumen, dan hasil penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel 2.70. Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.92	25.94	26,06	25,89	26,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	18.97	18.99	22,50	22,48	22,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.75	12.76	12,84	12,76	12,56
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	6.21	6.21	16,70	16,76	17,29
e.	Capaian Kinerja	-	13.82	13.92	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,89	76,55	78,10	77,89	78,74
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/414/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

c. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2024 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 97,08 dengan kategori AA (Istimewa). Faktor yang menjadi pendukung kenaikan yang signifikan adalah dengan pemenuhan

keterisian data yang dibutuhkan dan manajemen pengelolaan tata hukum pemerintah yang meningkat.

d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Tabel 2.71. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,14	2,22	2,11	2,91	3,79

Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2024 nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3,79 dan masuk dalam predikat sangat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik", 6 (enam) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "baik" yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kota Bontang, 3 (tiga) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "cukup" yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.

Pengukuran Indeks SPBE akan berakhir pada tahun 2025 dan mulai tahun 2026 serta seterusnya akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) berikut dengan pengurukannya oleh KemenPAN-RB, sesuai surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB Nomor

B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan Kepada Pemerintah pada tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital Sebagai Penguatan Kebijakan SPBE.

e. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

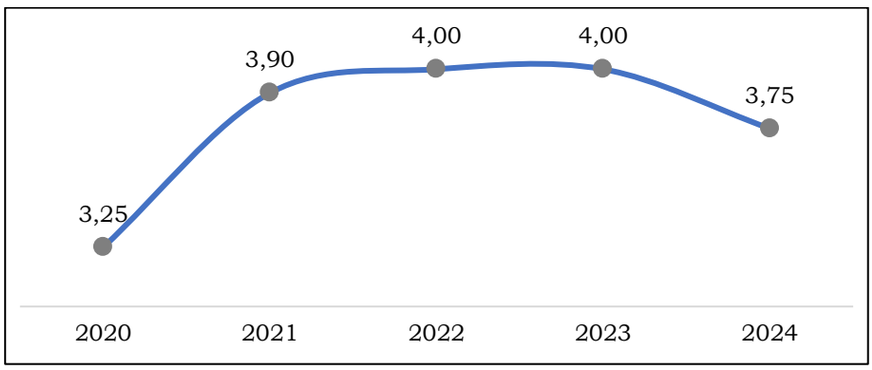

Gambar 2.76. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 masih berada pada nilai 4,00 dari skala 5,00, atau berada pada kategori B (Baik). Namun pada tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Indeks Pelayanan Publik senilai 3,75. Belum maksimalnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kalimantan Timur disebabkan oleh faktor belum diterapkannya kebijakan pelayanan namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

f. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).

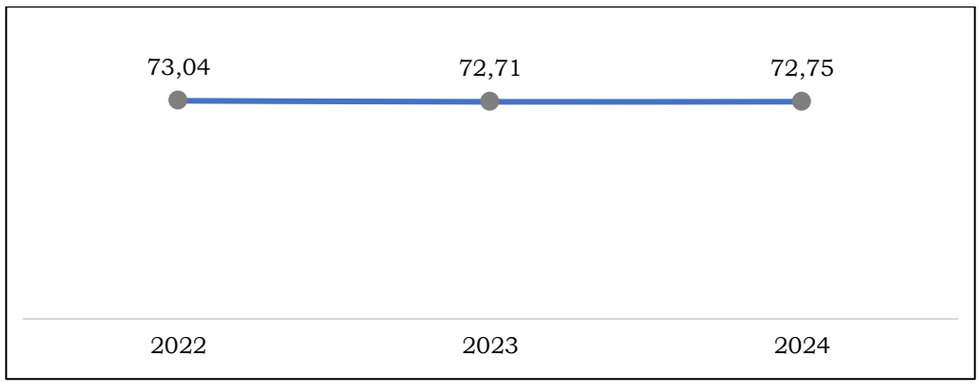

Gambar 2.77. Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: KPK, 2025)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2024 masih pada angka 72,75 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

g. Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja penatausahaan Barang Milik Daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Indikator ini meliputi 4 sasaran strategis yakni Pengelolaan BMD yang akutanbel dan produktif, kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang – undangan, Pengawasan serta Pengendalian

Barang Milik Daerah yang efektif dan Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal.

Tabel 2.72. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024

No	Uraian	Nilai	Bobot (%)	Indeks
Sasaran Strategis : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif				
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	3,70	10	0,37
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan				
3	Ketepatan waktu penetapan RKBMD	1,00	5	0,05
4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	0,80	15	0,12
5	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif				
6	Tindak Lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	1,00	15	0,15
7	Tindak lanjut Pengelolaan BMD	1,60	20	0,32
Sasaran Strategis : Administrasi BMD yang Andal				
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	3,00	15	0,45
Total		19,10	100	2,26

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Pengelolaan Aset dihitung berdasarkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Nilai kategori 0,1-1,0 *(Buruk),* 1,1-2,0 *(Cukup),* 2,1-3,0 *(Baik),* 3,1-4,0 *(Sangat Baik).* Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,26 (Baik) dengan bobot nilai tertinggi melalui parameter sertifikasi dokumen kepemilikan BMD dengan skor 0,45 dan nilai terendah melalui parameter ketepatan waktu penetapan RKBMD. Oleh karena itu perlu penguatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara sistematis dan berbasis data, optimalisasi pemanfaatan aset melalui digitalisasi sistem informasi manajemen aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala, serta penegakan regulasi dan pengawasan internal.

h. Nilai Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tingkat penerapan prinsip Sistem Merit diukur melalui Nilai Penerapan Sistem Merit yang diatur dalam Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Penilaian dilakukan oleh KASN dengan menggunakan mekanisme self-assessment yang terstandar dan objektif, mencakup delapan aspek manajemen ASN, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pengembangan karier, (4) promosi dan mutasi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan, serta (8) sistem informasi.

Hasil penilaian diberikan dalam bentuk nilai (100–400) yang kemudian dapat dikategorikan menjadi empat tingkatan, yaitu: Kategori IV (nilai 325–400, sebutan Sangat Baik), Kategori III (nilai 250–324, sebutan Baik), Kategori II (nilai 175–249, sebutan Kurang), dan Kategori I (nilai 100–174, sebutan Buruk).

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Nilai Sistem Merit sebesar 271. Berdasarkan klasifikasi tersebut, nilai ini menempatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Kategori III dengan sebutan “Baik”, yang mencerminkan bahwa prinsip merit sudah diterapkan dengan baik dalam manajemen ASN, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai kategori “Sangat Baik” pada periode perencanaan berikutnya.

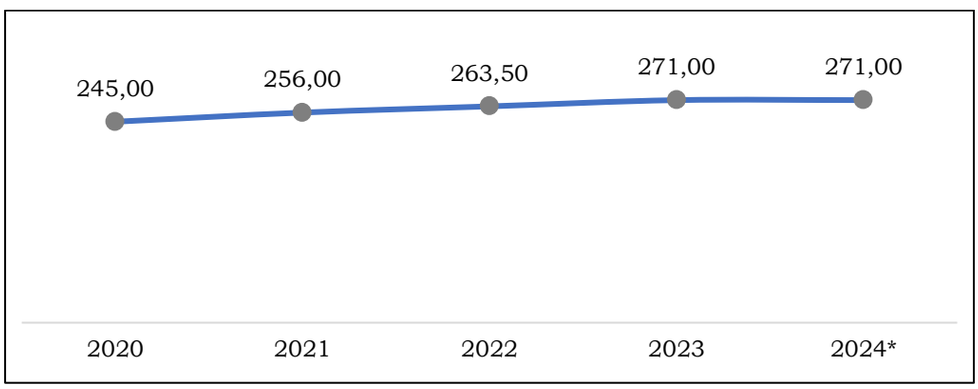

Gambar 2.78. Nilai Sistem Merit Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BKD, 2025)

Perkembangan Nilai Sistem Merit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2020, nilai Sistem Merit berada pada angka 245,00 dan

termasuk dalam Kategori II (Kurang). Selanjutnya, terjadi peningkatan secara konsisten hingga tahun 2023 dengan capaian 271,00 yang menempatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Kategori III (Baik).

Adapun untuk tahun 2024, data resmi dari KASN belum tersedia, sehingga data yang digunakan merupakan data sementara yang mengacu pada capaian tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kategori yang diperoleh masih berada pada posisi “Baik” dan belum mengalami perubahan. Meskipun telah berhasil meningkatkan capaian dari kategori “Kurang” ke “Baik”, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan untuk mencapai kategori IV (Sangat Baik) dengan rentang nilai 325–400 poin.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Penegakan Peraturan Daerah

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 3 (tiga) peraturan daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) peraturan daerah.

Tabel 2.73. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
1.	2022	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016	Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017	Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur
3.	2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika
		Perda Nomor 10 Tahun 2012	Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Khusus Untuk Tambang Dan Sawit.

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2025

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur baik PPNS maupun anggota di lapangan, kurangnya pemenuhan mutu layanan minimal berupa pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

b. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel 2.74. Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Aksi HAM Daerah	100	61,77	76,21	63,96	64,3

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 64,3 persen. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya juga masih kurangnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta

c. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 80,69 persen pada tahun 2024. Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,58 poin dibandingkan nilai pada tahun 2023. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*". Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,50.

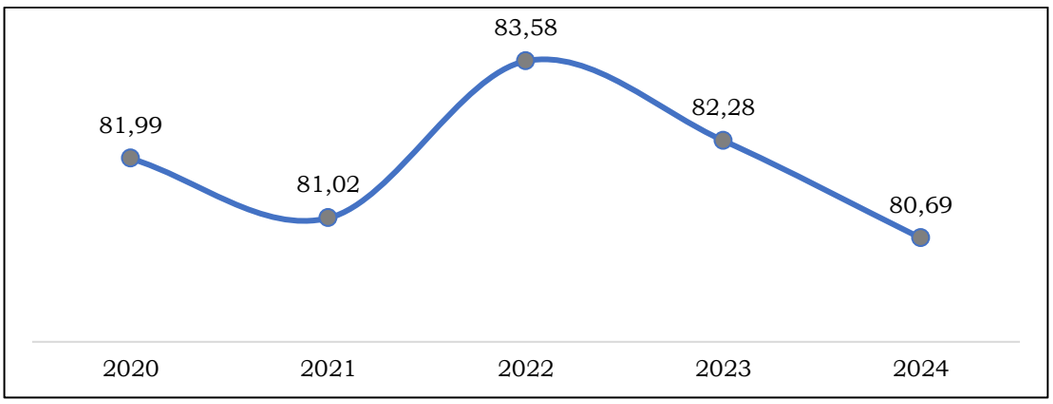

Gambar 2.79. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator. Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2024, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan dan aspek kesetaraan.

d. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.

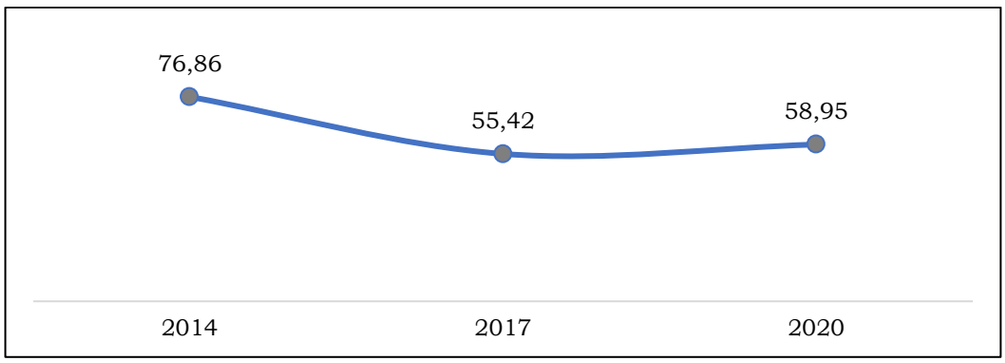

Gambar 2.80. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020
(Sumber: BPS RI, 2024)

Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar

stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.

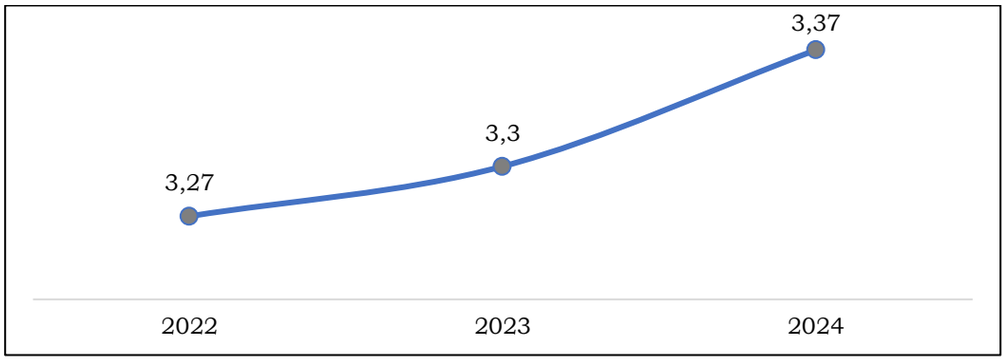

Gambar 2.81. Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: BRIN, 2025)

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,37 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun skor IDSD Kalimantan Timur masih berada di bawah skor IDSD Nasional yang sebesar 3,43. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar infrastruktur, pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

b. Kerja Sama Daerah

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola potensi yang ada di daerah adalah melalui kerja sama antar daerah, baik melalui kerja sama pemerintah daerah dalam negeri maupun kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain. Kerja sama antar daerah memungkinkan daerah untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki bagi kepentingan bersama. Bentuk legalitas kerja sama daerah dituangkan dalam nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama (PKS).

Pada tahun 2023, Kalimantan Timur telah memiliki 13 menjadi 35 perjanjian kerja sama antar daerah pada tahun 2024. Perjanjian kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Peluang peningkatan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur kedepannya akan semakin terbuka terlebih untuk mendukung daya saing daerah sebagai daerah mitra IKN dan *superhub* ekonomi IKN.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kinerja program, kegiatan, atau kebijakan yang dilaksanakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan. Indikator ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), agar mampu mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
A	**PENDIDIKAN**		
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	81,84
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	53,75
3	Kemampuan literasi SMA	Nilai	77,3
4	Kemampuan numerasi SMA	Nilai	63,83
5	Indeks iklim keamanan SMA	Nilai	73,05
6	Indeks iklim kebinekaan SMA	Nilai	72,88
7	Indeks iklim inkusivitas SMA	Nilai	61,58
8	Kemampuan literasi SMK	Nilai	72,38
9	Kemampuan numerasi SMK	Nilai	60,24
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	88,2
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	81,63
12	Indeks iklim keamanan SMK	Nilai	70,09
13	Indeks iklim kebinekaan SMK	Nilai	70,09
14	Indeks iklim inkusivitas SMK	Nilai	58,66
15	Kemampuan literasi SDLB	Nilai	80,09
16	Kemampuan numerasi SDLB	Nilai	74,93
17	Indeks iklim keamanan SDLB	Nilai	80,54
18	Indeks iklim kebinekaan SDLB	Nilai	72,46
19	Indeks iklim inkusivitas SDLB	Nilai	69,54
20	Kemampuan literasi SMPLB	Nilai	80,88
21	Kemampuan numerasi SMPLB	Nilai	74,55
22	Indeks iklim keamanan SMPLB	Nilai	75,43
23	Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,14
24	Indeks iklim inkusivitas SMPLB	Nilai	70

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
25	Kemampuan literasi SMALB	Nilai	81,95
26	Kemampuan numerasi SMALB	Nilai	72,57
27	Indeks iklim keamanan SMALB	Nilai	76,5
28	Indeks iklim kebinekaan SMALB	Nilai	77
29	Indeks iklim inkusivitas SMALB	Nilai	71,08
30	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	siswa	n/a
31	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/ MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	siswa	n/a
B	**KESEHATAN**		
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,83
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	177
5	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	18,04
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n/a
7	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	75,38
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	86,01
9	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	1,89
10	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	57,1
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,80
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,30
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100,88
13	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	kab/kota	n/a
14	Jumlah Kader pendamping keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	kader	n/a
15	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a
16	Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi di luar cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	2,41
2	Persentase perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	0,4
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	29,25
4	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	%	0
5	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	%	0
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	%	84,23

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
7	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	10,8
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	87,88
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	74,47
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	18,18
11	Tingkat kemantapan jalan	%	82,21
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	45
13	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	74,76
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
3	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Orang	n/a
4	Persentase Berkurangnya Luasan kawasan kumuh 10 – 15 Ha	%	16,6
5	Persentase permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	29,02
E	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	65
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100
3	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	60
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	n/a
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	n/a
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	100
9	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
F	**SOSIAL**		
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,96
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	100
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	45
4	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A
6	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
10	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
11	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
12	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100
13	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	45
14	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100
G	**TENAGA KERJA**		
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Orang	288.813.211
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	27,1
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	395.844
5	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	200.000
H	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99
3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99
I	**PANGAN**		
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	372,73
2	Skor pola pangan harapan	skor	89,1
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,81
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,2
J	**LINGKUNGAN HIDUP**		
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	75
2	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	29,53
3	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100
4	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan yang dikelola	Hektar	162.103
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,91

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
6	Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	%	69
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	8,44
8	Persentase pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	100
9	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53,77
K	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	5,6
2	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100
L	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	1,31
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	10
3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	%	2,73
M	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	Angka	2,17
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Spesific Fertility*)/ASFR 15-19	Angka	18,2
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (*demand satisfied*)	%	77,37
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)	%	21,91
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,8
6	Indeks pengasuhan keluarga remaja	Indeks	90,06
7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,85
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,24
9	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,01
N	**PERHUBUNGAN**		
1	Rasio Konektivitas Darat	Angka	0,41
2	Persentase perlengkapan jalan terpasang	%	25
3	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	Angka	0,846
4	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	%	50,74
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	indeks	45,45
O	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	60
3	Persentase pengelolaan E-Government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	80
4	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	desa	n/a
P	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	44

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	50
3	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	n/a
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	24,5
5	Persentase koperasi dan UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	2
Q	**PENANAMAN MODAL**		
1	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara	Triliun Rp	49,86
2	Persentase peningkatan investasi	%	2,7
3	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rp	76,33
R	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
1	Rasio wirausaha pemuda	%	1,02
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	70
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	100
S	**STATISTIK**		
1	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	2,68
T	**PERSANDIAN**		
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks	366
U	**KEBUDAYAAN**		
1	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	50
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	45
3	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	29
V	**PERPUSTAKAAN**		
1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	skor	69,53
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	n/a
W	**KEARSIPAN**		
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	74,95
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	76
X	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,37
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	214.694,00
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	241.728,40
4	Luas kawasan konservasi	Ha	327.819,31
5	Angka konsumsi ikan	Kg/KAP/Th	36,72
Y	**PARIWISATA**		
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	1,69
2	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	%	28,06
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	3,55
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	2,83
Z	**PERTANIAN**		
1	Produktivitas tanaman pangan	Ton/ha	4,88
2	Produktivitas tanaman hortikultura	Ton/ha	17,32
3	Rata-rata produktivitas komoditas unggulan Perkebunan	Kg/ha	3.005

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
4	Produksi komoditas peternakan	Ton	89.493,54
5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	370,3
6	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	10.195,06
7	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Skor	91,25
8	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33
9	Persentase penanganan bencana pertanian	%	74,5
10	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan	%	100
11	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	77
12	Persentase kelembagaan koperasi tani (korporasi) yang dibentuk dan beroperasi	%	0,5
AA	**KEHUTANAN**		
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,49
2	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks	n/a
3	Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)	%	1
4	Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	%	10
5	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	%	64,95
BB	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**		
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	M3	12.939.254,38
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Km2	2.307,00
3	Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah	Ha	n/a
4	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Rekomendasi	n/a
5	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Rumah Tangga	5.147
6	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,14
7	Rasio elektrifikasi	%	96,17
CC	**PERDAGANGAN**		
1	Produk yang masuk pasar ekspor	Produk	17
2	Negara tujuan produk ekspor	Negara	11
3	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100
4	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	21,4
5	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	1,06
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
7	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	75
8	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	%	7
DD	**PERINDUSTRIAN**		
1	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	37,81

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
2	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan	%	100
3	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100
EE	**TRANSMIGRASI**		
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1
2	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100
FF	**SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Indeks kematangan organisasi	Indeks	47,43
2	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a
3	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	Level 3
4	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	orang	n/a
5	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1	mahasiswa	n/a
6	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3	mahasiswa	n/a
7	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim	mahasiswa	n/a
8	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri	mahasiswa	n/a
9	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus	mahasiswa	n/a
GG	**SEKRETARIAT DPRD**		
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n	%	n/a
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n	%	n/a
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a
HH	**PERENCANAAN**		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	90,1
II	**KEUANGAN**		
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	16,94
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	40,46
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	92,52
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	2,26
5	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	46,32
JJ	**KEPEGAWAIAN**		
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	60,87
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	86,54
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	94,23
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	97,29
5	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	56,01
KK	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
1	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis	Orang	1.490
2	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	Orang	7.153
3	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	130

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024
LL	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	%	70
2	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan	%	n/a
3	Persentase Pengembangan Hasil Invensi dan Inovasi	%	n / a
MM	**PENGAWASAN**		
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	%	72
2	Jumlah kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan	kasus	814
3	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	%	75
NN	**Pemerintahan Umum**		
1	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	indeks	6,85
2	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	100

Ket :
1. Angka bertanda * adalah data tahun 2023;
2. Angka bertanda ** adalah data tahun 2022;
3. n/a adalah data belum tersedia.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

A. Urusan Pendidikan

Sesuai peraturan terkait SPM bidang Pendidikan yang telah diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah Provinsi antara lain Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan pada Pendidikan Khusus yaitu Sekolah Luar Biasa. Lebih lanjut, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi karena berkenaan dan menyangkut dengan pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan indikator pelayanan minimal pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.76. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
-	**Kategori Indeks Pencapaian SPM**	**TUNTAS UTAMA**			**99.49 %**
1	**Pendidikan Menengah**				**99.66 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	177.468	177.468	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				19.66 %
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98.29 %
	SMA (2024)				98.47 %
	1 Angka partisipasi sekolah	100	100	0	100 %
	2 Kemampuan literasi	73.93	81.71	0	100 %
	3 Kemampuan numerasi	61.53	72.99	0	100 %
	4 Indeks iklim keamanan	82.44	72.66	9.78	88.14 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
	5	Indeks iklim kebhinekaan	77.25	75.18	2.07	97.32 %
	6	Indeks iklim inklusivitas	62.55	59.17	3.38	94.60 %
	SMK (2024)					
	1	Angka partisipasi sekolah	100	100	0	100 %
	2	Kemampuan literasi	69.31	75.45	0	100 %
	3	Kemampuan numerasi	58.24	67.35	0	100 %
	4	Tingkat penyerapan lulusan SMK	94	89.54	4.46	95.26 %
	5	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79	75.8	3.20	95.95 %
	6	Indeks iklim keamanan	82.1	70.84	11.26	86.29 %
	7	Indeks iklim kebhinekaan	74.43	72.91	1.52	97.96 %
	8	Indeks distribusi guru	0.33	0.33	0	1000 %
	9	Indeks iklim inklusivitas	59.91	57.64	2.27	96.21 %
2	**Pendidikan Khusus**					**99.32 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				(80%)	80 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	2.842	2.842	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				(20%)	19.32 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				96.60 %
	1	Angka partisipasi sekolah	100	100	0	100 %
	2	Kemampuan literasi	66.05	62.96	3.09	95.32 %
	3	Kemampuan numerasi	58.49	59.26	0	100 %
	4	Indeks iklim keamanan	78.79	69.56	9.23	88.29 %
	5	Indeks iklim kebhinekaan	72	67.42	4.58	93.64 %
	6	Indeks iklim inklusivitas	74	58.16	15.84	78.59 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Daerah pada Kategori indeks pencapaian SPM adalah Tuntas Utama atau sebesar 99,49 persen dan belum mencapai target Nasional sebesar 100 persen. Capaian Pendidikan menengah sebesar 99,66 persen dan pendidikan khusus dengan capaian 99,32 persen.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya pada pengumpulan data dan terkendala terhadap penetapan harga satuan yang tidak berdasarkan pada target sub kegiatan.

B. Urusan Kesehatan

Indikator yang ditetapkan pemerintah sebagai indikator standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpontesi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 2.77. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
-	**Kategori Indeks Pencapaian SPM**	**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	78.820	78.820	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20 %
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu yang harus dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu yang dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98.29 %
	1 Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	200	200	0	100 %
	2 Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	10	10	0	100 %
	3 Sarana dan prasarana	10	10	0	100 %
2	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	1.674	1.674	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			(20%)	20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1 Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	200	200	0	100 %
	2 Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	200	200	0	100 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
	3	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	200	200	0	100 %
	4	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	200	200	0	100 %
	5	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	200	200	0	100 %
	6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	200	200	0	100 %
	7	Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	200	200	0	100 %
	8	Tenaga medis : Dokter	10	10	0	100%
	9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	10	10	0	100%
	10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	10	10	0	100%
	11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	10	10	0	100%
	12	Tenaga Laboratorium	10	10	0	100%
	13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	10	10	0	100%
	14	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	10	10	0	100%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Nasional sebesar 100 persen dan Capaian Daerah pada Kategori indeks pencapaian SPM adalah Tuntas Paripurna sebesar 100 persen. Pada indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi dan indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi capaian daerah untuk pelayanan dasarnya sebesar 100 persen.

C. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang urusan sosial yaitu :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu :

a. Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi
b. Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi
c. Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi
d. Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi
e. Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi

Tabel 2.78. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	150	152	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			(20%)	20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Penyediaan permakanan	152	152	0	100 %
	2	Penyediaan sandang	152	152	0	100 %
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	10	10	0	100 %
	4	Penyediaan alat bantu	50	50	0	100 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	101	101	0	100 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	152	152	0	100 %
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	152	152	0	100 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	152	152	0	100 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	152	152	0	100 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	7	0	100 %
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti**					**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				(80%)	80 %
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	6056	6056	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				(20%)	20 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Pengasuhan	49	49	0	100 %
	2	Penyediaan permakanan	6056	6056	0	100 %
	3	Penyediaan sandang	6056	6056	0	100 %
	4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	26	26	0	100 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	10	10	0	100 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	6056	6056	0	100 %
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	6056	6056	0	100 %
	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	8	8	0	100 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6056	6056	0	100 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	5	5	0	100 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	16	0	100 %
	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	1	1	0	100 %
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**					**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				(80%)	80 %
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	1550	1550	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				(20%)	20 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Penyediaan permakanan	1550	1550	0	100 %
	2	Penyediaan sandang	1550	1550	0	100 %
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	17	17	0	100 %
	4	Penyediaan alat bantu	100	100	0	100 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	1550	1550	0	100 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1550	1550	0	100 %
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1550	1550	0	100 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	29	29	0	100 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1550	1550	0	100 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	116	116	0	100 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	7	0	100 %
	12	Pemulasaraan	11	11	0	100 %
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**					**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				(80%)	80 %
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	86	86	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				(20%)	20 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Penyediaan permakanan	86	86	0	100 %
	2	Penyediaan sandang	86	86	0	100 %
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	5	5	0	100 %
	4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	86	86	0	100 %
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	86	86	0	100 %
	6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	86	86	0	100 %
	7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	40	40	0	100 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	7	7	0	100 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	86	86	0	100 %
	10	Pemulangan ke daerah asal	35	35	0	100 %
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provins**					**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				(80%)	80 %
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	17870	17870	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				(20%)	20 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Penyediaan permakanan	17870	17870	0	100 %
	2	Penyediaan sandang	1000	1000	0	100 %
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1000	1000	0	100 %
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	900	900	0	100 %
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	600	600	0	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

D. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi pada Bidang Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut meliputi Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 2.79. Tabel Capaian SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20 %
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu yang harus dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu yang dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100 %
	1 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	184,15 miliar Rp	184,15 miliar Rp	0	100 %
	2 Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	4	4	0	100 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			(20%)	20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota (Rp)	11 miliar Rp	11 miliar Rp	0	100 %
	2 Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	2	2	0	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

Realisasi penerapan SPM Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pekerjaan Umum pada jenis pelayanan dasar terdiri dari Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota Tahun 2024 ialah belum dapat dilaksanakan karena kondisi geografis antar daerah di Kalimantan Timur belum dimungkinkan untuk pembangunan skala regional yang penduduknya masih jarang dan berpencar, berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa. Namun, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota terus diupayakan pembangunan fisik maupun perencanaannya.

E. Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri dari Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu Warga Negara dengan ketentuan Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana dan Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi.

Tabel 2.80. Tabel Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
-	**Kategori Indeks Pencapaian SPM**	**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20 %
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu yang harus dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu yang dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100 %
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			(80%)	80 %
		Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			(20%)	20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1 Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	10	10	0	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

F. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Trantibumlinmas mengacu Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibumlinmas provinsi yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yaitu Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi.

Tabel 2.81. Tabel Capaian SPM Urusan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian
-	**Kategori Indeks Pencapaian SPM**	**TUNTAS UTAMA**		**96.67 %**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**			**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**(80%)**	**80 %**

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A	Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	1.000	1.000	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				**(20%)**	**16.67 %**
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B.	Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	929	929	0	100 %
	2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	9	9	0	100 %
	3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	60	60	0	100 %
	4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2	2	0	100 %
	5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	20	20	0	100 %
	6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	20	20	0	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2025

2.1.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui sinergi kebijakan nasional dan daerah, dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBN, pembangunan difokuskan pada proyek-proyek strategis nasional yang berskala besar, lintas sektor, dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian wilayah. Rencana ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta panduan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Beberapa PSN telah ditetapkan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan lampiran Peraturan Menko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024. Proyek-proyek strategis tersebut diantaranya pengembangan kawasan perbatasan/jalan perbatasan provinsi, pengembangan Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Marangkayu dan Pelabuhan KEK Maloy diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air baku, meningkatkan konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Nasional melalui APBD Provinsi seperti pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu), pemeliharaan jalan Long Bagun Seberang – Long Boh (Batas Kaltara), dukungan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Pembangunan RSUD Provinsi di Kutai Barat dan Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II Samarinda.

2.1.7. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat sumber daya manusia, diperlukan langkah terpadu seperti pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Upaya ini didukung

oleh pembangunan sarana pendidikan, kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta pelatihan kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, perlu dilakukan penanganan stunting, eliminasi penyakit menular, perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat miskin dan rentan, pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas, serta penguatan layanan kesehatan melalui promosi hidup sehat, pemerataan tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan untuk seluruh Masyarakat;

2. Untuk memperkuat ekonomi daerah, diperlukan peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan melalui teknologi modern, pelatihan petani, dan perluasan pasar. Pengembangan kawasan industri, diversifikasi dan kemandirian pangan, serta penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan ekonomi kreatif, termasuk promosi destinasi unggulan dan pelatihan pelaku wisata, perlu didorong bersama dengan penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, teknologi, kemitraan usaha, serta pembangunan infrastruktur logistik yang terintegrasi;
3. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, konektivitas antarwilayah, dan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk dukungan terhadap IKN. Hal ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, irigasi, sarana transportasi darat, laut, udara, serta listrik dan telekomunikasi. Selain itu, dikembangkan kawasan industri dan perkotaan yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur pertanian, permukiman, kesehatan, dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan. Upaya ini juga didukung oleh pembiayaan inovatif melalui skema KPBU, CSR, dan pemanfaatan jasa ekosistem serta pasar karbon;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik yang responsif dan berbasis digital. Hal ini mencakup pengawasan karier ASN, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi layanan publik, dan pengembangan sistem pengaduan yang terintegrasi. Digitalisasi layanan pemerintahan juga dipercepat dengan pembangunan infrastruktur TIK, integrasi sistem satu data, peningkatan kapasitas SDM, dan jaminan keamanan data.

Selain itu, integritas diperkuat melalui pengawasan internal, budaya kerja yang transparan, serta manajemen risiko. Penguatan kapasitas fiskal daerah dilakukan lewat inovasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, efisiensi anggaran, kemitraan strategis, pengembangan BUMD, dan pemanfaatan dana CSR;

5. Penguatan kehidupan beragama, budaya, dan kearifan lokal dilakukan melalui peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, pembinaan keagamaan inklusif, serta pelestarian budaya dan seni daerah dalam bingkai NKRI. Kurikulum pendidikan diintegrasikan dengan muatan lokal, dan peran lembaga adat diperkuat dalam pengambilan keputusan serta perlindungan hak ulayat. Upaya ini juga mencakup promosi budaya melalui festival, pendidikan karakter, penyediaan ruang publik inklusif, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan;
6. Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan mencakup pengelolaan sampah dan limbah secara ramah lingkungan melalui fasilitas terpadu dan program 3R yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Ketahanan energi, air, dan ekologi ditingkatkan lewat pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air, serta pelestarian ekosistem dengan pendekatan konservasi dan teknologi hijau. Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem dilakukan melalui rehabilitasi hutan, gambut, dan mangrove, penguatan tata ruang berbasis kearifan lokal, serta pengembangan ekonomi hijau. Selain itu, mitigasi bencana diperkuat melalui sistem peringatan dini yang inovatif dan kesiapsiagaan lintas sektor secara terkoordinasi.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD disajikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penyajian pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai catatan, bahwa terdapat perbedaan komponen APBD untuk tahun 2020 yang ketentuannya masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Terdapat perbedaan komponen

penyajian APBD antara tahun 2020 dengan tahun 2021-2024 yaitu pada (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; serta (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Secara umum realisasi kinerja APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan realisasi penerimaan daerah berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 110,18 persen dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 96,26 persen. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 88,78 persen serta meningkat pada tahun 2024 sebesar 92,51 persen. Kinerja pelaksanaan APBD pada realisasi belanja daerah yang relatif lebih rendah daripada realisasi pendapatan daerah dikarenakan adanya efisiensi belanja daerah dan beberapa kegiatan fisik belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran dan belanja yang lebih matang dalam rangka peningkatan realisasi belanja. Adapun kinerja pelaksanaan APBD dalam 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.82. Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Daerah			
2020	8.584.526.835.525	10.133.115.629.662	118,04
2021	9.589.762.859.000	10.220.142.967.274	106,57
2022	12.469.541.473.626	16.804.693.776.013	134,77
2023	18.698.658.531.767	17.750.987.305.165	94,93
2024	21.221.750.228.801	22.084.373.012.119	104,06
Belanja Daerah			
2020	10.706.850.002.651	9.328.504.462.478	87,13
2021	12.260.598.307.059	10.723.529.422.431	87,46
2022	14.679.878.053.600	12.393.745.833.368	84,43
2023	21.649.509.223.080	19.724.959.715.482	91,11
2024	22.198.305.000.000	20.463.583.151.616	92,19
Penerimaan Pembiayaan			
2020	2.249.394.164.475	2.249.383.814.348	100,00
2021	2.674.485.448.059	2.953.994.981.532	110,45
2022	2.446.958.526.374	2.446.993.522.588	100,00
2023	6.621.341.468.233	6.621.017.958.435	100,00
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00

Tahun	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Pembiayaan			
2020	150.000.000.000	100.000.000.000	66,67
2021	3.650.000.000	3.650.000.000	100,00
2022	236.621.946.400	236.600.000.000	99,99
2023	3.670.490.776.920	3.670.490.776.920	100,00
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2020-2024, realisasi pendapatan daerah masuk dalam kategori sangat baik, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Adapun rencana dan realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.83. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
4.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**5.289,2**	**6.111,9**	**8.997,3**	**10.653,8**	**10.239,6**	**19,3**
4.01.01	Pajak Daerah	3.900,4	4.774,9	7.623,6	8.698,2	8.571,5	23,7
4.01.02	Retribusi Daerah	9,8	13,6	20,0	68,1	1.100,9	460,9
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	111,0	214,6	310,3	260,2	237,7	28,3
4.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.268,1	1.108,8	1.043,4	1.627,3	329,5	-10,6
4.02	**Pendapatan Transfer**	**4.831,9**	**4.094,3**	**7.790,3**	**7.006,9**	**11.698,8**	**33,0**
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.831,9	4.094,3	7.790,3	7.006,9	11.698,8	33,0
4.02.01.01	Dana Perimbangan	4.759,5	4.056,9	7.753,1	7.006,9	11.696,1	33,4
4.02.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.544,6	2.592,0	6.329,4	5.487,0	9.946,3	46,3
4.02.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	831,4	828,1	824,1	857,3	1.009,5	5,2

Kode Rekening	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertum buhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.02.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	212,1	247,5	233,2	185,1	209,8	0,9
4.02.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	171,3	389,4	366,4	477,6	530,5	40,7
4.02.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	72,3	37,5	37,2	-	-	-49,7
4.02.01.03	Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-	2,7	100,0
4.03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**12,0**	**13,9**	**17,1**	**90,2**	**146,0**	**131,7**
4.03.01	Pendapatan Hibah	3,3	13,9	17,1	21,1	19,2	91,1
4.03.02	Pendapatan Lainnya	8,8	-	-	69,2	126,8	-8,3
	Pendapatan Daerah	**10.133,1**	**10.220,1**	**16.804,7**	**17.751,0**	**22.084,4**	**23,8**

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Analisis Pendapatan Daerah dilakukan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2020 hingga 2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 23,8 persen. Capaian realisasi terendah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp10,13 triliun. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp22,08 triliun yang diakibatkan meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebagai dampak meningkatnya ekspor migas dan batubara.

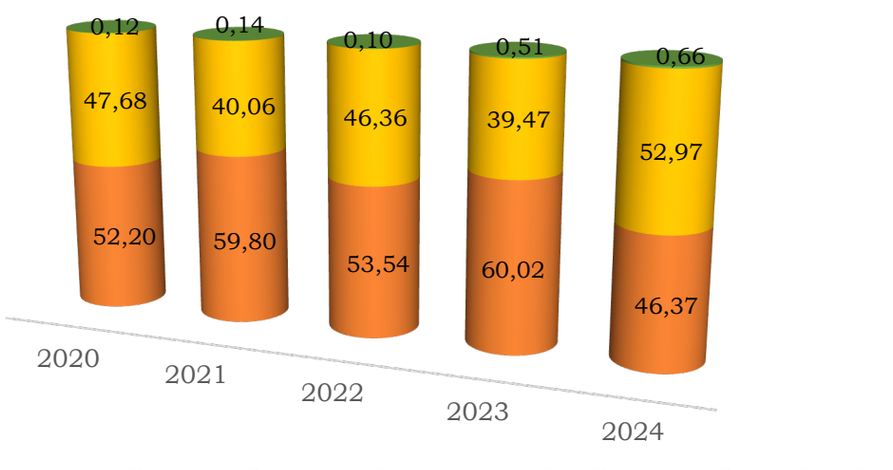

Gambar 2.82. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Jika dilihat dari tren persentase realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki proporsi yang lebih dominan dari komponen pendapatan lainnya dengan rata-rata 54,38 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer berfluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan transfer pemerintah pusat dari Dana Bagi Hasil (DBH). Kontribusi PAD yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama pendapatan daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 80,39 persen. Secara absolut, realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar Rp3,9 triliun dikarenakan dampak pandemi Covid-19, serta lesunya aktivitas lapangan usaha sektor ekstraktif yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

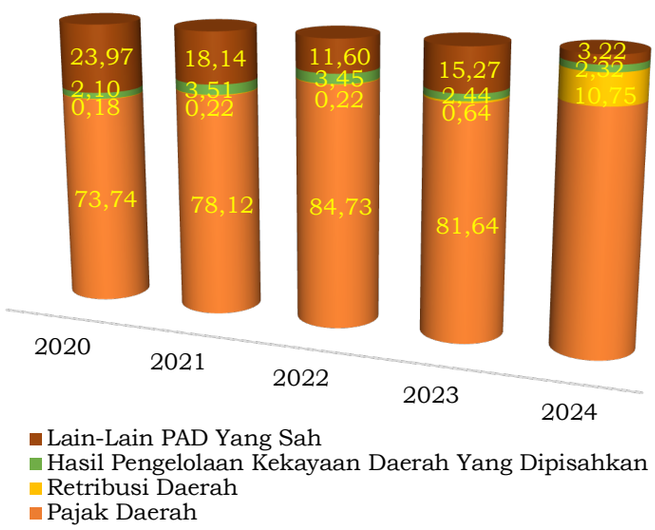

Gambar 2.83. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak daerah masih didominasi oleh 3 komponen pembentuk utama yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Pendapatan Transfer

Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan transfer paling dominan rata-rata dalam 5 tahun terakhir mencapai 76,25 persen yang sebagian besar dipengaruhi oleh DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalti. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pertambangan batubara terhadap keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi.

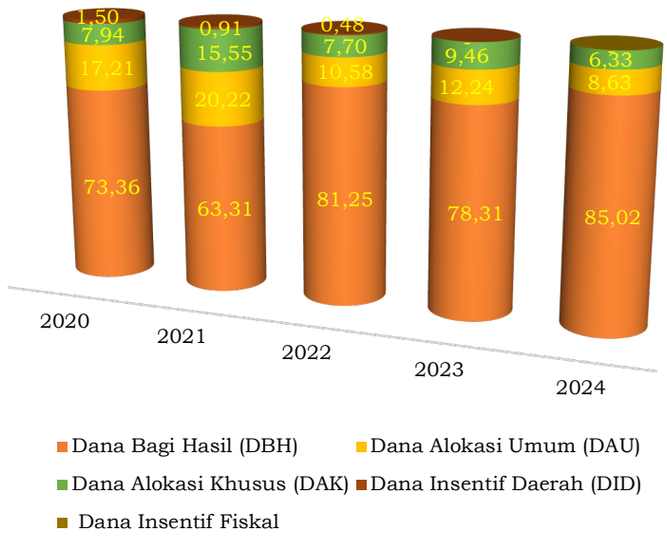

Gambar 2.84. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Berdasarkan proporsi komponen pembentuk Pendapatan Transfer yang dimuat pada gambar di atas, penurunan realisasi DBH pada tahun 2021 menjadi Rp4,09 triliun sangat erat kaitannya dengan melemahnya perekonomian daerah yang terjadi di tahun 2020 terutama pada sektor lapangan usaha pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2022 hingga tahun 2024 memberikan dampak pada meningkatnya DBH terutama yang bersumber dari DBH Mineral dan Batubara seiring dengan tingginya permintaan global serta membaiknya harga batubara acuan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi pada kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,31 persen. Capaian komponen ini juga berfluktuasi semenjak tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2023 – 2024. Sumber pendapatan pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,8 persen yang dipengaruhi oleh pendapatan atas dana *Reducing Emission for Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment*, serta keuntungan bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pertambangan mineral logam dan batu bara.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pengalokasian belanja daerah ini wajib terlebih dahulu memprioritaskan belanja wajib *(mandatory spending)* dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM). Selain itu, belanja daerah juga diprioritaskan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur. Setelah kedua prioritas tersebut dipenuhi, selanjutnya belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya.

Perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada tahun 2020 sebesar Rp9,33 triliun menjadi sebesar Rp20,46 triliun pada tahun 2024. Realisasi belanja meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024 terutama pada komponen belanja modal dan belanja transfer akibat meningkatnya belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.84. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kode Rek.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.01	**BELANJA OPERASI**	**4.624,5**	**4.983,2**	**6.001,8**	**8.267,5**	**9.336,8**	**19,7**
5.01.01	Belanja Pegawai	1.668,1	2.105,6	2.334,6	2.591,4	3.225,8	18,1
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.779,8	2.634,9	3.184,2	4.984,4	4.898,7	17,6
5.01.03	Belanja Hibah	163,9	228,7	432,0	679,8	1.195,1	65,4
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12,6	14,0	50,9	11,9	17,2	61,0
5.02	**BELANJA MODAL**	**1.066,6**	**1.514,5**	**1.980,0**	**5.023,5**	**4.870,0**	**55,8**
5.02.01	Tanah	0,0	25,3	85,1	215,9	78,0	26.424,2
5.02.02	Peralatan dan Mesin	418,1	300,2	755,3	1.654,1	1.142,6	52,9
5.02.03	Bangunan dan Gedung	247,2	537,5	421,6	1.190,2	1.963,2	85,8
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	374,8	638,2	702,1	1.914,8	1.612,4	59,3
5.02.05	Aset tetap lainnya	26,6	13,2	16,0	35,2	41,7	27,4
5.02.06	Aset lainnya	-	-	-	13,3	32,0	140,7
5.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**226,2**	**221,4**	**6,7**	**50,4**	**64,2**	**145,6**
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**3.411,3**	**4.004,5**	**4.405,3**	**6.383,6**	**6.192,6**	**17,3**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.863,2	2.455,9	3.542,7	5.186,1	4.391,4	26,8
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.548,0	1.548,6	862,5	1.197,5	1.801,1	11,2
	Jumlah Belanja Daerah	**9.328,5**	**10.723,5**	**12.393,7**	**19.725,0**	**20.463,6**	**23,4**

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 23,4 persen. Realisasi belanja terendah pada tahun 2022 terdapat pada komponen belanja tidak terduga (BTT) sebesar 1,2 persen dan belanja modal sebesar 74,75 persen. Rendahnya realisasi BTT ini dikarenakan tidak ada belanja untuk penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2022 seperti yang dialokasikan pada tahun sebelumnya yang diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Secara struktur belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata sebesar 46,40 persen karena pada komponen dimaksud termasuk komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komponen terbesar berikutnya adalah belanja transfer dengan rata-rata sebesar 34,42 persen karena pada pendapatan dimaksud terdapat belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 2.85. Proporsi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, besaran belanja transfer semenjak tahun 2026 diperkirakan akan menurun karena telah menggunakan pola opsen untuk penerimaan Pajak Kendaran Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2020-2024 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel 2.85. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**Penerimaan Pembiayaan**						
1.	Penggunaan SiLPA	2.249,38	2.953,99	2.446,99	6.621,02	976,55	24,90

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penerimaan		**2.249,38**	**2.953,99**	**2.446,99**	**6.621,02**	**976,55**	**24,90**
B	**Pengeluaran Pembiayaan**						
1.	Penyertaan Modal Investasi Pemda	100,00	3,65	236,60	3.670,49	0,00	1.915,95
Jumlah Pengeluaran		**100,00**	**3,65**	**236,60**	**3.670,49**	**0,00**	**1.915,95**
Pembiayaan Netto		**2.149,38**	**2.950,34**	**2.210,39**	**2.950,53**	**976,55**	**(13,58)**
SILPA		**2.953,99**	**2.446,96**	**6.621,34**	**976,55**	**1.620,79**	**33,54**

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah hanya diperoleh melalui SiLPA. Pengalokasian SiLPA berfluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp6,62 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp976,55 miliar. Meningkatnya realisasi SiLPA pada tahun 2023 dikarenakan realisasi pendapatan tahun 2022 yang melampaui target dan realisasi belanja pada tahun 2022 hanya mencapai 77,90 persen.

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) merupakan salah satu komponen penerimaan daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Perolehan SiLPA selama tahun 2020-2024 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel 2.86. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
Jumlah SILPA	**2.954,0**	**100,0**	**2.447,0**	**100,0**	**6.621,3**	**100,0**	**976,6**	**100,0**	**2.597,3**	**100,0**
Pelampauan penerimaan PAD	962,9	32,6	715,0	29,2	1.923,3	29,1	1.088,9	111,5	252,7	9,7
Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	562,0	19,0	-85,8	-3,5	2.407,5	36,4	-2.362,8	-241,9	665,9	25,6
Pelampauan lain-lain pendapatan	0,8	0,0	1,2	0,1	4,4	0,1	326,2	33,4	-56,0	-2,2

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
Jumlah SILPA	**2.954,0**	**100,0**	**2.447,0**	**100,0**	**6.621,3**	**100,0**	**976,6**	**100,0**	**2.597,3**	**100,0**
daerah yang sah										
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.378,3	46,7	1.537,1	62,8	2.286,1	34,5	1.924,5	197,1	1.734,7	66,8
Pelampauan pembiayaan netto	50,0	1,7	279,5	11,4	0,1	-0,0	-0,3	-0,0	-0,0	-0,0

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Perolehan SILPA selama tahun 2020-2024 utamanya dipengaruhi oleh penghematan belanja atau akibat lainnya yang diperoleh melalui efektivitas dalam efisiensi/penghematan belanja atau belum optimalnya realisasi belanja daerah yang rata-rata berkontribusi sebesar 81,6 persen. Sedangkan, komponen lainnya yang menjadi penyumbang perolehan SILPA adalah pelampauan pendapatan daerah (PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah) yang rata-rata berkontribusi sebesar 15,8 persen.

2.2.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah Neraca Daerah. Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2020-2024 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel 2.87. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**Aset**	**34.958,1**	**33.527,0**	**38.361,0**	**43.420,4**	**46.589,6**	**7,70**
1.1	Aset Lancar	4.404,8	3.850,0	8.362,1	3.198,0	4.876,1	23,83
1.2	Investasi Jangka Panjang	3.508,1	3.689,2	4.084,4	7.832,2	7.832,2	26,91
1.3	Aset Tetap	24.424,9	24.200,3	24.763,0	27.861,5	32.649,1	7,78
1.5	Aset Lainnya	2.620,4	1.787,5	1.151,5	4.187,9	940,3	29,69
1.6	Properti Investasi				340,9	291,9	(14,36)
2	**Kewajiban**	**2.423,0**	**1.631,6**	**1.221,8**	**890,2**	**1.219,2**	**(11,99)**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	451,9	483,7	1.133,1	801,5	1.130,5	38,27
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.971,1	1.147,9	88,7	88,7	88,7	(33,51)
3	**Ekuitas**	**32.535,1**	**31.895,4**	**37.139,2**	**42.530,2**	**45.370,4**	**8,92**
3.1	Jumlah Ekuitas	32.535,1	31.895,4	37.139,2	42.530,2	45.370,4	8,92

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, Tahun 2025

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari pemanfaatan ekonomi dan/atau sosial serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,70 persen.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan selama 11,99 persen. Penurunan kewajiban ini dipengaruhi oleh signifikannya pengurangan Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,92 persen atau sebesar Rp45,37 triliun.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

Optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 akan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi ekonomi makro nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.88. Asumsi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Tahun 2025	Tahun 2029
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	8,0
Gross National Income per kapita (USD)	5.410	8.000
Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (%)	5,14	7,27
Konsumsi Pemerintah (%)	6,66	8,40
Investasi (%)	5,61	9,65
Ekspor Barang dan Jasa (%)	6,95	9,50
Lifting Minyak Bumi (ribu BOPD)	605	6,42-7,92
Lifting Gas Bumi (ribu BOEPD)	1.005	1.371 - 1.617
Produksi Batubara (Juta Ton)	717	743

Sumber : Perpres No 12 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Sejalan perbaikan ekonomi nasional dan proyeksi ekonomi nasional yang semakin meningkat pada tahun 2029, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah mempertimbangkan asumsi makro ekonomi nasional pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026-2030 mempertimbangkan target makro ekonomi Kalimantan Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.89. Proyeksi Ekonomi Makro Kalimantan Timur

Indikator	Tahun 2025	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	6,30	8,65
PDRB per kapita (Juta Rupiah)	218,10	328,0
Inflasi (Persen)	2,5+1	2,5+1
Investasi (Triliun Rp)	77,86	91,12
Ekspor Barang dan Jasa (Persen PDRB)	48,84-49,07	53,32-54,44
Kontribusi Industri Pengolahan (Persen)	18,32	19,60
Nilai Tukar Petani (Persen)	139,41	146,60

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pendapatan daerah merupakan instrumen dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan belanja daerah. Penyusunan pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan

pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 yang diproyeksikan lebih tinggi dari tahun 2025 dan terus meningkat hingga pada tahun 2030 mencapai Rp20,9 triliun atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,79 persen. Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 akan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi rata-rata sebesar 54,18 persen atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,26 persen. Komponen pendapatan terbesar berikutnya pendapatan transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 45,18 persen atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,84 persen. Masih tingginya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah yang memiliki kemandirian fiskal.

Tingginya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dipengaruhi Pajak Daerah yang akan berkontribusi dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 82,71 persen dengan perolehan utama yang bersumber dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. PAD diproyeksikan mengalami tren peningkatan moderat sepanjang tahun 2026–2030, dengan komponen utama berasal dari pajak daerah, yang secara konsisten menyumbang lebih dari 80 persen total PAD. Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi PAD antara lain :

1. Perubahan regulasi terkait penurunan Tarif PKB sebesar 24 % dari semula 1,75 % menjadi 1,328 % (0,8 % ditambah opsen 66%), serta penurunan Tarif BBNKB sebesar 11 % dari semula 15% menjadi 13,28 % (8 % ditambah opsen 66%), sehingga proyeksi pendapatan pada tahun 2026 mengalami penurunan;
2. Dengan adanya penurunan tarif PKB dan BBNKB menjadi 0,8% diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bertambah dan meningkatnya animo masyarakat untuk mutasi kendaraan wilayah Kalimantan Timur dan minat pembelian kendaraan bermotor untuk wilayah Kalimantan Timur diperkirakan akan terus meningkat;

3. Asumsi Tren pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang berdampak pada peningkatan permintaan kendaraan baru;
4. Penurunan target produksi batubara pada tahun 2026 menjadi 728 juta ton dari tahun 2025 sebesar 740 ton berdampak pada penurunan penerimaan PBBKB pada tahun 2026, namun target produksi akan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2027-2030.

Sedangkan proyeksi pendapatan dari Pendapatan Transfer akan dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan berkontribusi dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 79,17 persen. Proyeksi penerimaan DBH diperhitungkan dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi makro daerah, realisasi penerimaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan alokasi target dana transfer lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Proyeksi penerimaan DBH Sumber Daya Alam pada tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh asumsi penurunan target produksi batubara yang berdampak pada penurunan royalti mineral dan batubara, namun pada tahun 2028-2030 diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komponen lainnya pada penerimaan DBH seperti Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan akan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4 persen pertahun, sedangkan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksi akan terus meningkat 9-10 persen pertahun dengan mempertimbangkan realisasi 5 tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sangat dipengaruhi oleh Komponen Penerimaan dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pendapatan hibah. Penurunan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dipengaruhi oleh penurunan keuntungan bersih dari perusahaan pemegang IUPK.

Pendapatan Daerah diharapkan terus lebih meningkat ditahun 2027 sampai dengan tahun 2030, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk pendapatan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi :
   a. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Melakukan kajian secara holistik untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
   c. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
   d. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
   e. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
   f. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   g. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
   h. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   i. Melakukan *cleansing database* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
   j. Pemberian relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
   k. Digitalisasi pelayanan pajak;
   l. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
   m. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB);

n. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;

2. Komponen Pendapatan Transfer bagi Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal. Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan dan penyaluran pendapatan transfer.
   b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
3. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Strategi yang dijalankan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyaluran dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment;*
   b. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam pembayaran laba bersih kepada pemerintah provinsi.

Adapun penetapan pendapatan daerah pada tahun 2025 bersumber dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.90. Penetapan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030
(Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Penetapan 2025 (Rp)	Proyeksi					
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	**Pendapatan Daerah**	**19.149.234.532.603**	**20.450.000.000.000**	**19.748.000.000.000**	**20.360.000.000.000**	**21.070.293.000.000**	**21.917.210.000.000**	**2,79**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	**9.566.413.121.680**	**10.753.535.391.163**	**10.934.779.767.753**	**11.192.998.415.720**	**11.461.923.166.077**	**11.744.345.960.649**	**4,26**
4.1.01	Pajak Daerah	7.937.566.254.869	9.067.500.000.000	9.169.950.000.000	9.278.300.000.000	9.376.725.000.000	9.480.240.000.000	3,74
4.1.02	Retribusi Daerah	1.114.869.349.428	1.126.375.315.643	1.203.993.442.567	1.285.324.080.085	1.371.520.951.766	1.464.888.069.807	5,64
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	377.458.223.635	432.266.776.014	446.601.810.672	510.770.391.391	589.267.398.076	668.863.829.150	12,22
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	136.519.293.748	127.393.299.506	114.234.514.514	118.603.944.243	124.409.816.235	130.354.061.693	-0,70
4.2	**Pendapatan Transfer**	**9.277.648.428.533**	**9.334.429.762.111**	**8.727.832.244.735**	**9.091.259.569.202**	**9.540.173.346.319**	**10.110.527.585.740**	**1,84**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.277.648.428.533	9.334.429.762.111	8.727.832.244.735	9.091.259.569.202	9.540.173.346.319	10.110.527.585.740	1,84
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	21.414.666.000	21.414.666.000	17.879.814.047	14.928.449.053	12.464.256.649	10.406.820.780	-13,21
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.554.590.339.533	7.611.383.073.111	6.888.691.614.605	7.146.241.820.588	7.479.244.084.218	7.922.795.006.272	1,12
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.049.286.349.000	1.049.286.349.000	1.107.239.257.142	1.147.074.567.703	1.188.343.039.126	1.231.096.232.450	3,26
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.357.074.000	652.345.674.000	714.021.558.941	783.014.731.858	860.121.966.326	946.229.526.238	7,79
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**305.172.982.390**	**362.034.846.726**	**85.387.987.512**	**75.742.015.078**	**68.196.487.604**	**62.336.453.611**	**-17,53**
4.3.01	Hibah	28.361.111.193	29.805.805.044	28.435.288.996	29.179.856.266	29.946.760.554	30.736.671.971	1,68
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	276.811.871.197	332.229.041.682	56.952.698.516	46.562.158.812	38.249.727.050	31.599.781.640	-23,26

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2025

B. Proyeksi Belanja Daerah

Perhitungan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pengalokasian belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berbasis kinerja yang berdasarkan pada target dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Perencanaan belanja berbasis kinerja menjadi pendekatan utama yang digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja. Disamping itu, alokasi belanja daerah disusun dengan strategi penganggaran berbasis prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;

3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Dengan pendapatan daerah yang tumbuh sebesar 2,79 persen, arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada perwujudan visi pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yaitu peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah selama lima tahun diarahkan pada:

1) Pemenuhan kebutuhan belanja untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan wajib layanan dasar;
2) Pemenuhan alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk fungsi pendidikan, peningkatan kompetensi SDM ASN dan pengawasan;
3) Pemenuhan alokasi belanja wajib dan mengikat lainnya seperti belanja gaji dan tunjangan aparatur, dana alokasi khusus, DBH SDA-DR, dan lainnya;
4) Pemenuhan kebutuhan belanja untuk mendukung pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, dan program prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
5) Pemenuhan kebutuhan belanja untuk pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur (Gratispol dan Jospol) dalam rangka mewujudkan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas;

6) Meningkatkan kualitas belanja daerah pada belanja produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
7) Memprioritaskan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif seperti pariwisata, perdagangan, pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM dan IKM;
8) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
9) Pemenuhan kebutuhan belanja dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan potensi ekonomi daerah, penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kesempatan kerja;
10) Pemenuhan kebutuhan belanja dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik;
11) Belanja subsidi dialokasikan untuk subsidi biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
12) Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota dialokasikan atas perolehan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan yang harus dibagihasilkan;
13) Belanja transfer ke kabupaten/kota melalui bantuan keuangan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah merupakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan yakni pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Belanja daerah pada tahun 2025 merupakan jumlah belanja daerah pada P-RKPD tahun 2025. Adapun proyeksi belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91. Penetapan Belanja Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Penetapan 2025 (Rp)	Proyeksi					
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**BELANJA DAERAH**	**21.696.857.674.103**	**21.350.000.000.000**	**21.248.000.000.000**	**21.860.000.000.000**	**22.570.293.000.000**	**23.417.210.000.000**	**1,56**
5.01	**Belanja Operasi**	**10.119.989.613.078**	**10.992.895.037.628**	**10.040.845.706.566**	**10.145.691.319.534**	**10.150.539.355.309**	**10.255.389.815.101**	**0,42**
5.01.01	Belanja Pegawai	3.824.853.450.880	4.135.467.815.430	4.137.535.549.338	4.139.604.317.112	4.141.674.119.271	4.143.744.956.331	1,66
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.914.929.763	6.409.962.482.198	5.553.690.387.228	5.556.467.232.421	5.559.245.466.038	5.562.025.088.771	0,45
5.01.04	Belanja Subsidi	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20,00
5.01.05	Belanja Hibah	710.045.732.435	414.970.490.000	309.619.770.000	409.619.770.000	409.619.770.000	509.619.770.000	-2,05
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	24.175.500.000	12.494.250.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	2,35
5.02	**Belanja Modal**	**4.717.602.475.646**	**3.111.594.988.294**	**5.320.154.293.434**	**5.569.750.220.466**	**6.247.753.644.691**	**6.647.320.184.899**	**12,04**
5.03	**Belanja Tidak Terduga**	**109.300.545.408**	**70.218.949.370**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**	**1,33**
5.04	**Belanja Transfer**	**6.749.965.039.971**	**7.175.291.024.708**	**5.787.000.000.000**	**6.044.558.460.000**	**6.072.000.000.000**	**6.414.500.000.000**	**-0,50**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.696.713.889.971	5.231.796.378.408	5.187.000.000.000	5.444.558.460.000	5.472.000.000.000	5.714.500.000.000	4,09
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000	1.943.494.646.300	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000	-11,56

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2025

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan dalam rangka menutup defisit anggaran yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Proyeksi SiLPA pada tahun 2026-2030 diasumsikan bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penghematan belanja daerah atau akibat lainnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk kurun waktu tahun 2026-2030 tidak dialokasikan dengan asumsi kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk penyertaan modal pada BUMD telah tercukupi. Terhadap selisih pengeluaran dan penerimaan pembiayaan tersebut, terdapat pembiayaan netto yang digunakan untuk menutupi defisit pendapatan akibat lebih besarnya belanja daerah. Adapun proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.92. Penetapan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Penetapan 2025 (Rp)	Proyeksi					
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	**Pembiayaan**							
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.597.623.141.500**	**900.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**-21,96**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.597.623.141.500	900.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	-21,96
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**2.547.623.141.500**	**900.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**-21,82**

Sumber: Bapenda Provinsi KALTIM, 2025

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah selama periode RPJMD. Perhitungan proyeksi kapasitas riil direncanakan bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Penggunaan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni :

1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur melalui pendanaan program unggulan Gratispol dan Jospol;
3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun perhitungan kapasitas riil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.93. Penetapan Kapasitas Rill tahun 2025 dan Proyeksi Kapasitas Rill Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah)

No	Uraian	Penetapan 2025 (Rp)	Proyeksi					
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	**Penerimaan Daerah**	**21.696.857.674.103**	**21.350.000.000.000**	**20.248.000.000.000**	**20.860.000.000.000**	**21.570.293.000.000**	**22.417.210.000.000**	**0,72**
1	Pendapatan Daerah	19.149.234.532.603	20.450.000.000.000	19.748.000.000.000	20.360.000.000.000	21.070.293.000.000	21.917.210.000.000	2,79
2	Penerimaan Pembiayaan	2.547.623.141.500	900.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	-21,82
B	**Belanja Wajib**	**10.758.777.781.721**	**11.291.776.738.230**	**12.399.653.536.118**	**12.116.338.772.994**	**12.317.127.697.397**	**12.748.982.780.864**	**3,53**
1	Belanja Pegawai bagi ASN, Kepala Daerah dan DPRD	3.824.853.450.880	4.135.467.815.430	4.137.535.549.338	4.139.604.317.112	4.141.674.119.271	4.143.744.956.331	1,66
2	Balanja DAK	652.357.074.000	652.345.674.000	714.021.558.941	783.014.731.858	860.121.966.326	946.229.526.238	7,79
3	Belanja DBH SDA-DR	292.188.953.933	158.574.202.000	152.977.925.685	159.551.913.138	166.408.407.435	173.559.548.867	-7,27
4	Belanja FCPF	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
5	Belanja BLUD	1.237.664.412.937	1.107.261.678.392	1.203.118.502.154	1.284.609.350.885	1.371.923.204.365	1.465.948.749.428	3,71
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	4.696.713.889.971	5.233.127.368.408	6.187.000.000.000	5.744.558.460.000	5.772.000.000.000	6.014.500.000.000	5,44
5	Penyertaan Modal ke BUMD	50.000.000.000	-	-	-	-	-	
	Kapasitas Rill Keuangan Daerah	**10.938.079.892.382**	**10.058.223.261.770**	**7.848.346.463.882**	**8.743.661.227.006**	**9.253.165.302.603**	**9.668.227.219.137**	**-1,66**
C	**Pemanfaatan Kasitas Rill Keuangan Daerah**	**10.938.079.892.382**	**10.058.223.261.770**	**7.848.346.463.882**	**8.743.661.227.006**	**9.253.165.302.603**	**9.668.227.219.137**	**-1,66**
1	Prioritas I	839.811.535.185	804.352.508.091	835.088.417.503	836.046.716.724	837.008.472.919	837.973.702.706	-0,01
a	Belanja operasional kantor bersifat wajib	589.860.357.906	592.824.480.308	593.120.892.548	593.417.452.994	593.714.161.721	594.011.018.802	0,14
b	Belanja Mandatory dan SPM	131.030.861.871	131.689.308.413	132.347.754.955	133.009.493.730	133.674.541.198	134.342.913.904	0,50

No	Uraian	Penetapan 2025 (Rp)	Proyeksi					
			2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
c	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	9.619.770.000	9.619.770.000	9.619.770.000	9.619.770.000	9.619.770.000	9.619.770.000	0,00
d	Belanja Tidak Terduga	109.300.545.408	70.218.949.370	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	1,33
2	Prioritas II	1.703.261.104.569	4.746.809.224.443	5.329.560.470.924	4.933.858.143.300	5.178.213.107.680	4.708.528.345.339	35,88
a	Belanja Program Unggulan Gratispol	644.692.925.004	2.702.558.264.147	2.938.753.112.024	3.044.390.843.700	3.137.406.674.909	3.213.016.358.322	67,40
b	Belanja Program Unggulan Jospol	1.058.568.179.565	2.044.250.960.296	2.390.807.358.900	1.889.467.299.600	2.040.806.432.771	1.495.511.987.017	14,08
3	Prioritas III	8.395.007.252.628	4.507.061.529.236	1.683.697.575.455	2.973.756.366.982	3.237.943.722.004	4.121.725.171.091	0,77
a	Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya	8.395.007.252.628	4.507.061.529.236	1.683.697.575.455	2.973.756.366.982	3.237.943.722.004	4.121.725.171.091	0,77

Sumber: Bapenda Provinsi KALTIM, 2025

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

Pengidentifikasian permasalahan pembangunan dan isu strategis berperan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Pemetaan yang akurat terhadap permasalahan pembangunan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang menyeluruh. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara realita atau kondisi pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sementara isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, diperoleh 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu pengungkit untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, kualitas dan daya saing SDM di Kalimantan Timur masih belum merata di seluruh wilayah. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa kabupaten memiliki capaian di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02 yakni Mahakam Ulu sebesar 70,79, Kutai Barat sebesar 74,76, dan Penajam Paser Utara 74,94. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah.

Tingkat pendidikan tenaga kerja di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2024, tenaga kerja di Kalimantan Timur masih didominasi oleh lulusan SMA/sederajat sebesar 27,6 persen dan lulusan SD/sederajat ke bawah sebesar 24,4 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang berimplikasi terhadap keterbatasan kompetensi dan daya saing di pasar kerja. Selain itu, tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK yang mencapai 18,16 persen turut mempengaruhi kondisi ketersediaan tenaga

kerja terampil di daerah ini. Rendahnya akses pendidikan tinggi dan keterampilan vokasional menyebabkan banyak tenaga kerja belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur yang mencapai 5,14 persen atau masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.

Tantangan dalam sektor kesehatan juga turut memengaruhi kualitas SDM. Pada tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih tergolong cukup tinggi yaitu berada pada angka 22,90 persen. Masih rendahnya penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan menyebabkan indeks keluarga sehat berada pada angka 0,286 masuk dalam kategori “Keluarga Tidak Sehat”. Masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan serta adanya infeksi dan berat badan lahir rendah menjadi salah satu penyebab kematian ibu dan bayi. Meningkatnya kasus tuberkulosis juga merupakan tantangan dalam sektor kesehatan yang disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberkulosis. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberkulosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, faktor ekonomi juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing SDM di Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masih berada di atas 5,00 persen. Kemiskinan yang tinggi berpotensi memperburuk ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

2. Masih lambatnya transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kalimantan Timur. Sebagai daerah yang selama ini bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan penggalian, upaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi masih berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sumber daya alam berisiko terhadap ketidakstabilan ekonomi, terutama akibat fluktuasi harga

komoditas global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan sektor non-ekstraktif menjadi penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau perlu menjadi salah satu strategi untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 38,38 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian adalah perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang pada tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 0,23 persen, demikian pula dengan sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar 2,38 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya diversifikasi ekonomi belum berjalan optimal. Selain itu, pengembangan kawasan peruntukan industri dalam konsep Superhub Ekonomi IKN, seperti di Kariangau, Buluminung, dan Maloy, masih menghadapi berbagai kendala. Pembangunan infrastruktur, investasi, penyediaan tenaga kerja kompeten dengan keterampilan khusus sesuai arah pembangunan transformasi ekonomi, serta regulasi yang belum optimal menjadi tantangan dalam percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi

Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung sektor-sektor strategis. Namun, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan besar hingga saat ini.

Salah satu tantangan utama dalam infrastruktur dasar di Kalimantan Timur adalah kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Jalan provinsi yang mengalami rusak berat mencapai 111,46 km, sementara yang rusak ringan mencapai 55,55 km. Kondisi serupa juga terjadi pada jalan nasional, di mana terdapat 100,5 km jalan rusak berat dan 136,41 km jalan rusak ringan. Infrastruktur jalan yang belum optimal menyebabkan mobilitas barang dan orang menjadi terhambat, meningkatkan biaya logistik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada transportasi darat. Selain itu, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah hanya mencapai 149,19 km/1.000 km2 dan masih di bawah rasio panjang

jalan secara nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km2 hal ini tergambar dari masih ada wilayah yang belum memiliki konektivitas darat yang memadai, seperti di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat yang terhubung dengan wilayah lain. Selain itu, belum adanya bandara di Ujoh Bilang semakin memperburuk aksesibilitas wilayah. Belum terbangunnya jalur transportasi di wilayah tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta sulitnya mengakses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Dukungan konektivitas di kawasan ekonomi juga masih belum optimal seperti pada kawasan industri kariangau, kawasan industri buluminung dan kawasan ekonomi khusus maloy batuta trans Kalimantan.

Pada sektor pelayanan dasar, cakupan layanan air minum di Kalimantan Timur baru mencapai 83,71 persen, sementara di beberapa daerah seperti Kota Balikpapan dan Bontang masih menghadapi krisis air bersih. Selain itu, cakupan akses sanitasi layak baru mencapai 84,23 persen. Hal tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai sehingga berisiko terhadap penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, masalah lain dalam sektor pelayanan dasar adalah backlog perumahan, ini mengindikasikan perlunya kebijakan strategis dan intervensi programatik dalam sektor perumahan, baik melalui program subsidi kepemilikan (Gratis Biaya Rumah/GBA), pembangunan rumah layak huni, maupun optimalisasi pemanfaatan rumah yang sudah tersedia namun belum dihuni. Upaya penanganan backlog perumahan akan menjadi salah satu prioritas dalam arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD, dengan memperhatikan pemerataan antar wilayah serta keberpihakan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, infrastruktur penunjang pertanian dan pariwisata juga belum optimal yang dapat menghambat produktivitas kedua sektor tersebut.

Penyediaan listrik yang bersumber dari PLN di semua desa belum terpenuhi, hingga pada tahun 2024 masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut tidak selaras dengan capaian rasio elektrifikasi pada tahun 2024 yang telah mencapai 96,17 persen.

4. Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah

Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah juga masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Ketimpangan ini terlihat dari disparitas distribusi pendapatan masyarakat serta ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur antara kawasan perkotaan/pesisir dan daerah pedalaman dan perbatasan. Jika tidak diatasi, kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang mencerminkan ketimpangan ekonomi adalah nilai rasio Gini yang mencapai 0,321 pada tahun 2024, dimana capaian tersebut tertinggi di Pulau Kalimantan. Selain itu, Indeks Williamson yang relatif tinggi di angka 0,389 menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi pembangunan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pesisir timur, sedangkan wilayah barat terutama pada kawasan pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur masih cukup tertinggal. Hal tersebut berpotensi memperlambat pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperbesar kesenjangan sosial di masa depan.

5. Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup

Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi berbagai kegiatan ekonomi berbasis lahan. Risiko penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, pengelolaan limbah yang belum optimal, serta alih fungsi lahan yang semakin masif. Permasalahan ini dapat berdampak serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang apabila tidak segera diatasi.

Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Timur masih tergolong rendah, yaitu sebesar 52,64. Selain itu, pengelolaan sampah di Kalimantan Timur pun masih jauh dari optimal, dengan hanya 17,59 persen sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah. Tekanan terhadap lingkungan juga diperparah dengan alih fungsi lahan akibat desakan aktivitas ekonomi, seperti ekspansi pertambangan dan perkebunan. Kerusakan lingkungan semakin sulit dikendalikan karena pengawasan dan regulasi yang belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Namun, berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan masih belum berjalan secara optimal hingga saat ini. Akuntabilitas, pelayanan publik, sistem pengawasan, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kalimantan Timur, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum cukup optimal dengan skor 78,74 dari skor maksimal 100. Kualitas pelayanan publik Kalimantan Timur juga perlu ditingkatkan yang saat ini masih berada pada skala 3,75 dari 5,00 atau dikategorikan Baik (B). Selain itu, implementasi Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara masih kurang optimal dengan skor 271 dari skor maksimal 400, begitu pula dengan pembangunan zona integritas yang mencapai angka 0,5 dari skor maksimal 3. Capaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kalimantan Timur juga belum cukup optimal, dengan skor 3,2 dari skor maksimal 5,00. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan upaya sistematis dalam memperbaiki berbagai aspek tata kelola tersebut.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Daerah merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena memiliki dampak luas dan signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Isu-isu ini bersifat kompleks yang mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Pengidentifikasian isu strategis daerah menjadi salah satu langkah krusial dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah agar arah pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif.

Identifikasi isu-isu strategis berperan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan suatu wilayah. Penyusunan isu strategis

daerah dilakukan dengan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Perumusan isu strategis daerah juga turut memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur guna menyusun langkah-langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perumusan isu strategis daerah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.94. Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS, dan Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1) Proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan Kalimantan Timur 2) Dasar modal SDM yang cukup kuat, terutama modal pendidikan, tercermin dari capaian nilai IPM Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan 3) Keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas (Unmul, UINSI Samarinda, Poltekkes, Polnes, STIPER Kutai Timur, dll) 4) Adanya program pendidikan vokasi dan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi melalui BLK/BPVP dan perusahaan melalui program CSR 5) Berkembangnya komunitas wirausaha muda di kota-kota besar, seperti Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, dll 6) Dukungan kebijakan dan program hijau yang mendorong tumbuhnya kebutuhan untuk penciptaan pekerjaan hijau	Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja dan era baru pekerjaan yang ramah lingkungan *(green jobs)*	Peningkatan kualitas SDM	*Link & match* pendidikan-DUDI Kualitas SDM lokal	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
1) Pemberian bantuan sosial (BLT dan RTLH) serta perluasan cakupan perlindungan sosial oleh Pemerintah Daerah 2) Dukungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui	Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan		Penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan dan kesenjangan	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
program CSR perusahaan, utamanya sektor pertambangan 3) Pengembangan *food estate* atau lumbung pangan lokal (Kukar, Paser, dan PPU) 4) Melimpahnya komoditas unggulan sektor pertanian: a) Sub Sektor Tanaman Pangan (padi, jagung); b) Sub Sektor Tanaman Hortikultura (pisang); c) Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada, aren, kelapa dalam, kopi); d) Sub Sektor Peternakan (ayam petelur dan pedaging, domba dan sapi) 5) Melimpahnya komoditas unggulan sektor perikanan: a) Sub Sektor Perikanan Tangkap (udang, ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang); b) Sub Sektor Perikanan Budidaya (rumput laut, ikan nila, udang, ikan mas, ikan bandeng, ikan patin) 6) Tersedianya sebagian infrastruktur pertanian, seperti irigasi teknis dan jalan usaha tani			Ketahanan pangan		Ketahanan pangan	Kemandirian Pangan
1) Melimpahnya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas, kelapa sawit, serta mineral logal yang menjadi basis utama pengembangan hilirisasi industri pengolahan energi, petrokimia, smelter, bioenergi, dan CPO berbasis *green industry*	Masih lambatnya transformasi ekonomi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Ketahanan Ekonomi	Diversifikasi ekonomi Pengembangan Industri	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2) Pengembangan kawasan industri strategis, seperti KPI Kariangau, KEK MBTK, dan KI Buluminung 3) Keanekaragaman hayati yang tinggi serta kekayaan ekosistem di Kalimantan Timur, seperti hutan hujan tropis, kawasan karst, dan wilayah pesisir sebagai destinasi ekowisata unggulan sekaligus lokasi strategis bagi pengembangan pusat-pusat riset berbasis alam dan konservasi 4) Ketersediaan lahan dan produksi dari sektor pertanian (dalam arti luas) membuka peluang untuk diversifikasi industri berbasis agro-maritim 5) Pertumbuhan *start-up* digital, industri kreatif, dan UMKM berbasis teknologi, terutama di kota-kota besar, yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah 6) Akses terhadap pembangkit listrik, pelabuhan, jalan, dan jaringan logistik yang semakin membaik, memperkuat daya saing wilayah untuk menarik investasi lintas sektor			Konflik antar-negara	Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan		
			Perkembangan teknologi			
1) Ketersediaan fasilitas pendidikan dasar (SD–SMP) yang cukup merata di beberapa kabupaten/kota, seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara 2) Ketersediaan puskesmas di sebagian besar kecamatan di Kalimantan	Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi	Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	Urbanisasi masyarakat dunia	Penguatan infrastruktur	Pemenuhan SPM	Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Timur serta ketersediaan RSUD, alat medis, dan pelayanan rujukan di beberapa kabupaten/kota, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah	Konektivitas wilayah	Pemerataan Pembangunan Wilayah
3) Pengembangan jaringan jalan utama untuk dapat menghubungkan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dimana saat ini jalan nasional memiliki panjang 1.806,76 km, jalan provinsi sepanjang 938,85 km, serta jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km				Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Minimnya pusat pertumbuhan	Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN
4) Pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang						
5) Wilayah Kaltim yang termasuk dalam jalur pelayaran ALKI II menjadi potensi pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana transportasi perairan baru maupun eksisting saat ini: a) Pelabuhan laut (Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Kariangau), b) Dermaga sungai (Pelabuhan Samarinda, Dermaga Melak, dan Dermaga Ujoh Bilang)						
6) Ketersediaan bandara internasional (Bandara SAMS Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda) serta bandara perintis (Bandara Kalimarau Berau, Bandara Melalan Kutai Barat, dll) dengan potensi pengembangan bandara baru						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7) Adanya proyek strategis nasional (PSN) di Kalimantan Timur yang memperkuat konektivitas dan logistik 8) Ketersediaan dan pengembangan kawasan industri di wilayah sekitar IKN, yaitu KPI Kariangau, KEK MBTK, dan KI Buluminung yang menjadi pendukung *superhub* ekonomi IKN dan pendorong ekonomi Kaltim 9) Pengembangan infrastruktur TIK, termasuk telah terjangkaunya wilayah IKN dan sekitarnya oleh fiber optik Palapa Ring Tengah dan BTS 4G 10) Masuknya beberapa investor yang menanamkan modal di IKN sehingga berpotensi mempercepat, mengembangkan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan IKN dan wilayah sekitar (Kalimantan Timur)						
1) Memiliki kawasan hutan lindung yang luas, yaitu mencapai 1,73 juta Ha sebagai penyerap karbon alami (*carbon sink*) serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah 2) Pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di beberapa daerah aliran sungai (DAS) Mahakam 3) Pelaksanaan kegiatan konservasi biodiversitas dan ekowisata,	Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan ramah lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi	Tantangan perubahan iklim *Biodiversity Loss* Komitmen transisi energi	Pembangunan lingkungan hidup	Kerusakan ekosistem	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
khususnya di Mahakam Ulu dan Berau 4) Pelaksanaan kegiatan revitalisasi lahan pasca tambang 5) Adanya potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, terdiri dari: a) Potensi Panas Bumi (18 MW), b) Potensi Tenaga Air (2.118,80 MW), c) Potensi Minihidro dan Mikrohidro (3.112 KW), d) Potensi Energi Surya (13.479 MW), e) Potensi Biomassa (936,14 MW), f) Potensi Biogas (150 MW), g) Potensi Energi Angin (212 MW), dan h) Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF 6) Pelaksanaan program Bank Sampah dan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*) di berbagai wilayah, meskipun skalanya masih terbatas 7) Melakukan penyusunan dokumen *Emission Reduction Program* (ERPD) dan menjadi provinsi percontohan program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF)						
1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronis (SPBE) yang telah berpredikat “sangat baik” 2) Perolehan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3) Peningkatan birokrasi yang berkualitas, tercermin dari capaian	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik			Tiga Agenda Transformasi		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dengan kategori A- atau predikat "memuaskan dengan catatan" 4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, tercermin dari nilai SAKIP dengan predikat BB atau "sangat baik" yang ditandai dengan meningkatnya efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, penerapan sistem manajemen kinerja yang andal dan didukung teknologi informasi, serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang telah menjangkau hingga tingkat eselon III atau koordinator 5) Program pelatihan berbasis kompetensi ASN, terutama terkait digitalisasi, penyusunan dokumen perencanaan, keuangan daerah, dan tata kelola berbasis output						

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Disisi lain, transformasi ekonomi juga memerlukan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan era pekerjaan baru yang ramah lingkungan *(green jobs)* sebagai antisipasi transisi ekonomi hijau dan transisi energi. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kalimantan Timur dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

Isu strategis pengentasan kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi pada sektor industri ekstraktif cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kalimantan Timur dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan. Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, mengakibatkan tantangan terhadap perlindungan sosial masyarakat untuk pengurangan kemiskinan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kalimantan Timur. Perlindungan sosial adaptif perlu dirancang untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan sosial, program jaminan kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan kerja bagi, serta penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antarwilayah secara merata.

3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur pada periode Tahun 2013-2024 selalu mendominasi pada kisaran 40-57 persen. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan

oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan transisi energi yang telah disepakati secara internasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi di Kalimantan Timur antara lain adalah karena belum optimalnya diversifikasi ekonomi baik secara horisontal maupun vertikal, masih rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara, serta belum berfungsi optimalnya kawasan-kawasan industri. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusivitas pembangunan. Peran Kalimantan Timur ke depan sebagai *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN diyakini akan mengakselerasi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

4. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan sebagian wilayah menjadi semakin tertinggal dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Pemerataan pembangunan wilayah secara terfokus dan proporsional sangat dibutuhkan agar inklusivitas pembangunan dapat terwujud. Pemerataan distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah di Kalimantan Timur. Optimalisasi kebijakan pembangunan wilayah yang

didasarkan pada analisa karakteristik, potensi, serta keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah menjadi salah satu hal strategis yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadirnya IKN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, pariwisata, industri, dan sektor lainnya juga terus dilakukan guna menunjang pengembangan sektor ekonomi.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

6. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan adalah peluang dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan *Superhub* Ekonomi IKN memiliki konsep pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan aglomerasi serta pengembangan konsep *tri-city* Balikpapan-Samarinda-IKN yang didukung rantai pasok dari daerah-daerah Mitra IKN. Kedepannya, *Superhub* Ekonomi IKN diproyeksikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan perolehan manfaat dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, sekaligus meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah aspek peningkatan kapasitas SDM sesuai kualifikasi pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri-industri yang dikembangkan sesuai klaster *Superhub* Ekonomi IKN, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat dikendalikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.

7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakkan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci

mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran IKN diyakini akan menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang juga akan meningkatkan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, konsepsi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasan-kawasan industri juga perlu diiringi dengan kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah masifnya polusi udara, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas air. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

8. Kemandirian Pangan

Isu strategis yang krusial perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah terkait dengan kemandirian pangan. Sebagai daerah yang terdampak langsung dari pembangunan IKN, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu, permasalahan terkait kemandirian pangan yang dihadapi adalah akses distribusi pangan yang belum memadai karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur pendukung pertanian yang belum merata, masih kurangnya jumlah petani muda terampil yang mampu menerapkan konsep pertanian modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan kondisi tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian, serta distribusi, integrasi dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi yang masih perlu diperbaiki. Keseluruhan isu tersebut memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif, agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan

9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing global.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2030. Rumusan tersebut juga diselaraskan dengan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Selain itu, sebagai bagian dari integral pembangunan nasional, maka perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga mempedomani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

3.1. RPJMD Tahun 2025-2029 Sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 menempatkan Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara yang berperan sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mewujudkan Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara, Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai *Superhub* Ekonomi IKN melalui pembangunan dan pengembangan klaster-klaster industri hijau. Kalimantan

Timur memiliki visi jangka panjang **Kaltim Sejahtera 2045** sebagai **Penggerak *Superhub* Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan**. Berdasarkan visi tersebut, Kalimantan Timur bercita-cita untuk menjadi daerah dengan perekonomian daerah yang tumbuh berbasis hilirisasi industri, memiliki pendapatan per-kapita setara negara maju, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, daya saing dan inovasi daerah meningkat, kualitas daya saing SDM meningkat, yang disertai dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *nett zero emission*.

Tabel 3.1. Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Target Tahap I Tahun 2029	Target Akhir Tahun 2045
1.	Peningkatan Perekonomian dan Pendapatan Per Kapita		
	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,90-7,70	5,99-7,55
	b. PDRB per kapita (Rp Juta)	415,80-523,80	850,00-1.289,73
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,98	5,76
	d. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	21,39–24,52	32,32 – 44,09
	e. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	56,46	127,09
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,27 – 3,07	0,07 – 0,57
	b. Rasio Gini	0,309-0,312	0,254 – 0,298
3.	Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,57	4,08
	b. Indeks Inovasi Daerah	58,86	85,45
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,65	0,77
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju *Nett Zero Emission*		
	4) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	67,46	96,37
	5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,46	86,51

Terdapat indikator kinerja dan indikasi target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap sasaran visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Indikator dan indikasi target kinerja sasaran visi ini perlu dikawal pencapaiannya di setiap tahapan pelaksanaan RPJMD. Selanjutnya, target kinerja sasaran visi Tahap I RPJPD yang telah ditetapkan ke dalam RPJMD

Tahun 2025-2029 dapat disesuaikan dengan memperhatikan pendistribusian target indikator makro pembangunan per-provinsi pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta kondisi dinamika pembangunan terkini.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 telah merumuskan strategi besar untuk mencapai visi Kaltim Sejahtera 2045, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama pembangunan.

Tabel 3.2. Strategi Besar Pencapaian Visi Kaltim Sejahtera 2045

<table>
<tr><th colspan="3">Transformasi Pembangunan Daerah</th></tr>
<tr><th>Misi 1. Transformasi Sosial</th><th>Misi 2. Transformasi Ekonomi</th><th>Misi 3. Transformasi Tata Kelola</th></tr>
<tr><td>1) Kesehatan Untuk Semua
2) Pendidikan Berkualitas yang Merata
3) Perlindungan Sosial yang Adaptif</td><td>4) IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5) Penerapan Ekonomi Hijau
6) Tranformasi Digital
7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</td><td>9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif</td></tr>
<tr><th colspan="3">Landasan Transformasi</th></tr>
<tr><th colspan="2">Misi 4. Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi</th><th>Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</th></tr>
<tr><td colspan="2">10) Hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh dan demokrasi substansial
11) Stabilitas ekonomi makro
12) Daya saing dan kerjasama antar daerah</td><td>13) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15) Lingkungan hidup berkualitas
16) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</td></tr>
<tr><th colspan="3">Kerangka Implementasi Transformasi</th></tr>
<tr><th>Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</th><th>Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</th><th>Misi 8. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan</th></tr>
</table>

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan implementasi periode pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan Tahap I RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 3.3. Fokus Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029)
Penguatan Fondasi Transformasi : Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	
Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Misi 2: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja
Misi 3: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas	Peningkatan kualitas ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat
Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Penguatan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendorong peningkatan inklusivitas sosial
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, aman dan didukung teknologi hijau
Misi 8: Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan	Peningkatan kapasitas dan kolaborasi stakeholders pembangunan, akuntabilitas kinerja pemda, kualitas pengelolaan fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Selanjutnya visi dan misi, serta program prioritas yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani visi, misi, sasaran visi, serta arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I.

3.2. RPJMD Tahun 2025-2029 Sebagai Bagian Integral Pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang disebut Asta Cita.

Tabel 3.4. Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan	Narasi 8 (delapan) Asta Cita
Asta Cita 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Asta Cita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Tabel 3.5. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	**Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins***
1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5) Pemberantasan Kemiskinan 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7) Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10) Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12) Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13) Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14) Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri-Lainnya 15) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*
16) Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah 17) Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Selanjutnya program prioritas dan program hasil terbaik cepat RPJM Nasional Tahun 2025-2029 tersebut diperhatikan dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Hal lain yang perlu untuk dipedomani dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah arah pembangunan kewilayahan untuk Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang di dalam Lampiran IV RPJM Nasional Tahun 2025-2029, dimana di dalamnya terdapat target sasaran pembangunan serta lokasi prioritas dan *highlight* indikasi intervensi kebijakan. Adapun target sasaran pembangunan yang didistribusikan ke Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 9 (sembilan) indikator makro yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi GRK, IKLH, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.6. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target Tahun 2025	Target Tahun 2029
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	8,6
2.	PDRB per kapita (Rp Juta)	218,1	326,9
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,9	4,6
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24–5,05	2,37–3,37
5.	Rasio Gini	0,310–0,321	0,309–0,313
6.	Indeks Modal Manusia	0,59	0,62
7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,20	80,87
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60–5,14	4,14–4,77

Untuk mencapai target sasaran pembangunan Kalimantan Timur yang telah didistribusikan dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 tersebut, maka telah dirumuskan *highlight* indikasi intervensi kebijakan dengan pendekatan lokasi-lokasi prioritas seperti Kawasan Superhub Ekonomi Nusantara, Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar, Pembangunan Kawasan Perbatasan Prioritas, Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan dan sekitarnya, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur seperti *North Hub Development* Project Selat Makassar, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut, Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga.

3.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.3.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, Bapak Dr. H. Rudy Mas'ud S.E., M.E. dan Bapak Ir. H. Seno Aji, S.E., M.Si, telah ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu :

Gambar 3.1. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas mengandung makna, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus

mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa **"Semua Bisa Sukses"**. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia. Adapun penjelasan kata kunci visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Kaltim Sukses, yang dimaknai dengan keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi kemajuan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan berlandaskan pada upaya transformasi ekonomi menuju basis hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus diiringi dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan ketimpangan semakin berkurang dengan pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Selain itu, seluruh aspek pembangunan juga dilaksanakan dengan beriorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan kehidupan generasi penerus.

Generasi Emas, yang dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan peningkatan daya saing dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia adalah sasaran pembangunan yang harus diwujudkan. Penyiapan manusia yang unggul diyakini akan meningkatkan peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat.

Perwujudan Generasi Emas akan membangun manusia di Kalimantan Timur untuk menjadi generasi penerus berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.7. Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Visi RPJPD Tahun 2025-2045	Visi RPJMN Tahun 2025-2029
Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Visi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang dirumuskan tersebut telah sejalan visi Presiden yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta visi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

3.3.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;

Misi pertama berhubungan dengan upaya transformasi sosial untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, berdaya saing dan sejahtera. Upaya ini perlu dilandasi dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses penuh untuk mencapai kesehatan fisik dan mental. Pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan kreativitas dan pengembangan potensi individu dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga setiap warga dapat menjadi manusia yang cerdas, kreatif dan berwawasan lingkungan. Pendidikan vokasi didorong lebih berkembang dan spesifik mengarah pada peningkatan kemampuan dan kapasitas pekerjaan hijau, pengembangan ekonomi unggulan dan potensial masa depan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pekerjaan hijau memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang

ramah lingkungan dan layak bagi perempuan. Perlindungan sosial dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki jaminan keamanan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara proses pelaksanaan misi ini dimulai dari peningkatan pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tahapan berikutnya adalah peningkatan inklusivitas ketenagakerjaan dari sumber daya manusia yang tersedia. Pada akhirnya hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera.

Misi 2, Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;

Misi kedua menggambarkan upaya untuk meningkatkan peran dan pengaruh daerah dalam perekonomian Nasional, terutama sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kalimantan Timur akan dibangun sebagai pusat aglomerasi yang didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik. Perekonomian daerah harus tumbuh menjadi perekonomian yang tangguh, berdampak positif, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas secara masif, *shifting* struktur perekonomian melalui percepatan diversifikasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan menjadi sasaran utama. Instrumen utama pelaksanaan misi ini adalah melalui pengembangan komoditi unggulan non-migas dan batubara, pembangunan kawasan-kawasan industri, serta optimalisasi hilirisasi untuk perluasan nilai tambah. Untuk peningkatan inklusivitas, hal tersebut perlu diiringi dengan penyiapan kompetensi hijau untuk tenaga kerja. Hilirisasi diarahkan pada basis sumber daya alam terbarukan dalam konteks pelaksanaan transformasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan pada sektor-sektor potensial ekonomi kerakyatan, ekonomi hijau dan ekonomi biru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Pengembangan daya saing sektor

UMKM dan ekonomi kreatif lokal secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan hal tersebut diyakini dapat terakselerasi dengan memanfaatkan peluang daerah sebagai *Superhub* Ekonomi IKN dan daerah Mitra IKN.

Misi 3, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;

Misi ketiga menggambarkan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-wilayah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dimaksud mencakup infrastruktur dasar yang terkait langsung dengan pelayanan publik maupun infrastruktur penunjang ekonomi. Perluasan aksesibilitas dan konektivitas antar-wilayah menjadi salah satu kunci utama pengembangan ekonomi daerah, terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan serta pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang. Fokus pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan, air baku dan air bersih, permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, kelistrikan, telekomunikasi, serta penyiapan infrastruktur sanitasi (air limbah dan persampahan). Pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan sektor ekonomi juga terus dilakukan, seperti infrastruktur penunjang pertanian, pariwisata, industri, dan sektor lainnya.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;

Misi keempat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan misi-misi lainnya. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan perlu ditopang oleh aparatur dengan kompetensi yang memadai, berkinerja yang baik, berintegritas, berinovasi, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai modal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif.

Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, menciptakan pelayanan publik yang prima, serta memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan juga dilaksanakan melalui harmonisasi antar level pemerintahan, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan organisasi, standar operasional prosedur, kerjasama, sinergi, dan integrasi kinerja organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga melaksanakan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Keterbukaan layanan informasi publik, penguatan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, juga menjadi fokus pelaksanaan misi ini agar tingkat kepuasan layanan masyarakat semakin meningkat.

Misi 5, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;

Misi kelima menjadi landasan bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, aman, dan tenteram di tengah heterogenitas penduduk Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan dengan meningkatkan keimanan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Setiap warga masyarakat diberikan akses, sarana dan prasarana yang baik untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai keagamaan ini selanjutnya diperkuat dengan nilai-nilai kebudayaan melalui pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya dan kearifan lokal Kalimantan Timur diarahkan untuk terus berkembang dan beradaptasi mengikuti kemajuan zaman. Internalisasi nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;

Misi keenam menggambarkan upaya pelaksanaan amanat dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan kehidupan yang baik bagi generasi mendatang di tengah tantangan permasalahan dan dampak perubahan iklim. Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial dengan emisi GRK yang rendah dan meminimalkan dampak perubahan iklim. Pilihan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tetap dalam koridor tidak merusak kualitas lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penerapan pekerjaan hijau/*green jobs*. Pekerjaan hijau tidak hanya berpotensi menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, tetapi juga menjadikan pekerjaan tersebut layak dan inklusif. Upaya pemerintah daerah untuk terus mengendalikan tingkat emisi gas rumah kaca tidak hanya akan berdampak positif bagi keberlanjutan Kalimantan Timur semata, namun juga Indonesia dan dunia. Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi hijau juga perlu dioptimalisasi agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Pekerjaan hijau akan mempersiapkan alih keterampilan (*reskilling*) dan peningkatan keterampilan (*upskilling*) bagi sumber daya manusia di Kalimantan Timur untuk dapat menguasai pemanfaatan teknologi hijau tersebut. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi lainnya tetap berada dalam koridor pilar keberlanjutan melalui sinergitas pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup menuju pertumbuhan hijau. Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan akan mewujudkan kesinambungan pembangunan jangka panjang untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

6 (enam) misi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang dirumuskan tersebut telah sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan 8 (delapan) misi RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 3.8. Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

6 MISI RPJMD KALTIM 2025-2029	8 MISI (ASTACITA) PRESIDEN 2025-2029	8 MISI RPJPD KALTIM 2025-2045	
MISI 1 **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera**	**ASTACITA - 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	**MISI 1** Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	**MISI 8** Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan
MISI 2 **Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah**	**ASTACITA - 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	**MISI 2** Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara **MISI 4** Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	
	ASTACITA - 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
	ASTACITA - 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		
MISI 3 **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan**	**ASTACITA - 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**MISI 6** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
		MISI 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
MISI 4 **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi**	**ASTACITA - 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	**MISI 3** Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas	
MISI 5 **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal**	**ASTACITA - 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**MISI 5** Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	

6 MISI RPJMD KALTIM 2025-2029	8 MISI (ASTACITA) PRESIDEN 2025-2029	8 MISI RPJPD KALTIM 2025-2045
MISI 6 **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**ASTACITA - 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Berbasis Kearifan Lokal

Keselarasan pelaksanaan misi tersebut menjadi penting mengingat upaya pencapaian pembangunan nasional dan pencapaian rencana pembangunan jangka panjang daerah memerlukan sinergi antar level pemerintahan dan antar dokumen perencanaan. Misi ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara cascading kinerja, visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat terwujud apabila kinerja utama yakni terwujudnya Kaltim Sukses dan terbangunnya Generasi Emas dicapai, dengan didukung oleh kondisi pemungkin berupa tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan Kaltim Sukses ini ditandai dengan pencapian 4 (empat) kinerja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan generasi emas ditandai

dengan 4 (empat) kinerja yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, produktivitas SDM, serta nilai agama dan budaya. Sementara untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan pencapaian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme pemerintahan, serta kualitas layanan publik.

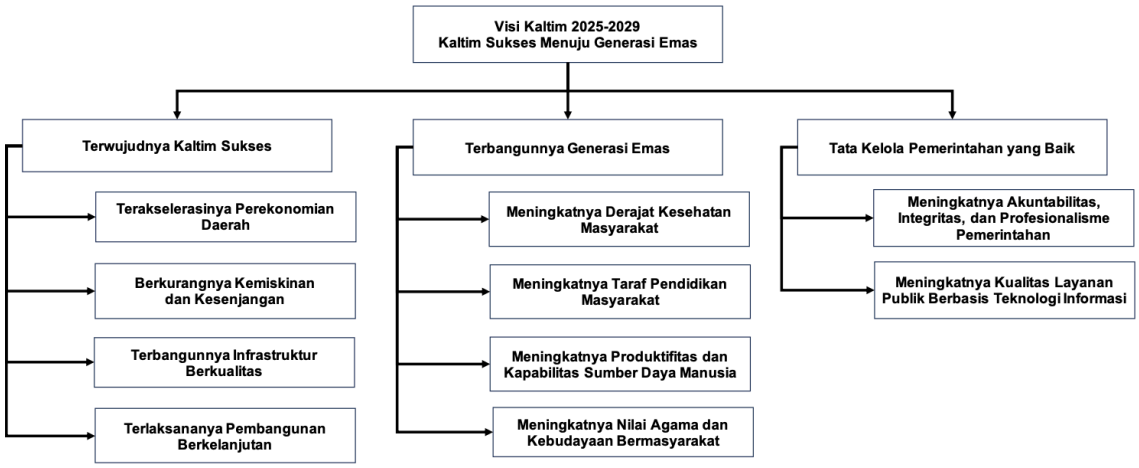

Gambar 3.2. Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menyertakan indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama. Khusus untuk target indikator makro pembangunan, telah dikembangkan dengan memperhatikan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 untuk Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 3 (tiga) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan dengan 32 indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES								
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)	3,90	3,95	4,00	4,20	4,40	4,60	4,75
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,30	7,00	7,85	8,15	8,60	8,65
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,32	18,84	19,04	19,12	19,19	19,60
	Tingkat Inflasi (%)	1,47	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1
	Indeks Daya Saing Daerah	3,37	3,40	3,44	3,49	3,53	3,57	3,61
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	4,24–5,05	3,50–4,30	3,12–3,99	2,75–3,68	2,37–3,37	2,35–3,30
	Indeks Gini	0,321	0,310–0,321	0,309–0,318	0,308–0,315	0,307–0,313	0,306–0,310	0,304–0,308
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	5,92	6,17	6,71	6,96	7,21	7,39	7,52

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia *Blue Economy Index*	31,30	32,92	38,81	44,69	50,58	56,46	62,35
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,04*	63,44	63,84	64,25	64,65	65,05	65,45
	Indeks Ketahanan Pangan	78,61	79,69	80,47	80,69	81,46	81,69	82,46
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,63	80,20	80,36	80,83	81,15	81,46	81,78
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	75,55	40,82	55,05	60,80	65,90	67,46	72,63
	Indeks Risiko Bencana	136,11	131,64–136,11	127,17–131,64	122,70–127,17	118,23–122,70	113,76–114,56	108,83–113,76
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS								
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,94	74,99	75,04	75,08	75,13	75,18	75,25

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Prevalensi Stunting (%)	22,2	19,8	18,4	17,2	16,0	14,8	13,9
Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,15–14,18	14,18–14,26	14,26–14,33	14,33–14,41	14,41–14,85	14,85–15,00
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,34–10,35	10,35–10,53	10,53–10,70	10,70–10,88	10,88–11,50	11,50–13,00
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,80	14,50	14,50–15,19	15,19–15,89	15,89–16,58	16,58–17,28	17,28–17,97
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	218,10	227,21	260,44	293,67	326,90	328,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,41–4,97	4,27–4,87	4,14–4,77	3,95–4,68

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19	78,49–78,50	78,86–78,90	79,23–79,29	79,60–79,69	79,97–80,08	80,43–80,56
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,56*	58,80–58,84	59,36–59,42	59,92–60,00	60,48–60,59	61,04–61,17	61,62–61,77
LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK								
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	85,16	85,84	86,53	87,22	87,92	88,63	89,34
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Nilai AKIP (nilai)	78,74	79,19	79,78	80,36	80,95	81,54	82,13
	Indeks Integritas Nasional	72,75	75,84	76,62	77,40	78,17	78,95	79,96
	Indeks Inovasi Daerah	61,74	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52
	Nilai Sistem Merit (skor)	271*	279	286	294	301	309	316
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2,26*	2,26–2,33	2,33–2,40	2,40–2,47	2,47–2,54	2,54–2,61	2,61–2,69

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,06	4,10	4,13	4,17	4,20	4,26
	Indeks Pemerintah Digital	n/a	n/a	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10

Keterangan : *) Capaian Tahun 2023

3.3.4. Penyelarasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's)

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka dalam rangka pencapaian target sasaran RPJM Nasional Tahun 2025-2029 diperlukan penyelarasan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat daerah. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan intergrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2025-2029, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN tahun 2025-2029, dan menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Salah satu penyelarasan yang dilakukan adalah penyelarasan target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah agar dapat merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi setiap daerah. Adapun penyelarasan target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro nasional dengan target indikator makro daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam arah kebijakan wilayah RPJM Nasional Tahun 2025 untuk Kalimantan Timur. Adapun indikator makro yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran.

Tabel 3.10. Penyelarasan Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJM Nasional		Target RPJMD Prov. Kaltim	
	2025	2029	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	8,6	6,30	8,60
PDRB Per-Kapita (juta Rupiah)	218,1	326,9	218,10	326,90
Kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional (%)	3,9	4,6	3,95	4,60
Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	4,24–5,05	2,37–3,37
Indeks Gini	0,310-0,321	0,309-0,313	0,310–0,321	0,306–0,310
Indeks Modal Manusia	0,59	0,62	0,59	0,62
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46	40,82	67,46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,20	80,87	80,20	81,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60-5,14	4,14-4,77	4,60–5,14	4,14–4,77

Ket : Indikator Kinerja Makro ditentukan berdasarkan Buku Saku Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 ini telah selaras dengan 3 (tiga) agenda transformasi Nasional, yaitu transformasi ekonomi (tujuan 1), transformasi sosial (tujuan 2), dan transformasi tata kelola sebagai landasan pencapaian visi (tujuan 3). Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang mengarah pada upaya pengentasan persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's**
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	(T-2) Tanpa Kelaparan
	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
	(T-12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	(T-1) Tanpa Kemiskinan
	(T-2) Tanpa Kelaparan
	(T-10) Berkurangnya Kesenjangan
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	(T-6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	(T-13) Penanganan Perubahan Iklim
	(T-14) Ekosistem Lautan
	(T-15) Ekosistem Daratan
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(T-3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	(T-4) Pendidikan Berkualitas
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	(T-5) Kesetaraan Gender
	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	(T-17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan pemetaan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan dan sasaran RPJMD telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki semangat untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan yang inklusif, serta menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.3.5. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2029

Rumusan sasaran RPJMD sebagai upaya pencapaian tujuan dan visi pembangunan perlu diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan (arah) pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 sebagai bagian pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I. Penyelarasan ini bertujuan untuk mengendalikan bahwa rangkaian kinerja dan rangkaian kerja yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah tetap pada koridor upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini menjadi penting mengingat pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi fondasi bagi pelaksanaan tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode-periode berikutnya.

Tabel 3.12. Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	**Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045**
(S1) Terakselerasinya Perekonomian Daerah	(4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
	(7) Integrasi ekonomi domestik dan global
	(8) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	(11) Stabilitas ekonomi makro
	(12) Daya saing dan kerjasama antar daerah
(S2) Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	(3) Perlindungan sosial yang adaptif
	(16) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
(S3) Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	(8) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	(16) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
(S4) Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	(5) Penerapan ekonomi hijau
	(15) Lingkungan hidup berkualitas
	(17) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
(S5) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(1) Kesehatan untuk semua
(S6) Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	(2) Pendidikan berkualitas yang merata
(S7) Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	(4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
(S8) Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	(10) Hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh dan demokrasi substansial
	(13) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
	(14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
(S9) Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	(4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
	(9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
(S10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	(6) Transformasi digital
	(9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

3.3.6. Penyelarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Rumusan sasaran RPJMD juga perlu dilakukan penyelarasan secara sistematis dengan misi pembangunan daerah. Penyelarasan antara keduanya bertujuan untuk memastikan kesinambungan antara capaian pembangunan yang diharapkan dengan upaya-upaya strategis dalam mewujudkan visi selama lima tahun ke depan. Sebagai turunan dari tujuan, sasaran dirumuskan untuk menggambarkan hasil-hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan sebagai bagian dari pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan demikian, keselarasan antara sasaran dan misi menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, serta selaras dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Tabel 3.13. Keselarasan Sasaran dengan
Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

SASARAN	MISI
S2. Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	M1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
S5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
S6. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	
S7. Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	
S1. Terakselerasinya Perekonomian Daerah	M2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah
S3. Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	M3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
S9. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	M4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
S10. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	

SASARAN	MISI
S8. Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	M5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
S4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	M6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.4.1. Strategi Prioritas Pembangunan

Selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, terdapat **3 (tiga) strategi utama pembangunan** yang dirumuskan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi **Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas**, yakni, mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penekanan pada ketiga strategi ini yang selanjutnya disebut sebagai **Trisula Pembangunan Daerah**, merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang daerah.

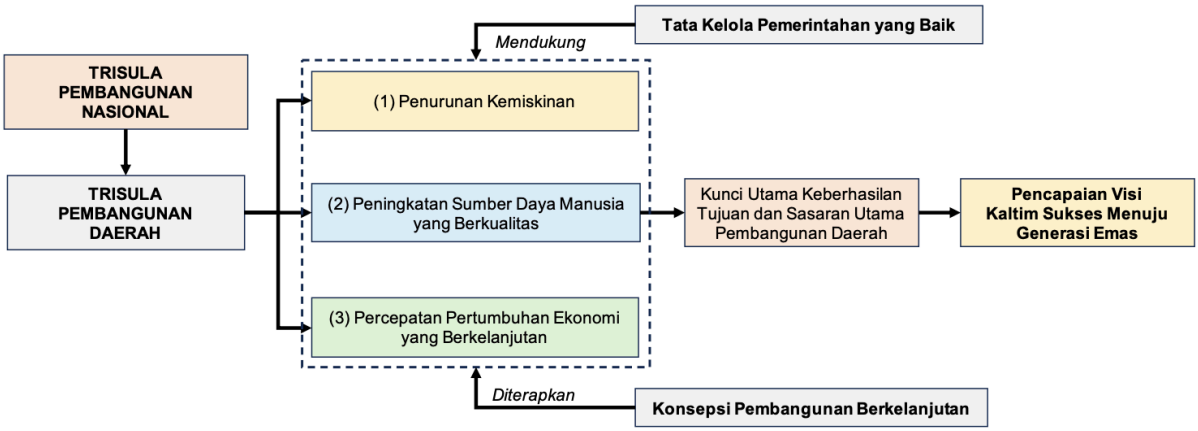

Gambar 3.3. Trisula Pembangunan Daerah Sebagai Strategi Prioritas Pembangunan

Strategi utama untuk penurunan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) ditempuh melalui menjaga stabilitas ekonomi makro daerah melalui : (1) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menjaga inflasi agar tetap

terkendali; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pengurangan beban biaya pendidikan dan kesehatan, serta pemberian perlindungan sosial adaptif seperti bantuan sosial serta jaminan sosial; (3) memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui intervensi pembangunan SDM; (4) meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat miskin; (5) meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah perdesaan dan perbatasan.

Strategi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui : (1) Perluasan akses pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur mulai dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga pendidikan S1, S2, dan S3 dalam kerangka perwujudan semangat bahwa **"semua bisa sukses"**; (2) Perluasan akses pengobatan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur, termasuk peningkatan sarana dan prasana kesehatan; (3) membangun SDM melalui pendidikan yang bermutu (termasuk pendidikan vokasi/keahlian) yang terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia kerja; (4) meningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan keahlian termasuk dalam pekerjaan hijau; (5) meningkatkan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai bagian pembangunan SDM unggul yang berakhlak.

Strategi utama mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan ditempuh melalui : (1) meningkatkan produktivitas komoditi unggulan non-migas dan batubara (2) mengembangkan hilirisasi industri pada komoditi-komoditi unggulan; (3) membangun dan mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan industri, terutama kawasan *superhub* ekonomi IKN; (4) mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM (termasuk kewirausahaan) untuk menumbuhkan perekonomian yang inklusif; (5) mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja termasuk pekerjaan hijau; (6) mengembangan riset dan inovasi, serta pemanfaatannya dalam peningkatan efektifitas penggunaan sumber daya, efisiensi, serta produktivitas kegiatan perekonomian daerah.

3.4.2. Strategi Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun penahapan pembangunan RPJMD secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan yang disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.4. Penahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yaitu Tahap 1 (Tahun 2026) sebagai tahap Fondasi: Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 2 (Tahun 2027) sebagai tahap Penguatan: Pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya manusia, sektor ekonomi inklusif dan daya saing investasi sebagai penguat landasan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 3 (Tahun 2028) sebagai tahap Akselerasi: Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

daya saing sumber daya manusia untuk akselerasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 4 (Tahun 2029) sebagai tahap Perwujudan: Kemajuan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta manusia berdaya saing sebagai perwujudan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, dan Tahap 5 (Tahun 2030) sebagai tahap Kesinambungan: Kesinambungan pembangunan untuk keberlanjutan pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci penahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

A. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 1 adalah **"Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"**. Pada tahap ini, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan lokal turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.

B. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2027)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 2 adalah **"Pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya manusia, sektor ekonomi inklusif, dan daya saing investasi sebagai penguat landasan Kaltim**

Sukses Menuju Generasi Emas”. Tahap ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang diperkuat untuk mendukung konektivitas wilayah, pembangunan SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan keterampilan dan daya saing SDM, pengembangan sektor-sektor ekonomi inklusif dan peningkatan daya saing investasi untuk mendukung perekonomian daerah. Pada aspek tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terintegrasi diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya, kehidupan beragama, dan pelestarian lingkungan semakin dikedepankan dalam berbagai aspek pembangunan daerah.

C. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2028)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 3 adalah **“Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk akselerasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**. Tahap ini berfokus pada optimalisasi kawasan ekonomi strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diiringi dengan optimalisasi penyerapan tenaga kerja serta pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh daerah. Pada sektor ekonomi dilakukan perluasan ekosistem industri berbasis komoditas unggulan serta pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan. Adapun pembangunan transportasi, energi, dan teknologi komunikasi pada sektor infrastruktur diperluas guna mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan publik yang lebih optimal. Tata kelola pemerintahan semakin diperkuat melalui peningkatan kapasitas ASN, optimalisasi sistem digital, dan penegakan regulasi yang lebih efektif. Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah semakin diperkuat melalui program pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Adapun, pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas dengan penguatan tata kelola lingkungan dan mitigasi risiko dampak perubahan iklim.

D. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2029)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 4 adalah **"Kemajuan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta manusia berdaya saing sebagai perwujudan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"**. Tahap ini ditandai dengan tercapainya infrastruktur yang berfungsi optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat dan investasi, SDM yang unggul dan produktif serta menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis industrialisasi. Selain itu, pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berbasis teknologi semakin terwujud, ditandai dengan layanan publik yang lebih efisien dan transparan. Keberagaman budaya dan kehidupan beragama semakin harmonis, didukung oleh penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan semakin kuat dengan implementasi strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.

E. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 (Tahun 2030)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 5 adalah **"Kesinambungan pembangunan untuk keberlanjutan pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat"**. Pada tahap ini keberlanjutan capaian pembangunan dikawal untuk tetap berlanjut di masa transisi periode pemerintahan. Pembangunan SDM unggul dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sektor ekonomi semakin inklusif dengan daya saing industri yang semakin meningkat terus dibangun. Infrastruktur yang telah terbangun dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi semakin matang, menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kehidupan sosial dan budaya terus diperkuat dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan penguatan keharmonisan beragama. Pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

3.4.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera

1) Menyediakan pembiayaan sekolah dan seragam sekolah bagi seluruh peserta didik SMA/SMK/SLB;
2) Menyediakan pembiayaan berupa uang kuliah tunggal bagi penduduk usia produktif untuk pendidikan tinggi jenjang S1 hingga S3;
3) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya;
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
5) Membangun sekolah unggul dan dukungan pembangunan sekolah rakyat;
6) Menyediakan akses layanan berobat melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
7) Meningkatkan upaya promotif-preventif kesehatan diantaranya melalui pengendalian penyakit, peningkatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat, penurunan risiko kematian ibu dan anak, pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan dan penyehatan lingkungan;
8) Memperkuat upaya penanganan stunting diantaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, dan penguatan kelembagaan serta SDM pendamping keluarga berisiko stunting;
9) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan;
10) Menyediakan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis secara merata;
11) Memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat;

13) Meningkatkan partisipasi perempuan, pemuda, maupun penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada anak dan lansia;
14) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang diiringi dengan penyediaan lapangan kerja;
15) Meningkatkan *link and match* pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
16) Mengembangkan ekosistem pekerjaan hijau *(green jobs)* dan kompetensi tenaga kerja hijau.

Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah

1) Mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri sebagai *superhub* ekonomi IKN, serta pengembangan wilayah Mitra IKN di Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan;
2) Meningkatkan industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern;
3) Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan;
4) Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
5) Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
6) Mengembangkan ekonomi maritim dengan mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
7) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
8) Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
9) Mengembangkan destinasi pariwisata, diantaranya pariwisata berbasis desa;
10) Memberikan kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, serta swasta;

11) Meningkatkan peran ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan

1) Membangun jalan akses wilayah perbatasan;
2) Meningkatkan kondisi jalan mantap Provinsi di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
3) Mengembangkan konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan;
4) Mendukung pembangunan bandara perbatasan;
5) Mendukung pembangunan pelabuhan internasional;
6) Meningkatkan sarana dan prasarana dermaga Sungai Mahakam;
7) Meningkatkan kualitas layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan;
8) Membangun bendungan untuk mendukung irigasi pertanian dan pemenuhan air baku;
9) Membangun bendali dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir;
10) Membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum berskala regional;
11) Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan dan inklusif;
12) Memperluas akses hunian layak melalui penyediaan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
13) Mengembangkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang andal;
14) Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di setiap desa;
15) Membangun rumah sakit umum daerah provinsi.

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja;
2) Meningkatkan kualitas belanja dengan mengutamakan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan daerah;
3) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara;
4) Mengoptimalkan penerapan sistem merit;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital;
6) Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur;
7) Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal;
8) Meningkatkan penerapan hasil riset dan inovasi daerah;
9) Mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
10) Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah;
11) Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antar kabupaten/kota.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

1) Menyediakan pembiayaan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah;
2) Membangun/rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan;
3) Meningkatkan penghargaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan antar umat beragama;
4) Memperkuat pelestarian budaya asli daerah dan kearifan lokal;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan budaya masyarakat;
6) Memberikan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
7) Mengintegrasikan muatan lokal dan kearifan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

1) Mengimplementasikan konsepsi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru secara bertahap melalui penguatan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sirkular ekonomi lingkungan;
2) Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
3) Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
5) Mencegah deforestasi serta degradasi hutan dan lahan;
6) Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah melalui penerapan sirkular ekonomi;
7) Meningkatkan pengendalian dan pengurangan pencemaran lingkungan;
8) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama untuk mendukung kedaulatan energi, air, dan pangan;
9) Menguatkan perencanaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
10) Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana.

3.4.4. Strategi

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3.14. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
KATA KUNCI VISI: KALTIM SUKSES		
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	1. Peningkatan produksi dan nilai tambah melalui hilirisasi industri; 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri; 3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; 4. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi; 5. Peningkatan investasi pada sektor produktif; 6. Menjaga stabilitas perekonomian daerah; 7. Peningkatan nilai ekspor daerah.
	Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan; 4. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
	Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi; 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hunian layak; 6. Peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis; 7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan.
	Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	1. Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; 2. Penurunan emisi gas rumah kaca; 3. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; 4. Pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim; 5. Peningkatan pengelolaan persampahan; 6. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan; 7. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; 8. Peningkatan ketahanan pangan.
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS		
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan akses layanan kesehatan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 3. Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan; 4. Peningkatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan akses dan inklusi layanan pendidikan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 3. Peningkatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; 4. Penyediaan akses pendidikan tinggi.
	Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja; 2. Peningkatan kesempatan kerja; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan; 4. Peningkatan daya saing kepemudaan; 5. Peningkatan daya saing perempuan.
	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	1. Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat; 2. Pengembangan ketahanan sosial, budaya dan agama; 3. Pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal.
LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK		
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2. Peningkatan kualitas layanan publik; 3. Peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur; 4. Peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah; 6. Penguatan dan penerapan riset dan inovasi pemerintahan.
	Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah

1) Peningkatan produksi dan nilai tambah melalui hilirisasi industri;

Strategi dalam meningkatkan produksi untuk mendukung hilirisasi industri difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung dan penguatan kapasitas produksi di sektor unggulan, khususnya kelapa sawit. Selain itu, Pemerintah Daerah juga mempercepat proses perizinan dan menjamin ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan swasta juga diperkuat guna menjamin keberlanjutan rantai pasok dari hulu ke hilir.

Sementara itu, strategi untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri diarahkan pada diversifikasi produk olahan serta peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi dan transfer teknologi. Dorongan terhadap sertifikasi produk, penguatan logistik, dan perluasan pasar juga dilakukan agar produk industri hilir lebih kompetitif. Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan sektor industri pengolahan Kalimantan Timur.

2) Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri;

Strategi pembangunan kawasan-kawasan industri di Kalimantan Timur, khususnya di Maloy, Kariangau, Buluminung, dan Bontang sebagai *superhub* ekonomi IKN, diawali dengan penyediaan infrastruktur dasar yang andal untuk mendukung aktivitas industri. Selanjutnya, Pemerintah Daerah memberi dorongan melalui kemudahan perizinan dan jaminan atas kepastian hukum agar mampu menarik minat investor. Perencanaan konektivitas antar kawasan industri dan pusat logistik regional juga dilakukan untuk mengefisiensikan distribusi produk dan bahan baku.

Strategi pengembangan kawasan-kawasan industri dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi kawasan dengan pendekatan konsep aglomerasi. Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi dan adopsi teknologi industri. Selain itu, perluasan pasar dan peningkatan nilai tambah dilakukan melalui sinergi kawasan industri dengan kebutuhan logistik dan pasokan bahan baku. Melalui hal tersebut, diharapkan kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan akan meningkat sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam upaya perwujudan transformasi ekonomi.

3) Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Strategi peningkatan produktivitas di sektor pertanian difokuskan pada penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan bagi petani terkait pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan. Produktivitas pada sektor perkebunan ditingkatkan melalui program peremajaan tanaman/*replanting*, pengendalian hama dan penyakit, serta penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan. Adapun sektor peternakan diarahkan pada peningkatan kualitas pakan, penyediaan bibit ternak unggul, dan penguatan layanan kesehatan hewan melalui pengembangan Desa Korporasi Ternak.

Strategi peningkatan produktivitas sektor perikanan didorong melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan, pengembangan budidaya perikanan air tawar dan laut serta perikanan tangkap berbasis teknologi modern, perbaikan fasilitas tangkap, serta penataan sistem distribusi hasil tangkapan. Sementara itu, peningkatan produktivitas di sektor kehutanan dilakukan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan rehabilitasi lahan kritis. Dengan pendekatan yang menyeluruh di masing-masing subsektor, strategi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan sumber daya alam daerah, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

4) Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;

Strategi pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, penginapan, dan fasilitas umum. Hal tersebut didukung dengan penyelenggaraan festival budaya lokal, promosi digital, serta jalinan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata pun dilakukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.

Pada sisi lain, pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada pelatihan keterampilan dengan disesuaikan pada potensi lokal. Pemerintah Daerah turut berkontribusi dalam pembentukan ruang kreatif sebagai inkubator bisnis, wadah kolaborasi dan promosi produk. Sementara itu, dukungan terhadap pengembangan UMKM diberikan melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, serta pendampingan untuk masuk ke pasar digital.

Pengembangan koperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pemanfaatan digitalisasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing. Koperasi Merah Putih juga dikembangkan sebagai salah satu instrumen pengembangan koperasi modern melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha strategis sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung pencapaian pembangunan daerah. Jika dikembangkan secara terpadu, keempat sektor tersebut akan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi serta memperkuat daya saing Kalimantan Timur.

5) Peningkatan investasi pada sektor produktif;

Strategi peningkatan investasi pada sektor produktif dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi investasi melalui identifikasi sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pada kawasan industri dan

pelabuhan, serta pemberian insentif bagi investor. Selain itu, promosi investasi secara aktif turut dilakukan melalui forum investasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan, pelaku usaha, BUMN/BUMD, serta internasional. Melalui langkah-langkah tersebut, strategi peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan sektor riil sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

6) Menjaga stabilitas perekonomian daerah;

Strategi menjaga stabilitas perekonomian daerah dilaksanakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, pengawasan distribusi barang, pembangunan pusat distribusi pangan, serta dukungan terhadap produksi lokal untuk menjaga kelancaran rantai pasok. Pada sisi lain, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Timur dioptimalkan dalam merespons gejolak harga, termasuk melalui operasi pasar, pembentukan toko penyeimbang dan pemantauan harga secara berkala. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga tetap terjaga dan tingkat inflasi dapat dikendalikan secara efektif untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

7) Peningkatan nilai ekspor daerah;

Strategi peningkatan nilai ekspor daerah dilaksanakan melalui diversifikasi komoditas unggulan, utamanya produk turunan kelapa sawit, produk olahan perikanan, dan hasil tambang. Perluasan akses pasar luar negeri juga ditingkatkan melalui kerja sama dagang dan promosi investasi, serta peningkatan kualitas dan standar produk untuk memenuhi permintaan global. Langkah lainnya adalah dengan memberi dukungan terhadap pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui pelatihan, pembiayaan, dan fasilitasi logistik. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan devisa dan memperluas jaringan perdagangan

internasional sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan

1) Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial;

Strategi peningkatan cakupan perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan jangkauan program bantuan sosial berbasis data yang valid. Adapun bantuan sosial disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didalamnya termasuk bantuan untuk keluarga miskin dan rentan, pendidikan anak sekolah, jaminan perlindungan kesehatan, jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta kebutuhan dasar lansia dan penyandang disabilitas.

Sedangkan strategi peningkatan kualitas perlindungan sosial diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja, pemberian akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, namun juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang bagi kelompok miskin dan rentan. Terbukanya akses masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus peluang untuk mandiri secara ekonomi diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.

2) Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Strategi peningkatan akses layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS salah satunya dilaksanakan dengan mendekatkan layanan ke masyarakat, seperti unit layanan keliling, dan menjalin kemitraan dengan lembaga lokal. Selain itu, pengintegrasian data PMKS dengan data yang valid juga dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan penjangkauan sasaran. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilaksanakan, diantaranya melalui pembukaan kanal pengaduan dan layanan daring sehingga lebih inklusif bagi kelompok rentan.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dilakukan melalui pemberian pelatihan berkelanjutan kepada pekerja sosial serta melakukan standardisasi prosedur pelayanan sesuai dengan pedoman nasional. Selain itu, pengawasan mutu layanan juga diperkuat melalui sistem evaluasi rutin, asesmen kepuasan penerima layanan, dan akreditasi lembaga layanan sosial. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan akan mempercepat pemulihan kemandirian sosial-ekonomi PMKS sehingga berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan;

Strategi peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan dijalankan melalui pelatihan manajemen usaha, penguatan modal BUMDes, serta pendampingan dalam pengelolaan unit-unit usaha produktif. Pemerintah Daerah juga turut memfasilitasi akses pasar dan kemitraan antara BUMDes dan pelaku usaha besar agar produk desa memiliki daya saing.

Keterlibatan aktif masyarakat pun didorong dalam perencanaan dan pengelolaan usaha desa. Hal tersebut turut didukung oleh regulasi serta pemberian insentif fiskal dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan, diharapkan lembaga ekonomi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di perdesaan dengan menciptakan sumber penghidupan yang inklusif dan berkelanjutan.

4) Revitalisasi kawasan permukiman kumuh;

Strategi revitalisasi kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan akses air bersih. Hal tersebut juga disertai dengan penataan hunian yang layak dan ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dibentuk untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk pemberdayaan warga dalam proses pembangunan. Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung produktivitas ekonomi.

Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan strategis provinsi, jembatan penghubung antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, penyediaan sarana dan prasarana dermaga serta penyediaan moda transportasi yang terintegrasi. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta turut dilakukan untuk mendanai proyek infrastruktur serta mempercepat proses perizinan dan pengadaan lahan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas orang dan barang menjadi lebih lancar dan efisien.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas difokuskan pada perbaikan kondisi jalan yang rusak melalui rekonstruksi dan rehabilitasi, modernisasi sarana transportasi, serta penguatan sistem manajemen lalu lintas. Adapun standar mutu layanan infrastruktur dipastikan melalui penggunaan material konstruksi sesuai standar serta dilakukannya perawatan secara berkala. Hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Timur.

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur sumber daya air dilakukan dengan membangun bendungan, embung, saluran irigasi baru, dan jaringan pipa distribusi air baku di wilayah yang masih minim akses.

Pemerintah Daerah turut mengidentifikasi daerah kekurangan air baku dan rawan kekeringan maupun banjir dan memastikan ketersediaan infrastruktur pengendalian air. Kerja sama lintas sektor dilakukan untuk dapat mempercepat realisasi proyek, terutama di kawasan yang mendukung pertanian, perkotaan, dan industri.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas infrastruktur difokuskan pada rehabilitasi saluran irigasi, pemeliharaan rutin bendungan, serta penerapan teknologi pengolahan dan distribusi air baku yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga pemantauan debit air dan penguatan sistem peringatan dini banjir untuk menjaga ketahanan infrastruktur. Berdasarkan langkah-langkah yang dijabarkan, diharapkan strategi tersebut dapat menjamin ketahanan air maupun mendukung pertanian, pengendalian banjir dan ketersediaan air baku dengan andal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur air minum di Kalimantan Timur dilaksanakan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, perluasan jaringan perpipaan, dan penambahan *reservoir* di wilayah dengan cakupan layanan rendah. Optimalisasi pemanfaatan sumber air baku serta pengembangan sistem distribusi air minum regional juga didorong oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut didukung oleh penyediaan anggaran yang memadai serta kolaborasi dengan PDAM dan mitra swasta untuk mempercepat penyediaan akses air minum layak.

Pada sisi kualitas, strategi difokuskan pada peningkatan standar pengolahan air, peremajaan pipa distribusi, serta penerapan sistem pemantauan kualitas air secara *real-time*. Melalui langkah-langkah yang dapat menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan mendukung peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan infrastruktur air minum di Kalimantan Timur.

4) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur air limbah dan sanitasi dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah, penambahan jaringan perpipaan air limbah, serta pembangunan tangki septik komunal di wilayah padat penduduk. Selain bekerja sama dengan sektor swasta dalam skema pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi skala rumah tangga.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem biofilter, serta pemeliharaan rutin jaringan dan fasilitas pengelolaan limbah. Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat tentang perilaku sanitasi sehat juga dilakukan agar infrastruktur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur sanitasi di Kalimantan Timur dengan terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan layak huni.

5) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hunian layak;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana hunian layak dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta dukungan pengembangan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan akses transportasi, air bersih, dan listrik. Pada sisi kualitas, strategi peningkatan dilakukan dengan memastikan standar konstruksi yang tahan bencana, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas penunjang seperti drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau. Adapun pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni juga terus dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah. Melalui penyediaan hunian yang layak dan sehat

serta pengurangan *backlog* perumahan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur hunian layak di Kalimantan Timur.

6) Peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis;

Strategi peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis diarahkan pada rehabilitasi gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat pelayanan publik agar memenuhi standar teknis dan fungsional yang aman, efisien, serta ramah lingkungan. Penggunaan material konstruksi berkualitas, penerapan sistem manajemen bangunan cerdas (*smart building*), serta audit struktur bangunan secara berkala juga dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberlanjutan, keandalan, dan efisiensi operasional bangunan-bangunan strategis yang mendukung pelayanan publik secara optimal sehingga meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Kalimantan Timur.

7) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan;

Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan dengan memperluas jaringan distribusi listrik ke daerah terpencil serta menambah kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Kerja sama dengan PLN dan investor swasta juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan pengembangan industri baru.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas dilakukan dengan memperkuat sistem transmisi dan distribusi, menerapkan teknologi *smart grid* untuk meningkatkan efisiensi pasokan listrik, serta melakukan pemeliharaan dan modernisasi infrastruktur kelistrikan secara berkala. Melalui pengimplementasian strategi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur, khususnya ketenagalistrikan, yang andal dan stabil di Kalimantan Timur.

Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

1) Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru;

Strategi peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dilaksanakan melalui penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air, pemanfaatan pupuk organik, serta diversifikasi tanaman. Perluasan program rehabilitasi hutan dan pengembangan hutan tanaman rakyat pun digencarkan dengan melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, pelatihan pertanian hijau bagi petani dan pekebun turut difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, strategi peningkatan peran sektor perikanan dalam konteks pengembangan ekonomi biru dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta restorasi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pelatihan bagi nelayan mengenai praktik tangkap selektif diselenggarakan untuk menjaga produktivitas perikanan jangka panjang. Keseluruhan langkah-langkah yang dijabarkan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi hijau dan biru di Kalimantan Timur, dengan menciptakan sistem produksi yang efisien dan rendah emisi. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga mendukung penurunan intensitas emisi GRK melalui peningkatan tutupan vegetasi, konservasi karbon biru, dan pengurangan deforestasi.

2) Penurunan emisi gas rumah kaca;

Strategi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) diarahkan melalui penguatan program rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, pengelolaan limbah serta penerapan pembangunan rendah karbon di sektor industri dan transportasi juga menjadi langkah yang diambil.

Melalui penerapan strategi tersebut, kualitas lingkungan hidup dapat meningkat akibat berkurangnya polusi dan kerusakan ekosistem serta menurunnya intensitas emisi GRK.

3) Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan;

Strategi pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan melalui implementasi teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, serta perlindungan keanekaragaman hayati termasuk habitat satwa endemik. Pemerintah Daerah juga mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat sebagai bagian dari konservasi berkelanjutan.

Pada sisi lain, strategi pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, penerapan AMDAL secara ketat dan transparan serta penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas institusi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Upaya tersebut bertujuan menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi risiko degradasi ekosistem, sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan.

4) Pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim;

Strategi pengendalian dampak perubahan iklim difokuskan pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, penerapan konsep pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan air terpadu, dan diversifikasi tanaman tahan iklim. Pelatihan teknis dan integrasi kebijakan lintas sektor juga dilakukan untuk

memperkuat perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat daerah.

Sementara itu, strategi penanggulangan dampak iklim difokuskan pada pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta rehabilitasi mangrove dan lahan gambut untuk meredam dampak iklim ekstrem. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tutupan lahan dan efisiensi energi, sekaligus memperkuat sistem adaptasi dan mitigasi bencana iklim sehingga berdampak pada penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur.

5) Peningkatan pengelolaan persampahan;

Strategi peningkatan pengelolaan persampahan dijalankan melalui optimalisasi sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat rumah tangga hingga industri. Perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah dan pembangunan fasilitas daur ulang diupayakan pelaksanaannya. Penguatan peran bank sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan. Melalui penerapan strategi ini, kualitas lingkungan hidup dapat meningkat karena berkurangnya timbunan sampah di TPA, menurunnya pencemaran tanah dan air, serta terciptanya perilaku masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

6) Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan;

Strategi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dilaksanakan dengan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa. Perkuatan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga riset untuk inovasi teknologi rendah emisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, edukasi kepada

masyarakat dan pelatihan teknis juga diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem energi terbarukan. Melalui langkah-langkah ini, emisi gas rumah kaca (GRK) dapat ditekan secara signifikan karena berkurangnya ketergantungan pada energi fosil dan meningkatnya bauran energi ramah lingkungan.

7) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana;

Strategi peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dilakukan dengan memperkuat sistem peringatan dini, membangun infrastruktur tangguh bencana, diantaranya tanggul banjir dan jalur evakuasi, serta menyusun rencana kontinjensi. Pelatihan dan simulasi rutin bagi masyarakat, serta pembentukan relawan tanggap bencana lokal untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Selain itu, integrasi mitigasi risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah menjadi kunci dalam mengurangi kerentanan kawasan rawan bencana. Berdasarkan langkah-langkah yang dijabarkan, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan karena masyarakat dan pemerintah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana.

8) Peningkatan ketahanan pangan;

Strategi peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada perluasan lahan produktif, pemanfaatan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pasar tani, penguatan rantai pasok pangan, penguatan lumbung pangan desa dan cadangan pangan daerah. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan akses subsidi benih serta pupuk guna meningkatkan kapasitas produksi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Diversifikasi pangan lokal juga didorong sebagai sumber karbohidrat alternatif. Upaya ini bertujuan membangun ekosistem

pangan yang berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi isu krisis pangan maupun gangguan iklim.

Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1) Peningkatan akses layanan kesehatan;

Strategi peningkatan akses layanan kesehatan di Kalimantan Timur dilaksanakan melalui peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan pemerataan tenaga medis dan pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, integrasi program pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan sanitasi juga ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan umur harapan hidup dan penurunan prevalensi stunting melalui pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;

Strategi peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan dilakukan dengan membangun unit layanan kesehatan baru di wilayah yang belum terjangkau seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, memprioritaskan daerah dengan rasio fasilitas rendah, serta menambah layanan kesehatan keliling. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan.

Sementara itu, strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan alat kesehatan, perbaikan infrastruktur penunjang seperti ruang rawat inap dan sanitasi, serta digitalisasi layanan melalui sistem rekam medis elektronik. Standar mutu juga diperkuat melalui pelatihan bagi tenaga teknis dan non-teknis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat penanganan masalah kesehatan, dan berkontribusi terhadap peningkatan umur harapan hidup serta penurunan prevalensi stunting.

3) Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan;

Strategi penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan dilaksanakan melalui optimalisasi peran Posyandu, serta penggencaran Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Hal tersebut didukung dengan penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan kader kesehatan, serta integrasi antara layanan gizi, imunisasi, dan kesehatan ibu-anak secara rutin. Dukungan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi pendampingan teknis dan pemberian insentif bagi kader dalam pemeliharaan sarana kesehatan lokal. Melalui langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai dengan peningkatan umur harapan hidup dan penurunan prevalensi stunting.

4) Peningkatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan;

Strategi peningkatan upaya promotif di bidang kesehatan dilakukan melalui edukasi kesehatan masyarakat secara masif mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, serta imunisasi dan sanitasi. Sementara itu, strategi pada sisi preventif diwujudkan melalui pendeteksian dini penyakit menular dan tidak menular, pemberian imunisasi lengkap, serta skrining ibu hamil dan balita. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit sejak dini, sehingga berkontribusi pada peningkatan umur harapan hidup.

Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

1) Peningkatan akses dan inklusi layanan pendidikan;

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan dilaksanakan dengan mendirikan unit sekolah baru dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Langkah lainnya ialah dengan menempatkan guru secara merata melalui skema afirmatif dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik. Bantuan pendidikan gratis dan seragam sekolah turut diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk mengurangi hambatan ekonomi siswa dalam mengakses pendidikan formal.

Selanjutnya, strategi peningkatan inklusi layanan pendidikan dilakukan dengan perkuatan sistem pendidikan inklusif yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, akses pendidikan non-formal diperluas untuk menjangkau kelompok usia sekolah yang tidak tertampung di pendidikan formal. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat terwujud dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat mengakses layanan pendidikan.

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah unggulan, unit sekolah baru, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan. Selain itu, pembangunan ruang kelas dan penambahan fasilitas pendukung seperti asrama yang dibangun untuk memfasilitasi siswa yang berasal dari daerah terpencil. Adapun sumber pendanaan lainnya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pusat, dan pihak swasta melalui skema *corporate social responsibility* (CSR).

Dalam hal peningkatan kualitas, strategi peningkatan sarana dan prarasana pendidikan dijalankan melalui revitalisasi fasilitas sekolah dan perbaharuan fasilitas belajar. Selain itu, peningkatan kapasitas pengelola juga dilakukan sehingga pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dapat optimal. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar, yang pada akhirnya mendorong siswa untuk menyelesaikan pendidikannya dalam kondisi yang layak dan mendukung.

3) Peningkatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;

Peningkatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dilakukan melalui kolaborasi aktif antara satuan pendidikan vokasi dan pelaku usaha serta penyediaan fasilitasi inkubasi bisnis oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, strategi peningkatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia industri dijalankan melalui penyelarasan jurusan SMK dengan kebutuhan industri, kurikulum SMK dengan standar kompetensi industri, dan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi. Adapun kerja sama dengan perusahaan besar di sektor unggulan Kalimantan Timur diperkuat dengan pengembangan skema magang berbasis *teaching industry*. Untuk memperkuat keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, juga dilakukan peningkatan peran Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV). Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan akan mendorong penyerapan tenaga kerja dari siswa lulusan SMK.

4) Penyediaan akses pendidikan tinggi;

Strategi penyediaan akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur dilakukan melalui pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari jenjang sarjana, magister dan doktoral, dukungan sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta pemberian rekomendasi terhadap pengembangan program studi yang relevan dengan potensi daerah. Pemerintah Daerah juga mendukung pembukaan kelas jarak jauh di wilayah terpencil melalui dukungan pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Langkah tersebut bertujuan memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi, sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.

Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

1) Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja;

Strategi dalam peningkatan kapasitas dan produktifitas tenaga kerja difokuskan pada pelatihan berbasis keterampilan (*skill-based training*) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, peningkatan kapasitas instruktur, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi kerja serta mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan juga didorong melalui program magang intensif guna memperkuat kesiapan dan daya saing tenaga kerja lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita melalui kontribusi tenaga kerja yang lebih terampil, sekaligus memperluas peluang kerja dan menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Timur.

2) Peningkatan kesempatan kerja;

Strategi peningkatan kesempatan kerja difokuskan pada pengembangan sektor padat karya, penguatan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan, serta perluasan pasar, dan pengembangan *digital platform*, serta penyelenggaraan bursa kerja yang menghubungkan pencari kerja dengan peluang yang tersedia. Strategi ini juga diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi energi dan sumber daya alam, serta pembangunan rendah karbon melalui bisnis proses dan praktik industri yang ramah lingkungan, atau disebut dengan pekerjaan hijau/*green jobs*.

Peningkatan kesempatan kerja melalui pengembangan pekerjaan hijau juga didorong untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Keseimbangan permintaan tenaga kerja hijau untuk pekerjaan hijau dan penyediaan tenaga kerja hijau yang

berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau. Penciptaan pekerjaan hijau akan diwujudkan melalui pengembangan ekosistem pekerjaan hijau dan pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi yang lebih produktif dan stabil sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita dan penurunan tingkat pengangguran.

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan;

Strategi peningkatan kuantitas kewirausahaan difokuskan pada penguatan ekosistem pendukung bagi calon dan pelaku UMKM melalui pelatihan berbasis potensi lokal, pembentukan inkubator bisnis, serta pemberian bantuan permodalan dan kemudahan akses permodalan. Pemerintah Daerah juga mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha dengan mempermudah perizinan dan memperluas akses pasar melalui fasilitasi promosi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Adapun strategi peningkatan kualitas kewirausahaan dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi produk (seperti halal dan SNI), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk operasional dan pemasaran, termasuk melalui *e-commerce* dan media sosial. Pemerintah Daerah juga mendukung UMKM untuk ikut serta dalam pameran dagang dan festival lokal guna meningkatkan daya saing produk. Diharapkan jumlah pelaku usaha produktif dapat meningkat serta keberlanjutan dan daya saing usaha menguat melalui upaya tersebut sehingga dapat mendorong produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB per kapita dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

4) Peningkatan daya saing kepemudaan;

Strategi peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan melalui pengembangan program pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri, penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan, serta

penyediaan ruang kreatif dan inovatif. Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial-ekonomi dan memperluas akses pemuda terhadap program magang, beasiswa, serta kompetisi inovasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemuda akan lebih siap memasuki dunia kerja atau menciptakan peluang usaha mandiri. Hal tersebut tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kontribusi produktif mereka dalam kegiatan ekonomi daerah.

5) Peningkatan Daya Saing Perempuan

Strategi untuk meningkatkan daya saing perempuan difokuskan pada pengurangan kesenjangan tingkat pendidikan dan akses kesehatan, kesenjangan akses pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta perlindungan dan kesetaraan hukum. Hal tersebut dilaksanakan dengan memastikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan ibu yang berkualitas, menghilangkan hambatan pendidikan bagi anak perempuan, dan mengatasi hambatan akses perempuan masuk ke sektor-sektor tertentu. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, serta penguasaan sumber daya ekonomi dapat dicapai dengan mendorong kuota keterwakilan perempuan di parlemen dan posisi manajemen senior, serta memfasilitasi kepemilikan aset dan akses terhadap kredit bagi perempuan berusaha. Selain itu, pemberian perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan juga diperlukan. Pendekatan komprehensif pada kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di ranah publik dapat meningkatkan kontribusi perempuan secara signifikan dalam produktivitas dan kapasitasnya.

Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat

1) Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat;

Strategi penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat dilaksanakan melalui bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah secara proporsional, serta pemberian bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas ibadah. Selain itu, penyediaan fasilitas perjalanan spiritual (umroh dan perjalanan religi), dialog antarumat beragama, serta kerja sama dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan dilakukan untuk mempererat solidaritas antarumat beragama. Langkah-langkah ini tidak hanya menjamin pemenuhan hak-hak beribadah masyarakat secara adil, tetapi juga menguatkan toleransi dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur.

2) Pengembangan ketahanan sosial, budaya dan agama;

Strategi pengembangan ketahanan sosial, budaya, dan agama diarahkan pada upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kohesi sosial masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pelestarian serta revitalisasi budaya lokal, dan peningkatan literasi serta moderasi beragama. Pembinaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama guna memastikan setiap program responsif terhadap kearifan lokal dan kebutuhan komunitas, sekaligus membangun jejaring kolaboratif lintas sektor dalam penguatan karakter bangsa. Selain itu, strategi ini menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang efektif untuk mengurangi kerentanan sosial, mengarusutamakan nilai budaya dan agama dalam pendidikan, serta pembangunan sebagai landasan moral dan etika bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial, budaya serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Timur.

3) Pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal;

Strategi pelestarian seni dan budaya dilakukan melalui pendataan, perlindungan, dan pengembangan ekspresi budaya seperti tari, musik, dan bahasa lokal, disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pendukung seni dan budaya, pelatihan, *workshop*, serta festival budaya rutin. Dukungan promosi bagi komunitas adat dan pelaku seni juga ditingkatkan untuk memperluas jangkauan pelestarian dan membangun apresiasi masyarakat.

Adapun strategi pelestarian kearifan lokal diwujudkan dengan penerapan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan lingkungan dan pelibatan tokoh adat dalam perumusan kebijakan pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, seni, budaya, dan kearifan lokal tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi landasan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dan kompetitif.

Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan

1) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

Strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah difokuskan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja yang terintegrasi dengan *e-government*. Penyelenggaraan pelatihan teknis penyusunan dokumen kinerja dan penerapan monitoring dan evaluasi berbasis indikator capaian turut dioptimalkan. Selain itu, dilakukan pula publikasi capaian kinerja dan penguatan fungsi pengawasan internal untuk mendorong budaya kerja yang akuntabel. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah akan semakin meningkat dengan proses pemerintahan didorong untuk lebih terbuka, terukur, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya mendorong peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

2) Peningkatan kualitas layanan publik;

Strategi peningkatan kualitas layanan publik dilakukan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur birokrasi, optimalisasi penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, serta peningkatan kapasitas SDM di unit pelayanan. Upaya lainnya mencakup optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem antrian, pengaduan, dan penilaian kepuasan masyarakat, serta penguatan standar pelayanan minimal di setiap sektor. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik instansi pemerintah.

3) Peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur;

Strategi peningkatan integritas aparatur di Kalimantan Timur dilaksanakan melalui pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai etika, anti-korupsi, dan pelayanan publik. Kerja sama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dilakukan untuk menanamkan komitmen terhadap integritas aparatur. Penegakan kode etik secara tegas serta pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas tinggi diterapkan dalam rangka membangun budaya birokrasi yang bersih.

Adapun strategi peningkatan profesionalitas dilakukan dengan pengembangan kapasitas SDM ASN secara kontinu, memastikan kesesuaian kompetensi aparatur terhadap bidang tugasnya melalui uji kompetensi, rotasi jabatan yang objektif, serta pengembangan karier berbasis kinerja. Dengan demikian, seluruh langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas aparatur untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip profesionalisme.

4) Peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian;

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian dijalankan melalui penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, pembaharuan data ASN secara berkala, serta pelaksanaan rekrutmen dan promosi jabatan berbasis kompetensi dan kinerja. Selain

itu, penguatan fungsi pembinaan kepegawaian di setiap perangkat daerah dan fasilitasi pelatihan sesuai kebutuhan jabatan turut mendorong efektivitas manajemen SDM aparatur. Melalui langkah-langkah tersebut, sistem merit dapat diterapkan secara konsisten karena pengelolaan kepegawaian menjadi lebih objektif, transparan, dan berbasis pada prinsip profesionalisme dan kinerja.

5) Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah;

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah diterapkan melalui pendataan aset yang akurat dan terbarukan, pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem inventarisasi aset, serta pengawasan berkala terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset oleh Perangkat Daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola aset dan optimalisasi aset yang tidak produktif menjadi langkah yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan nilai manfaat aset daerah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mendorong terciptanya tata kelola aset yang lebih optimal dan berdaya guna.

6) Penguatan riset dan inovasi pemerintahan beserta penerapannya;

Strategi penguatan riset dan inovasi pemerintahan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan swasta, serta penyediaan dana riset kepada peneliti (termasuk akademisi) untuk mendukung inovasi terhadap permasalahan pelayanan publik. Strategi penerapan riset dan inovasi pemerintahan dilakukan melalui pengintegrasian hasil riset ke dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan, membangun ekosistem birokrasi yang adaptif dan berbasis pengetahuan, mengembangkan mekanisme insentif bagi Perangkat Daerah yang menghasilkan gagasan inovatif dan solutif, serta pengendalian dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil riset yang telah disusun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong

pengimplementasian hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan dan mendorong berkembangnya inovasi daerah.

Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

1) Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan;

Strategi peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan dilakukan meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem layanan publik berbasis digital, serta peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan literasi digital. Hal tersebut didukung oleh perluasan cakupan jaringan internet, terutama di wilayah terpencil, serta pengembangan *platform* layanan terpadu seperti penyederhanaan pengurusan izin melalui aplikasi OSS. Adapun implementasi kebijakan satu data serta percepatan penggunaan dokumen digital menjadi langkah yang diambil dalam efisiensi birokrasi. Melalui langkah-langkah tersebut, digitalisasi pemerintahan akan mempercepat transformasi menuju tata kelola yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Strategi peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas layanan publik sesuai standar minimal pelayanan. Sementara itu, peningkatan kualitas dilakukan dengan pemeliharaan rutin, digitalisasi layanan, modernisasi teknologi, serta pelatihan petugas agar pelayanan lebih profesional. Upaya ini diharapkan menjadikan pelayanan publik lebih efisien, inklusif, dan bermutu tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.4.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Berikut program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3.15. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses									
	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah									
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya produk dan negara tujuan ekspor	Negara Tujuan Produk Ekspor (Negara)	11	12	13	15	17	20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Produk yang Masuk Pasar Ekspor (Produk)	17	19	22	24	28	33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri (%)	37,81	40,81	42,31	43,81	45,31	46,81	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	31,5	35	38,5	42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	n/a	2,91	3,05	3,18	3,32	3,46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya koperasi kewenangan provinsi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	65	70	75	80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas lahan pertanian yang terlindungi	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	21.415,06	30.462,06	42.462,06	42.462,06	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (Ton)	439.628,00	493.966,02	523.603,98	555.020,22	588.321,43	623.620,72	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Produksi tanaman pangan (Ton)	321.685,60	347.814,02	351.918,23	356.070,87	360.272,50	364.523,72	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatknya Luasan Areal Perkebunan	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	40.450	36.750	33.400	30.050	Dinas Perkebunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096	20.092.114	20.180.519	20.269.314	20.358.499	Dinas Perkebunan
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan	Luas Kawasan Untuk Peternakan (Ha)	300	500	600	700	800	900	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Kemanfaatan Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan (Skor)	80,66	85,57	88,14	90,78	93,51	96,31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan (Skor)	87,02	90,54	92,35	94,19	96,08	98,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan	Jumlah produk olahan hasil perikanan (Ton)	40.214	44.289	46.441	48.763	51.201	53.761	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	1.496.856.638.140	1.680.270.182.290	1.765.987.693.815	1.864.461.726.395	2.014.425.391.040	2.150.463.904.900	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	214.694	223.367,8	227.834,9	232.391,7	237.039,5	241.780,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	241.728,4	258.945,5	268.008,6	277.388,9	287.097,5	297.145,9	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1.545	1.645	1.695	1.745	1.795	1.845	Dinas Kehutanan
			Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	6.293.432,95	6.402.024	6.461.888,27	6.525.929,11	6.594.146,54	6.665.844,44	Dinas Kehutanan
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	1,69	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Pariwisata
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,55	5,07	6,08	7,09	8,11	9,12	Dinas Pariwisata
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi (Angka)	2,364	2.489	2.614	2.739	2.864	3.014	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan									
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	30	60	60	70	90	100	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	45	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang Dibina (%)	4,2	8,47	14,41	21,19	27,97	36,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (%)	2,73	3,56	4,16	4,75	5,35	5,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)	16,60	31,43	32,58	34,05	35,19	37,40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas									
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	93,62	97,57	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air	Kapasitas air baku untuk air bersih (Liter/Detik)	11.011	11.676	11.736	11.796	11.856	12.166	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99	38,06	41,68	44,25	47,78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	0,40	16,08	19,58	23,01	26,45	31,40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,41	11,42	13,86	16,47	18,99	22,33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	0,00	8,62	8,62	15,52	15,52	15,52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (%)	9,7	16,00	19,50	23,00	26,50	30,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	84,23	88,23	91,23	94,23	97,23	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	74,47	79,08	82,98	87,23	90,43	92,91	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Kepemilikan Rumah	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (Orang)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
01.04.05	Program Peningkatan Prasana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	29,02	33,77	34,42	35,28	36,15	37,01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat (Dinas Perhubungan)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (%)	50,74	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	Dinas Perhubungan
			Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang (%)	25	35	40	45	50	55	Dinas Perhubungan
			Rasio Konektivitas Darat (Angka)	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	Dinas Perhubungan
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan SDP	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran (Indeks)	45,45	48,21	51,00	53,00	55,00	57,00	Dinas Perhubungan
			Rasio Konektivitas Laut dan SDP (Angka)	0,846	0,846	0,890	0,923	0,923	0,923	Dinas Perhubungan
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (%)	0,3788	0,4996	0,5070	0,5107	0,5143	0,5180	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12,14	15,73	19,06	22,39	25,72	29,05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
03.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	96,17	97,06	97,48	97,88	98,26	98,63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan									
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,77	18,75	22,50	26,25	30,00	33,75	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunya Emisi GRK dari sektor persampahan	Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Persampahan (TonCO2e)	17.609,98	49.580,71	73.962,35	120.978,3	153.997,54	184.656,55	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (%)	29,53	30,1	30,2	30,3	30,4	30,5	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunya Emisi GRK dari sektor limbah	Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Limbah (TonCO2e)	15.500,62	42.532,79	62.676,13	101.274,35	127.383,98	150.974,65	Dinas Lingkungan Hidup
03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	1	3	4	5	6	7	Dinas Kehutanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
			Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	3,5	4,45	4,92	5,40	5,87	6,34	Dinas Kehutanan
03.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	0,547	0,555	0,568	0,572	Dinas Kehutanan
			Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	122.579	95.337	109.140	115.860	122.580	132.580	Dinas Kehutanan
03.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	10.104	544.821	903.227	1.007.608	1.200.795	1.201.398	Dinas Kehutanan
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	65,037	65,118	65,200	65,282	65,364	Dinas Kehutanan
03.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	330.184	370.184	380.184	390.184	400.184	410.184	Dinas Kehutanan
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	1	6	6	6	6	6	Dinas Kehutanan
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	10	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya penggunaan energi bersih	Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)	6.994.832,59	9.388.542,39	11.754.895,55	14.268.436,97	16.936.345,38	19.766.114,34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
03.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	87,36	87,37	87,38	87,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan dalam menghadapi bencana	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	n/a	0,115	0,118	0,119	0,123	0,125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Pasca Bencana (Indeks)	n/a	0,055	0,056	0,057	0,060	0,065	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Pra Bencana (Indeks)	n/a	0,383	0,396	0,414	0,429	0,430	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani (%)	74,5	90	90	90	90	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya persediaan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	89,10	89,95	90,40	90,85	91,31	91,77	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya kualitas ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	97,70	97,80	97,85	97,90	97,95	98,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,81	1,90	0,95	0	0	0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas									
	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat									
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan (Angka)	8,42	8,05	7,87	7,69	7,51	7,32	Dinas Kesehatan
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100,88	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60,16	80	86	92	98	100	Dinas Kesehatan
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	62	60	64	70	76	82	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	66	73	76	80	84	89	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat									
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	81,84	82,57	82,93	83,29	83,66	84,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	53,75	71,34	72,43	73,52	74,61	75,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	78,53	80,63	82,74	84,64	86,95	89,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	68,84	70,95	73,05	75,16	77,26	79,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	81,63	82,71	83,25	83,79	84,33	84,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	88,2	90,18	91,17	92,16	93,15	94,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	51,00	52,52	53,36	54,19	55,03	55,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
04.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra (Orang)	n/a	198.900	202.390	209.028	214.685	223.553	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia									
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65	67	68,5	70,5	71,5	73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	288.813.211	306.401.936	315.593.994	325.061.813	334.813.668	344.858.078	
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10	28,10	28,60	29	29,60	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen (%)	44,09	45,92	46,94	48,17	49,63	54,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	49,07	50.20-51.26	50.75-51.69	51.30-52.11	51.86-52.54	52.41-52.97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	1,02	1,45	1,50	2	2,50	3	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat									
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari terjaganya keharmonisan, toleransi, dan stabilitas sosial di daerah	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur (Indeks)	6,85	6,89	6,91	6,93	6,95	6,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
04.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kapasitas lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan	Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra (Orang)	n/a	5.715	5.915	6.015	6.115	6.495	Sekretariat Daerah
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	45	50	53	59	63	68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	29	31	33	36	38	41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan									
04.01.02	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya Hasil Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi (%)	65,96	63	67	68	70	75	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) (%)	78,38	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	Sekretariat Daerah
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan ASN	Persentase Pemenuhan ASN sesuai perencanaan (%)	60,87	89,21	89,42	89,63	89,84	90,05	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	86,54	88,13	88,47	89,09	89,99	92,15	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	94,23	94,29	94,32	94,35	94,38	94,40	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	97,29	97,43	97,50	97,57	97,64	97,71	Badan Kepegawaian Daerah
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Profesional dan Akutanbel	Indeks pengelolaan barang milik daerah (Indeks)	2,26	2,40	2,47	2,54	2,61	2,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi teknis ASN	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis (Orang)	1.490	1.410	1.440	1.470	1.500	1.530	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan ASN	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan (Orang)	7.153	12.000	12.050	12.060	12.070	12.080	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya ASN yang kompeten	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi (Orang)	130	400	420	450	470	490	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Jumlah Kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan (Kasus)	814	790	780	770	760	750	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan / Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
05.05.03	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan secara berkelanjutan	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) (%)	n/a	52,94	64,71	76,47	88,24	94,12	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi (%)	n/a	45,71	51,43	57,14	62,86	68,57	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi									
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (%)	80	85	87	89	91	93	Dinas Komunikasi dan Informatika
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	46,32	51,94	52,99	52,65	52,13	51,37	Badan Pendapatan Daerah
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
04.01.02	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) (%)	82	86	88	90	92	95	Sekretariat Daerah

3.4.6. Program Unggulan

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan **"Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas".** Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan **Trisula Pembangunan Daerah** yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

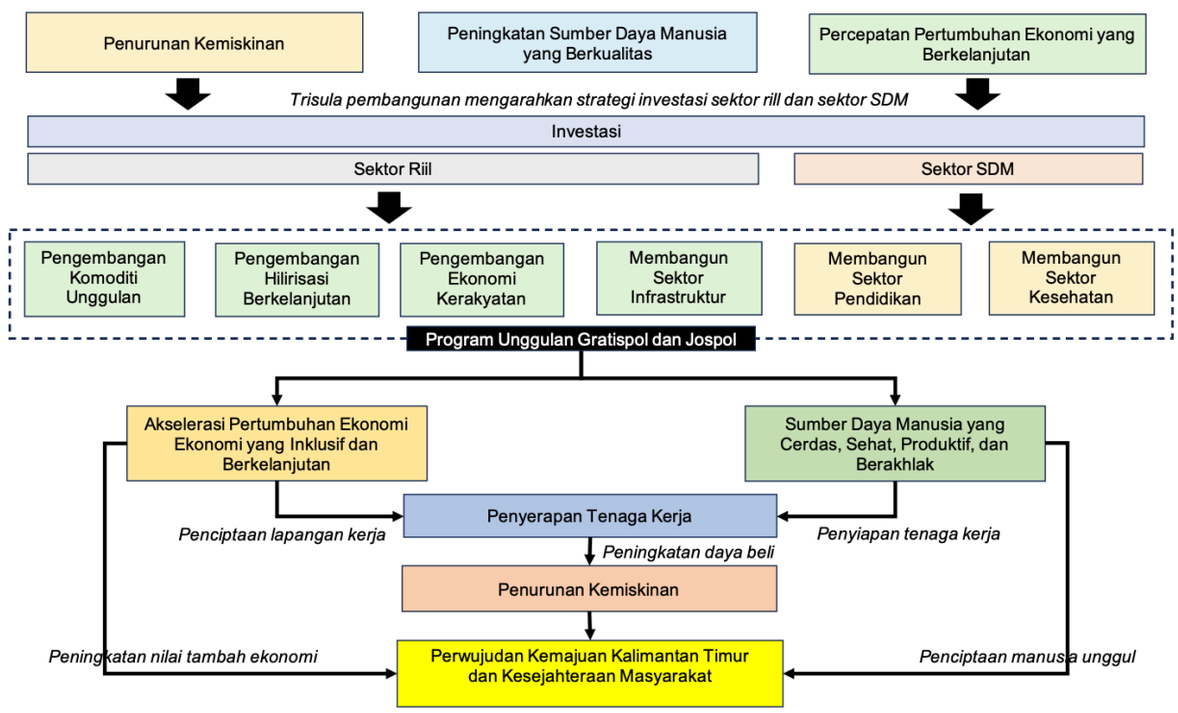

Gambar 3.5. Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Nasional

Program Unggulan Gratispol, terdiri dari **7 (tujuh) kegiatan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu:

1) Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK/SLB/MA secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di Kalimantan Timur yang tidak bersekolah hingga jenjang menengah atas hanya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Instrumen utama yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan unggulan ini adalah melalui optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sementara itu untuk pendidikan tinggi, setiap penduduk usia produktif juga akan diberikan bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Kesejahteraan Rakyat. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK/SLB /MA dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB /MA (siswa)	181.663	187.914	193.544	199.342	205.320	211.475
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1 (mahasiswa)	28.083	149.307	151.547	156.396	160.306	167.359
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3 (mahasiswa)	2.860	7.449	7.560	7.856	8.053	8.408

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim (mahasiswa)	657	892	1.343	1.434	1.507	1.630
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri (mahasiswa)	89	133	153	169	211	253
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus (mahasiswa)	1.165	1.200	1.390	1.709	2.030	2.160

Ket : Asumsi penambahan jumlah siswa di tahun 2030 sebesar 25% dari baseline 2025

2) Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan pelayanan gratis biaya berobat kepada pasien yang memiliki keluhan di luar tanggungan JKN pada rumah sakit Provinsi.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun indikator dan target kinerja indikatif

kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Meningkatnya cakupan jaminan dan layanan kesehatan masyarakat	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (orang)	491.691	492.352	491.691	491.691	491.691	491.691
		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi di luar cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (orang)	1.000	1.400	1.358	1.324	1.296	1.278

3) Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;

Merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan Program Strategis Nasional (ProSN) percepatan penurunan prevalensi stunting. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penguatan kader pendamping keluarga risiko stunting yang secara bertahap dilakukan di 10 kabupaten/kota. Kelompok sasaran yang dituju kepada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dua tahun (baduta).

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Diberikannya Penguatan Kader Risiko Stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting (Kab/Kota)	3	3	3	3	3	3

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya (Kader)	610	610	610	610	610	610

4) Gratis Internet di Setiap Desa;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin pada setiap desa memiliki paling sedikit 1 (satu) titik akses internet secara gratis dalam rangka membuka ruang bagi masyarakat pedesaan untuk dapat mengakses informasi global. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan tumbuh lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas terhadap lokapasar. Internet memungkinkan pelajar di pedesaan untuk memperluas wawasan tentang perkembangan terkini di berbagai bidang serta mengakses sumber belajar secara daring (kursus dan pendidikan jarak jauh). Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penyediaan perangkat dan biaya berlangganan internet. Adapun untuk desa yang belum terakses jaringan internet melalui fiber optik dan/atau provider telekomunikasi, maka opsi yang diberikan adalah melalui jaringan internet satelit. Sebagai catatan penting, bahwa pelaksanaan kegiatan unggulan ini juga perlu di ikuti dengan pengendalian, pengawasan dan edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada seluruh masyarakat desa agar tidak digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet (desa)	716	841	841	841	841	841

ket : Asumsi jumlah desa se-Kalimantan Timur di Tahun 2030 tidak bertambah (total 841 desa)

5) Gratis Seragam Sekolah

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orang tua peserta didik yang umumnya selalu membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/SLB/MA maupun pada masa kenaikan kelas SMA/SMK/SLB/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian perlengkapan seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis (siswa)	65.004	135.210	208.896	216.060	223.467	231.126

6) Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi *backlog*[1] kepemilikan rumah dan mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)[2]. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya *appraisal*, biaya balik nama sertifikat, dll).

---

[1] *Backlog* rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat (Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2016)

[2] Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016)

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah Program Pengembangan Perumahan. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah (orang)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

7) Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah;

Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah Program Kesejahteraan Rakyat. Adapun indikator dan target kinerja indikatif kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Indikatif					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) (orang)	880	900	900	900	900	900

ket : Penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) tidak berulang

Program Unggulan Jospol, terdiri dari **9 (sembilan) arah kebijakan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu:

1) Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;

Peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditi pertanian Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao, lada, pisang, padi dan jagung. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditi pertanian untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pertanian. Strategi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, seperti jaringan irigasi, alsintan, bibit unggul dan lain-lain.

2) Pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik;

Peningkatan efisiensi dan produktivitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru.

Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;

Peningkatan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, pesantren, serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penjaga rumah ibadah. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dan pesantren diberikan tambahan penghasilan. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga mendapat perhatian melalui pemberian insentif sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui peningkatan tambahan penghasilan dan pemberian insentif, diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan, pesantren serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;

Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital merupakan langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital, UMKM di daerah dapat memperluas visibilitas dan akses pasar, serta mengembangkan inovasi produk yang lebih menarik bagi konsumen. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital marketing, desain produk, dan manajemen keuangan juga menjadi penting untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga

diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan alam. Pengedepanan potensi khusus yang dimiliki tiap desa, seperti tradisi, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan keindahan alam dari desa-desa tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Pelatihan bagi masyarakat lokal dalam hal manajemen pariwisata, layanan pengunjung, dan pemasaran digital juga dilaksanakan secara beriringan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan memperkuat dukungan yang diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ekonomi masyarakat desa akan terakselerasi sebagai dampak positif adanya destinasi wisata. Kedepannya pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata.

6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terluar dan tertinggal. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan

peralatan medis dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, meliputi jalan tol dan non-tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional, merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan jalan tol dan non-tol serta jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mengurangi isolasi daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara itu, pengembangan transportasi umum yang modern dan terintegrasi akan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, penguatan jaringan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi, akan mendukung digitalisasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional dalam upaya mendukung Superhub Ekonomi IKN akan membuka peluang ekspor-impor, menarik investasi asing, serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai hub perdagangan di kawasan Asia. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berkelanjutan.

8) Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi

alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

Memudahkan investasi termasuk melalui pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta, merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan mengefektifkan sistem satu pintu yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan Timur dengan melakukan promosi untuk menarik investasi, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

3.4.7. Kegiatan Unggulan

Sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, telah ditetapkan 2 (dua) Program Unggulan yakni Gratispol dan Jospol yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dari kedua program unggulan tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 3.16. Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
Program Unggulan Gratispol				
1.	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	10 kabupaten/kota	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat	1. Biro Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	10 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4.	Gratis Internet di Setiap Desa	7 kabupaten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Gratis Seragam Sekolah	10 kabupaten/kota	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7.	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol				
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern				
1.	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Penunjang Pusat Distribusi Pangan Provinsi	Balikpapan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
2.	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
3.	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Pengembangan kawasan tanaman Pisang Kepok (Grecek)	Kutai Timur dan Kutai Kartanegara	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5.	Pembangunan *Workshop* Produksi Pupuk Organik Pertanian	Samarinda	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, Aren, dan Karet	Kakao : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau Kopi : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser Aren : Kutai Kartanegara, Kutai Barat Karet : Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
7.	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	10 kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan
8.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
9.	Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul	Penajam Paser Utara	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.	Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman	Samarinda	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
11.	Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)	Samarinda	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik				
1.	Pembangunan Aplikasi SAKTI GEMAS (Super App)	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan *Cold Storage* sebagai sarana Sistem Rantai Dingin	Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah				
1.	Pemberian Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Biro Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM				
1.	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	10 kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2.	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
3.	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa				
1.	Pengembangan Pariwisata Geopark Sangkulirang-Mangkalihat	Kutai Timur, Berau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
2.	Pengembangan Desa Wisata yang berstandar	7 kabupaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya	7 kabupaten	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan				
1.	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	Kutai Barat - Mahakam Ulu	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
3.	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
4.	Pembangunan *Workshop* Las Bawah Air Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang	Bontang	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional				
1.	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang	Kutai Barat - Mahakam Ulu	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
2.	Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)	Mahakam Ulu	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
3.	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46	Kutai Timur, Berau	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
4.	Dukungan Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang	Samarinda - Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
5.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda	Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan	Balikpapan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab.PPU-Kubar	Penajam Paser Utara – Kutai Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
8.	Dukungan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang	Mahakam Ulu	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9.	Pembangunan SPAM Regional Mahakam	Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
10.	Pembangunan SPAM Regional Long Kali	Penajam Paser Utara dan Paser	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pelaksana
11.	Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Balikpapan, Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
12.	Dukungan pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau	Balikpapan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata				
1.	Pembangunan dan Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
2.	Pembangunan Pelabuhan Tambat	Samarinda, Kutai Kartanegara	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta				
1.	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Forum Investasi Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan : Daftar kegiatan unggulan merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan perkembangan kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap prioritas, kebijakan, dan ketersediaan anggaran.

3.4.8. Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program unggulan daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3.17. Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Unggulan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
6	Prioritas Nasional 2	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Penyediaan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Prioritas Nasional 2	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Prioritas Nasional 2	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Prioritas Nasional 2	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
11	Prioritas Nasional 2	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
12	Prioritas Nasional 2	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
13	Prioritas Nasional 2	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Prioritas Nasional 2	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15	Prioritas Nasional 2	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
16	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
17	Prioritas Nasional 2	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
18	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
19	Prioritas Nasional 3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Prioritas Nasional 3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Prioritas Nasional 3	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23	Prioritas Nasional 4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Prioritas Nasional 4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Prioritas Nasional 4	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Prioritas Nasional 4	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
30	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
31	Prioritas Nasional 4	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
32	Prioritas Nasional 4	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
33	Prioritas Nasional 4	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
34	Prioritas Nasional 4	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
35	Prioritas Nasional 4	Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
36	Prioritas Nasional 4	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
37	Prioritas Nasional 4	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38	Prioritas Nasional 4	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
39	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
40	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
41	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
42	Prioritas Nasional 6	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
43	Prioritas Nasional 6	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
44	Prioritas Nasional 6	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
45	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
46	Prioritas Nasional 6	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
47	Prioritas Nasional 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
48	Prioritas Nasional 7	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
49	Prioritas Nasional 7	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
50	Prioritas Nasional 7	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
51	Prioritas Nasional 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
52	Prioritas Nasional 8	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan : Jumlah KPU yang di indikasikan berlokus di Kalimantan Timur sejumlah 53 KPU dari total 83 KPU yang direncanakan berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dituangkan sebagai berikut.

Tabel 3.18. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2) Program Rehabilitasi Sosial 3) Program Penanganan Bencana 4) Program Pengelolaan Pendidikan 5) Program Kesejahteraan Rakyat 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 7) Program Penempatan Tenaga Kerja 8) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 10) Program Kawasan Permukiman 11) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 12) Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
			13) Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 14) Program Penyuluhan Pertanian 15) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 16) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 17) Program Penanganan Kerawanan Pangan 18) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan 19) Program Pengelolaan Hutan
		2. Pengahapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		3. Sekolah Rakyat	1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2) Program Penataan Bangunan Gedung 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
			2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.	Kesehatan untuk Semua	1. Stunting	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		4. Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Penataan Bangunan Gedung
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	-
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Penataan Bangunan Gedung
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan
		4. Makan Bergizi Gratis	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
			2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4) Program Pengelolaan Pendidikan 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6) 'Program Penanganan Kerawanan Pangan 7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 10) Program Penyelenggaraan Jalan 11) Program Pengelolaan Pelayaran 12) Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
		3. Kemudahan perizinan di daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
		4. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4) Program Penyelenggaraan Pengawasan
		5. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4) Program Pengelolaan Pendidikan 5) Program Penempatan Tenaga Kerja 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		6. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
			8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 9) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 10) Program Pengelolaan Hutan 11) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 12) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 13) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 14) Program Pengelolaan Persampahan 15) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 16) Program Pengelolaan Pendidikan 17) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

3.4.9. Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi pengembangan wilayah dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029 perlu diselaraskan dengan Pola Ruang, Struktur Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), serta Indikasi Program yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur 2023-2042. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan pengembangan wilayah yang telah dirumuskan dalam RTRW, yang mencakup penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis di provinsi.

Gambar 3.6. Peta Strategi Pengembangan Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: RTRWP Kaltim 2023 – 2042)

Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan pemanfaatan ruang secara optimal, dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui hal tersebut, RPJMD Kaltim 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan, seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang sejalan dengan visi jangka panjang RTRW Kaltim 2023-2042.

3.4.10. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten/kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh. Arah kebijakan pembangunan lebih lanjut dirinci ke dalam *highlight* indikasi intervensi yang akan menjadi pedoman masing – masing kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang terukur dan berkelanjutan, diperlukan indikator makro yang menjadi acuan dalam menilai capaian, memantau progres, serta menetapkan target jangka menengah dan panjang. Indikator-indikator ini disusun untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, implementasi program, dan evaluasi kinerja pembangunan, sesuai dengan visi dan misi daerah. Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur.

a. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional, berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Paser:

Tabel 3.19. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Paser

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	75,13	75,66	78,22
LPE (%)	3,77	3,80	5,30
Tingkat Kemiskinan (%)	8,63	8,00–8,38	6,20-7,21

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
Indeks Gini	0,271	0,269-0,271	0,258-0,264
TPT (%)	4,53	4,16-4,40	3,20–3,50

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Paser disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Paser.

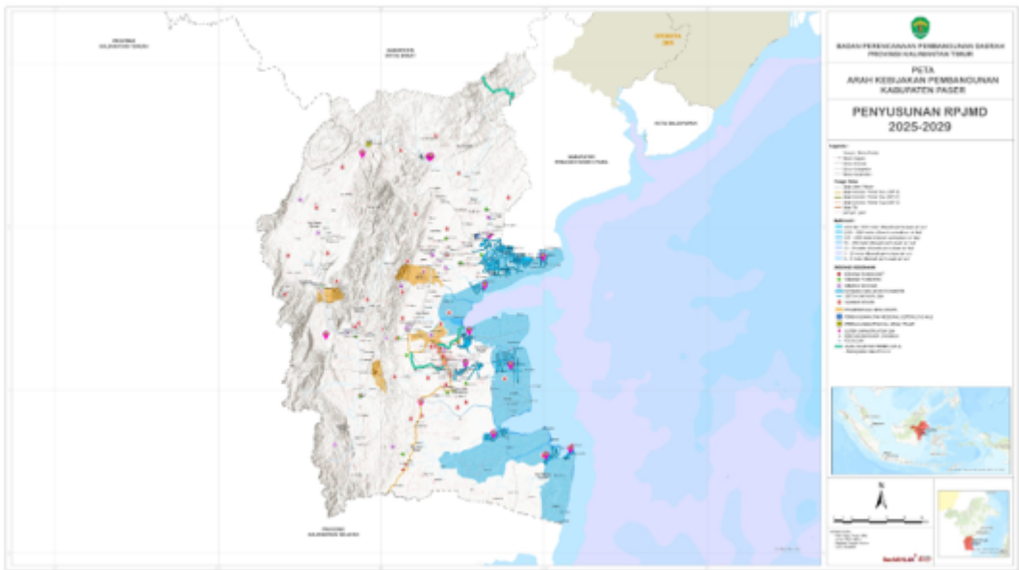

Gambar 3.7. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kabupaten Paser Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Paser sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
5. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;

6. Peningkatan biaya operasional sekolah;
7. Pemberian seragam sekolah gratis;
8. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Fasilitasi pembentukan toko penyeimbang harga, distribusi, dan stok kebutuhan pokok;
10. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) pakan ternak;
11. Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
12. Pembangunan kawasan sentra pangan terpadu (padi, jagung, pisang);
13. Pengembangan desa wisata di Klempang Sari, Pasir Mayang, Muara Pasir, dll;
14. Pengembangan ekowisata (hutan, satwa, mangrove, agrowisata, dll);
15. Pengembangan desa wisata budaya (Adat Paser dan Dayak);
16. Pengembangan ekonomi kreatif khas Paser (kuliner, kriya, *fashion, digital creative*);
17. Pengembangan kawasan tanaman kopi;
18. Pengembangan budidaya komoditi unggulan (udang, bandeng, dan rumput laut);
19. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Long Kali;
20. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
21. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
22. Pembangunan instalasi biogas program PDKT;
23. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
24. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
25. Pengendalian banjir;
26. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
27. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
28. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
29. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
30. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;

31. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH);
32. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
33. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
34. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
35. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
36. Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

b. Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kubar diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Kutai Barat:

Tabel 3.20. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Barat

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	74,76	74,90	77,09
LPE (%)	7,57	7,72	8,78
Tingkat Kemiskinan (%)	9,56	8,50–9,23	5,00–5,92
Indeks Gini	0,266	0,260–0,263	0,239–0,250
TPT (%)	5,58	5,11–5,41	3,70–4,00

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Barat disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Barat.

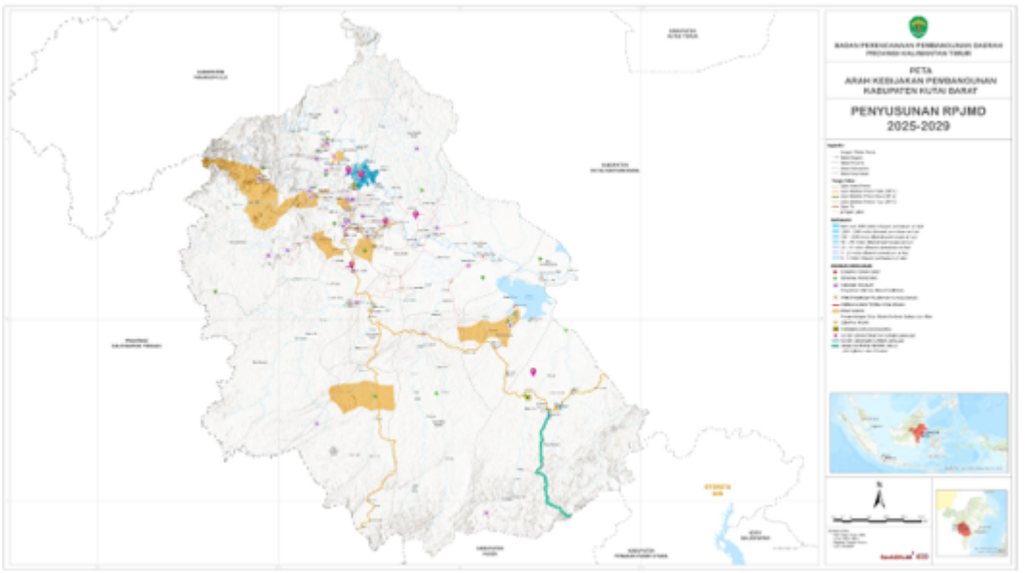

Gambar 3.8. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Kutai Barat sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas salah satunya melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
4. Peningkatan biaya operasional sekolah;
5. Pemberian seragam sekolah gratis;
6. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
8. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
9. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) kopi;
10. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
11. Pengembangan kawasan tanaman kakao, kopi, aren, dan karet;
12. Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
13. Pengembangan dermaga sungai;

14. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang;
15. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kabupaten PPU – Kutai Barat;
16. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kabupaten Kutai Barat-Kutai Kartanegara;
17. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
18. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
19. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
20. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
21. Pengembangan ekowisata Danau Jempang, Melintang, Semayang, Aco, dll;
22. Festival budaya (Erau, lamin adat, tarian hudoq, dll);
23. Pengembangan Desa Wisata Tj. Issuy, Mancong, dll;
24. Pengembangan ekonomi kreatif khas Kutai Barat (kuliner, kriya, *fashion, digital creative*);
25. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
26. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
27. Pembangunan instalasi biogas program PDKT;
28. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (ubi kayu);
29. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
30. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
31. Penyediaan internet gratis setiap desa
32. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
33. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH);
34. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
35. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
36. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
37. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

38. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
39. Program *restocking* ikan lokal endemik (baung, jelawat).

c. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kukar diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Kutai Kartanegara:

Tabel 3.21. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Kartanegara

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	76,57	76,86	79,41
LPE (%)	5,62	5,70	7,71
Tingkat Kemiskinan (%)	7,28	6,68–6,95	4,20–5,24
Indeks Gini	0,307	0,285–0,307	0,265–0,282
TPT (%)	4,11	3,85–4,00	3,00–3,18

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.

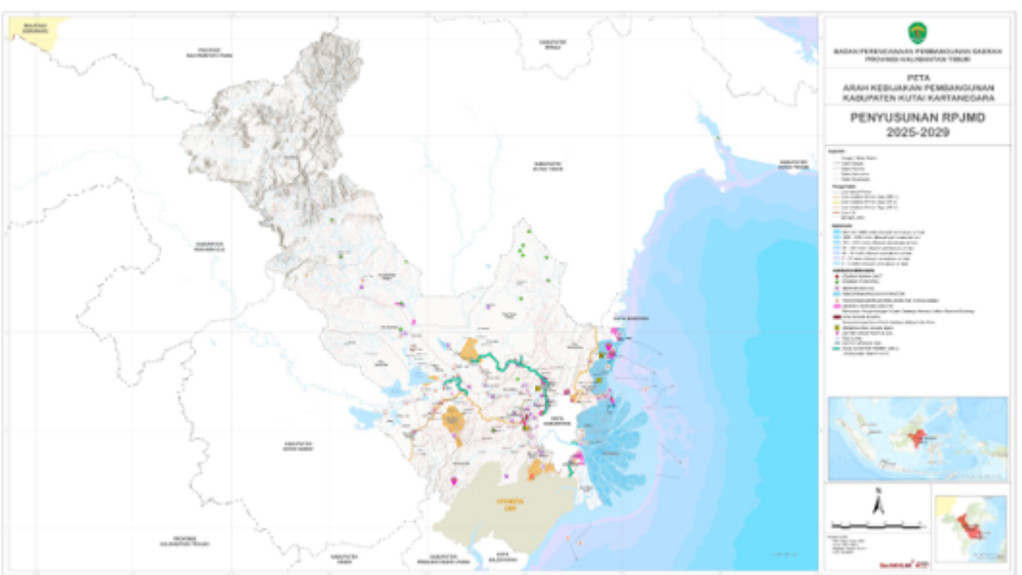

Gambar 3.9. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
4. Peningkatan biaya operasional sekolah;
5. Pemberian seragam sekolah gratis;
6. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
8. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
9. Pembangunan sekolah unggulan SMAN 3 Tenggarong;
10. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
11. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
12. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak dan Pabrik Minyak Goreng;
13. Pengembangan kawasan tanaman pisang kepok (grecek);
14. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
15. Revitalisasi tambak tradisional menjadi tambak modern berkelanjutan;
16. Pengembangan sentra budidaya perikanan pesisir (udang vaname, bandeng, rumput laut);
17. Pengembangan kawasan tanaman kakao, kopi, aren, dan karet;
18. Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
19. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (padi dan jagung);
20. Pengembangan dermaga sungai;
21. Pembangunan pelabuhan tambat;
22. Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan rumput laut;

23. Pengembangan ekonomi kreatif (kuliner, kriya, seni pertunjukan, dokumenter, dll);
24. Pengembangan ekowisata Pulau Kumala, Bukit Bengkirai, Danau Semayang, dll);
25. Festival budaya dan edukasi (Erau, adat kerajaan kutai, tarian, seni pertunjukan, dll);
26. Pengembangan Desa Wisata Kedang Ipil, Pela, Enggelam, Samboja, Ma. Badak dll;
27. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
28. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
29. Pembangunan instalasi biogas program PDKT;
30. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
31. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
32. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
33. Pengendalian banjir;
34. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
35. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kabupaten Kutai Kartanegara-Kutai Barat;
36. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
37. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
38. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mahakam;
39. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
40. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Agroekowisata Separi Sejahtera;
41. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
42. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH);
43. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
44. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
45. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;

46. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
47. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

d. Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intrevensi Provinsi untuk Kab. Kutai Timur:

Tabel 3.22. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Kutai Timur

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	75,90	76,18	78,29
LPE (%)	9,82	9,85	11,70
Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,64–8,50	4,06–5,12
Indeks Gini	0,283	0,277–0,282	0,242–0,272
TPT (%)	5,76	5,44–5,51	4,30–4,50

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Timur.

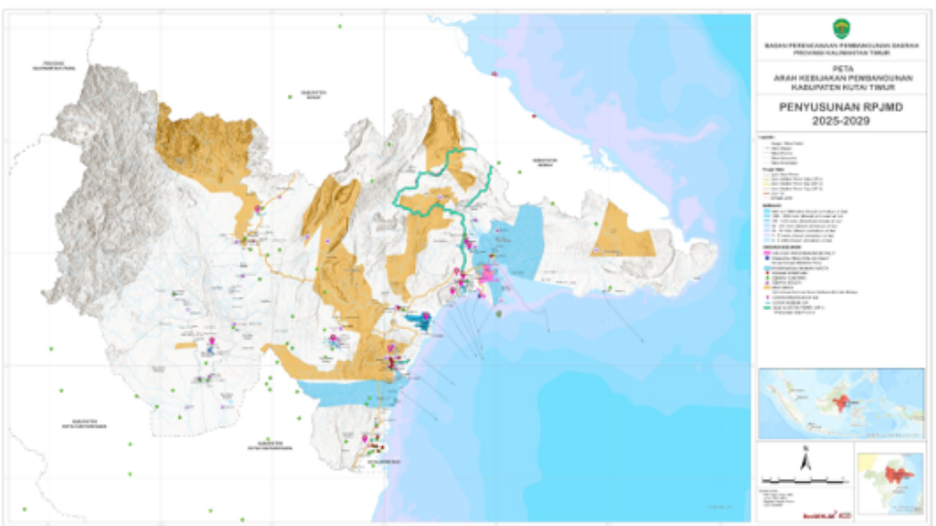

Gambar 3.10. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 (Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Kutai Timur sebagai berikut:

1. Dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK);
2. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
6. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
7. Peningkatan biaya operasional sekolah;
8. Pemberian seragam sekolah gratis;
9. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Pembangunan sekolah unggulan SMAN 2 Sangatta Utara;
11. Pengembangan Pariwisata Geopark Sangkulirang-Mangkalihat;
12. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Buah-Buahan;
13. Pengembangan kawasan tanaman pisang kepok (grecek);
14. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
15. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
16. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
17. Revitalisasi tambak tradisional menjadi tambak modern berkelanjutan (udang, bandeng, dan rumput laut);
18. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Indominco;
19. Pengelolaan pelabuhan perikanan Sangatta;
20. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
21. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
22. Pembangunan instalasi biogas program PDKT;

23. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL);
24. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
25. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
26. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
27. Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
28. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (padi);
29. Pengendalian banjir;
30. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
31. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
32. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung – Simp. KM 46;
33. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
34. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai (TNK);
35. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
36. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH);
37. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
38. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
39. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
40. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
41. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

e. Kabupaten Berau

Kabupaten Berau diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekonomi kreatif dan UMKM, yang diiringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Berau:

Tabel 3.23. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Berau

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	77,17	77,57	79,65
LPE (%)	7,28	7,40	8,63
Tingkat Kemiskinan (%)	5,08	4,00-4,88	2,75–3,58
Indeks Gini	0,317	0,310–0,316	0,282-0,294
TPT (%)	5,15	4,78–4,90	3,90–4,05

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Berau disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Berau.

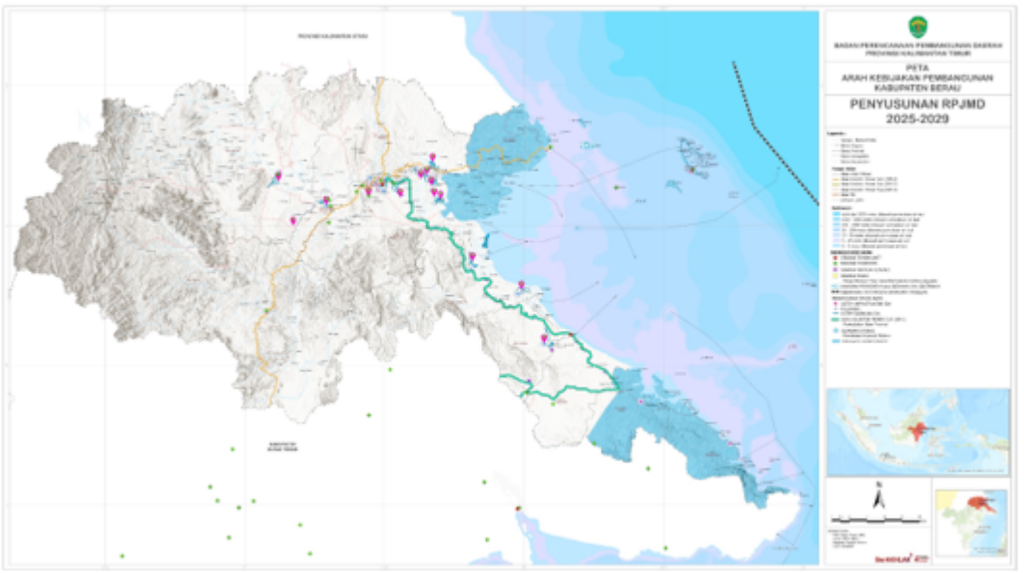

Gambar 3.11. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kabupaten Berau Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Berau sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
5. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
6. Peningkatan biaya operasional sekolah;
7. Pemberian seragam sekolah gratis;
8. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Coklat;
10. Pengembangan kawasan tanaman kakao;
11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sambaliung;
12. Pengembangan Pariwisata Geopark Sangkulirang-Mangkalihat;
13. Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya;
14. Pengembangan ekonomi kreatif khas Berau (*fashion*, kesenian, kuliner, dan wastra)
15. Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
16. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (jagung);
17. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
18. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46;
19. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
20. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
21. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
22. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
23. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;

24. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
25. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
26. Pembangunan instalasi biogas program PDKT;
27. Pengendalian banjir;
28. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
29. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
30. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya di Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb;
31. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
32. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH);
33. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
34. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
35. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
36. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
37. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

f. Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten PPU diarahkan untuk meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, jasa dan perdagangan, yang diiringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Penajam Paser Utara:

Tabel 3.24. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Penajam Paser Utara

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	74,94	75,00	77,46
LPE (%)	30,68	7,00	10,00
Tingkat Kemiskinan (%)	6,69	4,22-4,40	3,86-4,30

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
Indeks Gini	0,258	0,248–0,256	0,224–0,233
TPT (%)	2,05	2,00–2,02	1,75-1,90

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Penajam Paser Utara.

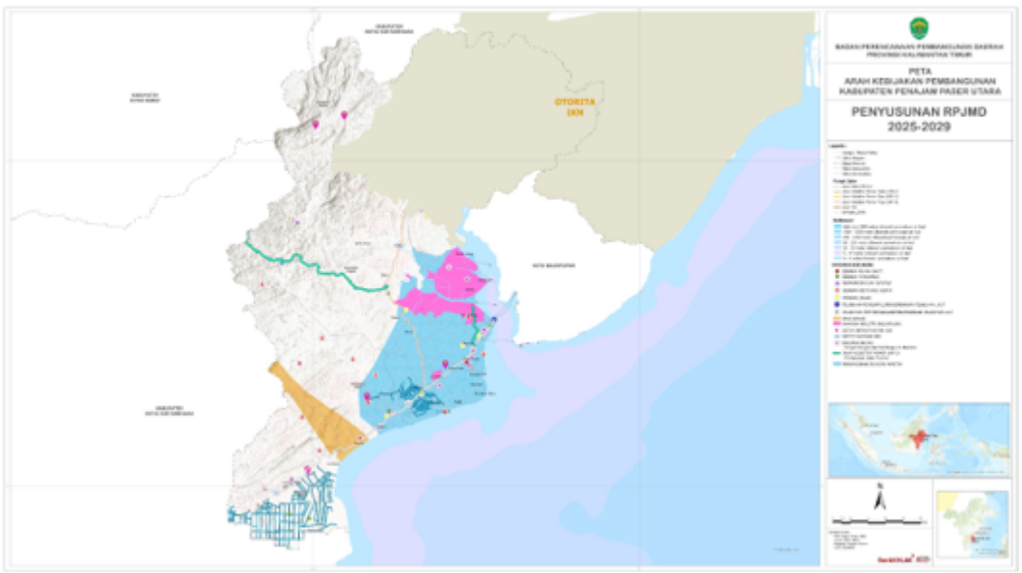

Gambar 3.12. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi provinsi untuk Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung;
2. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
5. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
6. Peningkatan biaya operasional sekolah;

7. Pemberian seragam sekolah gratis;
8. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 1 PPU);
10. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pengolahan Rotan;
11. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
12. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
13. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
14. Pengembangan budidaya laut terpadu (udang vaname, bandeng, rumput laut);
15. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (padi);
16. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Api-Api;
17. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Long Kali dan Mahakam;
18. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
19. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
20. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
21. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kabupaten PPU-Kutai Barat;
22. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
23. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
24. Revitalisasi pelabuhan penumpang;
25. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
26. Penyediaan internet gratis di setiap desa;
27. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
28. Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
29. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
30. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
31. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
32. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

33. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

g. Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahulu diarahkan untuk akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Mahakam Ulu:

Tabel 3.25. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Mahakam Ulu

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	70,79	71,07	72,35
LPE (%)	3,60	3,65	4,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,75	9,70–10,30	6,30–6,90
Indeks Gini	0,285	0,260–0,284	0,227-0,266
TPT (%)	2,51	2,18-2,25	1,40–1,50

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Mahakam Ulu disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Mahakam Ulu.

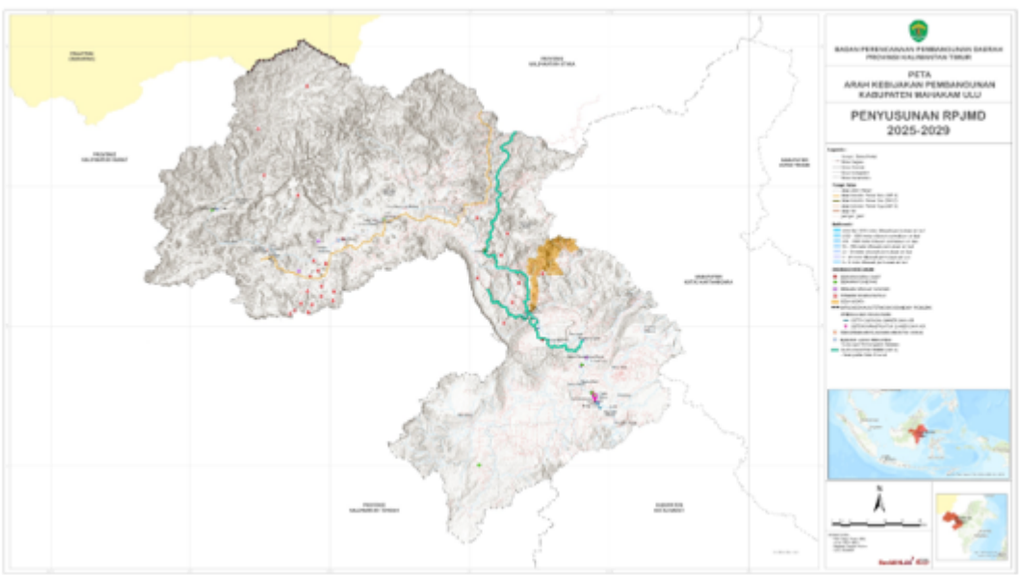

Gambar 3.13. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 (Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kab. Mahakam Ulu sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan;
3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
5. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
6. Peningkatan biaya operasional sekolah;
7. Pemberian seragam sekolah gratis;
8. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
10. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
11. Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (padi);
12. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
13. Dukungan pembangunan Bandara Ujoh Bilang;
14. Pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang;
15. Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang-Long Boh (Batas Kalimantan Utara);
16. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
17. Dukungan pembangunan dermaga sungai;
18. Pembangunan jaringan distribusi listrik;
19. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
20. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
21. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
22. Penyediaan internet gratis di setiap desa;

23. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
24. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
25. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
26. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
27. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
28. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
29. Program *restocking* ikan lokal endemik (baung, gabus, toman).

h. Kota Balikpapan

Kota Balikpapan diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai kota pusat *Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions* (MICE) yang diiringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekonomi Kreatif, serta peningkatan investasi industri terutama di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Balikpapan:

Tabel 3.26. Capaian dan Target Indikator Makro Kota Balikpapan

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	82,62	83,09	84,60
LPE (%)	3,23	4,50	5,75
Tingkat Kemiskinan (%)	2,23	2,07–2,15	1,05-1,72
Indeks Gini	0,324	0,312–0,324	0,285-0,295
TPT (%)	6,22	6,03–6,12	5,00–5,20

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kota Balikpapan disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kota Balikpapan.

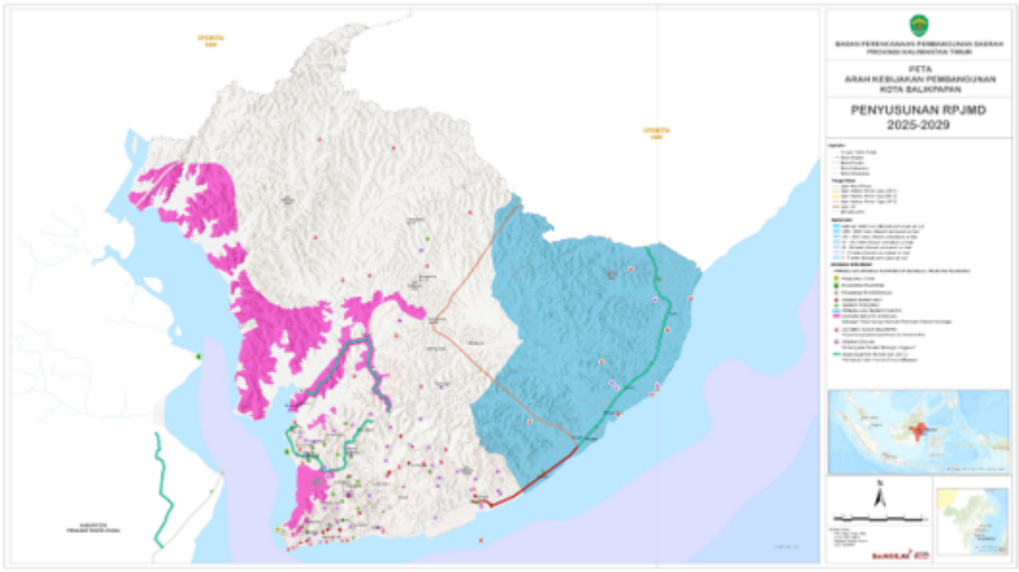

Gambar 3.14. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kota Balikpapan Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Dukungan pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau;
2. Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau;
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mahakam;
4. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo;
5. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
6. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
7. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
8. Pembangunan gedung dan infrastruktur penunjang pusat distribusi pangan provinsi;
9. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
10. Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan;
11. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
12. Dukungan pembangunan transportasi angkutan massal terintegrasi;
13. Revitalisasi pelabuhan penumpang;
14. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Manggar;

15. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pengolahan Hasil Laut;
16. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
17. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
18. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi;
19. Pengendalian banjir;
20. Optimalisasi pelayanan air minum;
21. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
22. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
23. Peningkatan biaya operasional sekolah;
24. Pemberian seragam sekolah gratis;
25. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
26. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
27. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
28. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
29. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
30. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
31. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

i. Kota Samarinda

Kota Samarinda diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Samarinda:

Tabel 3.27. Capaian dan Target Indikator Makro Kota Samarinda

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	83,11	83,40	85,40
LPE (%)	8,66	8,00	9,50
Tingkat Kemiskinan (%)	4,30	4,07-4,25	3,00-3,38
Indeks Gini	0,330	0,320–0,328	0,288-0,300
TPT (%)	5,75	5,60–5,63	4,93–5,12

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kota Samarinda disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kota Samarinda.

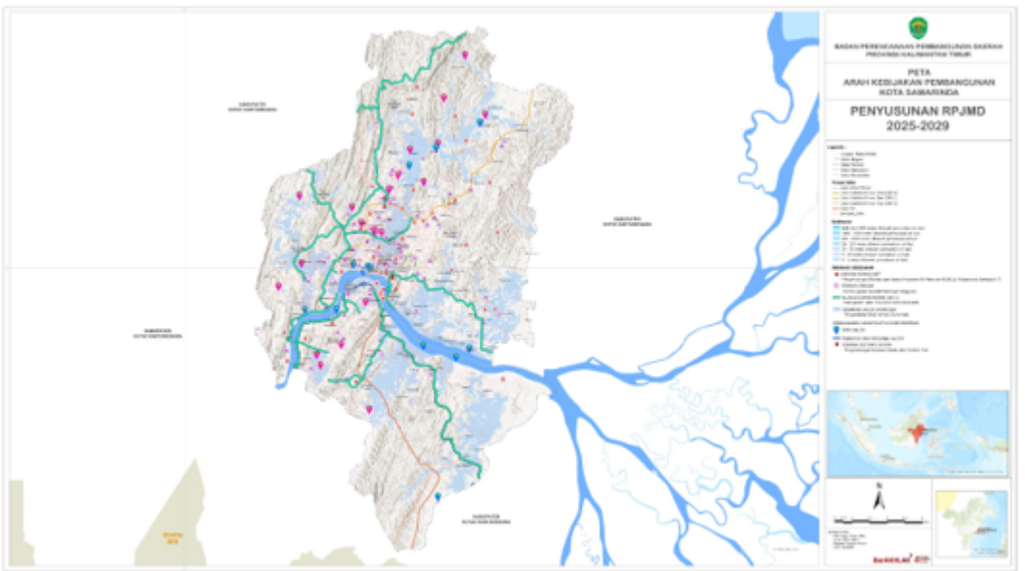

Gambar 3.15. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kota Samarinda Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pengembangan RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II;
2. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
3. Dukungan pembangunan Jalan Tol Samarinda – Bontang;
4. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
5. Pembangunan dermaga sungai;
6. Pembangunan pelabuhan tambat;
7. Dukungan pembangunan transportasi angkutan massal terintegrasi;

8. Pengendalian banjir di Kota Samarinda;
9. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
10. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
11. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
12. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Selili;
13. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Buah-Buahan;
14. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
15. Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda;
16. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
17. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
18. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mahakam;
19. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
20. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
21. Peningkatan biaya operasional sekolah;
22. Pemberian seragam sekolah gratis;
23. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
24. Pembangunan sekolah unggulan SMAN 10 Samarinda;
25. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
26. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
27. Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan veteriner;
28. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
29. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
30. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
31. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

j. Kota Bontang

Kota Bontang diarahkan untuk mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja melalui peningkatan daya saing SDM tenaga kerja serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan. Berikut data capaian dan target indikator makro beserta *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Bontang:

Tabel 3.28. Capaian dan Target Indikator Makro Kota Bontang

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	82,49	82,78	84,23
LPE (%)	-2,51	1,15	4,70
Tingkat Kemiskinan (%)	3,74	3,31–3,60	1,50-1,60
Indeks Gini	0,330	0,322–0,328	0,290-0,301
TPT (%)	7,06	6,73–6,78	5,31–5,35

Sumber: Data diolah dari Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Highlight indikasi intervensi kebijakan pembangunan untuk Kota Bontang disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kota Bontang.

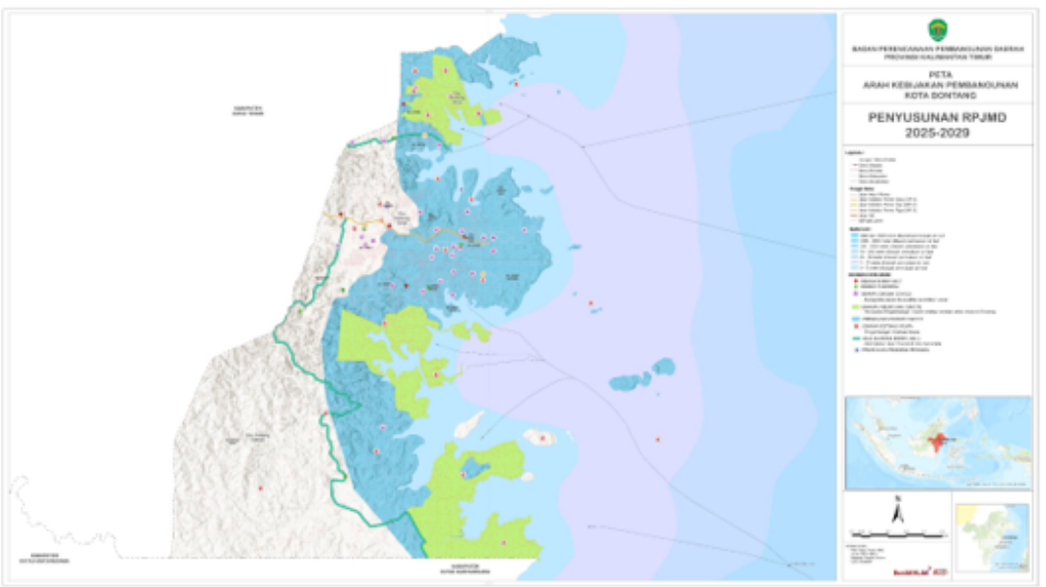

Gambar 3.16. Peta *Highlight* Indikasi Intervensi
di Kota Bontang Tahun 2025–2029
(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun *highlight* indikasi intervensi Provinsi untuk Kota Bontang sebagai berikut:

1. Peningkatan biaya operasional sekolah;

2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
3. Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah;
4. Pemberian seragam sekolah gratis;
5. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Pengembangan budidaya rumput laut & kepiting;
7. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pengolahan Hasil Laut;
8. Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan;
9. Dukungan pembangunan Jalan Tol Samarinda – Bontang;
10. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tanjung Limau;
12. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Indominco;
13. Kemitraan pelaku industri dengan UMKM;
14. Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu;
15. Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok;
16. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
17. Pengendalian banjir;
18. Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
19. Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga;
20. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
21. Pembangunan *workshop* las bawah air Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang;
22. Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi;
23. Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah;
24. Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
25. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Uraian rencana program seluruh Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun kedepan telah disusun dengan rumusan kinerja, target kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam upaya pencapaian visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Nomenklatur program disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud telah diselaraskan dengan rumusan strategi, arah kebijakan, dan proyeksi belanja daerah. Khusus untuk pelaksanaan rencana program di tahun 2030, merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030, yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah tahun 2030-2034. Uraian rencana program selanjutnya disajikan berdasarkan pendekatan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4-1 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.401.052.083.431		3.813.451.232.736		3.966.632.073.723		4.086.586.401.027		4.422.153.231.078	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.833.686.362.076		1.912.876.916.223		1.968.383.547.298		1.985.876.357.905		2.085.170.175.800	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	1.706.869.199.158	92,5	1.778.559.753.305	93	1.827.350.526.234	93,5	1.842.022.676.420	94	1.934.123.810.241	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (UPTD TEKKOM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	3.197.994.975	92,5	3.497.994.975	93	3.672.894.724	93,5	3.746.352.618	94	3.933.670.249	1.01.2.22.0.00.01.0003 - UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0003 - UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah I)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	22.585.740.700	92,5	23.685.740.700	93	24.870.027.735	93,5	25.367.428.290	94	26.635.799.704	1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah II)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	24.059.704.923	92,5	25.259.704.923	93	26.522.690.169	93,5	27.053.143.973	94	28.405.801.171	1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah III)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	27.310.556.901	92,5	28.510.556.901	93	29.936.084.746	93,5	30.534.806.441	94	32.061.546.763	1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah IV)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	18.591.513.752	92,5	19.791.513.752	93	20.781.089.440	93,5	21.196.711.228	94	22.256.546.790	1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah V)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	15.254.466.644	92,5	16.454.466.644	93	17.277.189.976	93,5	17.622.733.776	94	18.503.870.465	1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (Dinas Pendidikan Wilayah VI)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	15.817.185.023	92,5	17.117.185.023	93	17.973.044.274	93,5	18.332.505.160	94	19.249.130.418	1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.564.990.249.547		1.897.698.844.705		1.995.144.281.026		2.097.450.585.454		2.333.501.624.727	
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	81,84	82,57	1.330.541.459.747	82,93	1.656.490.054.905	83,29	1.741.875.051.736	83,66	1.838.517.894.699	84,02	2.057.622.299.434	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	53,75	71,34		72,43		73,52		74,61		75,70		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	78,53	80,63		82,74		84,64		86,95		89,05		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	68,84	70,95		73,05		75,16		77,26		79,73		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	81,63	82,71		83,25		83,79		84,33		84,87		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	88,2	90,18		91,17		92,16		93,15		94,14		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur (UPTD TEKKOM)	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	78,52	80,21	16.200.000	81,26	436.200.000	82,32	458.010.000	83,37	480.910.500	84,42	504.956.025	1.01.2.22.0.00.01.0003 - UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	68,84	70,95		72		73,05		74,79		76,27		1.01.2.22.0.00.01.0003 - UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara (Dinas Pendidikan Wilayah I)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara (%)	77,83	78,61	67.896.850.000	79,39	69.496.850.000	80,19	72.971.692.500	80,99	73.620.277.125	81,80	77.301.290.981	1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara (%)	38,55	39,17		39,79		40,41		41,02		41,64		1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
	persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	84,29	87,27		90,25		93,23		96,21		99,19		1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
	persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	79,14	82,12		85,10		88,08		91,06		94,04		1.01.2.22.0.00.01.0005 - Dinas Pendidikan Wilayah I
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Kutai Timur dan Bontang (Dinas Pendidikan Wilayah II)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang (%)	69,80	70,50	44.271.224.000	71,21	45.571.224.000	71,92	47.849.785.200	72,64	49.242.274.460	73,37	52.704.388.183	1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang (%)	40,13	41,02		41,91		42,80		43,69		44,58		1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	79,40	81,98		84,57		87,15		89,73		92,32		1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	64,57	67,16		69,74		72,32		74,36		76,40		1.01.2.22.0.00.01.0006 - Dinas Pendidikan Wilayah II
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Kutai Kartanegara (Dinas Pendidikan Wilayah III)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara (%)	78,06	78,84	57.735.392.000	79,63	59.035.392.000	80,43	61.987.161.600	81,23	63.086.519.680	82,04	67.240.845.664	1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara (%)	16,99	17,23		17,47		17,7		17,94		18,18		1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	68,37	69,39		70,41		71,43		72,45		73,47		1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	61,22	62,24		63,27		64,29		65,31		66,33		1.01.2.22.0.00.01.0007 - Dinas Pendidikan Wilayah III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Dinas Pendidikan Wilayah IV)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu (%)	62,46	63,08	17.512.358.800	63,72	17.952.358.800	64,35	18.849.976.740	65	19.792.475.577	65,65	21.782.099.356	1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu (%)	10,09	11,82		13,56		15,30		17,03		18,77		1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	50,40	58,93		67,46		75,99		78,77		87,30		1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
	persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	30,75	39,28		47,82		56,35		59,13		61,90		1.01.2.22.0.00.01.0008 - Dinas Pendidikan Wilayah IV
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Paser (Dinas Pendidikan Wilayah V)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser (%)	71,58	72,3	23.269.605.000	73,02	24.569.605.000	73,75	25.798.085.250	74,49	26.087.989.513	75,24	28.392.388.988	1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser (%)	25,82	27		28,17		29,34		30,52		31,69		1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	66,67	70		73,33		76,66		80		83,33		1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V
	persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	56,67	60		63,33		66,67		70		76,67		1.01.2.22.0.00.01.0009 - Dinas Pendidikan Wilayah V
Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di wilayah Berau (Dinas Pendidikan Wilayah VI)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau (%)	76,12	76,88	23.747.160.000	77,65	24.147.160.000	78,42	25.354.518.000	79,21	26.622.243.900	80	27.953.356.095	1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau (%)	53,83	54,95		56,08		57,21		58,33		59,46		1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
	persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (%)	83,33	86,11		88,89		91,67		94,44		97,22		1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
	persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (%)	61,11	63,89		66,67		69,44		72,22		75		1.01.2.22.0.00.01.0010 - Dinas Pendidikan Wilayah VI
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.334.256.768		1.434.256.768		1.505.969.606		1.581.268.087		1.660.331.491	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal	Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	49	52	1.334.256.768	53	1.434.256.768	54	1.505.969.606	55	1.581.268.087	57	1.660.331.491	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				841.215.040		1.141.215.040		1.198.275.792		1.258.189.582		1.321.099.061	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,58	0,60	841.215.040	0,61	1.141.215.040	0,62	1.198.275.792	0,63	1.258.189.582	0,64	1.321.099.061	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	51,00	52,52		53,36		54,19		55,03		55,87		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				200.000.000		300.000.000		400.000.000		420.000.000		500.000.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	n/a	4	200.000.000	8	300.000.000	12	400.000.000	16	420.000.000	18	500.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.518.701.112.000		2.520.154.714.000		2.654.887.702.000		2.789.803.730.000		2.951.493.252.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.944.321.996.882		2.066.152.171.300		2.190.238.626.000		2.319.525.307.000		2.457.591.892.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	90	102.344.727.594	100	106.616.765.000	100	111.718.728.000	100	114.223.904.000	100	115.714.427.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Balai Latihan Kesehatan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	90	5.317.695.994	100	8.304.859.300	100	9.425.891.000	100	10.546.923.000	100	11.667.955.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	90	8.616.533.200	100	9.020.000.000	100	9.520.000.000	100	10.020.000.000	100	10.520.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Laboratorium Kesehatan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Laboratorium Kesehatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RS Mata)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	80	14.689.887.835	90	15.000.000.000	100	15.350.000.000	100	15.700.000.000	100	16.050.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Aji Muhammad Salehuddin II)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	90	10.545.867.020	100	10.750.000.000	100	11.000.000.000	100	11.250.000.000	100	11.500.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Abdoel Wahab Sjahranie)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	83	964.332.644.239	84	988.654.100.000	85	1.037.779.305.000	86	1.089.912.021.000	87	1.145.107.622.000	1.02.0.00.0.00.01.0009 - RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	738.420.995.000	100	825.650.119.000	100	888.045.557.000	100	955.530.857.000	100	1.029.538.206.000	1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSJD Atma Husada Mahakam)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,40	98,42	100.053.646.000	98,43	102.156.328.000	98,44	107.399.145.000	98,45	112.341.602.000	98,46	117.493.682.000	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0011 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				527.381.672.014		411.086.542.700		420.593.076.000		426.082.423.000		449.565.360.000	
Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan (Angka)	8,42	8,05	429.331.880.251	7,87	310.586.542.700	7,69	317.623.076.000	7,51	320.642.423.000	7,32	342.655.360.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100,88	100	52.000.000.000	100	52.000.000.000	100	52.000.000.000	100	52.000.000.000	100	52.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Laboratorium Kesehatan	Persentase Pemeriksaan Laboratorium UKP dan UKM yang terselesaikan (%)	85	100	446.231.327	100	500.000.000	100	520.000.000	100	540.000.000	100	560.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Laboratorium Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RS. Mata)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	80	100	2.349.244.765	100	2.500.000.000	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD. Korpri)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	75	100	2.265.090.910	100	2.500.000.000	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD. A. Wahab Sjahranie)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	87	100	23.091.224.761	100	24.000.000.000	100	25.000.000.000	100	26.000.000.000	100	27.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0009 - RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	100	100	2.898.000.000	100	3.000.000.000	100	3.250.000.000	100	3.500.000.000	100	3.750.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD. dr. Kanujoso Djatiwibowo)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	87	100	15.000.000.000	100	16.000.000.000	100	17.000.000.000	100	18.000.000.000	100	18.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				46.060.842.104		41.930.000.000		43.040.000.000		43.150.000.000		43.260.000.000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60,16	80	39.881.075.434	86	40.000.000.000	92	41.000.000.000	98	41.000.000.000	100	41.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	62	60		64		70		76		82		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	66	73		76		80		84		89		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UPTD Balai Pelatihan Kesehatan)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	35	50	706.600.000	55	750.000.000	60	800.000.000	65	850.000.000	70	900.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kesehatan
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RSUD Abdoel Wahab Sjahranie)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	35	50	334.000.000	55	350.000.000	60	375.000.000	65	400.000.000	70	420.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0009 - RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RSUD Kanujoso Djatiwibowo)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	40	63	5.000.000.000	65	350.000.000	67	375.000.000	69	400.000.000	70	420.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	95,79	95,82	0,000	95,83	200.000.000	95,84	200.000.000	95,85	200.000.000	95,86	200.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RS Korpri)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	70	80	139.166.670	85	140.000.000	90	145.000.000	95	150.000.000	100	160.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RS Mata)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	70	80	0,000	85	140.000.000	90	145.000.000	95	150.000.000	100	160.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				250.701.000		286.000.000		291.000.000		296.000.000		301.000.000	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	250.701.000	100	286.000.000	100	291.000.000	100	296.000.000	100	301.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				685.900.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000		775.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	685.900.000	100	700.000.000	100	725.000.000	100	750.000.000	100	775.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.798.031.005.418		3.174.836.481.093		2.798.649.218.602		2.959.763.616.302		2.778.712.536.783	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				163.270.730.081		166.354.317.159		172.972.033.017		179.470.634.668		186.569.166.401	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72,20	77,00	142.333.766.461	78,50	141.000.000.000	80,00	145.072.033.017	81,50	149.270.634.668	83,00	154.469.166.401	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD I)	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.459.420.603	100	6.354.317.159	100	7.100.000.000	100	7.300.000.000	100	8.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0002 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD II)	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.128.975.757	100	6.500.000.000	100	7.100.000.000	100	7.800.000.000	100	8.200.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD III)	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.546.751.260	100	6.500.000.000	100	7.100.000.000	100	7.800.000.000	100	8.300.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0004 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.801.816.000	100	6.000.000.000	100	6.600.000.000	100	7.300.000.000	100	7.600.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0005 - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				182.434.936.308		144.042.979.381		164.507.069.501		162.780.906.903		207.354.874.253	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air	Kapasitas air baku untuk air bersih (Liter/Detik)	11.011	11.676	162.894.336.008	11.736	124.542.979.381	11.796	144.007.069.501	11.856	142.280.906.903	12.166	186.854.874.253	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99		38,06		41,68		44,25		47,78		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	0,40	16,08		19,58		23,01		26,45		31,40		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,41	11,42		13,86		16,47		18,99		22,33		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air (UPTD I)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99	6.540.600.300	38,06	6.000.000.000	41,68	6.000.000.000	44,25	6.000.000.000	47,78	6.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0002 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air (UPTD II)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99	6.000.000.000	38,06	6.500.000.000	41,68	7.500.000.000	44,25	7.500.000.000	47,78	7.500.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,41	11,42		13,86		16,47		18,99		22,33		1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air (UPTD III)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99	7.000.000.000	38,06	7.000.000.000	41,68	7.000.000.000	44,25	7.000.000.000	47,78	7.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0004 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				118.224.260.800		100.817.600.773		106.841.127.429		105.109.994.470		134.691.093.796	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	0,00	8,62	118.224.260.800	8,62	100.817.600.773	15,52	106.841.127.429	15,52	105.109.994.470	15,52	134.691.093.796	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.351.410.000		1.079.237.600		1.187.161.360		1.017.567.050		1.324.627.065	
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional (%)	0,00	0,40	1.351.410.000	1,00	1.079.237.600	1,91	1.187.161.360	2,66	1.017.567.050	2,81	1.324.627.065	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.073.294.900		3.172.911.243		1.586.847.900		1.986.847.900		1.486.847.900	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (%)	9,7	16,00	3.073.294.900	19,50	3.172.911.243	23,00	1.586.847.900	26,50	1.986.847.900	30,00	1.486.847.900	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	84,23	88,23		91,23		94,23		97,23		100,00		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				40.020.228.975		25.508.754.934		21.278.611.256		17.858.203.197		18.897.554.319	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	10,80	12,16	35.020.228.975	12,77	21.508.754.934	13,27	18.278.611.256	13,69	14.858.203.197	14,12	15.897.554.319	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya kualitas sIstem drainase perkotaan (UPTD II)	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	10,80	12,16	5.000.000.000	12,77	4.000.000.000	13,27	3.000.000.000	13,69	3.000.000.000	14,12	3.000.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				48.002.963.500		32.002.432.000		35.202.675.200		30.173.726.629		39.278.920.203	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	87,88	89,88	48.002.963.500	91,88	32.002.432.000	93,88	35.202.675.200	96,88	30.173.726.629	100,00	39.278.920.203	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				794.229.456.840		720.000.000.000		23.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	74,47	79,08	794.229.456.840	82,98	720.000.000.000	87,23	23.000.000.000	90,43	5.000.000.000	92,91	5.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				822.760.000		770.884.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	18,18	20,98	822.760.000	20,98	770.884.000	20,98	1.000.000.000	20,98	1.000.000.000	20,98	1.500.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1.425.598.785.465		1.964.487.364.003		2.254.473.692.939		2.438.765.735.485		2.166.009.452.846	
Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	1.273.274.533.385	93,62	1.841.884.790.710	97,57	2.119.175.611.192	100,00	2.292.806.526.988	100,00	2.002.009.452.846	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman (UPTD I)	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	41.999.979.097	93,62	34.000.000.000	97,57	36.000.000.000	100,00	42.000.000.000	100,00	45.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0002 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman (UPTD II)	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	55.371.024.243	93,62	43.998.256.134	97,57	49.298.081.747	100,00	51.959.208.497	100,00	55.000.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman (UPTD III)	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	54.953.248.740	93,62	44.604.317.159	97,57	50.000.000.000	100,00	52.000.000.000	100,00	64.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0004 - UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4.270.584.000		4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	45,00	51,68	3.972.400.000	53,91	4.000.000.000	56,13	4.000.000.000	58,35	4.000.000.000	60,57	4.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya Kualitas Pengujian Standar Mutu Konstruksi	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (%)	56,67	63,34	298.184.000	70,67	600.000.000	77,67	600.000.000	85,01	600.000.000	92,01	600.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0005 - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				16.731.594.549		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (%)	74,76	79,04	16.731.594.549	79,60	12.000.000.000	81,32	12.000.000.000	82,52	12.000.000.000	83,16	12.000.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	83,20	84,94		85,92		87,52		88,17		88,50		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				133.861.909.582		67.968.604.907		75.708.465.398		71.888.734.698		86.139.099.217	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				20.970.000.000		25.570.000.000		26.070.000.000		26.070.000.000		26.070.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	970.000.000	100	5.570.000.000	100	5.570.000.000	100	5.570.000.000	100	5.570.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100	100		100		100		100		100		1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Kepemilikan Rumah	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (Orang)	-	2.000	20.000.000.000	2.000	20.000.000.000	2.000	20.500.000.000	2.000	20.500.000.000	2.000	20.500.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				52.397.023.278		39.998.604.907		44.238.465.398		40.418.734.698		53.669.099.217	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)	16,60	31,43	52.397.023.278	32,58	39.998.604.907	34,05	44.238.465.398	35,19	40.418.734.698	37,40	53.669.099.217	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				60.494.886.304		2.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		6.400.000.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	29,02	33,77	60.494.886.304	34,42	2.400.000.000	35,28	5.400.000.000	36,15	5.400.000.000	37,01	6.400.000.000	1.03.1.04.5.05.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				71.280.048.000		69.765.720.000		74.869.027.000		78.158.296.000		83.450.642.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				63.122.025.711		63.436.252.736		66.578.022.009		69.859.291.009		73.311.836.010	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	90	41.333.122.932	90	41.913.636.060	90	43.996.274.265	90	46.181.856.265	90	48.475.529.518	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	85	21.788.902.779	85	21.522.616.676	85	22.581.747.744	85	23.677.434.744	85	24.836.306.492	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	80	80		80		80		80		80		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.507.594.358		1.987.330.955		2.743.564.051		2.743.564.051		3.357.276.861	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	65	71	668.384.085	72	578.283.747	73	800.112.122	74	800.112.122	75	980.134.546	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	862.541.928	100	757.439.144	100	1.029.683.058	100	1.029.683.058	100	1.250.619.670	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	60	70	855.052.002	75	541.621.588	80	743.283.747	85	743.283.747	90	906.940.496	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	121.616.343	100	109.986.476	100	170.485.124	100	170.485.124	100	219.582.149	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.878.996.221		3.646.359.324		4.599.586.256		4.607.586.256		5.629.103.508	
Meningkatnya ketangguhan dalam menghadapi bencana	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	n/a	0,115	4.878.996.221	0,118	3.646.359.324	0,119	4.599.586.256	0,123	4.607.586.256	0,125	5.629.103.508	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pasca Bencana (Indeks)	n/a	0,055		0,056		0,057		0,060		0,065		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pra Bencana (Indeks)	n/a	0,383		0,396		0,414		0,429		0,430		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				771.431.710		695.776.985		947.854.684		947.854.684		1.152.425.621	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	771.431.710	100	695.776.985	100	947.854.684	100	947.854.684	100	1.152.425.621	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				126.426.721.000		129.874.206.000		146.948.764.000		157.274.803.000		167.877.100.000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				73.624.573.374		70.028.748.188		76.146.829.079		81.410.335.989		86.355.379.512	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	63.374.010.164	88	53.865.207.595	90	59.062.562.188	92	62.373.738.137	94	65.366.450.698	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	1.450.551.146	88	2.546.769.551	90	2.793.964.754	92	3.073.362.030	94	3.352.759.306	1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UTPD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	1.784.333.319	88	2.560.252.052	90	2.743.834.959	92	2.942.154.040	94	3.140.473.121	1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	1.756.671.539	88	3.243.465.100	90	2.739.846.200	92	2.935.265.870	94	3.130.685.540	1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UPTD Panti Sosial Bina Anak Remaja)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	1.679.479.502	88	2.445.894.000	90	2.690.483.400	92	2.959.531.740	94	3.228.580.080	1.06.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Panti Sosial Bina Remaja
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	1.308.951.505	88	2.209.526.071	90	2.642.740.377	92	3.305.547.251	94	3.968.354.126	1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik (UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82	86	2.270.576.199	88	3.157.633.819	90	3.473.397.201	92	3.820.736.921	94	4.168.076.641	1.06.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.111.439.025		1.900.000.000		5.087.467.910		7.000.000.000		8.700.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	1.111.439.025	100	1.900.000.000	100	5.087.467.910	100	7.000.000.000	100	8.700.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	45	55		65		75		85		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	n/a	24,26		29,01		33,77		38,53		43,29		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				5.360.000		200.300.000		400.000.000		550.000.000		687.000.000	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	n/a	3	5.360.000	9	200.300.000	9	400.000.000	10	550.000.000	10	687.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				32.325.673.506		26.023.005.862		29.986.207.463		30.986.207.463		32.545.047.964	
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya didalam Panti (%)	100	100	9.681.710.948	100	1.000.000.000	100	2.700.000.000	100	3.700.000.000	100	4.583.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial (UPTD Panti Tresna Werdha Nirwana Puri)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	5.273.313.000	100	5.390.674.631	100	6.672.259.668	100	6.672.259.668	100	5.943.218.781	1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial (UPTD Panti Sosial Anak Dharma dan UPTD Panti Sosial Anak Harapan)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	11.981.797.317	100	11.979.262.721	100	12.578.225.857	100	12.578.225.857	100	13.207.137.150	1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial (UPTD Panti Karya Wanita Harapan Mulia dan UPTD Panti Bina Remaja)	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	2.501.994.000	100	2.167.850.858	100	2.276.243.402	100	2.276.243.402	100	2.764.239.572	1.06.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial (UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	2.886.858.241	100	5.485.217.652	100	5.759.478.536	100	5.759.478.536	100	6.047.452.461	1.06.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				10.855.500.000		20.850.000.000		22.650.000.000		23.700.000.000		24.570.000.000	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	30	60	10.855.500.000	60	20.850.000.000	70	22.650.000.000	90	23.700.000.000	100	24.570.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	45	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				8.160.727.610		10.622.151.950		12.028.259.548		12.828.259.548		14.119.672.524	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	8.160.727.610	100	10.622.151.950	100	12.028.259.548	100	12.828.259.548	100	14.119.672.524	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				343.447.485		250.000.000		650.000.000		800.000.000		900.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkat Tata Kelolanya (Makam)	1	1	343.447.485	1	250.000.000	1	650.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				85.455.478.526		80.709.319.000		84.528.616.083		88.177.144.690		95.423.883.827	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				76.854.475.365		52.657.064.050		59.254.199.639		62.219.683.979		66.395.381.963	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	83	86	72.054.475.365	87	46.357.064.050	89	52.454.199.639	91	54.819.683.979	93	57.195.381.963	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	83	86	3.000.000.000	87	3.500.000.000	89	3.800.000.000	91	4.200.000.000	93	5.200.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	83	86	1.800.000.000	87	2.800.000.000	89	3.000.000.000	91	3.200.000.000	93	4.000.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				714.609.170		700.000.000		1.616.494.484		1.656.514.035		1.987.816.842	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	60	100	714.609.170	100	700.000.000	100	1.616.494.484	100	1.656.514.035	100	1.987.816.842	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				6.608.645.072		24.152.254.950		16.268.232.888		16.728.311.089		17.953.522.317	
Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65	67	451.446.262	68,5	1.150.000.000	70,5	1.965.977.938	71,5	2.126.056.139	73	2.651.267.367	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita))	288.813.211	306.401.936		315.593.994		325.061.813		334.813.668		344.858.078		2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (UPTD BLKI Balikpapan)	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	58	61	3.741.508.139	62,50	6.898.567.000	64	7.398.567.000	65,50	7.498.567.000	67	7.598.567.000	2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (UPTD BLKI Bontang)	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	60	65	2.415.690.671	68	16.103.687.950	70	6.903.687.950	72	7.103.687.950	75	7.703.687.950	2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				415.818.693		1.000.000.000		2.309.277.835		2.366.448.621		2.839.738.345	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10	28,10	415.818.693	28,60	1.000.000.000	29	2.309.277.835	29,60	2.366.448.621	30	2.839.738.345	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				400.661.576		1.000.000.000		2.309.277.835		2.366.448.621		2.839.738.345	
Meningkatnya Pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	395.844	436.418	400.661.576	458.238	1.000.000.000	481.150	2.309.277.835	505.208	2.366.448.621	530.468	2.839.738.345	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				461.268.650		1.200.000.000		2.771.133.402		2.839.738.345		3.407.686.015	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	200.000	220.500	461.268.650	231.525	1.200.000.000	243.101	2.771.133.402	255.256	2.839.738.345	268.019	3.407.686.015	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.974.220.703		13.257.377.134		14.064.880.675		14.661.526.523		15.645.312.830	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.171.795.738		11.364.684.621		11.932.918.911		12.529.564.759		13.156.043.579	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,88	91,2	17.777.376.394	91,4	10.038.262.926	91,6	10.208.570.707	91,8	10.287.912.094	92	10.241.895.116	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	85	87		88		89		90		91		2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,67	90,79	394.419.344	90,91	1.326.421.695	91,09	1.724.348.204	91,21	2.241.652.665	91,45	2.914.148.463	2.08.2.14.0.00.01.0002 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.01.0002 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.072.180.012		792.692.513		899.827.138		899.827.138		1.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen (%)	44,09	45,92	1.072.180.012	46,94	792.692.513	48,17	899.827.138	49,63	899.827.138	54,67	1.000.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	49,07	50.20-51.26		50.75-51.69		51.30-52.11		51.86-52.54		52.41-52.97		2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.284.836.420		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	47,67	47	818.400.000	46,5	250.000.000	46	300.000.000	45,5	300.000.000	45	300.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	99	100	466.436.420	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0002 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				72.646.788		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Lembaga)	9	12	72.646.788	14	200.000.000	16	200.000.000	18	200.000.000	20	200.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				149.326.789		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	149.326.789	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				757.869.026		100.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,47	61,5	757.869.026	62	100.000.000	62,5	125.000.000	63	125.000.000	63,5	125.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.465.565.930		200.000.000		207.134.626		207.134.626		364.269.251	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,71	84	1.000.000.000	88	75.000.000	92	75.000.000	96	75.000.000	100	100.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	99	100	465.565.930	100	125.000.000	100	132.134.626	100	132.134.626	100	264.269.251	2.08.2.14.0.00.01.0002 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.776.229.627		14.350.000.000		5.200.000.000		5.200.000.000		5.200.000.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				134.168.270		1.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya persediaan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100	134.168.270	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.153.173.018		600.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	89,10	89,95	392.315.008	90,40	300.000.000	90,85	700.000.000	91,31	700.000.000	91,77	700.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya kualitas ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	97,70	97,80	760.858.010	97,85	300.000.000	97,90	700.000.000	97,95	700.000.000	98,00	700.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				1.288.973.544		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,81	1,90	1.288.973.544	0,95	750.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				1.199.914.795		12.000.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,20	87	1.199.914.795	87	12.000.000.000	87	800.000.000	87	800.000.000	87	800.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				38.436.446.000		34.914.755.000		36.854.006.000		38.483.842.000		41.046.628.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.096.446.000		31.447.255.000		33.174.006.000		34.803.842.000		36.651.628.000	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	86,56	88,25	32.096.446.000	88,50	31.447.255.000	88,75	33.174.006.000	89,00	34.803.842.000	89,25	36.651.628.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				735.855.324		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	75	77	735.855.324	77	300.000.000	80	300.000.000	82	300.000.000	85	300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.349.144.676		1.382.500.000		1.460.000.000		1.460.000.000		1.745.000.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (%)	29,53	30,1	1.489.144.676	30,2	982.500.000	30,3	1.060.000.000	30,4	1.060.000.000	30,5	1.345.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunya Emisi GRK dari sektor limbah	Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Limbah (TonCO2e)	15.500,62	42.532,79	860.000.000	62.676,13	400.000.000	101.274,35	400.000.000	127.383,98	400.000.000	150.974,65	400.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		175.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan yang dikelola (Ha)	162.103	255.429	100.000.000	324.607	100.000.000	393.786	100.000.000	462.964	100.000.000	532.143	175.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				220.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		150.000.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	220.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				850.000.000		500.000.000		560.000.000		560.000.000		650.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	96,91	100	850.000.000	100	500.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	650.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				350.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup (%)	69	71	350.000.000	72	100.000.000	73	100.000.000	74	100.000.000	75	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				250.000.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000		225.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	8,44	11,37	250.000.000	12,79	125.000.000	14,22	150.000.000	15,64	150.000.000	17,06	225.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				520.000.000		300.000.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100	100	520.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				965.000.000		550.000.000		575.000.000		575.000.000		650.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,77	18,75	482.500.000	22,50	275.000.000	26,25	287.500.000	30,00	287.500.000	33,75	325.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Menurunya Emisi GRK dari sektor persampahan	Besaran Penurunan Emisi GRK Tahunan dari Sektor Persampahan (TonCO2e)	17.609,98	49.580,71	482.500.000	73.962,35	275.000.000	120.978,3	287.500.000	153.997,54	287.500.000	184.656,55	325.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.384.555.000		11.450.000.000		12.122.500.000		12.618.625.000		13.579.556.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.402.769.033		9.450.000.000		9.922.500.000		10.418.625.000		10.939.556.000	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	82	9.402.769.033	84	9.450.000.000	88,5	9.922.500.000	89	10.418.625.000	90	10.939.556.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.310.181.017		700.000.000		800.000.000		800.000.000		1.240.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,6	9	1.310.181.017	11	700.000.000	13	800.000.000	15	800.000.000	17	1.240.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	67	75		80		85		90		95		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	99,5	99,7		99,8		99,9		99,95		99,96		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				264.948.685		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	264.948.685	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				297.235.073		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	297.235.073	100	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				109.421.192		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	109.421.192	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				37.462.537.000		30.012.730.000		36.424.299.000		37.568.489.000		40.477.990.000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				25.599.515.591		21.794.079.883		22.883.783.872		24.027.973.872		25.229.371.846	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84	86	25.599.515.591	88	21.794.079.883	89	22.883.783.872	90	24.027.973.872	91	25.229.371.846	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				171.555.740		1.017.468.617		2.022.969.179		2.022.969.179		2.222.969.179	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	1,31	0,35	171.555.740	0,47	1.017.468.617	0,59	2.022.969.179	0,71	2.022.969.179	0,83	2.222.969.179	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				1.361.999.900		464.000.000		1.364.000.000		1.364.000.000		1.364.000.000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	10	28,57	1.361.999.900	28,57	464.000.000	42,86	1.364.000.000	42,86	1.364.000.000	42,86	1.364.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.513.051.839		837.181.500		2.553.545.949		2.553.545.949		3.061.648.975	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	25	2,97	2.513.051.839	3,57	837.181.500	4,16	2.553.545.949	4,76	2.553.545.949	5,35	3.061.648.975	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	25	2,97		3,57		4,16		4,76		5,35		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				7.816.413.930		5.900.000.000		7.600.000.000		7.600.000.000		8.600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang Dibina (%)	4,2	8,47	7.816.413.930	14,41	5.900.000.000	21,19	7.600.000.000	27,97	7.600.000.000	36,44	8.600.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (%)	2,73	3,56		4,16		4,75		5,35		5,94		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				872.970.297		1.062.023.866		1.124.633.325		1.194.217.477		1.440.638.170	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				98.766.912		150.000.000		150.000.000		150.000.000		219.084.866	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	18,2	17,78	98.766.912	17,69	150.000.000	17,61	150.000.000	17,61	150.000.000	17,61	219.084.866	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,17	2,12		2,11		2,10		2,10		2,10		2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				395.776.032		712.023.866		774.633.325		844.217.477		996.553.304	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	57,10	69	395.776.032	70	712.023.866	71	774.633.325	72	844.217.477	73	996.553.304	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (%)	77,37	79,09		79,91		80,75		81,60		82,47		2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				378.427.353		200.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	74,50	79,50	378.427.353	81	200.000.000	84	200.000.000	85	200.000.000	87,50	225.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				154.003.747.000		55.380.779.000		72.657.973.000		44.506.902.000		47.584.158.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.425.596.616		37.217.680.000		39.387.973.000		41.236.902.000		43.518.867.332	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perhubungan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	76	32.324.928.801	78	33.489.680.000	78,9	35.599.973.000	79,3	37.448.902.000	79,7	39.730.867.332	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	65	75		80		85		90		95		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Terminal)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	76	3.100.667.815	78	3.728.000.000	78,9	3.788.000.000	79,3	3.788.000.000	79,7	3.788.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Terminal
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	65	75		80		85		90		95		2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Terminal
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				24.291.944.394		2.463.099.000		2.370.000.000		2.370.000.000		3.165.290.668	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat (Dinas Perhubungan)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (%)	50,74	55,00	23.048.453.169	57,50	2.023.099.000	60,00	1.930.000.000	62,50	1.930.000.000	65,00	2.645.290.668	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang (%)	25	35		40		45		50		55		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rasio Konektivitas Darat (Angka)	0,41	0,44		0,47		0,50		0,53		0,56		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat (UPTD Terminal)	Rasio Konektivitas Darat (Angka)	0,41	0,44	1.243.491.225	0,47	440.000.000	0,50	440.000.000	0,53	440.000.000	0,56	520.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Terminal
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				94.286.205.990		15.600.000.000		30.800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan SDP	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran (Indeks)	45,45	48,21	94.286.205.990	51,00	15.600.000.000	53,00	30.800.000.000	55,00	800.000.000	57,00	800.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Laut dan SDP (Angka)	0,846	0,846		0,890		0,923		0,923		0,923		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				0,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Optimalisasi kebijakan jaringan perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	40	0	0,000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				120.052.916.365		51.556.347.000		52.000.300.000		53.770.565.000		56.185.733.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				48.310.173.355		34.405.195.100		36.249.748.100		38.020.013.100		40.035.181.100	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	48.310.173.355	100	34.405.195.100	100	36.249.748.100	100	38.020.013.100	100	40.035.181.100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				43.764.774.624		1.150.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	60	63	43.764.774.624	64,50	1.150.000.000	66	1.250.000.000	67,50	1.250.000.000	69	1.350.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				27.977.968.386		16.001.151.900		14.500.551.900		14.500.551.900		14.800.551.900	
Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (%)	80	85	27.977.968.386	87	16.001.151.900	89	14.500.551.900	91	14.500.551.900	93	14.800.551.900	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				66.392.610.703		71.322.690.957		78.213.824.963		80.409.516.727		89.914.992.035	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.790.661.754		43.822.690.957		46.213.824.963		48.409.516.727		51.914.992.035	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,9	41.311.935.615	89	42.345.175.267	89,05	44.662.433.488	89,1	46.780.555.679	89,15	50.204.582.935	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,9	1.478.726.139	89	1.477.515.690	89,05	1.551.391.475	89,1	1.628.961.048	89,15	1.710.409.100	3.31.3.30.2.17.01.0003 - UPTD Pelatihan Koperasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.2.17.01.0003 - UPTD Pelatihan Koperasi
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				242.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	44	55	242.000.000	70	1.000.000.000	80	1.500.000.000	90	1.500.000.000	100	2.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				641.706.949		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian dan UKM	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	2	3	641.706.949	3,5	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4,5	2.000.000.000	5	3.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0003 - UPTD Pelatihan Koperasi
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				758.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya koperasi kewenangan provinsi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	758.000.000	65	2.000.000.000	70	3.000.000.000	75	3.000.000.000	80	5.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				21.710.242.000		21.000.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000		24.000.000.000	
Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	n/a	2,91	21.710.242.000	3,05	21.000.000.000	3,18	22.500.000.000	3,32	22.500.000.000	3,46	24.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				250.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya daya saing UKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	250.000.000	31,5	2.000.000.000	35	3.000.000.000	38,5	3.000.000.000	42	4.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				31.657.866.000		36.665.759.000		46.024.047.000		52.135.250.000		58.562.012.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.657.866.218		23.165.759.218		28.224.047.240		33.534.250.000		38.522.012.000	
Meningkatnya Tata kelola Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	92	94	22.657.866.218	94	23.165.759.218	95	28.224.047.240	96	33.534.250.000	96	38.522.012.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.250.000.000		3.062.420.000		3.962.420.000		4.500.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	2.250.000.000	100	3.062.420.000	100	3.962.420.000	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				2.250.000.000		2.445.579.782		4.145.579.782		4.500.000.000		5.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi (Angka)	2.364	2.489	2.250.000.000	2.614	2.445.579.782	2.739	4.145.579.782	2.864	4.500.000.000	3.014	5.000.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.400.000.000		3.652.000.000		4.861.000.000		4.861.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	2.400.000.000	100	3.652.000.000	100	4.861.000.000	100	4.861.000.000	100	5.000.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.379.999.782		3.500.000.000		3.590.999.978		3.500.000.000		3.800.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM (Pelaku Usaha)	534	404	1.379.999.782	284	3.500.000.000	174	3.590.999.978	79	3.500.000.000	0	3.800.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				720.000.000		840.000.000		1.240.000.000		1.240.000.000		1.240.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	64	82	720.000.000	84	840.000.000	88	1.240.000.000	92	1.240.000.000	96	1.240.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				155.582.388.000		76.561.507.000		81.089.583.000		84.374.062.000		90.902.765.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				65.896.575.362		62.561.507.000		65.141.582.874		68.426.061.874		71.965.164.848	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	47.165.880.621	78	37.061.507.000	78,5	39.241.582.874	79	38.974.061.776	79,5	40.965.164.848	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	18.730.694.741	78	25.500.000.000	78,5	25.900.000.000	79	29.452.000.098	79,5	31.000.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.19.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				13.482.886.000		4.200.000.000		4.620.000.126		4.620.000.126		5.544.000.152	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	1,02	1,45	13.482.886.000	1,50	4.200.000.000	2	4.620.000.126	2,50	4.620.000.126	3	5.544.000.152	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				72.181.926.638		8.680.000.000		10.096.000.000		10.096.000.000		11.915.200.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Pretasi Olahraga (%)	35,69	36,61	72.181.926.638	37,07	8.680.000.000	37,53	10.096.000.000	38	10.096.000.000	38,46	11.915.200.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	70	75		80		80		85		85		2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				4.021.000.000		1.120.000.000		1.232.000.000		1.232.000.000		1.478.400.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	4.021.000.000	100	1.120.000.000	100	1.232.000.000	100	1.232.000.000	100	1.478.400.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				799.830.000		950.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.387.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				799.830.000		950.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.387.000.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,68	2,75	799.830.000	2,75	950.000.000	2,85	1.050.000.000	2,85	1.050.000.000	3	1.387.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				496.255.635		900.000.000		950.000.000		950.000.000		1.175.500.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				496.255.635		900.000.000		950.000.000		950.000.000		1.175.500.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	366	403	496.255.635	421	900.000.000	458	950.000.000	495	950.000.000	531	1.175.500.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				24.549.220.265		27.240.220.264		28.832.231.277		29.917.258.973		31.413.121.922	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.520.122.798		11.320.122.798		11.886.128.938		12.123.851.517		12.730.044.092	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan (UPTD Taman Budaya)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	5.551.055.383	92,5	5.951.055.383	93	6.248.608.152	93,5	6.373.580.315	94	6.692.259.331	1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD. Museum Mulawarman)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	92	4.969.067.415	92,5	5.369.067.415	93	5.637.520.786	93,5	5.750.271.201	94	6.037.784.762	1.01.2.22.0.00.01.0004 - UPTD Museum Negeri Mulawarman
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0004 - UPTD Museum Negeri Mulawarman
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				366.574.050		566.574.050		794.902.753		834.647.890		876.380.285	
Meningkatnya warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)	50	58	127.000.000	62	227.000.000	66	338.350.000	70	355.267.500	74	373.030.875	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan (UPTD Taman Budaya)	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan (%)	-11,76	5	239.574.050	10	339.574.050	15	456.552.753	20	479.380.390	25	503.349.410	1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				5.578.890.170		5.978.890.170		6.277.834.679		6.591.726.412		6.921.312.733	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesenian tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni (%)	46	50	1.861.355.450	52	2.061.355.450	54	2.164.423.223	56	2.272.644.384	58	2.386.276.603	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
meningkatnya sanggar seni yang terbina (UPTD Taman Budaya)	Persentase Sanggar Seni yang Dibina (%)	50	53,13	3.717.534.720	56,25	3.917.534.720	59,38	4.113.411.456	62,50	4.319.082.029	65,63	4.535.036.130	1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				8.400.000		158.400.000		196.320.000		206.136.000		216.442.800	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mangakses Informasi Sejarah Lokal (%)	25,12	30	8.400.000	35	158.400.000	40	196.320.000	45	206.136.000	50	216.442.800	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				2.092.239.247		2.692.239.246		2.826.851.208		2.968.193.769		3.116.603.457	
Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	45	50	2.092.239.247	53	2.692.239.246	59	2.826.851.208	63	2.968.193.769	68	3.116.603.457	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	29	31		33		36		38		41		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				5.982.994.000		6.523.994.000		6.850.193.700		7.192.703.385		7.552.338.554	
Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke museum	Persentase Peningkatan pengunjung museum (%)	11,85	15	9.000.000	20	150.000.000	25	157.500.000	30	165.375.000	35	173.643.750	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke museum Mulawarman (UPTD Museum Mulawarman)	Persentase peningkatan pengunjung museum Mulawarman (%)	0,22	10	5.973.994.000	15	6.373.994.000	20	6.692.693.700	25	7.027.328.385	30	7.378.694.804	1.01.2.22.0.00.01.0004 - UPTD Museum Negeri Mulawarman
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				33.320.562.327		32.914.861.568		34.526.760.265		36.062.696.441		37.391.987.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				31.520.560.320		31.272.237.705		32.586.742.692		34.008.769.196		34.553.729.196	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80	84,5	31.520.560.320	85	31.272.237.705	85,5	32.586.742.692	86	34.008.769.196	86,5	34.553.729.196	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	90	92		93		94		95		96		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.758.002.007		1.577.623.863		1.825.017.573		1.928.927.245		2.653.257.804	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	69,53	71,00	1.758.002.007	71,50	1.577.623.863	72,00	1.825.017.573	72,50	1.928.927.245	73,00	2.653.257.804	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				42.000.000		65.000.000		115.000.000		125.000.000		185.000.000	
Meningkatkan Pengembangan, Pengumpulan, pengolahan, Pendayagunaan dan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam serta Naskah Kuno Kalimantan Timur	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	n/a	80	42.000.000	85	65.000.000	90	115.000.000	95	125.000.000	100	185.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.167.145.673		1.078.097.432		1.284.980.735		1.408.584.559		2.346.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				937.379.260		848.331.019		934.980.735		1.023.584.559		1.240.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Tingkat Ketersediaan Arsip (Indeks)	74,95	75,25	937.379.260	75,50	848.331.019	75,75	934.980.735	76,00	1.023.584.559	76,25	1.240.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				229.766.413		229.766.413		350.000.000		385.000.000		1.106.000.000	
Meningkatnya ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip yang dikelola	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	76	78	229.766.413	79	229.766.413	80	350.000.000	81	385.000.000	82	1.106.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				87.790.771.000		70.743.923.000		75.487.658.000		78.423.098.000		84.661.081.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				58.397.074.292		56.513.145.000		59.608.802.000		62.544.242.000		65.826.454.338	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	55.007.683.810	92,6	54.459.704.650	92,8	57.377.689.883	93	60.231.574.278	93,2	63.428.152.991	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	893.008.060	92,6	774.990.300	92,8	813.739.565	93	854.426.544	93,2	897.148.112	3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	736.288.683	92,6	498.630.300	92,8	523.561.815	93	549.739.905	93,2	577.226.900	3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	607.552.939	92,6	279.819.750	92,8	293.810.737	93	308.501.273	93,2	323.926.335	3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	92,4	988.550.000	92,6	250.000.000	92,8	350.000.000	93	350.000.000	93,2	350.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS))	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	92,4	163.990.800	92,6	250.000.000	92,8	250.000.000	93	250.000.000	93,2	250.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				1.450.000.000		1.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000	
Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	1.200.000.000	87,36	750.000.000	87,37	1.500.000.000	87,38	1.500.000.000	87,40	1.500.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh UPTD	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	-	100	250.000.000	100	500.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	1.000.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				5.595.000.000		8.580.778.000		3.700.000.000		3.700.000.000		4.700.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	214.694	223.367,8	5.555.000.000	227.834,9	7.830.778.000	232.391,7	2.700.000.000	237.039,5	2.700.000.000	241.780,3	3.700.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan Manggar Baru	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan (Ton)	561	583,7	40.000.000	595,3	750.000.000	607,2	1.000.000.000	619,4	1.000.000.000	631,8	1.000.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				20.260.624.647		2.400.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		7.705.771.110	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	241.728,4	258.945,5	18.375.778.785	268.008,6	900.000.000	277.388,9	2.000.000.000	287.097,5	2.000.000.000	297.145,9	2.800.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya ketersediaan benih udang dan ikan air laut yang bermutu	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1.000.000.000	1.100.000.000	991.274.740	1.200.000.000	750.000.000	1.300.000.000	2.000.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar
Meningkatnya ketersediaan benih udang, ikan air laut/payau dan ikan air tawar endemik lokal yang bermutu	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4.181.000	4.732.250	893.571.122	4.840.750	750.000.000	4.949.250	2.000.000.000	5.057.750	2.000.000.000	5.166.250	2.405.771.110	3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Muara Badak-Sebulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				950.000.000		750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	100	100	950.000.000	100	750.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.138.072.061		1.250.000.000		2.428.856.000		2.428.856.000		2.428.855.552	
Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan	Jumlah produk olahan hasil perikanan (Ton)	40.214	44.289	650.000.000	46.441	750.000.000	48.763	1.500.000.000	51.201	1.500.000.000	53.761	1.500.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	1.496.856.638.140	1.680.270.182.290		1.765.987.693.815		1.864.461.726.395		2.014.425.391.040		2.150.463.904.900		3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya mutu produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	83	488.072.061	86	500.000.000	90	928.856.000	94	928.856.000	98	928.855.552	3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				43.101.208.364		32.625.588.000		42.028.297.000		42.609.889.000		42.759.852.000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.917.009.763		19.075.588.000		20.131.840.421		21.113.432.442		22.344.104.064	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	82	18.917.009.763	83	19.075.588.000	84	20.131.840.421	85	21.113.432.442	85	22.344.104.064	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				5.100.000.000		5.250.000.000		8.200.000.000		7.800.000.000		5.615.747.936	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	1,69	0,5	5.100.000.000	0,5	5.250.000.000	0,5	8.200.000.000	0,5	7.800.000.000	0,5	5.615.747.936	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				2.200.000.000		1.500.000.000		2.596.456.579		2.596.456.558		3.000.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata (%)	28,06	29,10	2.200.000.000	29,74	1.500.000.000	30,13	2.596.456.579	30,68	2.596.456.558	31,09	3.000.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				15.105.601.579		5.300.000.000		8.400.000.000		8.400.000.000		8.500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,55	5,07	15.105.601.579	6,08	5.300.000.000	7,09	8.400.000.000	8,11	8.400.000.000	9,12	8.500.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.778.597.022		1.500.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		3.300.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	2,83	1,16	1.778.597.022	1,16	1.500.000.000	1,27	2.700.000.000	1,68	2.700.000.000	2,38	3.300.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				224.598.063.373		196.948.623.000		216.648.242.000		224.578.929.000		236.440.929.000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				151.134.956.112		150.067.565.165		160.915.257.889		167.726.484.674		177.243.692.513	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81,58	82,80	64.624.554.993	83,60	67.341.249.500	84,40	70.945.812.300	85,20	74.268.103.200	86,00	78.206.508.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95,77	95,09	32.462.512.891	95,21	31.701.343.000	95,33	34.596.667.000	95,42	35.710.668.529	95,51	37.707.084.173	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91,65	92,57	35.915.484.985	93,03	36.237.564.781	93,50	38.261.943.179	93,96	40.125.040.679	94,43	42.181.292.415	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82,00	82,80	3.525.765.330	83,60	3.324.457.700	84,40	3.458.780.500	85,20	3.597.319.500	86,00	3.740.285.500	2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91,65	92,57	2.105.505.858	93,03	1.724.422.800	93,50	1.848.144.000	93,96	1.925.551.200	94,43	2.106.828.700	3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,1	95	1.405.796.283	95,2	1.367.455.946	95,5	2.051.942.510	95,7	1.965.856.566	95,9	2.388.426.025	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81,58	82,80	1.958.710.392	83,60	1.546.867.000	84,40	1.624.210.400	85,20	1.705.420.900	86,00	1.790.691.900	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91,65	92,57	1.303.609.669	93,03	1.319.873.400	93,50	1.423.367.000	93,96	1.479.535.300	94,43	1.638.512.100	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,8	82,75	1.750.552.220	85,75	1.420.421.100	95	2.030.138.100	95	2.118.627.300	95	2.469.788.000	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81,58	82,80	1.927.245.217	83,60	1.105.934.800	84,40	1.161.231.600	85,20	1.219.293.100	86,00	1.280.257.800	2.09.3.27.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,4	79,90	1.601.773.797	84,50	1.319.933.138	87,78	1.772.077.100	87,93	1.783.077.100	88,03	1.814.627.100	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81,58	82,80	2.553.444.477	83,60	1.658.042.000	84,40	1.740.944.200	85,20	1.827.991.300	86,00	1.919.390.800	2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				49.585.579.118		26.069.424.401		31.914.882.955		32.798.452.544		35.386.321.978	
Meningkatnya benih sumber tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikasi	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	98	100	4.607.835.066	100	500.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	200.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kemanfaatan Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan (Skor)	80,66	85,57	25.531.861.959	88,14	9.089.518.019	90,78	9.153.469.821	93,51	9.153.469.821	96,31	7.134.163.785	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya pemenuhan benih sumber tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura (%)	48	53	1.857.984.286	55	1.800.000.000	60	5.000.000.000	65	6.000.000.000	70	9.600.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	36,31	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya pengawasan peredaran pestisida dan pupuk	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk (%)	37	50	446.361.965	55	2.000.000.000	60	2.550.000.000	65	2.550.000.000	70	2.150.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096	3.632.479.289	20.092.114	3.972.118.466	20.180.519	4.803.891.644	20.269.314	5.252.578.489	20.358.499	5.949.411.818	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (Ton)	439.628,00	493.966,02	3.089.013.932	523.603,98	2.600.000.000	555.020,22	4.750.000.000	588.321,43	3.800.000.000	623.620,72	4.100.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi tanaman pangan (Ton)	321.685,60	347.814,02		351.918,23		356.070,87		360.272,50		364.523,72		2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan (Skor)	87,02	90,54	293.402.156	92,35	300.000.000	94,19	350.000.000	96,08	350.000.000	98,00	400.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan (%)	n/a	13,33	54.447.826	15	54.447.900	33,33	220.000.000	41,67	222.000.000	55	365.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Manfaat Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Skor)	81,02	85,95	7.506.483.033	88,53	3.500.000.000	91,18	1.050.000.000	93,92	1.050.000.000	96,74	1.100.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
Meningkatnya pengawasan peredaran benih perkebunan	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (Benih)	12.460.941	8.000.000	923.480.891	8.000.000	755.489.554	8.000.000	982.279.090	8.000.000	1.200.619.934	8.000.000	1.302.891.375	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
Terpenuhinya Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	3,22	3,32	1.642.228.715	3,45	1.497.850.462	3,58	2.255.242.400	3,71	2.419.784.300	3,83	3.084.855.000	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.737.364.289		3.806.381.548		4.493.350.008		4.554.041.634		3.954.971.661	
Meningkatknya Luasan Areal Perkebunan	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	900.001.056	40.450	330.000.228	36.750	363.000.250	33.400	399.300.276	30.050	439.230.303	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya luas lahan pertanian yang terlindungi	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	710.930.925	21.415,06	500.000.000	30.462,06	1.000.000.000	42.462,06	1.000.000.000	42.462,06	1.200.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12	96.381.165	16	96.381.320	44	250.349.758	64	274.741.358	100	395.741.358	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan	Luas Kawasan Untuk Peternakan (Ha)	300	500	2.030.051.143	600	2.880.000.000	700	2.880.000.000	800	2.880.000.000	900	1.920.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				6.321.793.991		4.790.000.000		4.990.000.000		4.990.000.000		5.110.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim	Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner (Skor)	87,54	91,08	4.804.391.633	92,90	3.140.000.000	94,76	3.290.000.000	96,65	3.290.000.000	98,58	3.110.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH (Skor)	91,25	94,97		95,47		95,97		96,47		96,97		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Skor)	93,35	94,28	1.517.402.358	94,75	1.650.000.000	95,23	1.700.000.000	95,70	1.700.000.000	96,18	2.000.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				6.114.324.143		6.311.677.615		7.535.570.338		7.554.702.627		8.082.962.045	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	100	100	1.509.943.943	100	1.311.677.615	100	2.035.570.338	100	2.054.702.627	100	2.382.962.045	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani (%)	74,5	90	104.380.200	90	500.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.200.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90,62	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				967.321.197		973.722.985		1.130.602.762		1.232.041.673		1.682.257.755	
Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan	Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	5,76	33,05	552.055.801	49,64	474.462.600	66,19	596.225.000	83,09	711.062.600	100	873.341.400	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kemitraan Usaha Perkebunan													
Meningkatnya peran aktif pelaku usaha peternakan	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (Skor)	83,59	86,96	249.474.106	88,70	350.000.000	90,48	400.000.000	92,28	400.000.000	94,13	700.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya pelaku usaha perkebunan yang bersertifikasi berkelanjutan	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	18,38	19,62	165.791.290	20,58	149.260.385	21,54	134.377.762	22,5	120.979.073	23,46	108.916.355	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				6.736.724.523		4.929.851.286		5.668.578.048		5.723.205.848		4.980.723.048	
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (Skor)	75,83	82,02	2.530.862.100	85,30	2.880.000.000	88,71	2.880.000.000	92,26	2.880.000.000	95,95	1.920.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)	13,48	25,39	309.946.337	47,76	667.516.601	65,17	692.395.863	82,59	693.395.863	100	701.933.963	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	77	78	2.657.487.590	78,5	300.000.000	79	800.000.000	79,5	800.000.000	80	960.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pekebun	Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	36,17	1.238.428.496	55,45	1.082.334.685	70,30	1.296.182.185	85,15	1.349.809.985	100	1.398.789.085	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				438.744.661.000		361.789.639.000		378.458.009.000		395.384.088.000		414.203.844.000	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				199.629.349.004		190.658.981.861		200.491.931.518		210.291.527.612		221.681.103.953	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (Dinas Kehutanan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	163.526.310.440	86,53	159.816.018.326	87,22	161.633.762.878	87,92	158.484.614.040	88,63	158.957.820.430	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	2.693.748.392	86,53	1.773.596.000	87,22	2.137.596.000	87,92	3.107.596.000	88,63	3.707.596.000	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	6.041.363.260	86,53	1.111.010.000	87,22	1.655.010.000	87,92	2.245.010.000	88,63	2.845.010.000	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.020.102.000	86,53	1.609.662.000	87,22	1.958.662.000	87,92	2.808.662.000	88,63	3.198.662.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	2.678.810.738	86,53	1.462.640.000	87,22	1.967.867.047	87,92	2.547.830.000	88,63	3.197.830.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.858.305.000	86,53	1.380.430.000	87,22	1.714.430.000	87,92	2.239.430.000	88,63	2.689.430.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.558.128.800	86,53	1.370.157.600	87,22	1.754.157.600	87,92	2.269.157.600	88,63	2.869.157.600	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.001.718.000	86,53	1.566.258.000	87,22	2.069.367.317	87,92	2.685.258.000	88,63	3.235.258.000	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	2.768.627.530	86,53	1.406.679.250	87,22	1.850.679.250	87,92	2.555.679.250	88,63	2.855.679.250	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.186.803.600	86,53	1.328.075.435	87,22	1.801.769.529	87,92	2.655.573.323	88,63	3.107.567.310	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.959.675.600	86,53	1.599.924.000	87,22	1.975.207.433	87,92	2.704.924.000	88,63	3.154.924.000	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.061.377.200	86,53	1.760.717.200	87,22	2.129.717.200	87,92	2.934.717.200	88,63	3.434.717.200	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.031.719.400	86,53	1.561.059.400	87,22	1.955.059.400	87,92	2.435.059.400	88,63	2.885.059.400	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.020.890.198	86,53	1.546.364.000	87,22	1.882.314.052	87,92	2.660.364.000	88,63	3.160.364.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	996.510.000	86,53	1.491.050.000	87,22	1.801.497.377	87,92	2.391.214.543	88,63	3.150.906.489	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.192.595.050	86,53	1.661.935.050	87,22	2.258.704.101	87,92	2.643.717.550	88,63	3.450.481.675	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.300.639.532	86,53	1.487.060.000	87,22	2.023.784.734	87,92	2.740.375.106	88,63	3.498.294.999	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.372.116.000	86,53	1.885.176.000	87,22	2.219.176.000	87,92	2.689.176.000	88,63	3.539.176.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	2.900.576.164	86,53	1.564.097.500	87,22	1.888.097.500	87,92	2.418.097.500	88,63	2.968.097.500	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	1.508.381.500	86,53	1.904.941.500	87,22	2.068.941.500	87,92	2.748.941.500	88,63	2.998.941.500	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	950.950.600	86,53	1.372.130.600	87,22	1.746.130.600	87,92	2.326.130.600	88,63	2.776.130.600	3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				154.768.119.156		114.090.164.659		118.657.586.720		123.419.496.446		128.384.336.253	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan (Dinas Kehutanan)	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1.545	1.645	4.636.783.822	1.695	3.045.650.166	1.745	3.585.502.082	1.795	4.229.180.035	1.845	4.226.850.100	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	6.293.432,95	6.402.024		6.461.888,27		6.525.929,11		6.594.146,54		6.665.844,44		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (Dinas Kehutanan)	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	1	3	32.911.471.890	4	15.318.431.268	5	17.561.830.922	6	22.223.375.288	7	21.211.399.535	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	3,5	4,45		4,92		5,40		5,87		6,34		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	3.924.279.484	0,5	7.382.539.393	0,5	7.946.075.926	0,5	7.367.747.576	0,5	6.818.511.704	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,184		0,195		0,207		0,219		0,231		3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	11.264.362.468	0,5	2.836.768.678	0,5	2.990.400.352	0,5	3.183.977.093	0,5	3.295.213.536	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,15	0,193		0,215		0,237		0,258		0,280		3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	7.043.201.820	0,5	6.605.303.356	0,5	6.956.323.808	0,5	6.355.694.449	0,5	6.681.494.736	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,15	0,193		0,215		0,237		0,258		0,280		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	7.770.376.139	0,5	3.383.108.860	0,5	3.559.355.744	0,5	3.776.510.687	0,5	3.912.330.122	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,207		0,231		0,255		0,278		0,302		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	4.880.720.577	0,5	8.457.233.620	0,5	8.843.518.884	0,5	8.279.655.967	0,5	8.643.789.504	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,207		0,231		0,255		0,278		0,302		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.076.509.936	0,5	3.810.714.758	0,5	4.004.661.966	0,5	4.240.270.941	0,5	4.395.330.828	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	4.781.978.948	0,5	4.771.916.868	0,5	4.964.258.076	0,5	4.198.192.663	0,5	5.351.506.812	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	4.882.482.337	0,5	5.791.708.716	0,5	4.984.869.188	0,5	5.219.657.925	0,5	6.373.862.622	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.585.053.368	0,5	4.623.033.022	0,5	3.809.211.330	0,5	4.036.720.593	0,5	5.183.335.598	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.584.308.060	0,5	4.131.013.720	0,5	4.338.219.388	0,5	4.587.651.387	0,5	4.757.123.370	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	4.496.823.100	0,5	2.873.496.842	0,5	3.028.648.842	0,5	3.223.810.645	0,5	3.336.699.702	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	6.602.021.290	0,5	5.208.886.968	0,5	5.460.710.132	0,5	5.756.659.511	0,5	5.974.631.222	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,207		0,231		0,255		0,278		0,302		3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	6.133.660.515	0,5	4.073.802.454	0,5	4.278.639.918	0,5	4.525.602.871	0,5	4.692.500.590	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,207		0,231		0,255		0,278		0,302		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	6.952.960.969	0,5	5.308.026.190	0,5	5.481.165.102	0,5	4.695.079.729	0,5	5.827.520.764	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	7.077.368.500	0,5	5.311.959.084	0,5	5.568.048.818	0,5	5.868.446.441	0,5	6.091.055.960	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.669.398.048	0,5	4.921.983.592	0,5	5.120.536.664	0,5	5.360.947.627	0,5	6.521.014.140	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	8.354.508.220	0,5	3.768.086.976	0,5	4.001.663.662	0,5	3.278.589.597	0,5	2.476.727.176	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.463.847.141	0,5	3.079.656.362	0,5	3.243.342.132	0,5	3.447.401.087	0,5	3.569.566.446	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203		0,225		0,247		0,268		0,290		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Persentase kerusakan hutan terhadap kawasan hutan diluar hutan konservasi (%)	0,51	0,5	5.614.334.500	0,5	9.029.996.242	0,5	8.522.778.472	0,5	9.069.947.329	0,5	8.549.844.274	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,207		0,231		0,255		0,278		0,302		3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (%)	0,16	0,203	61.668.024	0,225	356.847.524	0,247	407.825.312	0,268	494.377.005	0,290	494.027.512	3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				11.838.138.689		5.465.200.497		5.681.078.567		5.906.149.061		6.140.810.971	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Dinas Kehutanan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	2.500.000.000	0,547	374.795.976	0,555	383.952.958	0,568	393.925.674	0,572	405.749.530	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	122.579	95.337		109.140		115.860		122.580		132.580		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	100.000.000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	450.000.000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	48.521.660	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	63.480.000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	0,540	68.373.270	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	0,000	0,547	16.900.000	0,555	17.400.000	0,568	17.900.000	0,572	18.350.000	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	n/a	n/a	8.607.763.759	0,547	4.769.304.521	0,555	4.966.525.609	0,568	5.172.123.387	0,572	5.386.411.441	3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	64.814	64.814		64.814		64.814		64.814		64.814		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				60.993.984.292		48.299.410.960		50.226.277.817		52.235.193.667		54.329.719.792	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (Dinas Kehutanan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	1,5	3,25	1.327.584.240	3,5	5.811.886.225	3,75	6.034.353.631	4	6.266.294.045	4,25	6.508.118.638	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,70	2.538.905.859	0,75	56.561.649	0,75	70.683.555	0,75	61.343.973	0,75	63.889.007	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,05	1.029.099.999	0,05	169.850.527	0,05	147.401.102	0,1	153.509.582	0,1	159.878.377	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,05	246.794.100	0,05	108.259.070	0,08	112.740.347	0,08	97.843.703	0,1	101.903.036	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,1	760.431.180	0,1	435.556.567	0,1	453.586.000	0,1	472.383.155	0,1	491.981.354	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,1	810.603.262	0,1	105.369.840	0,1	109.731.520	0,1	114.278.928	0,1	119.020.124	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,205	882.548.537	0,3	495.741.298	0,35	430.218.349	0,35	448.047.121	0,4	466.635.668	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,05	1.216.733.561	0,05	274.685.517	0,1	286.055.853	0,1	297.910.355	0,1	310.270.038	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,1	362.135.647	0,1	280.844.584	0,1	292.469.868	0,1	253.825.146	0,1	264.355.826	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,05	941.829.900	0,05	332.357.537	0,08	346.115.149	0,1	360.458.581	0,1	375.413.261	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,125	337.185.160	0,125	234.792.294	0,125	244.511.289	0,125	212.203.445	0,125	221.007.326	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,6	2.500.652.835	0,65	761.411.406	0,65	792.929.279	0,65	825.789.232	0,7	860.049.517	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,03	300.820.500	0,03	135.263.219	0,05	140.862.306	0,08	146.699.811	0,1	152.786.082	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,2	1.033.945.326	0,2	513.143.717	0,2	534.384.794	0,2	667.836.419	0,2	579.619.640	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,03	290.278.753	0,03	250.428.108	0,05	260.794.332	0,08	271.601.966	0,1	282.870.169	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,03	185.567.647	0,03	279.137.496	0,03	242.243.431	0,1	252.282.293	0,1	262.748.963	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,15	1.031.492.260	0,2	192.960.153	0,2	200.947.547	0,2	209.275.058	0,2	217.957.447	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,5	521.037.060	0,505	1.171.814.279	0,505	1.220.320.373	0,505	1.270.891.932	0,545	1.323.618.606	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,1	403.325.789	0,1	461.574.923	0,1	480.681.361	0,1	500.601.380	0,1	521.370.295	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,05	900.000.000	0,05	178.330.158	0,1	154.759.965	0,1	161.173.406	0,1	167.860.157	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Milyar Rupiah)	-	0,03	93.515.178	0,03	139.252.093	0,03	120.846.913	0,08	125.854.956	0,1	131.076.417	3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	330.184	370.184	20.780.915.760	380.184	16.590.413.870	390.184	17.743.873.217	400.184	18.698.882.135	410.184	19.524.355.914	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	1	6		6		6		6		6		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	10	10		10		10		10		10		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	50	2.638.905.859	50	169.684.947	50	226.272.267	50	184.031.919	50	191.667.021	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	5.000	1.328.825.001	1.000	543.718.998	1.000	442.203.306	1.000	460.528.746	1.000	479.635.131	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.500	496.724.080	1.000	350.448.199	1.000	360.904.513	1.000	293.531.109	1.000	305.709.108	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.100	1.113.894.203	1.000	1.306.669.701	1.000	1.360.758.000	1.000	1.417.149.465	1.000	1.475.944.062	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.000	1.604.027.541	1.000	316.109.520	1.000	329.194.560	1.000	342.836.784	1.000	357.060.372	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	500	1.204.058.537	500	1.256.729.696	500	1.290.655.047	500	1.344.141.363	500	1.399.907.004	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.000	1.454.094.701	1.000	824.056.551	1.000	858.167.559	1.000	893.731.065	1.000	930.810.114	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.000	584.553.061	500	755.304.030	500	782.429.692	500	761.475.438	500	793.067.478	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	500	1.344.637.821	200	997.072.611	200	1.038.345.447	200	1.081.375.743	200	1.126.239.783	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	200	865.124.660	500	647.848.686	500	670.526.342	500	636.610.335	500	663.021.978	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	500	2.841.762.535	500	2.284.234.218	500	2.378.787.837	500	2.477.367.696	500	2.580.148.551	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	1.500	918.120.500	500	405.789.657	500	422.586.918	500	440.099.433	500	458.358.246	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	2.000	1.112.547.326	500	1.539.431.151	500	1.603.154.382	500	1.658.284.976	500	1.738.858.920	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	300	624.656.478	300	751.284.324	300	782.382.996	300	814.805.898	300	848.610.507	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	50	378.367.648	20	751.320.824	20	726.730.293	20	756.846.879	20	788.246.889	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	2.000	1.324.492.260	500	578.880.459	500	602.842.641	500	627.825.174	500	653.872.341	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	100	748.332.060	100	3.515.442.837	100	3.660.961.119	100	3.812.675.796	100	3.970.855.818	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	630	726.515.648	630	1.384.724.769	630	1.442.044.083	630	1.501.804.140	630	1.564.110.885	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	100	1.024.000.000	100	516.103.702	100	464.279.895	100	483.520.218	100	503.580.471	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	10	164.941.820	10	424.921.550	10	362.540.739	10	377.564.868	10	393.229.251	3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	-		0,53		0,53		0,53		0,53		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				11.515.069.859		3.275.881.023		3.401.134.378		3.531.721.214		3.667.873.031	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Dinas Kehutanan)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	10.104	544.821	5.361.610.000	903.227	1.375.881.023	1.007.608	1.501.134.378	1.200.795	1.631.721.214	1.201.398	1.767.873.031	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	65,037		65,118		65,200		65,282		65,364		3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	410.970.000	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0020 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	505.789.706	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0021 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	706.078.685	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	454.641.660	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	310.793.720	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	245.136.660	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	317.284.010	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	302.716.340	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	321.038.661	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	338.343.800	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0017 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	46.480.000	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0016 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	262.277.280	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	240.139.760	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	310.531.580	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	199.744.520	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	258.033.700	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0018 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	391.361.120	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	223.598.657	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	64,955	64,959	308.500.000	64,962	100.000.000	64,966	100.000.000	64,970	100.000.000	64,974	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0019 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				107.285.319.000		36.549.585.000		38.877.064.000		40.270.917.000		43.934.463.000	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.961.715.559		27.149.585.000		28.677.064.000		30.070.917.000		32.034.463.000	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,05	89,12	27.961.715.559	90,00	27.149.585.000	91,00	28.677.064.000	92,00	30.070.917.000	93,00	32.034.463.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				1.232.885.350		500.000.000		750.000.000		750.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (M3)	12.939.254,38	12.939.254,38	1.232.885.350	12.939.254,38	500.000.000	12.939.254,38	750.000.000	12.939.254,38	750.000.000	12.939.254,38	1.000.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Km²)	2.307	3.197,08		3.795,1		4.358,78		4.850,65		4.966,44		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				1.075.884.000		1.000.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Rekomendasi)	0	4	1.075.884.000	4	1.000.000.000	4	1.300.000.000	8	1.300.000.000	8	2.000.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Ha)	0	20		20		20		40		40		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				47.549.390.215		3.600.000.000		3.850.000.000		3.850.000.000		4.400.000.000	
Meningkatnya penggunaan energi bersih	Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)	6.994.832,59	9.388.542,39	300.000.000	11.754.895,55	300.000.000	14.268.436,97	300.000.000	16.936.345,38	300.000.000	19.766.114,34	500.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (%)	0,3788	0,4996	47.249.390.215	0,5070	3.300.000.000	0,5107	3.550.000.000	0,5143	3.550.000.000	0,5180	3.900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12,14	15,73		19,06		22,39		25,72		29,05		3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				29.465.443.876		4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		4.500.000.000	
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	96,17	97,06	29.465.443.876	97,48	4.300.000.000	97,88	4.300.000.000	98,26	4.300.000.000	98,63	4.500.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22.438.280.228		8.818.930.200		13.084.876.710		13.267.658.946		16.240.364.972	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.271.983.447		1.318.930.200		1.384.876.710		1.454.120.546		1.526.826.572	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,9	1.271.983.447	89	1.318.930.200	89,05	1.384.876.710	89,1	1.454.120.546	89,15	1.526.826.572	3.31.3.30.2.17.01.0002 - UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.2.17.01.0002 - UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				300.000.000		500.000.000		700.000.000		700.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	300.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	1.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				17.200.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.113.538.400		1.413.538.400	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	21,4	57,1	17.200.000.000	71,4	800.000.000	85,7	1.000.000.000	92,84	1.113.538.400	100	1.413.538.400	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				600.000.000		1.200.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	600.000.000	1,06	1.200.000.000	1,06	2.500.000.000	1,06	2.500.000.000	1,06	3.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				599.925.820		1.700.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya produk dan negara tujuan ekspor	Negara Tujuan Produk Ekspor (Negara)	11	12	599.925.820	13	1.700.000.000	15	3.200.000.000	17	3.200.000.000	20	3.500.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Produk yang Masuk Pasar Ekspor (Produk)	17	19		22		24		28		33		3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				2.267.379.537		2.700.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.800.000.000	
Meningkatnya tertib niaga	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	1.683.268.000	100	1.200.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan (%)	7	8	584.111.537	8,5	1.500.000.000	9	2.000.000.000	9,5	2.000.000.000	10	2.800.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0002 - UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				198.991.424		600.000.000		800.000.000		800.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	75	80	198.991.424	83,3	600.000.000	86,6	800.000.000	91,6	800.000.000	100	1.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				20.089.724.069		24.484.234.843		26.672.658.327		59.192.658.327		63.621.189.993	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				19.339.880.969		23.100.000.000		24.872.658.327		57.392.658.327		61.421.189.993	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri (%)	37,81	40,81	19.339.880.969	42,31	23.100.000.000	43,81	24.872.658.327	45,31	57.392.658.327	46,81	61.421.189.993	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				399.957.342		820.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	100	100	399.957.342	100	820.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.200.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				349.885.758		564.234.843		800.000.000		800.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	41,42	61,42	349.885.758	71,42	564.234.843	81,42	800.000.000	91,42	800.000.000	100	1.000.000.000	3.31.3.30.2.17.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				312.961.474		500.000.000		1.154.638.917		1.183.224.310		1.419.869.173	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				200.000.000		200.000.000		461.855.567		473.289.724		567.947.669	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan (Kawasan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	461.855.567	1	473.289.724	1	567.947.669	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				54.200.000		200.000.000		461.855.567		473.289.724		567.947.669	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	70	70	54.200.000	75	200.000.000	75	461.855.567	80	473.289.724	80	567.947.669	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				58.761.474		100.000.000		230.927.783		236.644.862		283.973.835	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	58.761.474	100	100.000.000	100	230.927.783	100	236.644.862	100	283.973.835	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				2.203.149.456.793		2.329.750.129.000		2.499.641.905.000		2.551.323.702.000		2.702.881.296.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				390.070.662.364		383.206.286.698		387.495.781.280		389.786.747.505		397.184.600.722	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	86	87	360.448.340.000	87,50	360.964.588.000	88	363.165.457.000	88,50	365.359.961.000	89	367.593.244.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95	95	21.418.239.000	95	18.426.357.000	95	20.256.209.000	95,5	20.269.632.000	96	24.281.276.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	81		81,50		82		82,50		83		4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	77	88	886.478.489	89	186.853.000	90	196.197.000	91	206.006.000	92	216.305.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	87	1.337.161.880	88	892.211.800	89	972.467.080	90	981.882.080	90	1.819.028.461	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	85	1.376.265.139	85	568.762.432	90	597.200.702	90	627.061.593	95	658.414.186	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89	89	436.775.838	89	436.776.161	89	436.775.718	89,5	436.775.718	89,5	436.775.718	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,62	86	1.327.927.000	87	411.579.828	88	432.159.210	89	453.767.210	90	476.455.052	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	83	1.000.182.496	84	80.457.277	85	84.480.470	86	88.704.004	87	93.139.405	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85	1.839.292.522	86	1.238.701.200	86	1.354.835.100	87	1.362.957.900	87	1.609.962.900	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				3.456.983.511		2.948.522.000		3.193.373.000		3.193.373.000		3.732.050.000	
Meningkatnya Hasil Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi (%)	65,96	63	1.744.304.631	67	1.316.174.000	68	1.397.791.000	70	1.397.791.000	75	1.577.350.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) (%)	78,38	82,00	641.174.330	83,00	816.174.000	84,00	897.791.000	85,00	897.791.000	85,00	1.077.350.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) (%)	82	86	1.071.504.550	88	816.174.000	90	897.791.000	92	897.791.000	95	1.077.350.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				7.689.042.120		5.138.537.200		5.652.390.920		5.652.390.920		8.612.442.539	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan (%)	n/a	100	149.150.000	100	149.150.000	100	164.065.000	100	164.065.000	100	300.000.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan (%)	n/a	100	2.538.052.120	100	1.451.722.200	100	1.596.894.420	100	1.596.894.420	100	2.927.289.340	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan (%)	100	100	701.475.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah (%)	n/a	100	3.100.365.000	100	1.717.665.000	100	1.889.431.500	100	1.889.431.500	100	3.242.131.500	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kerja Sama	Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti (%)	100	100	1.200.000.000	100	1.320.000.000	100	1.452.000.000	100	1.452.000.000	100	1.493.021.699	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				1.771.595.278.861		1.920.731.512.568		2.084.452.717.298		2.133.818.524.407		2.272.036.469.814	
Meningkatnya kapasitas lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan	Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra (Orang)	n/a	5.715	138.185.860.000	5.915	343.102.020.269	6.015	443.051.222.296	6.115	620.563.457.196	6.495	686.377.724.730	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra (Orang)	n/a	198.900	1.631.809.418.861	202.390	1.576.329.492.299	209.028	1.639.851.495.002	214.685	1.511.455.067.211	223.553	1.583.508.745.084	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi (%)	100	100	1.600.000.000	100	1.300.000.000	100	1.550.000.000	100	1.800.000.000	100	2.150.000.000	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3.514.711.162		3.018.168.839		3.357.882.282		3.363.952.282		4.104.978.282	
Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum yang dihasilkan, dan penyelesaian masalah hukum	Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum (%)	100	100	3.514.711.162	100	3.018.168.839	100	3.357.882.282	100	3.363.952.282	100	4.104.978.282	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan (%)	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.283.296.504		2.706.852.723		2.977.537.530		2.977.537.996		3.573.045.595	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi (%)	0	100	1.251.740.615	100	1.353.426.361	100	1.488.768.532	100	1.488.768.998	100	1.786.522.797	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi (%)	n/a	100	410.939.483	100	676.713.181	100	744.384.499	100	744.384.499	100	893.261.399	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro)	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi (%)	0	100	620.616.406	100	676.713.181	100	744.384.499	100	744.384.499	100	893.261.399	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				4.265.152.478		2.890.302.800		3.161.281.900		3.180.235.100		3.756.580.100	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	3	3	4.265.152.478	3	2.890.302.800	3	3.161.281.900	3	3.180.235.100	3	3.756.580.100	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				20.274.329.793		9.109.946.172		9.350.940.790		9.350.940.790		9.881.128.948	
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah (%)	80	86	750.000.000	87	803.946.172	88	883.646.930	89	883.646.930	90	1.060.376.316	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan (%)	n/a	85	18.124.329.793	86	7.503.000.000	87	7.583.646.930	87	7.583.646.930	88	7.760.376.316	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	n/a	85	1.400.000.000	86	803.000.000	87	883.646.930	87	883.646.930	88	1.060.376.316	4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				375.000.000.000		455.998.713.000		495.299.936.000		501.913.516.000		581.463.441.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				199.809.924.551		245.717.588.450		269.018.811.450		273.132.391.450		319.115.389.338	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	89	199.809.924.551	91	245.717.588.450	93	269.018.811.450	94	273.132.391.450	95	319.115.389.338	4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				175.190.075.449		210.281.124.550		226.281.124.550		228.781.124.550		262.348.051.662	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	n/a	100	108.899.182.544	100	142.962.490.737	100	157.962.490.737	100	159.962.490.737	100	186.885.976.130	4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	n/a	70		70		70		70		70		4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	n/a	80	66.290.892.905	80	67.318.633.813	80	68.318.633.813	80	68.818.633.813	80	75.462.075.532	4.02.0.00.0.00.04.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				53.751.238.000		47.078.815.000		49.740.014.000		51.826.031.000		55.500.283.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.908.920.945		40.233.815.000		42.525.014.000		44.611.031.000		47.000.283.000	
Meningkatnya kinerja layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80	97,6	42.908.920.945	97,75	40.233.815.000	97,83	42.525.014.000	97,9	44.611.031.000	98,05	47.000.283.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.256.000.000		3.100.000.000		3.320.000.000		3.320.000.000		3.800.000.000	
Meningkatnya keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	94,20	100	4.256.000.000	100	3.100.000.000	100	3.320.000.000	100	3.320.000.000	100	3.800.000.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP (%)	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6.586.317.055		3.745.000.000		3.895.000.000		3.895.000.000		4.700.000.000	
Meningkatnya keselarasan rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	100	100	6.586.317.055	100	3.745.000.000	100	3.895.000.000	100	3.895.000.000	100	4.700.000.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN				7.540.740.262.064		6.103.548.925.000		6.371.043.996.000		6.406.412.226.000		6.762.204.898.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				241.326.569.666		189.581.466.493		198.027.451.350		205.252.851.688		216.035.643.501	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81,4	81,5	127.388.114.539	82	102.214.295.606	82,5	106.547.410.427	83	109.971.128.988	83,5	115.747.270.420	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (BPKAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	92,11	92,13	65.299.625.733	92,14	48.342.975.950	92,15	50.801.514.600	92,16	53.296.061.600	92,16	56.097.450.300	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82,95	83	4.360.230.000	84	3.502.714.565	85	3.651.203.231	86	3.768.528.394	87	3.966.467.191	5.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Penajam Paser Utara)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	79,92	80	4.267.414.000	81	3.417.971.471	82	3.562.867.669	83	3.677.354.320	84	3.870.504.275	5.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80,78	81,03	8.613.589.932	81,28	6.906.562.188	81,53	7.199.348.307	81,78	7.430.687.035	82,03	7.820.977.648	5.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72,14	73	5.671.194.957	74	4.547.879.395	75	4.740.675.163	76	4.893.008.641	77	5.150.009.821	5.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84,58	85	4.220.865.936	86	3.389.723.773	87	3.533.422.482	88	3.646.962.962	89	3.838.516.637	5.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutai Kartanegara)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	76,34	77	7.758.328.208	79	6.228.617.433	81	6.492.663.811	83	6.701.294.443	85	7.053.274.320	5.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutai Timur)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	82,82	83,34	4.550.083.646	86,12	3.643.953.056	88,66	3.798.429.168	91,46	3.920.485.184	94,26	4.126.405.385	5.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutai Barat)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84,5	85	4.729.755.664	86	3.799.315.396	87	3.960.377.699	88	4.087.637.653	89	4.302.337.397	5.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89,75	90	4.467.367.051	91	3.587.457.660	92	3.739.538.793	93	3.859.702.468	94	4.062.430.107	5.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				7.264.631.142.067		5.892.677.785.043		6.150.720.875.082		6.178.210.761.156		6.521.723.899.015	
Meningkatnya Penerimaan Lain-lain dan Kualitas Pengelolaan dana transfer untuk Mendukung Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan lain - lain dan pendapatan transfer (%)	106,59	100	1.796.674.000	100	1.443.360.393	100	1.504.547.982	100	1.552.894.056	100	1.634.458.515	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akutanbel	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	92,19	93	7.262.834.468.067	93	5.891.234.424.650	93	6.149.216.327.100	93	6.176.657.867.100	93	6.520.089.440.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				10.486.851.931		1.796.199.400		1.975.819.300		1.975.819.300		2.370.983.200	
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Profesional dan Akutanbel	Indeks pengelolaan barang milik daerah (Indeks)	2,26	2,40	10.486.851.931	2,47	1.796.199.400	2,54	1.975.819.300	2,61	1.975.819.300	2,68	2.370.983.200	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				24.295.698.400		19.493.474.064		20.319.850.268		20.972.793.856		22.074.372.284	
Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	46,32	51,94	15.493.012.400	52,99	12.430.704.005	52,65	12.957.672.053	52,13	13.374.044.653	51,37	14.076.505.145	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Balikpapan	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	98,08	100	864.470.000	100	693.601.116	100	723.004.569	100	746.237.083	100	785.432.561	5.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Bontang	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	103,29	100	811.425.000	100	651.040.852	100	678.640.072	100	700.447.008	100	737.237.400	5.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	105,72	100	1.326.860.000	100	1.064.596.315	100	1.109.727.166	100	1.145.386.348	100	1.205.546.806	5.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Samarinda	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	97,80	100	2.013.735.000	100	1.615.705.396	100	1.684.199.112	100	1.738.317.966	100	1.829.621.661	5.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Kutai Timur	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	125,61	100	656.334.000	100	526.604.735	100	548.928.802	100	566.567.688	100	596.326.182	5.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Kutai Barat	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	113,47	100	798.883.000	100	640.977.871	100	668.150.496	100	689.620.368	100	725.842.100	5.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Paser	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	94,80	100	799.470.000	100	641.448.846	100	668.641.437	100	690.127.085	100	726.375.432	5.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	117,70	100	777.499.000	100	623.820.577	100	650.265.862	100	671.161.042	100	706.413.213	5.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB PAP dan PAB UPTD PPRD Berau	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB (%)	101,32	100	754.010.000	100	604.974.351	100	630.620.699	100	650.884.615	100	685.071.784	5.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5.03 - KEPEGAWAIAN				41.962.538.062		35.662.075.000		37.683.079.000		39.305.542.000		42.055.892.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.044.952.088		28.630.412.395		30.309.596.290		31.657.645.942		33.942.818.767	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,03	98,05	29.281.814.210	98,06	27.075.469.676	98,07	28.609.862.516	98,08	29.841.673.838	98,09	31.929.802.977	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95,53	95,55	2.763.137.878	95,56	1.554.942.719	95,57	1.699.733.774	95,58	1.815.972.104	95,59	2.013.015.790	5.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		5.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.917.585.974		7.031.662.605		7.373.482.710		7.647.896.058		8.113.073.233	
Meningkatnya pengelolaan pegawai berbasis kompetensi	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya (%)	56,01	74,00	399.999.462	80,00	1.369.860.556	84,99	1.390.820.909	90,00	1.407.647.890	94,99	1.436.172.478	5.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
Terpenuhinya Kebutuhan ASN	Persentase Pemenuhan ASN sesuai perencanaan (%)	60,87	89,21	1.446.053.396	89,42	1.337.120.199	89,63	1.412.896.083	89,84	1.473.729.000	90,05	1.576.851.114	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	86,54	88,13	7.036.944.588	88,47	3.368.037.595	89,09	3.558.907.516	89,99	3.712.137.982	92,15	3.971.889.615	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	94,23	94,29	655.988.889	94,32	606.571.101	94,35	640.946.067	94,38	668.542.307	94,40	715.322.614	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	97,29	97,43	378.599.639	97,50	350.073.154	97,57	369.912.135	97,64	385.838.879	97,71	412.837.412	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				70.100.466.469		68.729.461.000		68.410.531.000		71.839.970.000		75.784.653.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				36.565.917.645		36.270.561.734		36.102.252.975		37.912.068.987		39.993.794.438	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	86	36.565.917.645	88	36.270.561.734	90	36.102.252.975	91	37.912.068.987	92	39.993.794.438	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88	89		90		91		92		93		5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				33.534.548.824		32.458.899.266		32.308.278.025		33.927.901.013		35.790.858.562	
Meningkatnya kompetensi teknis ASN	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis (Orang)	1.490	1.410	10.934.548.824	1.440	10.976.845.681	1.470	11.154.261.641	1.500	11.581.586.876	1.530	12.908.803.869	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan ASN	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan (Orang)	7.153	12.000	15.700.000.000	12.050	16.319.310.739	12.060	16.230.752.939	12.070	16.283.939.897	12.080	16.973.054.703	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya ASN yang kompeten	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi (Orang)	130	400	6.900.000.000	420	5.162.742.846	450	4.923.263.445	470	6.062.374.240	490	5.908.999.990	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				24.364.052.000		22.833.791.000		24.098.944.000		25.168.082.000		26.833.914.000	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.085.497.408		20.364.527.610		21.382.754.271		22.451.892.271		23.574.486.326	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	19.085.497.408	78	20.364.527.610	78,5	21.382.754.271	79	22.451.892.271	79,5	23.574.486.326	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5.078.554.592		1.469.263.390		1.516.189.729		1.516.189.729		1.759.427.674	
Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah (%)	70	75,76	5.078.554.592	78,79	1.469.263.390	81,82	1.516.189.729	84,85	1.516.189.729	87,88	1.759.427.674	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub (%)	70	75,76		78,79		81,82		84,85		87,88		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI) (%)	n/a	75,76		78,79		81,82		84,85		87,88		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				200.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan secara berkelanjutan	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) (%)	n/a	52,94	200.000.000	64,71	1.000.000.000	76,47	1.200.000.000	88,24	1.200.000.000	94,12	1.500.000.000	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi (%)	n/a	45,71		51,43		57,14		62,86		68,57		5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				18.393.496.000		16.622.218.000		17.519.282.000		18.322.698.000		19.456.477.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.273.496.000		15.678.160.436		16.448.318.680		17.246.734.680		18.090.321.016	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	104,72	74,34	17.273.496.000	74,76	15.678.160.436	75,17	16.448.318.680	75,59	17.246.734.680	76	18.090.321.016	5.06.5.07.0.00.05.0000 - Badan Penghubung Provinsi
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	0	100		100		100		100		100		5.06.5.07.0.00.05.0000 - Badan Penghubung Provinsi
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				1.120.000.000		944.057.564		1.070.963.320		1.075.963.320		1.366.155.984	
Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung	Persentase kerja sama antar lembaga yang difasilitasi (%)	100	100	1.120.000.000	100	944.057.564	100	1.070.963.320	100	1.075.963.320	100	1.366.155.984	5.06.5.07.0.00.05.0000 - Badan Penghubung Provinsi
	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya, dan media digital (%)	100	100		100		100		100		100		5.06.5.07.0.00.05.0000 - Badan Penghubung Provinsi
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat (%)	10,80	0,26		0,31		0,36		0,41		0,45		5.06.5.07.0.00.05.0000 - Badan Penghubung Provinsi
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				85.279.257.552		84.904.803.000		84.504.569.000		87.498.450.000		91.141.478.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				67.430.828.475		76.027.383.170		75.661.733.517		78.396.912.316		81.725.145.120	
Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	67.430.828.475	100	76.027.383.170	100	75.661.733.517	100	78.396.912.316	100	81.725.145.120	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				15.019.916.378		6.513.655.294		6.484.757.771		6.700.920.677		6.963.953.014	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Jumlah Kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan (Kasus)	814	790	15.019.916.378	780	6.513.655.294	770	6.484.757.771	760	6.700.920.677	750	6.963.953.014	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.828.512.699		2.363.764.536		2.358.077.712		2.400.617.007		2.452.379.866	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi (%)	75	90	2.828.512.699	95	2.363.764.536	100	2.358.077.712	100	2.400.617.007	100	2.452.379.866	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				155.160.386.000		34.033.121.000		115.002.414.000		235.708.059.000		37.102.936.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.139.316.522		15.296.312.278		15.296.312.276		15.296.312.275		15.296.312.278	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	15.139.316.522	100	15.296.312.278	100	15.296.312.276	100	15.296.312.275	100	15.296.312.278	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	78,84	84,25		84,83		85,15		85,48		85,80		8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				4.292.461.704		1.647.552.576		2.089.063.244		2.410.482.871		3.045.846.041	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat dalam pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	83,33	100	4.292.461.704	100	1.647.552.576	100	2.089.063.244	100	2.410.482.871	100	3.045.846.041	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				122.842.148.590		10.215.388.683		90.375.002.407		210.491.201.148		10.720.895.897	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	1,16	1,00	122.842.148.590	1,00	10.215.388.683	1,00	90.375.002.407	1,48	210.491.201.148	1,62	10.720.895.897	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				3.600.889.923		281.579.283		357.036.818		411.969.881		520.558.286	
Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi masyarakat (%)	77,04	79	3.600.889.923	80	281.579.283	81	357.036.818	82	411.969.881	85	520.558.286	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.224.576.613		597.153.406		757.178.405		873.676.554		1.103.963.154	
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari terjaganya keharmonisan, toleransi, dan stabilitas sosial di daerah	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur (Indeks)	6,85	6,89	1.224.576.613	6,91	597.153.406	6,93	757.178.405	6,95	873.676.554	6,97	1.103.963.154	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				8.060.992.648		5.995.134.774		6.127.820.850		6.224.416.271		6.415.360.344	
Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat tentang manajemen konflik sosial dan kewaspadaan dini	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	8.060.992.648	100	5.995.134.774	100	6.127.820.850	100	6.224.416.271	100	6.415.360.344	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				**21.350.000.000.000**		**20.248.000.000.000**		**20.860.000.000.000**		**21.570.193.000.000**		**22.417.210.000.000**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Gubernur/Wakil Gubernur serta keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 5 tahun kedepan. Khusus untuk IKU dan IKD Tahun 2030, merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Gubernur/Wakil Gubernur periode berikutnya.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja puncak pada tingkatan dampak (*impact*) atau *ultimate outcome* sebagai gambaran utama keberhasilan kinerja Gubernur/Wakil Gubernur. IKU terdiri dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pembangunan yang terseleksi. Adapun IKU RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 beserta target kinerja per-tahunnya disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**INDIKATOR KINERJA TUJUAN**									
1	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional	%	3,90	3,95	4,00	4,20	4,40	4,60	4,75	
2	Indeks Modal Manusia	indeks	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	85,16	85,84	86,53	87,22	87,92	88,63	89,34	
II.	**INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS**									
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,30	7,00	7,85	8,15	8,60	8,65	
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	18,26	18,32	18,84	19,04	19,12	19,19	19,60	
6	Tingkat Inflasi	%	1,47	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	
7	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,37	3,40	3,44	3,49	3,53	3,57	3,61	
8	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	4,24–5,05	3,50-4,30	3,12-3,99	2,75-3,68	2,37-3,37	2,35-3,30	
9	Indeks Gini	indeks	0,321	0,310–0,321	0,309-0,318	0,308-0,315	0,307–0,313	0,306 - 0,310	0,304–0,308	
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	5,92	6,17	6,71	6,96	7,21	7,39	7,52	
11	Indonesia *Blue Economy Index*	indeks	31,30	32,92	38,81	44,69	50,58	56,46	62,35	
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	indeks	63,04*	63,44	63,84	64,25	64,65	65,05	65,45	
13	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	78,61	79,69	80,47	80,69	81,46	81,69	82,46	
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	76,63	80,20	80,36	80,83	81,15	81,46	81,78	
15	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	75,55	40,82	55,05	60,80	65,90	67,46	72,63	
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,80	14,50	14,50-15,19	15,19-15,89	15,89-16,58	16,58-17,28	17,28-17,97	

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	PDRB Per Kapita	Juta Rp	212,18	218,10	227,21	260,44	293,67	326,90	328,00	
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,41–4,97	4,27–4,87	4,14–4,77	3,95–4,68	
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	78,19	78,49-78,50	78,86-78,90	79,23-79,29	79,60-79,69	79,97-80,08	80,43-80,56	
20	Indeks Inovasi Daerah	indeks	61,74	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52	
21	Indeks Pelayanan Publik	indeks	3,75	4,06	4,10	4,13	4,17	4,20	4,26	

*Ket : *) Data Tahun 2023; Sumber: Hasil proyeksi, 2025*

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk masing-masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. IKD mengakomodir seluruh indikator yang diamanatkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang disajikan ke dalam aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. IKD juga mengakomodir pelaksanaan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Selain itu, IKD juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator-indikator tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Adapun IKD RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 beserta target kinerja per-tahunnya disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	78,61	79,69	80,47	80,69	81,46	81,69	82,46	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	7,40	6,58	5,79	5,42	5,18	4,74	4,21	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679	1,861	2,043	2,225	2,407	2,589	2,771	
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	100,94	168	165,75	163,50	161,25	159,00	156,75	
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83,71	84,76	85,81	86,86	87,90	88,95	90,00	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	76,63	80,20	80,36	80,83	81,15	81,46	81,78	
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	2,40	3,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	9,70	12,50	16,00	19,50	23,00	26,50	30,00	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,77	18,00	18,75	22,50	26,25	30,00	33,75	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	78,75**	79,76	80,77	81,79	82,80	85,00	85,42	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)									
	a. Kumulatif	%	36,04	14,79	14,97	16,29	17,77	19,74	20,60	
	b. Tahunan	%	49,19	27,53	31,48	37,43	42,95	42,87	48,62	
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	75,55	40,82	55,05	60,80	65,90	67,46	72,63	
13	Indeks Risiko Bencana	indeks	136,11	131,64–136,11	127,17–131,64	122,70–127,17	118,23–122,70	113,76–114,56	108,83–113,76	
14	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	2,15	2,54	2,78	2,91	2,98	2,99	
16	Rasio Penduduk	%	107,27	106,84	106,46	106,09	105,76	105,44	105,11	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32	34,29	35,98	37,58	39,08	40,48	41,88	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,30	7,00	7,85	8,15	8,60	8,65	
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	4,24–5,05	3,50-4,30	3,12-3,99	2,75-3,68	2,37-3,37	2,35-3,30	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212,18	218,10	227,21	260,44	293,67	326,90	328,00	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,41-4,97	4,27-4,87	4,14-4,77	3,95-4,68	
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	55,33	58	59,6	61,2	62,8	64,4	66	
6	Indeks Gini	indeks	0,321	0,310–0,321	0,309-0,318	0,308-0,315	0,307–0,313	0,306 - 0,310	0,304–0,308	
7	Indeks Modal Manusia	indeks	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	
8	Umur Harapan Hidup	tahun	74,94	74,99	75,04	75,08	75,13	75,18	75,25	
9	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*	0,302	0,318	0,336	0,355	0,375	0,396	
10	Prevalensi Stunting	%	22,20	19,8	18,4	17,2	16	14,8	13,9	
11	Angka Literasi/Numerasi Hasil Pembelajaran:									
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	1) Literasi Membaca	%	50,00	50,00 - 50,00	55,00 - 55,00	60,00 - 60,00	65,00 - 65,00	70,00 - 70,00	75,00 - 75,00	
	2) Numerasi	%	0	0,00 - 10,00	2,50 - 12,50	5,00 - 15,00	7,50 - 17,50	10,00 - 20,00	12,50 - 22,50	
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	1) Literasi Membaca	%	57,83	60,14 - 62,64	62,64 - 63,47	63,47 - 64,31	64,31 - 65,14	65,14 - 67,64	67,64 - 68,35	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2) Numerasi	%	43,53	44,96 - 47,46	47,46 - 47,83	47,83 - 48,19	48,19 - 48,56	48,56 - 51,06	51,06 - 51,26	
12	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,02	10,34-10,35	10,35-10,53	10,53-10,70	10,70-10,88	10,88-11,50	11,50-13,00	
13	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,03	14,15-14,18	14,18-14,26	14,26-14,33	14,33-14,41	14,41-14,85	14,85-15,00	
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	79,00	79,25	79,50	79,75	80,00	80,25	
15	Indeks Literasi Digital	indeks	3,62*	3,73	3,79	3,85	3,91	3,97	4,03	
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,54	78,93	80,19	81,45	82,7	83,96	90,51	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	78,19	78,49-78,50	78,86-78,90	79,23-79,29	79,60-79,69	79,97-80,08	80,43-80,56	
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,56*	58,80-58,84	59,36-59,42	59,92-60,00	60,48-60,59	61,04-61,17	61,62-61,77	
19	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,04*	66,09	68,15	70,20	71,49	72,86	74,22	
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	65,5	67,2	68,9	70,6	72,3	74	74,8	
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	74,32	77,46	78,33	78,89	79,45	79,96	80,52	
22	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,45	87,47	87,48	87,50	87,51	87,60	87,65	
23	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,441	0,396	0,387	0,378	0,368	0,359	0,351	
24	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*	62,45	63,09	63,73	64,37	65,01	65,64	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	%	41,16	40,17	39,57	39,28	39,23	39,35	39,58	
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	n/a	71,37	72,67	73,97	75,27	76,75	77,87	
3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	7,30	40	42,5	45	47,5	50	52,5	
	a) Jumlah penyandang disabilitas yang	Orang	94	44	300	700	1.000	1.200	1.500	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan									
	b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	6	7	8	9	9	10	11	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,26	18,32	18,84	19,04	19,12	19,19	19,60	
	a) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,38	3,08	2,47	2,72	3,06	3,23	3,37	
5	Nilai Tukar Petani	%	137,94	139,41	140,82	142,25	143,68	145,13	146,60	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,12	1,18	1,24	1,30	1,36	1,43	1,5	
7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	2,87	3,66	3,70	3,74	3,78	3,83	3,88	
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	55,00	55,80	56,65	57,55	58,50	59,50	60,55	
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%	4,92	5,06	5,20	5,34	5,48	5,62	5,76	
10	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	4,69	13,07	13,37	13,68	13,98	14,28	14,58	
11	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	3,79	4,06	4,33	4,60	4,87	5,14	5,41	
12	Rasio Kewirausahaan	%	3,61	3,84	3,92	4,00	4,07	4,15	4,46	
13	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,40	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,66	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,38	1,48	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	68,57	70,07	71,57	73,07	74,57	76,07	
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	49,07	49,65-50,83	50,20-51,26	50,75-51,69	51,30-52,11	51,86-52,54	52,41-52,97	
17	Indeks Inovasi Daerah	indeks	61,74	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52	
18	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	63,04*	63,44	63,84	64,25	64,65	65,05	65,45	
19	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	indeks	31,30	32,92	38,81	44,69	50,58	56,46	62,35	
20	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,14	12,40	15,73	19,06	22,39	25,72	29,05	
21	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	6,66*	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,2	
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,72	35,72-35,93	35,93-36,03	36,03-36,09	36,09-36,17	36,17-36,46	36,46–37,12	
23	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40,44	48,84-49,07	49,07-50,18	50,18-51,28	51,28-52,39	52,39-53,32	53,32-54,44	
24	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	5,92	6,17	6,71	6,96	7,21	7,39	7,52	
25	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi	%	37,36	24,00	24,53	25,06	25,58	26,11	26,64	
26	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,77	80,64	81,85	83,06	84,27	85,48	86,96	
27	Persentase Desa Mandiri	%	31,15	25,68	26,4	27,35	28,42	29,01	29,57	
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	1,76	
29	Tingkat Inflasi	%	1,47	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	
30	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	%	n/a	10,6	10,45	10,3	10,15	10	9,85	
31	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	19,74	22,64	25,54	28,44	31,34	34,24	36,73	
32	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,26	0,58	0,91	1,23	1,56	1,88	1,94	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	Nilai transaksi saham per kapita per provinsi	Rupiah	4.497.142,76	4.908.940,82	5.320.738,88	5.732.536,93	6.144.334,99	6.556.133,05	6.737.715,88	
34	Total Kredit/PDRB	%	11,30	14,20	17,10	20,00	22,90	25,80	27,16	
35	Inklusi Keuangan	%	93,25**	98,43	98,52	98,1	98,7	98,79	98,88	
36	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	27.481	24.983	25.061	25.138	25.197	25.229	25.261	
37	Indeks Zakat	indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	
38	Aset Perbankan Syariah per PDRB	%	1,75	1,81	2,04	2,22	2,54	2,80	3,33	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	indeks	97,08	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,79	3,85	3,91	3,97	4,03	4,09	4,15	
3	Indeks Pemerintah Digital	indeks	n/a	n/a	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	
4	Indeks Pelayanan Publik	indeks	3,75	4,06	4,10	4,13	4,17	4,2	4,26	
5	Indeks Integritas Nasional	indeks	72,75	75,84	76,62	77,4	78,17	78,95	79,96	
6	Persentase Penegakan Perda	%	65	70	71	72	73	74	75	
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,3	65,4	66,6	67,7	68,9	70	71,2	
8	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	80,69	80,71-83,21	80,73-83,23	80,75-83,25	80,77-83,77	80,79-83,79	80,81-83,81	
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	58,95*	63,50	64,40	65,30	66,10	67,00	67,90	
10	Indeks Rasa Aman	indeks	58	60	62	65	70	72	75	
11	Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas	indeks	50	51,01	52,22	60	62,01	65	70	
12	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah	dokumen	44	15	16	18	19	20	21	
13	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,37	3,40	3,44	3,49	3,53	3,57	3,61	
14	Nilai AKIP	nilai	78,74	79,19	79,78	80,36	80,95	81,54	82,13	
15	Nilai Sistem Merit	skor	271*	279	286	294	301	309	316	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Indeks Pengelolaan Aset	indeks	2,26	2,26–2,33	2,33–2,40	2,40–2,47	2,47–2,54	2,54–2,61	2,61–2,69	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	**PENDIDIKAN**									
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	81,84	82,2	82,57	82,93	83,29	83,66	84,02	
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	53,75	62,55	71,34	72,43	73,52	74,61	75,70	
3	Kemampuan literasi SMA	Nilai	77,3	77,9	78,5	79,1	79,7	80,3	80,9	
4	Kemampuan numerasi SMA	Nilai	63,83	65,43	67,03	68,63	70,23	71,83	73,43	
5	Indeks iklim keamanan SMA	Nilai	73,05	83,64	84,84	86,04	87,24	88,44	89,64	
6	Indeks iklim kebinekaan SMA	Nilai	72,88	73,88	74,88	75,88	76,88	77,88	78,88	
7	Indeks iklim inkusivitas SMA	Nilai	61,58	63,08	64,58	66,08	67,58	69,08	70,58	
8	Kemampuan literasi SMK	Nilai	72,38	73,68	74,98	76,28	77,58	78,88	80,18	
9	Kemampuan numerasi SMK	Nilai	60,24	62,44	64,64	66,84	69,04	71,24	73,44	
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	88,2	89,19	90,18	91,17	92,16	93,15	94,14	
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	81,63	82,17	82,71	83,25	83,79	84,33	84,87	
12	Indeks iklim keamanan SMK	Nilai	70,09	71,29	72,49	73,69	74,89	76,09	77,29	
13	Indeks iklim kebinekaan SMK	Nilai	70,09	71,39	72,69	73,99	75,29	76,59	77,89	
14	Indeks iklim inkusivitas SMK	Nilai	58,66	60,96	63,26	65,56	67,86	70,16	72,46	
15	Kemampuan literasi SDLB	Nilai	80,09	81,69	83,29	84,89	86,49	88,09	89,69	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Kemampuan numerasi SDLB	Nilai	74,93	75,53	76,13	76,73	77,33	77,93	78,53	
17	Indeks iklim keamanan SDLB	Nilai	80,54	81,04	81,54	82,04	82,54	83,04	83,54	
18	Indeks iklim kebinekaan SDLB	Nilai	72,46	73,46	74,46	75,46	76,46	77,46	78,46	
19	Indeks iklim inkusivitas SDLB	Nilai	69,54	70,84	72,14	73,44	74,74	76,04	77,34	
20	Kemampuan literasi SMPLB	Nilai	80,88	81,38	81,88	82,38	82,88	83,38	83,88	
21	Kemampuan numerasi SMPLB	Nilai	74,55	74,8	75,05	75,3	75,55	75,8	76,05	
22	Indeks iklim keamanan SMPLB	Nilai	75,43	76,63	77,83	79,03	80,23	81,43	82,63	
23	Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,14	74,94	76,74	78,54	80,34	82,14	83,94	
24	Indeks iklim inkusivitas SMPLB	Nilai	70	71,4	72,8	74,2	75,6	77	78,4	
25	Kemampuan literasi SMALB	Nilai	81,95	82,45	82,95	83,45	83,95	84,45	84,95	
26	Kemampuan numerasi SMALB	Nilai	72,57	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	
27	Indeks iklim keamanan SMALB	Nilai	76,5	77,8	79,1	80,4	81,7	83	84,3	
28	Indeks iklim kebinekaan SMALB	Nilai	77	79	81	83	85	87	89	
29	Indeks iklim inkusivitas SMALB	Nilai	71,08	72,68	74,28	75,88	77,48	79,08	80,68	
30	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	siswa	n/a	181.663	187.914	193.544	199.342	205.320	211.475	
31	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/ MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	siswa	n/a	65.004	135.210	208.896	216.060	223.467	231.126	
B	**KESEHATAN**									

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,83	1,78	1,78	1,78	1,80	1,80	1,80	
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	177	169	150	132	117	104	104	
5	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	18,04	15,87	14,74	13,65	13,01	12,40	12	
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n/a	36	46	55	61	70	80	
7	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	75,38	80	85	90	95	100	100	
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	86,01	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
9	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	1,89	10	20	35	50	60	90	
10	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	57,10	58	60	62	64	66	68	
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)									
	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,80	85	85	85	85	85	85	
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,30	90	90	90	90	90	90	
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100,88	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	kab/kota	n/a	3	3	3	3	3	3	
14	Jumlah Kader pendamping keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	kader	n/a	610	610	610	610	610	610	
15	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a	491.691	492.352	491.691	491.691	491.691	491.691	
16	Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi di luar cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a	1.000	1.400	1.358	1.324	1.298	1.278	
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	2,41	8,59	11,42	13,86	16,47	18,99	22,33	
2	Persentase perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	0,40	7,25	16,08	19,58	23,01	26,45	31,40	
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	29,25	33,26	35,99	38,06	41,68	44,25	47,78	
4	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	%	0,00	0,00	8,62	8,62	15,52	15,52	15,52	
5	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	%	0,00	0,27	0,40	1,00	1,91	2,66	2,81	
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	%	84,23	86,23	88,23	91,23	94,23	97,23	100,00	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	10,80	11,28	12,16	12,77	13,27	13,69	14,12	
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	87,88	88,88	89,88	91,88	93,88	96,88	100	
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	74,47	76,95	79,08	82,98	87,23	90,43	92,91	
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	18,18	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98	
11	Tingkat kemantapan jalan	%	82,21	85,70	89,84	93,62	97,57	100	100	
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	45,00	48,91	51,68	53,91	56,13	58,35	60,57	
13	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	74,76	78,5	79,04	79,60	81,32	82,52	83,16	
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Orang	n/a	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	Persentase Berkurangnya Luasan kawasan kumuh 10 – 15 Ha	%	16,60	28,75	31,43	32,58	34,05	35,19	37,40	
5	Persentase permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	29,02	32,18	33,77	34,42	35,28	36,15	37,01	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
E	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	65,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
F	**SOSIAL**									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,96	58,46	59,26	59,76	60,26	60,76	61,06	
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan	%	45	45	55	65	75	85	100	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA									
4	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A	6,66	24,26	29,01	33,77	38,53	43,29	
6	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	45	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
G	**TENAGA KERJA**									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60	70	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Kapita	288.813.211	297.447.607	306.401.936	315.593.994	325.061.813	334.813.668	344.858.078	
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	27,10	27,60	28,10	28,60	29,00	29,60	30,00	
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	395.844	415.636	436.418	458.238	481.150	505.208	530.468	
5	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101	255.256	268.019	
H	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67	29	30	35	40	45	50	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100	
3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9	10	12	14	16	18	20	
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100	100	100	100	100	
I	**PANGAN**									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	372,73	100	100	100	100	100	100	
2	Skor pola pangan harapan	skor	89,1	89,51	89,95	90,40	90,85	91,31	91,77	
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,81	2,86	1,90	0,95	0	0	0	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,2	82	87	87	87	87	87	
J	**LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	75	75	77	77	80	82	85	
2	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	29,53	30,00	30,10	30,20	30,30	30,40	30,50	
3	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun di luar	Hektar	162.103	186.250	255.429	324.607	393.786	462.964	532.143	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kawasan hutan yang dikelola									
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,91	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	%	69	70	71	72	73	74	75	
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	8,44	9,95	11,37	12,79	14,22	15,64	17,06	
8	Persentase pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53,77	54	55	56,50	59	61,50	64	
K	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	5,6	7	9	11	13	15	17	
2	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
L	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	1,31	2,14	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	10	20	28,57	28,57	42,86	42,86	42,86	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	35	2,97	3,57	4,16	4,76	5,35	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	%	2,73	3,2	3,56	4,16	4,75	5,35	5,94	
M	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	Angka	2,17	2,14	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Spesific Fertility*)/ASFR 15-19	Angka	18,2	17,95	17,78	17,69	17,61	17,61	17,61	
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (*demand satisfied*)	%	77,37	78,28	79,09	79,91	80,75	81,6	82,47	
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)	%	21,91	21	20	19	19	18	17	
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,8	68,25	68,69	69,12	69,54	69,95	70,35	
6	Indeks pengasuhan keluarga remaja	Indeks	90,06	90,57	91,04	91,5	91,93	92,34	92,83	
7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,85	57,98	58,10	58,22	58,35	58,47	58,68	
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,24	22,24	27,24	32,24	37,24	42,24	47,24	
9	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,01	14,51	14,03	13,54	13,05	12,56	12,07	
N	**PERHUBUNGAN**									
1	Rasio Konektivitas Darat	Angka	0,41	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	
2	Persentase perlengkapan jalan terpasang	%	25	30	35	40	45	50	55	
3	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	Angka	0,846	0,846	0,846	0,890	0,923	0,923	0,923	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	%	50,74	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	indeks	45,45	47,00	48,21	51,00	53,00	55,00	57,00	
O	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	82	85	87	89	91	93	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	60	61,50	63	64,50	66	67,50	69	
3	Persentase pengelolaan E-Government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	80	85	90	93	95	100	100	
4	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	desa	n/a	716	841	841	841	841	841	
P	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	44	50	55	70	80	90	100	
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	50	55	60	65	70	75	80	
3	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	n/a	2,77	2,91	3,05	3,18	3,32	3,46	
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	24,5	24,5	28	31,5	35	38,5	42	
5	Persentase koperasi dan UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
Q	**PENANAMAN MODAL**									

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara	Triliun Rp	49,86	53,74	59,65	66,80	75,49	86,06	98,97	
2	Persentase peningkatan investasi	%	2,70	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	
3	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rp	76,33	83,96	93,20	104,38	117,95	134,47	154,64	
R	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Rasio wirausaha pemuda	%	1,02	1,31	1,45	1,50	2,00	2,50	3,00	
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	70	73	75	80	80	85	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
S	**STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	2,68	2,68	2,75	2,75	2,85	2,85	3,00	
T	**PERSANDIAN**									
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks	366	385	403	421	458	495	531	
U	**KEBUDAYAAN**									
1	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	50	-	58	62	66	70	74	
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	45	-	50	53	59	63	68	
3	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	29	-	31	33	36	38	41	
V	**PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	skor	69,53	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	n/a	n/a	80	85	90	95	100	
W	**KEARSIPAN**									
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	74,95	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	76	77	78	79	80	81	82	
X	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,49	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	214.694,0	218.987,9	223.367,8	227.834,9	232.391,7	237.039,5	241.780,3	
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	241.728,4	250.188,9	258.945,5	268.008,6	277.388,9	287.097,5	297.145,9	
4	Luas kawasan konservasi	Ha	327.819,31	327.819,31	328.247,25	355.658,24	355.658,24	355.658,24	390.076,41	
5	Angka konsumsi ikan	Kg/KAP/Th	36,72	36,73	36,75	36,77	36,79	36,81	36,83	
Y	**PARIWISATA**									
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	1,69	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	%	28,06	28,69	29,10	29,74	30,13	30,68	31,09	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	3,55	4,05	5,07	6,08	7,09	8,11	9,12	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	2,83	2,92	1,16	1,16	1,27	1,68	2,38	
Z	**PERTANIAN**									
1	Produktivitas tanaman pangan	Ton/ha	4,88	4,91	4,95	4,96	5,02	5,08	5,14	
2	Produktivitas tanaman hortikultura	Ton/ha	17,32	18,07	18,86	19,69	20,55	21,45	22,38	
3	Rata-rata produktivitas komoditas unggulan Perkebunan	Kg/ha	3.005	3.018	3.031	3.045	3.058	3.072	3.085	
4	Produksi komoditas peternakan	Ton	89.493,54	90.243,30	91.030,14	91.856,19	92.723,76	93.653,28	94.593,37	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	370,3	-2,75	-3,64	-3,75	-3,90	-4,15	-4,50	
6	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	10.195,06	13.415,06	16.415,06	21.415,06	30.462,06	42.462,06	42.462,06	
7	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Skor	91,25	94,47	94,97	95,47	95,97	96,47	96,97	
8	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33	4,52	4,74	5,52	5,85	6,21	6,62	
9	Persentase penanganan bencana pertanian	%	74,5	90	90	90	90	90	90	
10	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	
12	Persentase kelembagaan koperasi tani (korporasi) yang dibentuk dan beroperasi	%	0,50	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51	1,62	
AA	**KEHUTANAN**									
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	
2	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks	n/a	0,533	0,540	0,547	0,555	0,568	0,572	
3	Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)	%	1	6	6	6	6	6	6	
4	Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	%	10	10	10	10	10	10	10	
5	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	%	64,95	64,95	65,04	65,12	65,20	65,28	65,36	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BB	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	M3	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Km2	2.307,00	3.075,00	3.197,08	3,795,10	4.358,78	4.850,65	4.966,44	
3	Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah	Ha	n/a	10	20	20	20	40	40	
4	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Rekomendasi	n/a	2	4	4	4	8	8	
5	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Rumah Tangga	5.147	5.197	5.247	5.297	5.347	5.397	5.447	
6	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,14	12,40	15,73	19,06	22,39	25,72	29,05	
7	Rasio elektrifikasi	%	96,17	96,62	97,06	97,48	97,88	98,26	98,63	
CC	**PERDAGANGAN**									
1	Produk yang masuk pasar ekspor	Produk	17	18	19	22	24	28	33	
2	Negara tujuan produk ekspor	Negara	11	11	12	13	15	17	20	
3	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	21,4	42,8	57,1	71,4	85,7	92,84	100	
5	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	75	76,6	80	83,3	86,6	91,6	100	
8	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	%	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
DD	**PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	37,81	39,31	40,81	42,31	43,81	45,31	46,81	
2	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	41,42	51,42	61,42	71,42	81,42	91,42	100	
EE	**TRANSMIGRASI**									
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
FF	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Indeks kematangan organisasi	Indeks	47,43	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
2	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	orang	n/a	880	900	900	900	900	900	
5	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1	mahasiswa	n/a	28.083	149.307	151.547	156.396	160.306	167.359	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3	mahasiswa	n/a	2.860	7.449	7.560	7.856	8.053	8.408	
7	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim	mahasiswa	n/a	657	892	1.343	1.434	1.507	1.630	
8	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri	mahasiswa	n/a	89	133	153	169	211	253	
9	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus	mahasiswa	n/a	1.165	1.200	1.390	1.709	2.030	2.160	
GG	**SEKRETARIAT DPRD**									
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n	%	n/a	70	70	70	70	70	70	
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a	80	80	80	80	80	80	
HH	**PERENCANAAN**									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	90,10	90,88	91,40	92,00	92,35	93,05	93,80	
II	**KEUANGAN**									
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	16,94	16,94	16,95	16,96	16,97	16,98	16,99	
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	40,46	57,18	57,19	57,2	57,21	57,22	57,23	
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	92,52	93,02	93,52	94,02	94,52	95,02	95,52	
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	2,26	2,33	2,4	2,47	2,54	2,61	2,68	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	46,32	49,93	51,94	52,99	52,65	52,13	51,37	
JJ	**KEPEGAWAIAN**									
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	60,87	89	89,21	89,42	89,63	89,84	90,05	
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	86,54	87,05	88,13	88,47	89,09	89,99	92,15	
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	94,23	94,26	94,29	94,32	94,35	94,38	94,40	
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	97,29	97,36	97,43	97,50	97,57	97,64	97,71	
5	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	56,01	69,60	74,00	80,00	84,99	90,00	94,99	
KK	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi teknis	Orang	1.490	1.800	1.410	1.440	1.470	1.500	1.530	
2	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat/STTP Pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	Orang	7.153	8.500	12.000	12.050	12.060	12.070	12.080	
3	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	130	130	400	420	450	470	490	
LL	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	%	70	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	87,88	
2	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan	%	n/a	41,18	52,94	64,71	76,47	88,24	94,12	

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Indikatif						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Pengembangan Hasil Invensi dan Inovasi	%	n / a	40	45,71	51,43	57,14	62,86	68,57	
MM	**PENGAWASAN**									
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	%	72	85	90	95	95	95	95	
2	Jumlah kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari pengawasan	kasus	814	800	790	780	770	760	750	
3	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	%	75	85	90	95	100	100	100	
NN	**Pemerintahan Umum**									
1	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	indeks	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93	6,95	6,97	
2	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

Ket : *) Data Tahun 2023;
**) Data Tahun 2022;
n/a : Data belum tersedia;

BAB V
PENUTUP

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yakni “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” menjadi pedoman arah pembangunan bagi daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 akan memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 juga telah mengarah pada upaya untuk mendukung pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selanjutnya, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dalam dimensi waktu 5 (lima) tahunan, serta menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dimensi 1 (satu) tahunan. Adapun beberapa kesimpulan penting substansial yang terdapat di dalam muatan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Kata kunci visi “Kaltim Sukses”, dimaknai dengan keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan kata kunci visi ”Generasi Emas”, yang dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.
2) 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu :
    1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
    2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
    3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
    4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
    5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal; dan
    6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

3) Visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” diwujudkan melalui ketercapaian kinerja 3 (tiga) tujuan pembangunan yakni terwujudnya Kaltim Sukses, terbangunnya Generasi Emas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4) Perwujudan Kaltim Sukses dilakukan melalui pencapaian 4 (empat) kinerja sasaran pembangunan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Generasi Emas dilakukan melalui pencapaian 4 (empat) kinerja sasaran pembangunan yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, produktivitas SDM, serta nilai agama dan budaya. Sementara untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan melalui pencapaian 2 (dua) kinerja sasaran pembangunan yang terkait dengan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme pemerintahan, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.
5) Trisula Pembangunan Daerah merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang daerah yang dirumuskan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6) Penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yaitu Tahap 1 (Tahun 2026) sebagai tahap Fondasi: Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 2 (Tahun 2027) sebagai tahap Penguatan: Pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya manusia, sektor ekonomi inklusif dan daya saing investasi sebagai penguat landasan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 3 (Tahun 2028) sebagai tahap Akselerasi: Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk akselerasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tahap 4 (Tahun 2029) sebagai tahap Perwujudan: Kemajuan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta manusia berdaya saing sebagai perwujudan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, dan Tahap 5 (Tahun 2030) sebagai tahap Kesinambungan: Kesinambungan pembangunan untuk keberlanjutan pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan

Jospol yang diturunkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan unggulan dan 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia terutama pendidikan dan kesehatan, sektor infrastruktur, sektor sosial, serta sektor ekonomi berkelanjutan, sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas".

8) Terdapat 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja tujuan dan 12 indikator kinerja sasaran strategis. IKU tersebut adalah kontribusi PDRB provinsi terhadap PDB nasional, indeks modal manusia, indeks reformasi birokrasi, laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB industri pengolahan, tingkat kemiskinan, indeks gini, Indonesia *blue economy* indeks, indeks daya saing daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, PDRB per kapita, indeks inovasi daerah, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya (atau penetapan perubahan RPJMD jika ada). Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mengawal implementasi konsepsi rencana pembangunan yang telah dirumuskan di dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan sebagai berikut:

1) Sebagai bagian integral pembangunan Nasional, pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selanjutnya, pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
2) Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah wajib diturunkan ke dalam indikator tujuan RENSTRA Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah. Sementara untuk target kinerja di setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran dalam RKPD dan/atau RENJA Perangkat Daerah yang memperhatikan dinamika pembangunan terkini, dengan mempertahankan target akhir pada tahun 2030 sebagai target minimal.

3) Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, meliputi antara lain :
   a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program unggulan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJMD secara periodik. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ), serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas;
   b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

   Selanjutnya masing-masing Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun regulasi yang digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Program Unggulan Gratispol dan Jospol.
4) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.
5) Melaksanakan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
6) Peraturan Daerah tentang RPJMD disebarluaskan kepada *stakeholders* pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non-elektronik.
7) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

8) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
9) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
10) Pada saat Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 196905121989032009